



Pemerintah Kabupaten
Purwakarta

RKPD

Kabupaten Purwakarta

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

2025

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan berpedoman pada RKPD;
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 serta mengacu pada RKP Tahun 2025, yang memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025;
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025;
- c. pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. BAB VII Penutup
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 36

Tanggal : 4 Juli 2024

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2025



DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-13
1.5 Sistematika	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Geografi	II-1
2.1.1.2 Demografi	II-23
2.1.1.3 Potensi Pengembangan Daerah	II-25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-35
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-61
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-64
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-66
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-157
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-160
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II-162
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-165
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-168
2.1.5 Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purwakarta tahun 2018-2023	II-171



2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD/RPD	II-178
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-237
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-237
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-243
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-29
3.2.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-30
3.2.2	Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-32
3.2.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-35
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	IV-4
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta.....	IV-6
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-23
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-23
4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-29
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta.....	IV-30
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta	II-5
Tabel 2.3	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta	II-6
Tabel 2.4	Jumlah Hari Hujan Dalam Setahun di Kab. Purwakarta	II-7
Tabel 2.5	Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Geologi Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta	II-8
Tabel 2.6	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purwakarta	II-9
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan di Kabupaten Purwakarta	II-11
Tabel 2.8	Kebutuhan Air di Kabupaten Purwakarta	II-12
Tabel 2.9	Status Ambang Batas Pendukung terhadap Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Purwakarta	II-13
Tabel 2.10	Nilai Status Daya Dukung Pangan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-16
Tabel 2.11	Timbulan Sampah Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-17
Tabel 2.12	Dampak Beban Pencemar Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	II-18
Tabel 2.13	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta	II-19
Tabel 2.14	Rawan Banjir di Kabupaten Purwakarta	II-20
Tabel 2.15	Kawasan Gempa Bumi di Kabupaten Purwakarta ..	II-21
Tabel 2.16	Hasil Pengukuran Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-23
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023	II-23
Tabel 2.18	Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023	II-24
Tabel 2.19	Arah Kebijakan WP Purwasuka	II-32
Tabel 2.20	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-36



Tabel 2.21	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023	II-36
Tabel 2.22	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.23	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2.24	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023	II-41
Tabel 2.25	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	II-42
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.27	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.28	Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-45
Tabel 2.29	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2.30	Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-48
Tabel 2.31	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-49
Tabel 2.32	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023	II-49
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-52
Tabel 2.34	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	II-53
Tabel 2.35	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.36	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi	II-55



	dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2023	
Tabel 2.37	Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023	II-57
Tabel 2.38	Persandingan Indek Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.39	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	II-59
Tabel 2.40	Capaian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-62
Tabel 2.41	Capaian Seni Budaya dan Olahraga di Kab. Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-65
Tabel 2.42	Capaian Pelayanan Umum di Kab. Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-67
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2021-2023	II-69
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021-2023	II-71
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023	II-73
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2023	II-78
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2023	II-79
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial Tahun 2021-2023	II-82
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021-2023	II-84
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2023	II-86
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan Tahun 2021-2023	II-88
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Tahun 2021-2023	II-89
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023	II-90
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023	II-92
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2023	II-93



Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021- 2023	II-95
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2021-2023	II-96
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2023	II-97
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2023	II-100
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021-2023	II-102
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2023	II-104
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Bidang Statistik Tahun 2021-2023	II-106
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Bidang Persandian Tahun 2021-2023	II-107
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2021-2023	II-108
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2021-2023	II-110
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2021-2023	II-112
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata Tahun 2021-2023	II-115
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian Tahun 2021-2023	II-116
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2021-2023	II-120
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian Tahun 2021-2023	II-122
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi Tahun 2021-2023	II-124
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2023	II-125
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023	II-128
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2023	II-130
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2021- 2023	II-132
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2021- 2023	II-134



Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2023	II-135
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2023	II-137
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2023	II-139
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021-2023	II-140
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2021-2023	II-141
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2021-2023	II-143
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021-2023	II-153
Tabel 2.84	Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	II-155
Tabel 2.85	Capaian Kinerja terkait Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-160
Tabel 2.86	Capaian Kinerja terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-163
Tabel 2.87	Capaian Kinerja terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-166
Tabel 2.88	Capaian Kinerja terkait Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	II-169
Tabel 2.89	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023	II-172
Tabel 2.90	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Purwakarta	II-179
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	III-2
Tabel 3.2	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023	III-3
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023	III-7



Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023	III-8
Tabel 3.6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	III-8
Tabel 3.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	III-9
Tabel 3.8	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	III-10
Tabel 3.9	Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023	III-11
Tabel 3.10	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	III-13
Tabel 3.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-14
Tabel 3.12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-15
Tabel 3.13	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023	III-15
Tabel 3.14	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-18
Tabel 3.15	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	III-19
Tabel 3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-21
Tabel 3.17	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	III-21
Tabel 3.18	Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023	III-23
Tabel 3.19	Persandingan Indeks Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023	III-23
Tabel 3.20	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023	III-25



Tabel 3.21	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kab. Purwakarta, Tahun 2025	III-28
Tabel 3.22	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025	III-36
Tabel 3.23	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025	III-37
Tabel 3.24	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025	III-39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.2	Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-11
Tabel 4.3	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah.....	IV-18
Tabel 4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2025.....	IV-31
Tabel 4.5	Keterkaitan Prioritas, Arah Kebijakan dan Isu Strategis RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	IV-34
Tabel 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Program Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-39
Tabel 4.7	Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-50
Tabel 4.8	Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2025	IV-51
Tabel 4.9	Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-52
Tabel 4.10	Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-53
Tabel 4.11	Keselarasan Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.12	Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	IV-58
Tabel 4.13	Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta	IV-63



Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Purwakarta	V-19
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	V-21
Tabel 5.3	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	V-977
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	VI-3
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	VI-4
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025	VI-21
Tabel 6.4	Penghargaan / Prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.....	VI-68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-12
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta.....	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta	II-2
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	II-34
Gambar 2.4	Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta	II-51
Gambar 2.5	Skor Indeks Daya Saing Daerah 2023	II-159
Gambar 2.6	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	II-176
Gambar 4.1	Tema Pembangunan RKP Tahun 2025	IV-25
Gambar 4.2	Prioritas Nasional Tahun 2025	IV-28
Gambar 4.3	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-49



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Proses Penyusunan RKPD	I-3
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kab. Purwakarta menurut Kecamatan.....	II-4
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi	II-36
Grafik 2.3	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Wilayah Perbatasan.....	II-37
Grafik 2.4	Inflasi	II-46
Grafik 2.5	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	II-47
Grafik 2.6	Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta.....	II-48
Grafik 2.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta	II-49
Grafik 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta	II-52
Grafik 2.9	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	II-53
Grafik 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta	II-55
Grafik 2.11	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	II-56
Grafik 2.12	Persandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	II-56
Grafik 2.13	Indeks Gini Kabupaten Purwakarta	II-57
Grafik 2.14	Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	II-58
Grafik 2.15	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta	II-60



Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-3
Grafik 3.2	Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-3
Grafik 3.3	Inflasi	III-12
Grafik 3.4	Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	III-13
Grafik 3.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta ...	III-14
Grafik 3.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta	III-15
Grafik 3.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta	III-18
Grafik 3.8	Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-19
Grafik 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta	III-21
Grafik 3.10	Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-22
Grafik 3.11	Persandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kab. Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan	III-22
Grafik 3.12	Indeks Gini Kabupaten Purwakarta	III-23
Grafik 3.13	Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wilayah Perbatasan ..	III-24
Grafik 3.14	Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta	III-25



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 – 2026.

Dalam penyusunan RKPD 2025 juga harus memperhatikan keselarasan dalam kebijakan RPJPN dan RPJPD 2025-2045 yang sedang disusun pada tahun yang sama yakni di tahun 2024. Irisan kebijakan perencanaan pembangunan ini tentunya harus diharmonisasikan agar kesinambungan dan keselarasannya dapat terjaga dengan baik.



Tema pembangunan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yaitu “PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL” tema ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi, serta membangun SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis.

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengkomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan.

Selain itu RKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
 - a. Pembentukan Tim;
 - b. Pengumpulan data dan informasi perencanaan;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - a. Input Program, Kegiatan dan Subkegiatan di SIPD-RI;
 - b. Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Musrenbang Kecamatan;
 - d. Input usulan aspirasi masyarakat;



- e. Input pokok-pokok pikiran DPRD;
- 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
- 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- 5. Penyusunan Rancangan RKPD;
- 6. Pelaksanaan Musrenbang;
- 7. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
 - a. Riviur RKPD oleh APIP;
 - b. Fasilitasi RKPD oleh Provinsi;
- 8. Penetapan RKPD.

Grafik 1.1
Proses Penyusunan RKPD



Sumber : Bappelitbangda, 2024



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat



- Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
 40. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor);
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RKPD dengan RPJMN

Penyusunan RKPD memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan RPD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RKPD memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta tentunya harus memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat melalui penyelarasan sasaran kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat.

1.3.4 Hubungan RKPD dengan RPJPD, RPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Kemudian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2045 yang memuat Visi, Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan menjadi pedoman bagi



penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dan diselaraskan pada penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Penyusunan RKPD mempedomani pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 pada pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun.

1.3.5 Hubungan RKPD dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

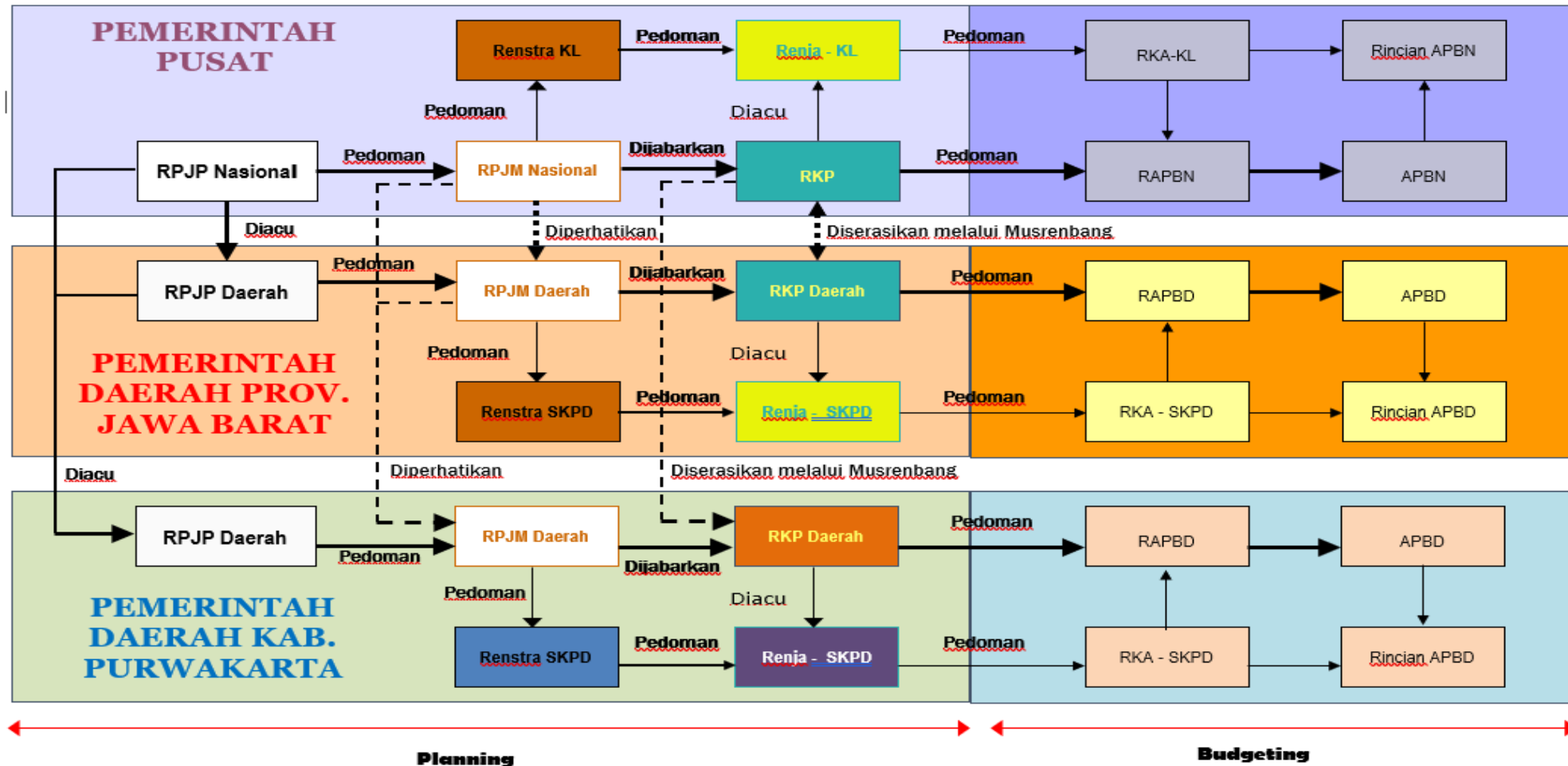
Penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2044. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Purwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Adapun gambaran tentang hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan daerah adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar. 1.1

Hubungan Antar Dokumen



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten dan LAKIP Perangkat Daerah, dan penyusunan laporan lainnya;



1.5 Sistematika

RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta target capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

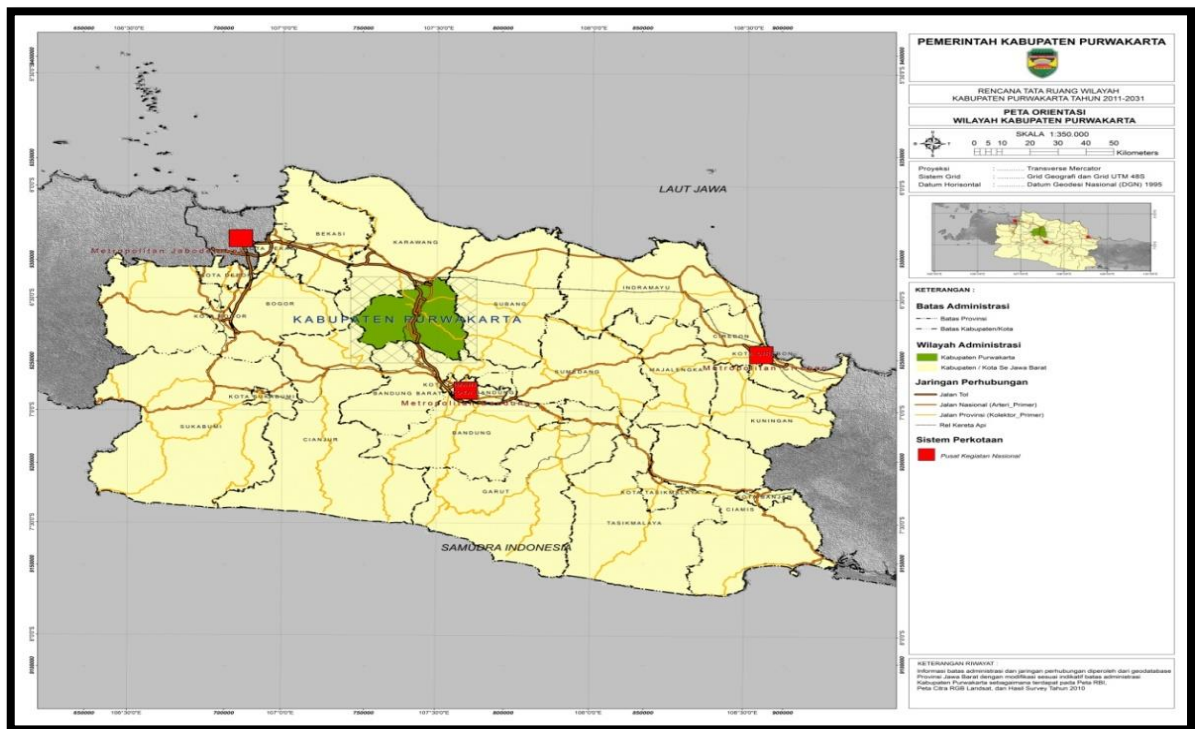
2.1.1.1 Geografi

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta



Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

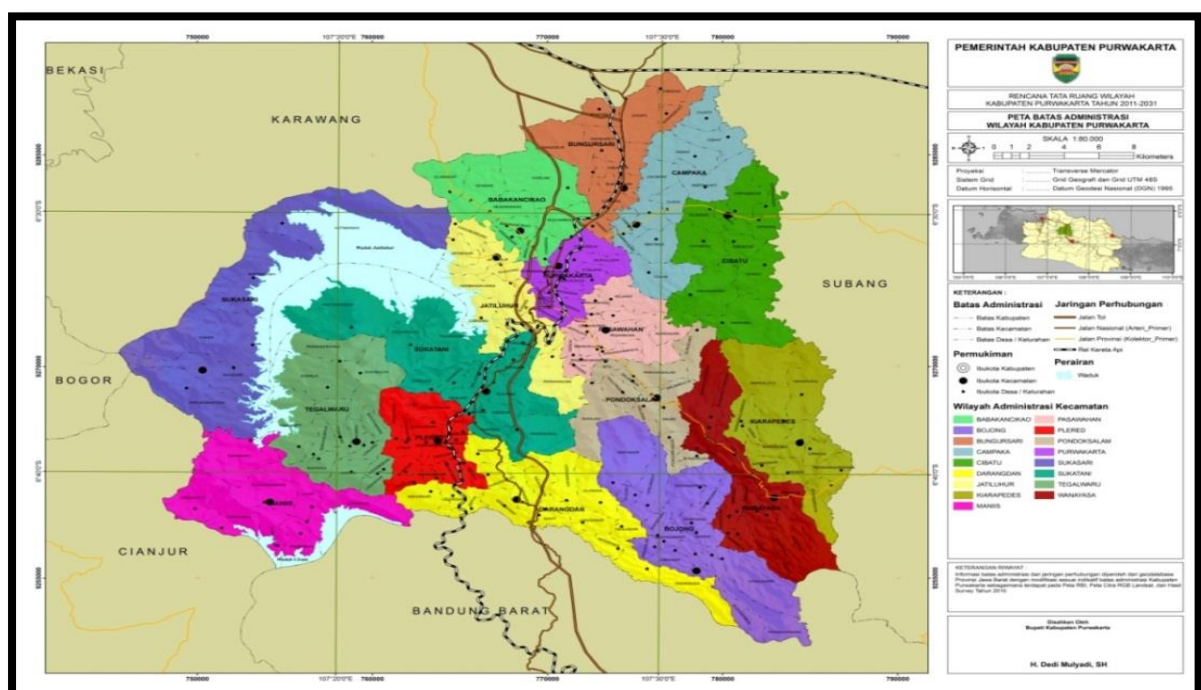
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km²) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 508 dusun, 1.155 Rukun Warga (RW), dan 3.622 Rukun Tetangga (RT).

Secara Administrasi, luas dan batas wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta



Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 mdpl.

Adapun luas wilayah dan jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.1

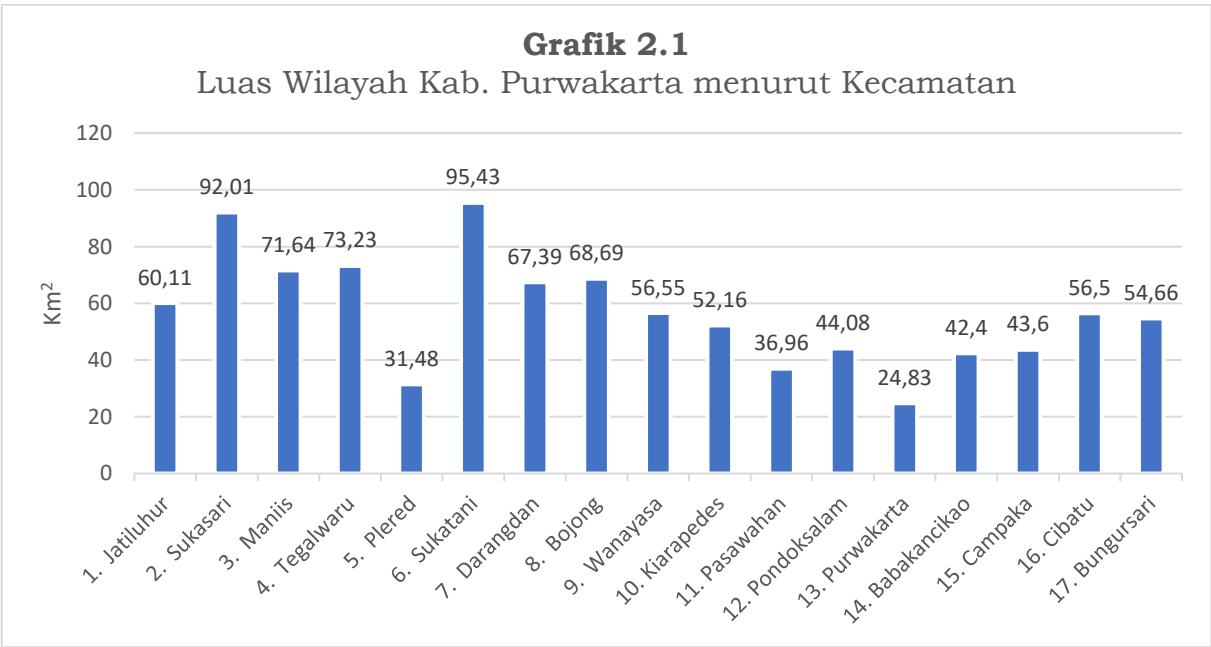
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	km ²	%	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9



KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA/ KELURAHAN
	km ²	%	
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 5 desa.



2.1.1.1.2 Topografi

Topografi merupakan bentuk suatu kota yang dilihat dari jenis ketinggian dan kemiringan dari atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Purwakarta terletak pada ketinggian <500 mdpl meliputi 101 desa/ kelurahan, 500-700 m dpl meliputi 69 desa dan >700 mdpl meliputi 22 desa. Secara lebih rinci luas wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2

Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (dpl)		
			< 500 m	500 – 700 m	> 700 m
1	Jatiluhur	10	4	6	0
2	Sukasari	5	0	2	3
3	Maniis	8	7	1	0
4	Tegalwaru	13	10	3	0
5	Plered	16	12	4	0
6	Sukatani	14	11	3	0
7	Darangdan	15	3	12	0
8	Bojong	14	0	2	12
9	Wanayasa	15	1	14	0
10	Kiarapedes	10	0	8	2
11	Pasawahan	12	12	0	0
12	Pondoksalam	11	6	2	3
13	Purwakarta	10	9	1	0
14	Babakancikao	9	6	3	0
15	Campaka	10	8	2	0
16	Cibatu	10	7	3	0
17	Bungursari	10	5	3	2
Kabupaten		192	101	69	22

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut wilayah Kabupaten Purwakarta sebagian besar berada di ketinggian <500 mdpl dan 500-700 mdpl, sedangkan terdapat 22 desa yang memiliki ketinggian tertinggi (>700 mdpl) yaitu berada di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Bungursari.



Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Purwakarta didominasi oleh kemiringan lereng >15-25% dengan luas sekitar 37.962,23 Ha atau sekitar 42% dari luas seluruh wilayah administrasi Kabupaten Purwakarta. Secara lebih rinci luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng menurut kecamatan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Waduk / Danau	Kemiringan Lereng					Total (Ha)
			0% - 8%	> 8% - 15%	> 15% - 25%	> 25% - 40%	> 40%	
1	Jatiluhur	-	1,666.50	1,482.38	764.30	163.26	-	4,076.44
2	Sukasari	6,979.24	432.11	2,009.86	8,048.36	565.68	1,435.34	19,470.59
3	Maniis	788.15	1,533.94	479.13	3,538.49	-	-	6,339.71
4	Tegalwaru	-	-	2,170.89	2,530.00	1,585.95	-	6,286.84
5	Plered	-	-	-	1,807.50	1,283.98	-	3,091.48
6	Sukatani	-	1,690.59	-	1,840.17	735.95	-	4,266.72
7	Darangdan	-	-	-	4,555.58	725.50	1,483.55	6,764.63
8	Bojong	-	-	-	2,372.19	1,871.51	2,891.35	7,135.05
9	Wanayasa	-	-	-	1,545.84	-	3,917.54	5,463.38
10	Kiarapedes	-	-	-	2,926.60	895.05	1,977.38	5,799.03
11	Pasawahan	-	2,117.66	-	913.70	138.83	17.78	3,187.97
12	Pondoksalam	-	248.86	-	1,936.45	1,626.60	163.59	3,975.51
13	Purwakarta	-	2,099.76	99.59	185.31	-	-	2,384.66
14	Babakancika o	-	2,827.06	1,986.40	-	-	-	4,813.46
15	Campaka	-	2,840.84	1,395.46	1,265.04	-	-	5,501.35
16	Cibatu	-	2,114.76	29.49	3,468.73	-	436.51	6,049.49
17	Bungursari	-	3,411.50	921.47	369.88	-	-	4,702.86
Total		7,767.39	20,983.60	10,574.67	38,068.16	9,592.31	12,323.03	99,309.17

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut wilayah Kabupaten Purwakarta sebagian besar berada kelerengan datar dan landai, dengan kondisi kelerengan tersebut Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan pengembangan pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, tetapi tetap menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar.



2.1.1.1.3 Klimatologi

Kabupaten Purwakarta memiliki suhu minimum 24°C, suhu maksimum 33°C dan suhu rata-rata 28°C. Pada tahun 2021 curah hujan di Kabupaten Purwakarta sebesar antara 2000 s/d 4500 mm dengan rata-rata curah hujan sebanyak 2,51 mm. Tingkat tertinggi curah hujan antara 2500-3000 dengan jumlah curah hujan sebesar 36.515 mm, dengan tingkat curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Sukasari dengan jumlah curah hujan sekitar 10.686,71 mm, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Jumlah Hari Hujan Dalam Setahun di Kab. Purwakarta

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm)					Total
		2000 - 2500	2500 - 3000	3000 - 3500	3500 - 4000	4000 - 4500	
1	Babakancikao	-	4,813.46	-	-	-	4,813.46
2	Bojong	-	0.53	3,529.06	3,605.47	-	7,135.05
3	Bungursari	2,608.33	2,094.53	-	-	-	4,702.86
4	Campaka	2,526.25	1,893.02	1,082.08	-	-	5,501.35
5	Cibatu	757.00	2,893.94	2,398.55	-	-	6,049.49
6	Darangdan	-	329.83	5,361.13	1,073.67	-	6,764.63
7	Jatiluhur	-	2,888.26	1,188.18	-	-	4,076.44
8	Kiarapedes	-	-	3,103.75	2,037.45	657.83	5,799.03
9	Maniis	4,946.29	605.28	-	-	-	5,551.57
10	Pasawahan	-	-	3,187.97	-	-	3,187.97
11	Plered	-	2,669.68	421.81	-	-	3,091.48
12	Pondoksalam	-	-	3,975.51	-	-	3,975.51
13	Purwakarta	-	963.40	1,421.26	-	-	2,384.66
14	Sukasari	331.02	10,686.71	1,473.61	-	-	12,491.35
15	Sukatani	-	1,702.97	2,563.75	-	-	4,266.72
16	Tegalwaru	1,313.00	4,973.84	-	-	-	6,286.84
17	Wanayasa	-	-	1,875.99	2,334.42	1,252.97	5,463.38
Total		12,481.90	36,515.42	31,582.66	9,051.01	1,910.80	91,541.78

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan hasil data Jumlah Hari Hujan Dalam Setahun di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 didominasi oleh tingkat curah hujan 2500-3000 dan 3000-3500 mm. Sedangkan terdapat pada 2 kecamatan yang berada di tingkat curah hujan tertinggi (4000-4500 mm) yaitu di Kecamatan Kiarapedes sebesar 657,83 mm dan Kecamatan Wanayasa sebesar 1.252,97 mm.



2.1.1.1.4 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya tersebar di sebelah Barat Daya Kabupaten Purwakarta. Jenis batuan napal, batu pasir kuarsa merupakan batuan yang tertua dengan lokasi sebaran di tepi Waduk Ir. H. Juanda dan batu lempung yang berumur lebih muda (Miosen) dan endapan gunung api tua yang berasal dari Gunung Burangrang, Gunung Sunda berupa tuf, lava andesit basaltis, breksi vulkanik dan lahar. Di atas batuan ini diendapkan pula hasil erupsi gunung api muda yang terdiri dari batu pasir, lahar, lapili, breksi, lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan lava scoria. Uraian lengkap mengenai formasi geologi di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Geologi Menurut Kecamatan Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Jenis Batuan								Total (Ha)
		Aluvial	Andesit, Basal, Diabas	Hasil GN api kuarter tua	Hasil GNapi tak teruraik	Miosen, Fasies Sedimen	Pliosen, Fasies Sedimen	Plitosem, Fasies GN Api	Tidak Ada Data	
1	Jatiluhur	-	933.82	-	-	317.42	-	2,825.21	-	4,076.44
2	Sukasari	854.52	5,148.43	-	-	845.95	114.01	5,528.43	-	19,470.59
3	Maniis			568.58				4,982.99		6,339.71
4	Tegalwaru	22.41	1,608.48	-	-	-	-	4,655.94	-	6,286.84
5	Plered	1,689.19	438.93	-	-	-		963.37	-	3,091.48
6	Sukatani	902.65	308.87	-	-	25.96	96.08	2,933.16	-	4,266.72
7	Darangdan	12.27	-	679.96	-	-	49.20	6,023.20	-	6,764.63
8	Bojong	-	-	1,764.90	42.75	-	497.18	4,830.23	-	7,135.05
9	Wanayasa	-	-	1,364.61	-	226.35	-	3,847.00	25.42	5,463.38
10	Kiarapedes	-	-	202.60	-	757.11	-	4,839.33	-	5,799.03
11	Pasawahan	-	-	-	-	765.91	3.14	2,354.55	64.37	3,187.97
12	Pondoksalam	-	-	-	-	1,158.16	592.98	1,975.39	248.98	3,975.51
13	Purwakarta	-	-	-	-	-	142.52	2,242.14	-	2,384.66
14	Babakancikao	1,459.86	447.96	-	-	521.40	-	2,384.24	-	4,813.46
15	Campaka	-	-	-		12.84	1,939.47	3,549.04	-	5,501.35
16	Cibatu	-	-	-		2,162.32	1.46	3,885.71	-	6,049.49
17	Bungursari	-	-	-	251.18	542.21	124.15	3,785.31	-	4,702.86
Total		4,940.90	8,886.50	4,580.64	293.93	7,335.61	3,560.19	61,605.24	338.77	99,309.17

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024



Berdasarkan data pada tabel tersebut wilayah Kabupaten Purwakarta sebagian besar memiliki jenis batuan Plitosem dan Fasies Gunung Api dengan luas sebesar 61.605,24 Ha.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Hidrologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari air mulai saat jatuh dari daratan sampai masuk ke lautan dan kembali ke atmosfer. Hidrologi melibatkan air permukaan dan air bawah permukaan. Wilayah Kabupaten Purwakarta memiliki dua buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citarum dan DAS Cilamaya yang terbagi kedalam 6 induk sungai, yaitu: Sungai Cilamaya, Sungai Cikao, Sungai Cilangkap, Sungai Ciampel, Sungai Cilalawi dan Sungai Cisomang. Berikut jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Purwakarta, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Jumlah Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purwakarta

No.	Nama DAS	Induk Sungai (Orde 1)	Anak Sungai (Orde 2)	Panjang (Km)	Lebar (m)	Debit (m3/det)
1	Cilamaya-Citarum	Cilamaya		62	30	366
			Ciracas	2	8	48
			Cijambe	2	3	3
			Cigarunggang	5	6	12
			Cijengkol	8	9	24
			Cisaranangsa	2	3	3
			Cisaat	4,5	6	15
			Cirawa	5	7	24
			Cibongas	3	3	4,5
			Cilandeuh	3	3	4
			Cipatapan	2	6	9
			Ciparung	3	5	7,5
			Cisaat	4	6	12
			Cilandak	12	8	32
			Ciherangninggali	53	25	130
		Cikao		45	40	0
			Cigintung	3	4	6
			Ciburungnyandung	4	4	4
			Cipanyaitan	2	4	4
			Cipamalayan	2	6	6
			Cigadung	3	5	7,5
			Cihanyir	2	4	4
			Cikembang	2	4	4
			Ciseuseupan	2	4	4



No.	Nama DAS	Induk Sungai (Orde 1)	Anak Sungai (Orde 2)	Panjang (Km)	Lebar (m)	Debit (m3/det)
			Cicadas	2	4	6
			Cipeureun	1,5	4	4
			Cigajah	5	6	18
			Cisitu	2	5	5
			Cibingbin	17	30	90
			Ciherangharus	35	30	210
			Cigorogoy	3	3	4,5
			Cikalapa liung	2	2	3
			Cicelebong	2,5	2,5	3
			Ciledug	2,5	2,5	3
			Citajur	2,5	2,5	3
			Cimunjul	4	4	10
			Cilempahan	5	5	12,5
			Cikembang	6	6	21
			Cigalugur	2,5	2,5	4
			Cipaisan	2,5	2,5	3
			Cinangka	4	4	10
		Cilangkap		16	4	16
			Ciorai	16	4	8
			Cijalu	4	3	3
		Ciampel		14	4	22
			Cikapuk	2	3	4
			Sumurbeunying	3	3	4,5
			Cilabuh	2	2	2
			Ciwaru	3	3	4,5
			Cikantong	3	3	4,5
		Jumlah				137

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup, sungai-sungai di Kabupaten Purwakarta adalah (1) Sungai Cilamaya yang merupakan Induk Sungai (orde 1 di DAS) dengan panjang 62 Km, lebar rata-rata 30 m, dan debit air 366 m3/detik. Sungai Cilamaya ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu antara lain: Sungai Ciracas, Sungai Cijambe, Sungai Cisaat, Sungai Cibongas, Sungai Cilandak, dll. (2) Sungai Cikao, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang sungai 45 km, lebar 40 m. Sungai Cikao terdiri dari beberapa sungai orde 2 DAS, yaitu antara lain: Sungai Cigintung, Sungai Cigadung, Sungai Cikembang, Sungai Cicadas, Sungai Cigajah, Sungai Cisitu, Sungai Cibingbin, Sungai Cigorogoy, Sungai Ciledug, Sungai Citajur, Sungai Cigalugur, Sungai Cinangka, dll. (3) Sungai Cilangkap, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 16 km, lebar 4 m. Sungai ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu Sungai Cioray



dan Sungai Cijalu. (4) Sungai Ciampel yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 14 km dan lebar sungai 4 m. Sungai Ciampel ini mempunyai orde 2 di DAS, yaitu Sungai Cikapuk, Sungai Sumurbeunying, Sungai Cilabuh, Sungai Ciwaru dan Sungai Cikantong.

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purwakarta terbagi ke dalam 18 jenis guna lahan, di antaranya: badan jalan, badan rel kereta api, danau, hutan, industri, kolam, ladang, perkebunan, pemukiman, pertahanan dan keamanan, pertambangan, peternakan, sawah, semak/belukar, sungai, tanah terbuka, TPU, dan wisata, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan di Kabupaten Purwakarta

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Badan Jalan	239.02	0.24
2	Badan Rel Kereta Api	11.71	0.01
3	Danau	8,077.42	8.13
4	Hutan	29,938.34	30.15
5	Industri	2,103.78	2.12
6	Kolam	402.20	0.40
7	Ladang	2,458.22	2.48
8	Perkebunan	20,067.98	20.21
9	Pemukiman	9,100.07	9.16
10	Pertahanan dan Keamanan	47.83	0.05
11	Pertambangan	639.63	0.64
12	Peternakan	325.48	0.33
13	Sawah	21,895.17	22.05
14	Semak/Belukar	1,704.53	1.72
15	Sungai	685.78	0.69
16	Tanah Terbuka	1,416.87	1.43
17	TPU	176.95	0.18
18	Wisata	18.18	0.02
Total (Ha)		99,309.17	100.00

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Penggunaan lahan di Kabupaten Purwakarta saat ini memiliki lahan dengan persentase terbesar yaitu hutan sebesar 30,15% dengan luas 29.938,34 Ha. Tetapi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk,



kemungkinan terjadi peningkatan dalam kebutuhan lahan untuk pemukiman, sedangkan luas penggunaan lahan terbangun untuk pemukiman di Kabupaten Purwakarta sebesar 9.100,07 Ha (9,16%). Sementara untuk penggunaan lahan paling sedikit yaitu badan rel kereta api dengan luas 11,71 Ha (0,01%).

2.1.1.1.7 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.1.7.1 Daya Dukung Air

Analisis daya tampung air di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dengan membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan air di daerah tersebut. Kebutuhan akan air diestimasi berdasarkan standar yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan harian. Penghitungan ini melibatkan aspek kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Berikut di sajikan data Kebutuhan Air di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Kebutuhan Air di Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Kebutuhan Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Non-Domestik (m ³ /tahun)	Kehilangan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air Total (m ³ /tahun)
Babakancikao	2.678.808	535.762	642.914	40.285.886	44.143.370
Bojong	2.355.564	471.113	565.335	62.454.447	65.846.459
Bungursari	2.691.072	538.214	645.857	36.169.418	40.044.562
Campaka	2.245.626	449.125	538.950	58.539.218	61.772.919
Cibatu	1.386.708	277.342	332.810	54.686.291	56.683.151
Darangdan	3.151.410	630.282	756.338	65.376.147	69.914.177
Jatiluhur	3.289.380	657.876	789.451	22.320.567	27.057.274
Kiarapedes	1.263.630	252.726	303.271	61.353.874	63.173.501
Maniis	1.598.262	319.652	383.583	20.944.022	23.245.519
Pasawahan	2.204.454	440.891	529.069	33.418.696	36.593.109
Plered	3.704.166	740.833	889.000	30.577.807	35.911.806
Pondoksalam	1.363.932	272.786	327.344	41.811.681	43.775.743
Purwakarta	7.897.140	1.579.428	1.895.314	13.660.982	25.032.864
Sukasari	767.814	153.563	184.275	31.507.186	32.612.838
Sukatani	3.424.284	684.857	821.828	30.248.815	35.179.784
Tegalwaru	2.367.390	473.478	568.174	48.184.098	51.593.139
Wanayasa	1.912.746	382.549	459.059	47.831.476	50.585.830

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024



Kecamatan Darangdan, Bojong, Campaka, dan Kiarapedes menunjukkan kebutuhan air yang signifikan untuk lahan, masing-masing mencapai 60 juta m³/tahun. Sebaliknya, Kecamatan Purwakarta memiliki kebutuhan domestik terbesar, mencapai 7.897.140 m³/tahun, yang jauh berbeda dengan rata-rata kebutuhan air domestik Kecamatan lainnya, berkisar antara 1 hingga 3 juta m³/tahun. Meskipun demikian, kebutuhan air untuk lahan di Kecamatan Purwakarta sendiri tergolong paling rendah, yakni sekitar 13.660.982 m³/tahun.

Ketersediaan air di Kabupaten Purwakarta telah dievaluasi menggunakan metode rasional yang berfokus pada Dasar Aliran Sungai (DAS) sebagai area tangkapan air dan layanan ekosistem penyedia air dalam sistem grid. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah air yang tersedia paling besar terdapat di Kecamatan Sukasari, mencapai 160.869.671 m³/tahun. Tingkat ketersediaan air yang juga tinggi dapat ditemui di Kecamatan Bojong, Cibatu, Maniis, dan Tegalwaru, dengan nilai berkisar 70 juta m³/tahun.

Setelah itu, perbandingan antara total kebutuhan air dan ketersediaan air bersih untuk setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta, teridentifikasi bahwa 6 kecamatan, yakni Cempaka, Darangdan, Kiarapedes, Pesawahan, Plered, dan Purwakarta, telah mencapai status daya dukung air yang melampaui kapasitasnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Status Ambang Batas Pendukung terhadap Daya Dukung Air Bersih
Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Selisih Ketersediaan (m ³ /tahun)	Status Daya Dukung Air
Babakancikao	44.143.370	51.542.543	7.399.173	Belum Melampaui
Bojong	65.846.459	76.267.515	10.421.056	Belum Melampaui
Bungursari	40.044.562	41.448.349	1.403.787	Belum Melampaui
Campaka	61.772.919	52.689.929	(9.082.990)	Sudah Melampaui
Cibatu	56.683.151	70.068.754	13.385.603	Belum Melampaui
Darangdan	69.914.177	68.986.415	(927.762)	Sudah Melampaui
Jatiluhur	27.057.274	39.675.862	12.618.588	Belum Melampaui
Kiarapedes	63.173.501	63.021.481	(152.020)	Sudah Melampaui
Maniis	23.245.519	71.745.124	48.499.604	Belum Melampaui
Pasawahan	36.593.109	35.505.488	(1.087.621)	Sudah Melampaui
Plered	35.911.806	31.191.320	(4.720.486)	Sudah Melampaui
Pondoksalam	43.775.743	44.402.859	627.116	Belum Melampaui
Purwakarta	25.032.864	18.603.788	(6.429.076)	Sudah Melampaui



Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Selisih Ketersediaan (m ³ /tahun)	Status Daya Dukung Air
Sukasari	32.612.838	160.869.671	128.256.833	Belum Melampaui
Sukatani	35.179.784	43.636.919	8.457.135	Belum Melampaui
Tegalwaru	51.593.139	70.760.353	19.167.214	Belum Melampaui
Wanayasa	50.585.830	60.527.969	9.942.139	Belum Melampaui

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Dengan merujuk pada Status Ambang Batas Pendukung terhadap Daya Dukung Air Bersih di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Campaka merupakan salah satu daerah yang telah melebihi ambang batas atau secara tidak langsung telah melewati batas tersebut, dengan selisih ketersediaan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang sudah melampaui, yaitu mencapai 9.082.990 m³/tahun. Sementara, Kecamatan Purwakarta merupakan salah satu daerah dengan status ambang batas yang masih belum melampaui dengan selisih ketersediaan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang belum melampaui, yaitu mencapai 128.256.833 m³/tahun. Penting untuk diperhatikan bahwa hingga saat ini, secara keseluruhan status daya dukung air di Kabupaten Purwakarta belum mencapai batasnya, menunjukkan bahwa masih terdapat kapasitas untuk pertumbuhan penduduk dalam batas yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan air.

Wilayah yang telah melewati batas daya dukungnya seperti Campaka, Darangdan, Kiarapedes, Pasawahan, Plered, Purwakarta sangat bergantung pada pasokan air di wilayah lain yang masih memiliki daya dukung yang belum terlampaui untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Oleh karena harus dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan lingkungan secara berkelanjutan, seperti, konservasi air (edukasi kesadaran penggunaan air, penggunaan teknologi hemat air), perlindungan sumber air (rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran air), pembangunan sarana penyimpanan air dan saluran distribusi air.



2.1.1.1.7.2 Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Di Kabupaten Purwakarta, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ketersediaan pangan mencapai 100 ribu juta Kkalori. Kecamatan tersebut meliputi Cibat, Darangdan, dan Tegalwaru, dengan jumlah terbesar tercatat di Kecamatan Darangdan, yaitu sebesar 110.091 juta Kkalori per tahun.

Dari hasil analisis sebelumnya, terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Sukasari relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, dalam penggunaan lahan, wilayah ini masih didominasi oleh hutan dan lahan pertanian, seperti sawah dan perkebunan. Kebutuhan energi pangan di Kecamatan ini juga tergolong rendah, yakni sebesar 13.757 juta Kkal/tahun. Dengan demikian, pasokan ketersediaan energi pangan di wilayah ini masih cukup besar, mencapai nilai 79.134 Juta Kkal/tahun.

Jika diperhatikan dari pusat kota, yaitu di Kecamatan Purwakarta, terlihat bahwa nilai ketersediaan energi pangan di wilayah ini paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yakni sebesar 24.881 juta Kkal/tahun. Sementara itu, kebutuhan energi pangan di Kecamatan ini sangat besar, atau dapat dikatakan berbanding terbalik dengan ketersediaan, mencapai 141.490 juta Kkal/tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Purwakarta sendiri tidak mampu memberikan dukungan melalui fungsi ekosistemnya dalam menyediakan energi pangan bagi penduduk lokal. Penentuan daya dukung pangan dilakukan dengan melakukan pengurangan antara jumlah ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan di wilayah tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2.10
Nilai Status Daya Dukung Pangan di Setiap Kecamatan
di Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Ketersediaan Energi Pangan (Juta Kkal/Tahun)	Kebutuhan Energi Pangan (Juta Kkal/Tahun)	Selisih Energi Pangan (Juta Kkal/Tahun)	Status
Babakancikao	73.323	47.995	25.328	Belum Melampaui
Bojong	93.777	42.204	51.573	Belum Melampaui
Bungursari	58.455	48.215	10.240	Belum Melampaui
Campaka	85.680	40.234	45.445	Belum Melampaui
Cibatu	108.361	24.845	83.516	Belum Melampaui
Darangdan	110.091	56.463	53.629	Belum Melampaui
Jatiluhur	36.291	58.935	(22.644)	Sudah Melampaui
Kiarapedes	88.226	22.640	65.586	Belum Melampaui
Maniis	57.097	28.636	28.462	Belum Melampaui
Pasawahan	73.854	39.496	34.357	Belum Melampaui
Plered	71.042	66.366	4.676	Belum Melampaui
Pondoksalam	86.924	24.437	62.486	Belum Melampaui
Purwakarta	24.881	141.490	(116.610)	Sudah Melampaui
Sukasari	79.134	13.757	65.378	Belum Melampaui
Sukatani	75.402	61.352	14.050	Belum Melampaui
Tegalwaru	109.027	42.416	66.612	Belum Melampaui
Wanayasa	77.403	34.270	43.133	Belum Melampaui

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa status daya dukung pangan di Kecamatan Purwakarta sudah melampaui batasnya, sehingga pasokan energi pangan perlu diperoleh dari luar kecamatan tersebut. Selain Kecamatan Purwakarta, kecamatan lain yang juga melampaui batas daya dukung pangan adalah Kecamatan Jatiluhur, yang terletak di sebelah timur Kecamatan Purwakarta. Kebutuhan pangan di Kecamatan Jatiluhur mencapai 56.463 Juta Kkal/tahun, sementara



ketersediaan pangan hanya 36.290 Juta Kkal/tahun, menunjukkan bahwa status daya dukungnya juga sudah melampaui batasnya.

2.1.1.1.8 Dampak Risiko Lingkungan Hidup

2.1.1.1.8.1 Timbulan Sampah

Dampak dari kegiatan rumah tangga salah satunya termanifestasi dalam bentuk sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan efektif dapat menimbulkan pencemaran pada berbagai aspek lingkungan, termasuk tanah, air, dan udara. Kabupaten Purwakarta menghasilkan timbulan sampah yang tinggi dengan kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Purwakarta, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11

Timbulan Sampah Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Timbulan Sampah (Ton/tahun)
Babakancikao	15.626
Bojong	13.741
Bungursari	15.698
Campaka	13.099
Cibatu	8.089
Darangdan	18.383
Jatiluhur	19.188
Kiarapedes	7.371
Maniis	9.323
Pasawahan	12.859
Plered	21.608
Pondoksalam	7.956
Purwakarta	46.067
Sukasari	4.479
Sukatani	19.975
Tegalwaru	13.810
Wanayasa	11.158
Total	258.431

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024



Berdasarkan hasil Timbulan Sampah Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta memiliki potensi timbulan sampah yang paling tinggi, mencapai 46.067 ton per tahun, sementara Kecamatan Sukasari memiliki potensi timbulan sampah yang paling rendah, yakni sebesar 4.469 ton per tahun. Jumlah keseluruhan potensi timbulan sampah di Kabupaten Purwakarta mencapai 258.431 ton per tahun.

2.1.1.1.8.2 Dampak Terhadap Beban Pencemar

Limbah adalah zat, bahan, atau benda yang dibuang atau ditinggalkan karena dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan. Limbah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, dan sebagainya. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas, dan bisa mengandung zat-zat yang berpotensi merugikan lingkungan atau kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar seperti Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Nitrogen, dan Total Posfor. Dasar perhitungan untuk parameter pencemar limbah adalah jumlah penduduk, dan karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Purwakarta memiliki potensi pencemar limbah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

Tabel 2.12

Dampak Beban Pencemar Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	BOD (Kg/tahun)	COD (Kg/tahun)	TN (Kg/tahun)	TP (Kg/tahun)
Babakancikao	1.183.140	2.268.057	506.741	84.829
Bojong	1.040.374	1.994.378	445.594	74.593
Bungursari	1.188.557	2.278.441	509.061	85.217
Campaka	991.818	1.901.297	424.798	71.111
Cibatu	612.463	1.174.079	262.319	43.912
Darangdan	1.391.873	2.668.194	596.142	99.795
Jatiluhur	1.452.809	2.785.008	622.241	104.164
Kiarapedes	558.103	1.069.873	239.037	40.015
Maniis	705.899	1.353.195	302.338	50.612
Pasawahan	973.634	1.866.438	417.009	69.808
Plered	1.636.007	3.136.194	700.705	117.299
Pondoksalam	602.403	1.154.796	258.010	43.191
Purwakarta	3.487.903	6.686.245	1.493.876	250.076
Sukasari	339.118	650.083	145.245	24.314



Kecamatan	BOD (Kg/tahun)	COD (Kg/tahun)	TN (Kg/tahun)	TP (Kg/tahun)
Sukatani	1.512.392	2.899.227	647.760	108.436
Tegalwaru	1.045.597	2.004.390	447.831	74.967
Wanayasa	844.796	1.619.458	361.828	60.570

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan hasil Dampak Beban Pencemar Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, dalam periode satu tahun, Kecamatan Purwakarta menghasilkan 3.487.903 kg BOD, 6.686.245 kg COD, 1.493.876 kg Total Nitrogen, dan 250.076 kg Total Posfor. Di sisi lain, Kecamatan Sukasari memiliki potensi beban pencemar yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Dalam mengukur kualitas lingkungan hidup, menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau wilayah. IKLH biasanya mencakup berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, keberagaman hayati, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Penggunaan IKLH membantu pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat umum untuk memantau dan mengevaluasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup, serta merancang kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang baik.

Capaian nilai IKLH Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Nomor 98 Tahun 2023 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

Indikator	Tahun 2023				
	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
Indeks Kualitas Lingknagan Hidup (poin)	50,00	75,03	42,12	58,41	Sedang

Sumber : SK Dirjen PPK Kementerian Lingkungan Hidup No. 98 Tahun 2024, 2024



2.1.1.1.8.3 Kebencanaan

Bencana alam adalah suatu gejala alam bersifat mendadak, yang menimbulkan kerugian bagi manusia dan hasil usahanya. Beberapa proses geologi dapat menimbulkan bencana. Pada wilayah Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah rawan bencana gerakan tanah, banjir, dan gempa bumi dan sesar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

1) Rawan Gerakan Tanah

Potensi Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Purwakarta memiliki Kawasan Rawan Gerakan Tanah klasifikasi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Darangdan yaitu 1.330,63 ha. Sedangkan Kawasan Rawan Gerakan tanah klasifikasi sangat rendah terkecil ditemukan di Kecamatan Bungursari sebesar 3.576,83 ha.

2) Banjir

Banjir merupakan luapan air yang dapat disebabkan oleh hujan berlebihan, tanah yang jenuh air, atau sungai yang meluap, dimana hal ini dapat terjadi di suatu wilayah. Potensi Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Purwakarta memiliki Kawasan Rawan Banjir klasifikasi tinggi, sedang, rendah, dan diluar area banjir, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Rawan Banjir di Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Rawan Bencana Banjir				Total (ha)
		Diluar Area Banjir	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Babakancikao	1.636,14	1.186,32	984,28	1.006,73	4.813,46
2	Bojong	7.135,05	-	-	-	7.135,05
3	Bungursari	487,15	2.284,67	1.130,36	785,14	4.687,32
4	Campaka	1.247,76	2.130,78	1.496,93	625,88	5.501,35
5	Cibatu	3.099,72	1.421,02	1.023,91	504,84	6.049,49
6	Darangdan	6.288,21	384,07	55,99	36,36	6.764,63
7	Jatiluhur	2.635,15	550,82	496,46	353,84	4.036,26
8	Kiarapedes	5.639,94	44,13	27,31	87,64	5.799,03
9	Maniis	4.502,70	411,81	375,06	197,83	5.487,41
10	Pasawahan	1.791,81	408,19	416,16	571,81	3.187,97
11	Plered	1.247,29	799,33	401,89	642,97	3.091,48
12	Pondoksalam	3.396,90	343,31	120,98	114,32	3.975,51



No	Kecamatan	Rawan Bencana Banjir				Total (ha)
		Diluar Area Banjir	Rendah	Sedang	Tinggi	
13	Purwakarta	329,10	504,54	492,36	1.074,20	2.400,20
14	Sukasari	11.691,74	231,64	45,43	91,73	12.060,53
15	Sukatani	2.891,61	825,34	401,48	148,29	4.266,72
16	Tegalwaru	4.793,55	870,46	368,14	132,47	6.164,61
17	Waduk/Danau	438,41	78,87	208,20	7.699,29	8.424,77
18	Wanayasa	5.402,32	22,17	11,33	27,56	5.463,38
Total		64.654,54	12.497,46	8.056,29	14.100,88	99.309,17

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Berdasarkan Tabel Rawan Banjir di Kabupaten Purwakarta, Kawasan Rawan Banjir dengan klasifikasi tinggi terbesar terletak di Kecamatan Purwakarta, mencapai luas 1.074,20 hektar. Sebaliknya, Kawasan Rawan Banjir yang memiliki klasifikasi rendah terkecil terdapat di Kecamatan Bungursari, dengan luas mencapai 2.284,67 hektar.

3) Gempa Bumi dan Sesar

Gempa Bumi merupakan getaran tanah yang dapat disebabkan oleh pelepasan energi di dalam kerak bumi. Energi ini dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik, dan getaran ini bisa menyebabkan guncangan atau bahkan pergeseran tanah di suatu wilayah. Sedangkan sesar adalah retakan atau celah pada kerak Bumi di mana batuan telah mengalami pergeseran. Potensi Kawasan Gempa Bumi di Kabupaten Purwakarta memiliki 2 klasifikasi yaitu menengah dan tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Kawasan Gempa Bumi di Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Gempa Bumi			Total (ha)
		BadanAir	Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	
1	Babakancikao	-	4.676,20	137,26	4.813,46
2	Bojong	-	657,04	6.478,01	7.135,05
3	Bungursari	-	4.687,32	-	4.687,32
4	Campaka	-	5.501,35	-	5.501,35
5	Cibatu	-	6.049,49	-	6.049,49
6	Darangdan	-	2.362,51	4.402,12	6.764,63
7	Jatiluhur	34,60	4.001,66	-	4.036,26
8	Kiarapedes	-	2.479,98	3.319,05	5.799,03



No	Kecamatan	Gempa Bumi			Total (ha)
		Badan Air	Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan Rawan Bencana Tinggi	
9	Maniis	307,25	4.849,23	330,93	5.487,41
10	Pasawahan	-	3.187,97	-	3.187,97
11	Plered	4,46	3.087,02	-	3.091,48
12	Pondoksalam	-	3.527,46	448,04	3.975,51
13	Purwakarta	-	2.400,20	-	2.400,20
14	Sukasari	505,24	11.082,53	472,76	12.060,53
15	Sukatani	-	4.266,72	-	4.266,72
16	Tegalwaru	208,65	5.955,97	-	6.164,61
17	Waduk/Danau	7.806,16	522,48	96,13	8.424,77
18	Wanayasa	-	1.315,28	4.148,10	5.463,38
Total (ha)		8.866,36	70.610,41	19.832,39	99.309,17

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purwakarta 2024-2044, 2024

Wilayah dengan risiko tinggi terbesar terletak di Kecamatan Bojong, mencapai luas 6.478,01 hektar. Sementara itu, wilayah dengan risiko menengah terkecil tercatat di Kecamatan Sukasari, dengan luas mencapai 11.082,53 hektar.

4) Cuaca ekstrim/ kekeringan

Cuaca ekstrem, termasuk kekeringan, merujuk pada kondisi cuaca yang di luar dari pola cuaca normal dalam jangka waktu tertentu. Kekeringan terjadi ketika wilayah tertentu mengalami kekurangan air yang signifikan, baik dalam bentuk hujan yang sangat rendah atau terjadi periode panjang tanpa hujan sama sekali. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang meluas, seperti memicu kebakaran hutan dan lahan, risiko kekurangan air di beberapa wilayah, kekeringan lahan pertanian dll.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi terjadinya bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Tujuan utama dari indeks ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana suatu wilayah dapat terpengaruh oleh bencana alam atau kejadian lainnya.

Penerapan indeks risiko bencana menjadi penting dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan, mitigasi risiko, dan persiapan menghadapi bencana, sehingga dapat



mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.16

Hasil Pengukuran Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana (poin)	138.00	137.31	124.53	128.98	117.89

Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, 2024

2.1.1.2 Demografi

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 mencapai sebanyak 997.870 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen, menjadi 1.037.070 jiwa.

Adapun data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	Jatiluhur	73,95	75,1	76,51	77,28	1,73	1,16	1,87	1,61
2	Sukasari	17,26	17,53	17,85	18,03	1,73	2,07	1,87	1,61
3	Maniis	36,05	36,49	37,06	37,31	1,41	1,63	1,55	1,26
4	Tegalwaru	53,18	54,05	55,11	55,71	1,82	2,18	1,96	1,7
5	Plered	83,43	84,57	86,01	86,73	1,56	1,84	1,7	1,42
6	Sukatani	76,91	78,18	79,73	80,61	1,84	2,21	1,98	1,72
7	Darangdan	70,89	71,95	73,26	73,96	1,68	1,99	1,82	1,55
8	Bojong	53	53,78	54,74	55,25	1,65	1,96	1,79	1,52
9	Wanayasa	43,3	43,67	44,19	44,33	1,04	1,14	1,18	0,86
10	Kiarapedes	28,39	28,85	29,41	29,73	1,81	2,17	1,95	1,69
11	Pasawahan	49,46	50,33	51,38	52,01	1,95	2,36	2,09	1,85
12	Pondoksalam	30,73	31,14	31,66	31,9	1,51	1,77	1,65	1,37



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
13	Purwakarta	179,23	180,3	181,96	182,07	0,78	0,8	0,92	0,57
14	Babakancikao	59,91	61,16	62,64	63,61	3,76	2,8	2,42	2,21
15	Campaka	50,34	51,27	52,39	53,07	0,57	2,47	2,17	1,94
16	Cibatu	31,27	31,66	32,16	32,39	1,43	1,67	1,58	1,29
17	Bungursari	60,57	61,44	62,52	63,08	1,62	1,92	1,76	1,49
JUMLAH		997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07	1,54	1,82	1,69	1,41

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Jumlah Penduduk paling banyak tahun 2023 terdapat di Kecamatan Purwakarta sebanyak 182,07 ribu jiwa, dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sukasari sebanyak 18,03 ribu jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi ada di Kecamatan Babakancikao sebesar 2,21.

Dilihat dari rasio, persentase dan kepadatan penduduk Kabupaten Purwakarta yang paling besar terdapat di Kecamatan Purwakarta sebesar 17,56 %. Dimana kepadatan penduduknya sebesar 7.333 jiwa per km².

Tabel 2.18

Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2023

Kecamatan		Persentase Penduduk (%)				Kepadatan Penduduk per km ²				Rasio Jenis Kelamin			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Jatiluhur	7,41	7,42	7,44	7,45	1.230	1.250	1.273	1.286	103,3	103,43	103,57	1,04
2.	Sukasari	1,73	1,73	1,74	1,74	188	190	194	196	106,3	106,4	106,56	1,07
3.	Maniis	3,61	3,61	3,6	3,6	503	510	517	521	106,2	106,34	106,43	1,06
4.	Tegalwaru	5,33	5,34	5,36	5,37	726	740	753	761	105,7	105,58	105,44	1,05
5.	Plered	8,36	8,36	8,36	8,36	2.651	2.690	2.732	2.755	104,1	103,55	103,64	1,03
6.	Sukatani	7,71	7,73	7,75	7,77	806	820	835	845	104,3	103,89	103,44	1,03
7.	Darangdan	7,1	7,11	7,12	7,13	1.052	1.070	1.087	1.097	103,7	103,52	103,39	1,03
8.	Bojong	5,31	5,32	5,32	5,33	772	780	797	804	106,5	106,32	106,13	1,06
9.	Wanayasa	4,34	4,32	4,3	4,27	766	770	781	784	105,5	105,39	105,22	1,05
10.	Kiarapedes	2,84	2,85	2,86	2,87	544	550	564	570	106	105,82	105,68	1,05
11.	Pasawahan	4,96	4,98	5	5,02	1.338	1.360	1.390	1.407	103,5	103,41	103,36	1,03
12.	Pondoksalam	3,08	3,08	3,08	3,08	697	710	718	724	104,2	104,12	104,01	1,04
13.	Purwakarta	17,96	17,83	17,69	17,56	7.218	7.260	7.328	7.333	101,2	101,13	101,07	1,01
14.	Babakancikao	6	6,05	6,09	6,13	1.413	1.440	1.477	1.500	100	99,86	99,69	0,99
15.	Campaka	5,04	5,07	5,09	5,12	1.155	1.180	1.201	1.217	99,9	100,43	100,95	1,01
16.	Cibatu	3,13	3,13	3,13	3,12	553	560	569	573	100,6	100,47	100,29	1
17.	Bungursari	6,07	6,07	6,08	6,08	1.108	1.120	1.144	1.154	102,1	102,27	102,44	1,03
Kabupaten Purwakarta		100	100	100	100	1.027	1.040	1.059	1.067	103,2	103,15	103,08	1,03

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2044, dimana tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta adalah mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dirumuskan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain yaitu :

- a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri dari ;
 1. peningkatan peran dan fungsi sistem pusat permukiman untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem pusat permukiman dan sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu dan merata.
- b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri dari;
 1. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung, yakni :
 - a) pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - b) pemanfaatan ruang yang optimal, efisien dan efektif untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dan dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan risiko bencana.
 2. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya, yakni :
 - a) pengembangan kegiatan industri potensial secara teraglomerasi;
 - b) pengembangan sentra produksi pertanian secara teraglomerasi dalam sistem agropolitan dan minapolitan;
 - c) pengembangan kawasan pariwisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
 - d) peningkatan daya saing investasi yang didukung kesiapan infrastruktur penunjang berdaya saing tinggi;
 - e) pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



- c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari :
1. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berdaya saing;
 2. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; dan
 3. pengendalian fungsi dan sumber daya Kawasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Adapun Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta sebagai penjabaran dari kebijakan penataan ruang wilayah, terdiri dari :

1. Strategi peningkatan peran dan fungsi sistem pusat permukiman untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kalijati, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Subang, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jalan Cagak, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Padalarang;
 - b. memperkuat peran Kabupaten dalam Wilayah Pengembangan Purwasuka sebagai Wilayah pengembangan industri non-polutif dan non-ekstraktif, pariwisata dan industri kreatif, serta agroindustri;
 - c. meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Purwakarta Purwakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian skala Kabupaten;
 - d. mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah sekitarnya;
 - e. meningkatkan keterkaitan fungsi kegiatan dan jaringan sarana parasarana antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perdesaan dengan Wilayah sekitarnya;
 - f. mengembangkan Kawasan Perdesaan sebagai suatu rangkaian dengan sistem pusat permukiman yang didukung jaringan sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - g. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh

persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat.

2. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem pusat permukiman dan sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu dan merata, terdiri atas:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - b. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan sistem pusat permukiman;
 - c. mengembangkan dan menerapkan teknologi modern dan ramah lingkungan dalam rencana jaringan prasarana;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan, kualitas, serta jangkauan sarana prasarana Wilayah secara merata;
 - e. menciptakan aksesibilitas sistem jaringan transportasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan Wilayah Kabupaten;
 - f. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan energi;
 - g. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - i. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan prasarana lainnya.
3. Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung, terdiri atas:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan non hutan; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan dan fungsi hidrologi pada Badan Air melalui pengelolaan sumber daya air secara optimal;
 - c. menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat pada Wilayah Kabupaten;
 - d. menjaga kelestarian fungsi Hutan Lindung;
 - e. menjaga kelestarian fungsi Kawasan Konservasi;
 - f. menetapkan dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;



- g. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan resapan air; dan
 - h. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling banyak 20% (dua puluh persen).
4. Strategi pemanfaatan ruang yang optimal, efisien dan efektif untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dan dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan risiko bencana, terdiri atas:
- a. memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;
 - b. merehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Lindung;
 - c. mengoptimalkan upaya pencapaian luas Kawasan berfungsi lindung;
 - d. mengendalikan fungsi kegiatan budi daya pada Kawasan rawan bencana secara adaptif dan berketahanan;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. menjaga kelestarian Kawasan Lindung pada Kawasan rawan bencana.
5. Strategi pengembangan pengembangan kegiatan industri potensial secara teraglomerasi, terdiri atas:
- a. menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - b. pemanfaatan sumber daya alam yang seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. pengaturan lokasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan sinergi keterkaitan sektor dalam wilayah dan menghindari konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya;
 - d. mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - e. mendorong penyediaan/ pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri; dan
 - f. merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi Kawasan Peruntukan Industri/ Kawasan industri.



6. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian secara teraglomerasi dalam sistem agropolitan dan minapolitan, terdiri atas:
 - a. perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara Wilayah Kabupaten;
 - c. meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya Wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian;
 - e. mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian;
 - f. mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri, terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan dan mengelola wisata alam, wisata buatan dan wisata religi secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan pertanian dan industri;
 - c. mengusahakan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya potensial wisata secara efektif dan berkelanjutan;
 - d. menciptakan suatu sistem pengelolaan mandiri dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam bidang pengelolaan;
 - e. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata.
8. Strategi pengembangan peningkatan daya saing investasi yang didukung kesiapan infrastruktur penunjang berdaya saing tinggi, terdiri atas:
 - a. mengembangkan dan memantapkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan industri, pertanian, serta



- pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri dan pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan Kawasan pertanian serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
 - d. menciptakan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana pada Wilayah tertinggal.
9. Strategi pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas:
- a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
10. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berdaya saing, terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - d. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
11. Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah, terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - b. mempertahankan keaslian budaya dan mengembangkan atraksi kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. melaksanakan penataan wisata air yang terintegrasi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan sarana penunjang Kawasan.



12. Strategi pengendalian fungsi dan sumber daya Kawasan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan, terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. melestarikan dan menjaga kualitas potensi sumber daya air Kawasan untuk kepentingan penyediaan air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, dan pengairan irigasi;
 - c. mengembangkan dan menata Kawasan berbasis lingkungan dan mitigasi bencana; dan
 - d. mengendalikan dan menata potensi pariwisata dan budi daya perikanan di sekitar Kawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. WP Provinsi Jawa Barat terbagi habis ke dalam 6 WP, yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya.

WP Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang Pengembangan WP Purwasuka ini diarahkan pada pembatasan perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan, alih fungsi kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fokus pada pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura.



Tabel 2.19
Arah Kebijakan WP Purwasuka

FOKUS	ARAH KEBIJAKAN
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas PKN, PKW dan PKL; mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Sumber : Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, 2024



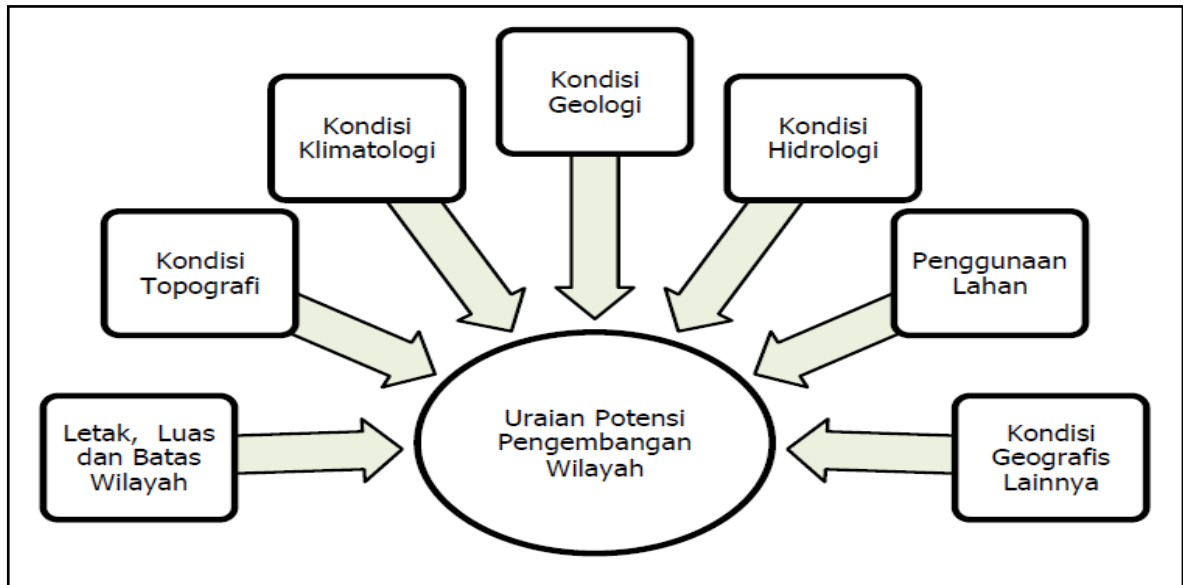
Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, memuat arahan kebijakan penataan ruang yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Jaringan Jalan Bebas Hambatan antara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kota-kota di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di:
 1. Jakarta-Cikampek;
 2. Jakarta-Cikampek II elevated;
 3. Tangerang-Merak;
 4. Jatiasih-Setu-Purwakarta (koridor Jatiasih-Cipularang-Sadang);
dan
 5. Ciawi-Sukabumi;
- ❖ Sumber air berupa air permukaan pada situ, danau, embung atau waduk berada di dalam dan di luar Kawasan Jabodetabek-Punjur yang terdiri atas:

Waduk Jatiluhur di Kecamatan Kutamanah dan Kecamatan Sukasari pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang berada di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- ❖ Unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di dalam maupun di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi:
 1. SPAM Regional Cisadane pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 2. SPAM Regional Ciawi pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 3. SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan Jatiluhur pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat; dan
 4. SPAM Regional Karian pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Secara umum, gambaran kerangka pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Bappelitbangda, 2024



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut merangkak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen. Namun di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke angka 4,97 persen.

Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

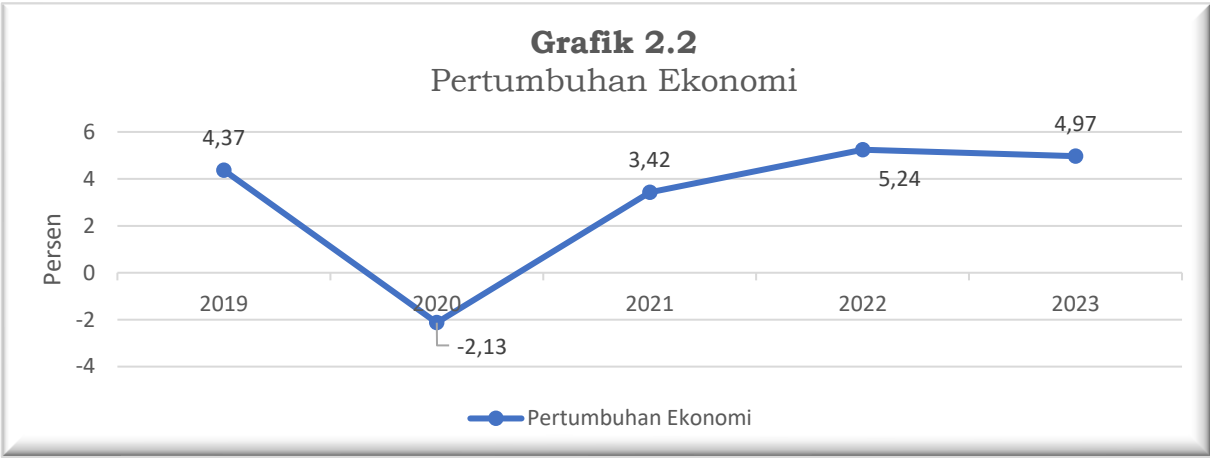


Tabel 2.20

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

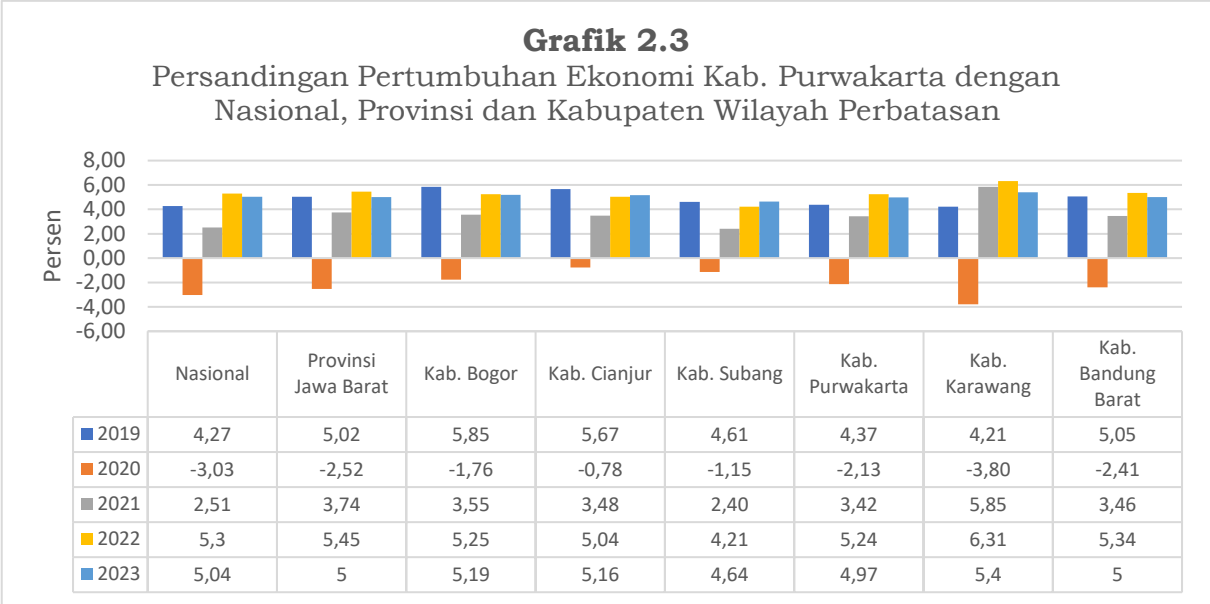
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.21

Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	4,27	-3,03	2,51	5,30	5,04
2	Provinsi Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00
3	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
4	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
5	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,40	4,21	4,64
6	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
7	Kab. Karawang	4,21	-3,80	5,85	6,31	5,40
8	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kab. Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta sangat fluktuatif, dengan pertumbuhan positif di 2019, 2021, 2022, dan 2023, dan pertumbuhan negatif di 2020. Pertumbuhan di 2023 (4,97%) lebih rendah dibandingkan 2022 (5,24%). Penurunan terdalam terjadi di 2020 (-2,13%) akibat pandemi Covid-19. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi Covid-19 di 2020.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;



Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1



(tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.22

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.720,79	2.726,05	2.770,71	2.870,50	2.901,24
B	Pertambangan dan Penggalian	31,59	30,91	33,49	33,2	33,46
C	Industri Pengolahan	26.974,84	26.205,23	27.126,57	28.876,61	30.483,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	279,6	274,22	306,12	314,04	323,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,15	14,84	16,27	16,64	16,98
F	Konstruksi	3.247,02	3.081,79	3.243,27	3.293,70	3.411,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.665,63	5.393,40	5.506,10	5.717,88	5.914,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1.060,28	1.029,85	1.037,98	1.091,34	1.199,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,21	556,41	561,28	595,94	636,99
J	Informasi dan Komunikasi	988,61	1.265,58	1.345,83	1.406,78	1.508,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046,73	1.053,51	1.125,29	1.124,97	1.155,96
L	Real Estat	636,8	638,17	698,51	736,1	778,06
M, N	Jasa Perusahaan	214,89	202,6	219,43	240,03	255,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522,5	499,32	488,12	480,35	487,99
P	Jasa Pendidikan	1.005,91	1.065,31	1.080,25	1.103,42	1.148,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,64	225,61	240,38	251,87	265,39
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.068,02	1.030,44	1.040,55	1.139,61	1.219,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Tabel 2.23

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.582,19	4.650,21	4.650,04	5.026,60	5.332,31
B	Pertambangan dan Penggalian	43,44	43,07	47,94	49,2	50,85
C	Industri Pengolahan	38.714,75	38.224,62	40.769,59	44.549,33	47.918,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	450,52	441,74	502,83	520,9	540,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,73	24,63	27,16	28,08	28,89
F	Konstruksi	5.166,05	4.926,75	5.342,72	5.640,50	6.044,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.122,54	7.828,29	8.048,88	8.492,28	8.985,27
H	Transportasi dan Pergudangan	1.687,67	1.669,51	1.720,99	1.892,07	2.217,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	762,19	745,1	778,21	855,08	947,81
J	Informasi dan Komunikasi	968,79	1.241,29	1.293,62	1.314,43	1.409,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.675,07	1.680,88	1.824,62	1.982,94	2.080,86
L	Real Estat	867,31	875,85	961,5	1.024,64	1.091,60
M, N	Jasa Perusahaan	327,99	316,27	343,89	380,77	420,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903,63	868,07	856,85	841,98	864,88
P	Jasa Pendidikan	1.521,95	1.651,87	1.715,10	1.782,21	1.891,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,17	337,35	363,37	386,03	418,48
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.560,51	1.526,09	1.530,92	1.710,50	1.886,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 2.24

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,15	0,19	1,64	3,6	1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,08	-2,13	8,32	-0,85	0,77
C	Industri Pengolahan	3,09	-2,85	3,52	6,45	5,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,28	-1,92	11,63	2,58	2,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	12,8	9,63	2,31	2,04
F	Konstruksi	5,88	-5,09	5,24	1,55	3,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	-4,8	2,09	3,85	3,44
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	-2,87	0,79	5,14	9,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	-3,1	0,88	6,17	6,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,67	28,02	6,34	4,53	7,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	0,65	6,81	-0,03	2,76
L	Real Estat	9,3	0,22	9,46	5,38	5,7
M, N	Jasa Perusahaan	9,23	-5,72	8,31	9,39	6,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	-4,44	-2,24	-1,59	1,59
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,9	1,4	2,14	4,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	-0,89	6,54	4,78	5,37
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,09	-3,52	0,98	9,52	6,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Tabel 2.25
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	6,94	6,57	6,57	6,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
C	Industri Pengolahan	57,18	57,01	57,6	58,25	58,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,66	0,71	0,68	0,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,63	7,35	7,55	7,38	7,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	11,68	11,37	11,1	10,94
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,49	2,43	2,47	2,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,11	1,1	1,12	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,43	1,85	1,83	1,72	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	2,51	2,58	2,59	2,53
L	Real Estat	1,28	1,31	1,36	1,34	1,33
M, N	Jasa Perusahaan	0,48	0,47	0,49	0,5	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	1,29	1,21	1,1	1,05
P	Jasa Pendidikan	2,25	2,46	2,42	2,33	2,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,5	0,51	0,5	0,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,3	2,28	2,16	2,24	2,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar -2,13% akibat pandemi COVID-19. PDRB mulai



menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,42%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 5,24% dan 4,97%.

PDRB atas dasar harga berlaku mengalami Tren serupa dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar 1,91%. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,22%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 8,13% dan 7,54%.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2023. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 (5,24%), dan Laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,13%).

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan (26,33% pada tahun 2023). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (18,83%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,27%). Dengan demikian, Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.27

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	Kab. Purwakarta	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
	Kab. Karawang	163.732,48	157.849,53	166.941,49	177.470,89	187.051,65
	Kab. Subang	28.672,90	28.344,32	28.960,89	30.202,58	31.604,98
	Kab. Bandung Barat	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19
	Kab. Cianjur	32.039,32	31.790,76	32.897,52	34.556,40	36.339,55
	Kab. Bogor	156.876,01	154.113,60	159.589,55	167.966,18	176.683,58



Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	Kab. Purwakarta	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
	Kab. Karawang	230.021,38	225.063,63	243.713,20	268.228,79	290.916,32
	Kab. Subang	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.160,40	49.692,22
	Kab. Bandung Barat	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18
	Kab. Cianjur	46.957,85	47.528,97	50.137,65	53.988,97	58.391,22
	Kab. Bogor	237.227,08	235.887,26	248.892,48	267.743,69	289.106,15
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
	Kab. Karawang	4,21	-3,8	5,85	6,31	5,4
	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,4	4,21	4,64
	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5
	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	3,16	3,16	3,15	3,13	3,11
	Kab. Karawang	10,73	10,54	10,86	10,96	11
	Kab. Subang	1,9	1,89	1,88	1,89	1,88
	Kab. Bandung Barat	2,2	2,19	2,17	2,16	2,15
	Kab. Cianjur	2,19	2,24	2,23	2,21	2,21
	Kab. Bogor	11,06	11,12	11,09	10,94	10,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



c. **Inflasi**

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

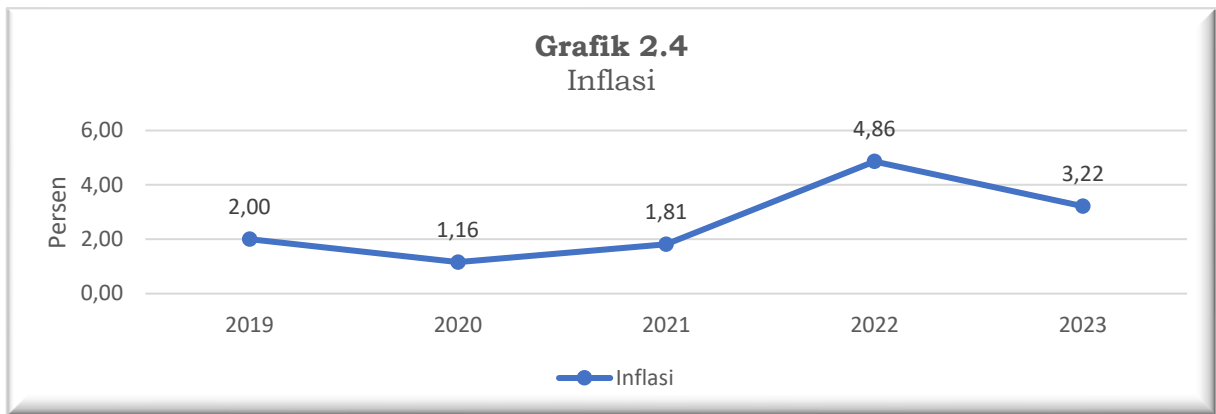
Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon sebagai *sister city* yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran inflasi Kabupaten Purwakarta, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.28
Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi	Persen	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Inflasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan data fluktuasi selama periode 2019-2023. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 (1,16%) dan Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (4,86%). Inflasi pada tahun 2023 (3,22%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerahnya.

Faktor-faktor yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta antara lain; Harga bahan makanan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta. Fluktuasi harga bahan makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca, musim, dan pasokan. Kemudian harga barang dan jasa lainnya, seperti transportasi, perumahan, dan pendidikan juga dapat mendorong inflasi. Selain itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), juga dapat mendorong inflasi.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain; dengan mengadakan operasi pasar secara rutin untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengadakan rapat untuk membahas perkembangan inflasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Kerjasama dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan makanan. kemudian Pemerintah Kabupaten



Purwakarta juga mengembangkan program ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan makanan.

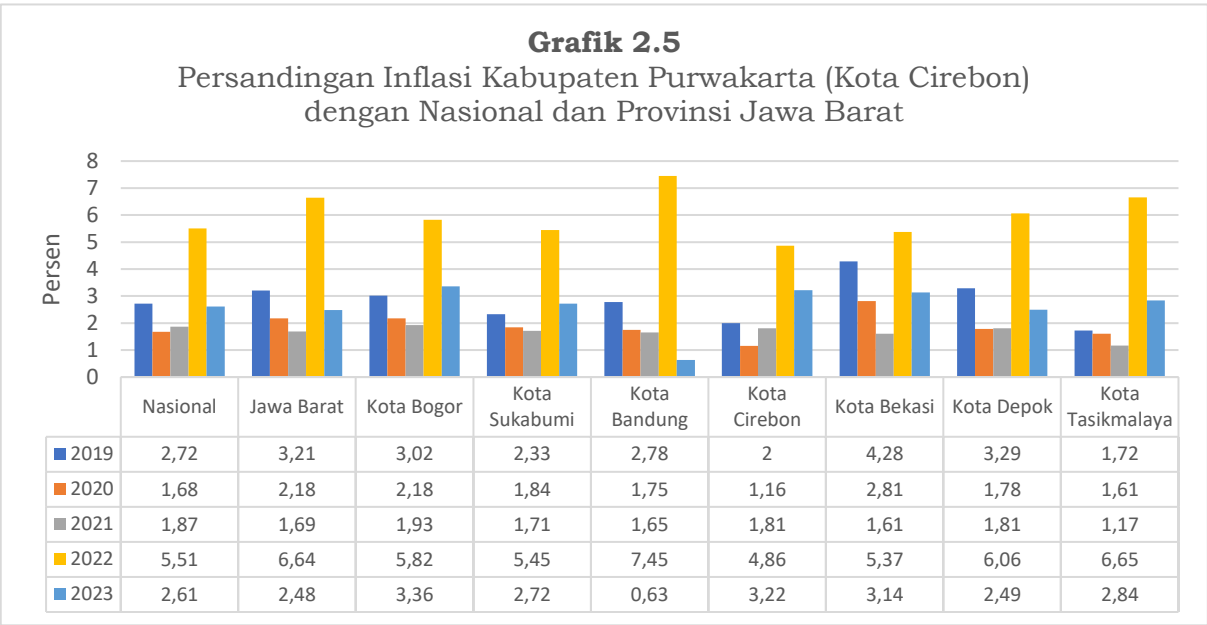
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.29

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Inflasi (persen)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,64	2,48
3	Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82	3,36
4	Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45	2,72
5	Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45	0,63
6	Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
7	Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37	3,14
8	Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06	2,49
9	Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.30

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,48	8,27	8,83	8,7	8,46
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

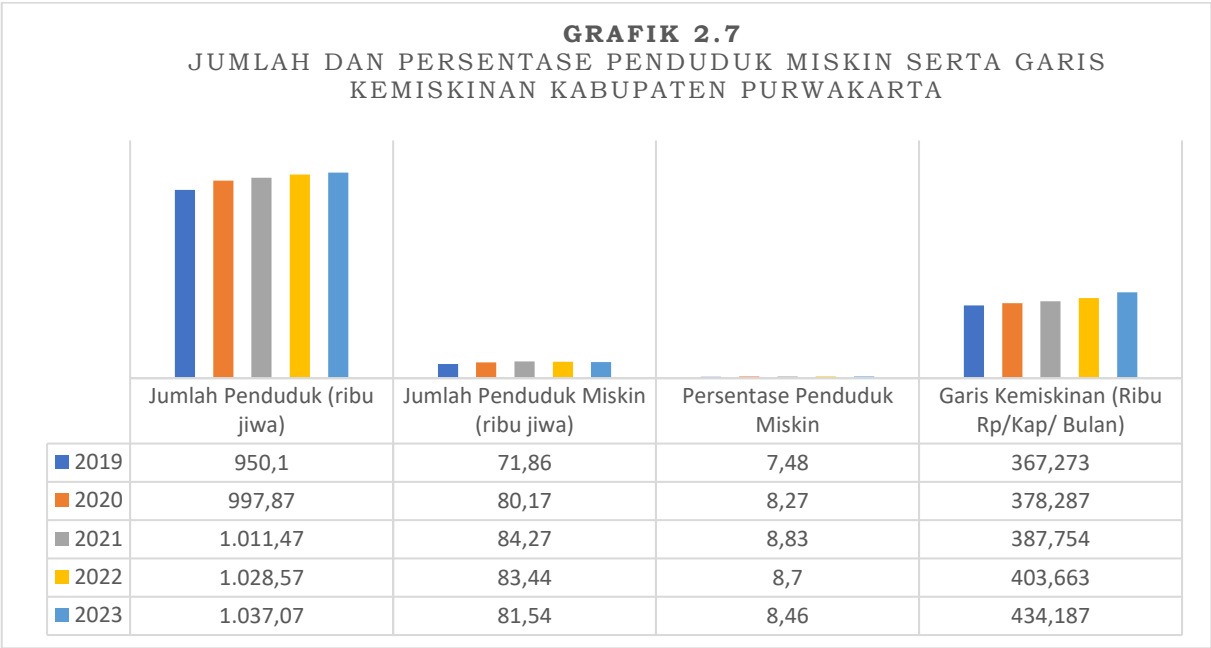


Tabel 2.31

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54
3.	Persentase Penduduk Miskin	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
4.	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 2.32

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
	Kab. Karawang	2.353,92	2.439,09	2.468.58	2.505,25	2.526,00
	Kab. Subang	1.595,83	1.595,32	1.608.59	1.624,39	1.649,82
	Kab. Bandung Barat	1.699,90	1.788,34	1.814.23	1.846,97	1.859,64
	Kab. Cianjur	2.263,07	2.477,56	2.506.68	2.542,79	2.558,14
	Kab. Bogor	5.965,41	5.427,07	5.489.54	5.566,84	5.627,02
	Prov. Jawa Barat	49.316,7	48.274,2	48.782,4	49.405,81	49.860,33
	Nasional	268.074,6	270.203,9	272.682,5	275.773,8	278.696,2
	Kab. Purwakarta	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54



Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Kab. Karawang	171,721	195,410	210,780	199,910	187,23
	Kab. Subang	127,460	149,810	158,970	155,340	152,33
	Kab. Bandung Barat	163,437	179,460	190,770	183,670	179,43
	Kab. Cianjur	209,751	234,470	260,020	246,810	240,06
	Kab. Bogor	395,000	465,670	491,240	474,740	453,76
	Prov. Jawa Barat	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98	3.888,60
	Nasional	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55
Persentase Penduduk Miskin (persen)	Kab. Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
	Kab. Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87
	Kab. Subang	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52
	Kab. Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52
	Kab. Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
	Kab. Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
	Prov. Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
	Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Kab. Purwakarta	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187
	Kab. Karawang	440.347	466.152	496.201	521.158	555.889
	Kab. Subang	339.607	351.885	360.691	372.308	404.320
	Kab. Bandung Barat	341.307	362.212	374.470	393.956	426.355
	Kab. Cianjur	350.760	371.699	387.631	406.829	437.327
	Kab. Bogor	373.799	402.877	418.483	443.787	482.174
	Prov. Jawa Barat	391.009	411.342	433.041	477.969	495.229
	Nasional	418.515	437.902	464.474	513.170	547.175

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 (8,83%) ke tahun 2023 (8,46%). Namun, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih tergolong tinggi bila dibandingkan rata-rata Jawa Barat (7,62%) tetapi masih dibawah rata-rata nasional (9,36%).

Kemudian terkait Kemiskinan Ekstrem yang ada di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem terdiri dari, jumlah keluarga ekstrem sebanyak 5.668 keluarga dan individu sebanyak 30.397 jiwa.



Gambar 2.4
Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta

NO	KECAMATAN	DATA KELUARGA		DATA INDIVIDU	
		DESIL 1	DESIL 2 - 4	DESIL 1	DESIL 2 - 4
1	BABAKANCIKAO	571	3.632	2.760	13.616
2	BOJONG	3.137	6.761	14.213	22.801
3	BUNGURSARI	577	3.240	2.623	11.609
4	CAMPAKA	663	3.702	3.136	12.970
5	CIBATU	284	2.137	1.321	7.244
6	DARANGDAN	2.803	8.869	12.696	29.844
7	JATILUHUR	909	3.767	4.709	14.176
8	KIARAPEDES	944	3.541	4.037	11.566
9	MANIIS	2.268	3.946	9.891	12.443
10	PASAWAHAN	799	4.128	3.640	14.083
11	PLERED	3.360	9.140	16.062	31.859
12	PONDOKSALAM	474	2.849	2.143	10.174
13	PURWAKARTA	2.020	8.952	10.289	33.257
14	SUKASARI	821	2.378	3.683	7.754
15	SUKATANI	2.416	7.566	11.341	26.862
16	TEGALWARU	2.477	6.926	10.750	22.650
17	WANAYASA	1.717	4.726	7.639	16.221
TOTAL		26.240	86.260	120.933	299.129

NO	KECAMATAN	PERSENTIL 1-2 DARI DESIL 1 (MISKIN EKSTREM)	
		DATA KELUARGA	DATA INDIVIDU
1	BABAKANCIKAO	80	458
2	BOJONG	838	4.406
3	BUNGURSARI	92	485
4	CAMPAKA	100	559
5	CIBATU	21	111
6	DARANGDAN	555	2.910
7	JATILUHUR	164	1.034
8	KIARAPEDES	181	912
9	MANIIS	725	3.730
10	PASAWAHAN	126	669
11	PLERED	726	4.070
12	PONDOKSALAM	66	334
13	PURWAKARTA	287	1.687
14	SUKASARI	208	1.092
15	SUKATANI	560	3.042
16	TEGALWARU	525	2.739
17	WANAYASA	414	2.159
TOTAL		5.668	30.397

Sumber : Kemenko PMK, 2024

Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem :
Keluarga : 5.668 dan Individu : 30.397

Perkembangan jumlah penduduk miskin ekstrem, selain dipengaruhi oleh tingkat garis kemiskinan dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, karena akan mempengaruhi perhitungan jumlah persentil 1 dan 2 pada Desil 1.



e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diukur berdasarkan tiga dimensi: Umur panjang dan sehat (diukur dengan UHH); Pengetahuan (diukur dengan APK-SD dan APS); Kehidupan yang layak (diukur dengan pengeluaran per kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin. Kemudian pada tahun 2023 ada peningkatan kembali menjadi 73,43 poin.

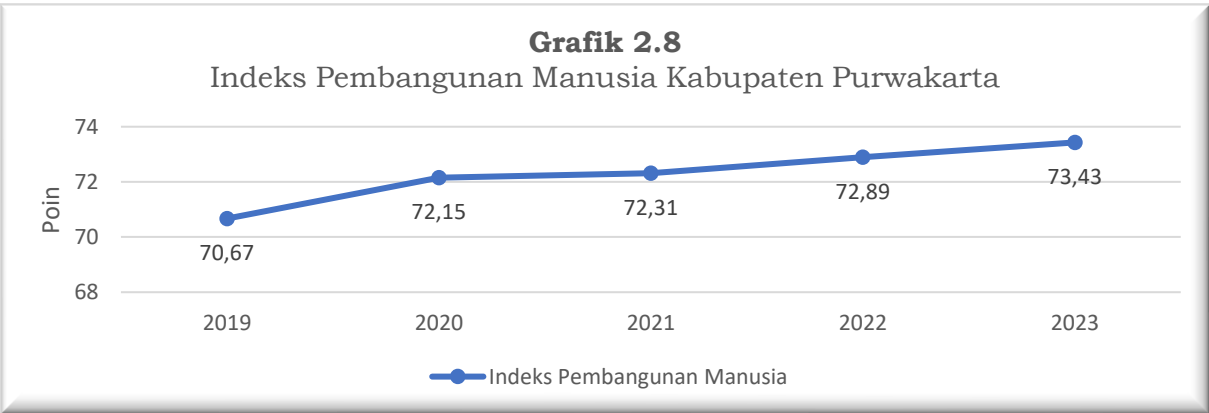
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.33

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,11	12,12	12,13	12,18
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	73,92	74,11	74,40	74,67
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rp	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



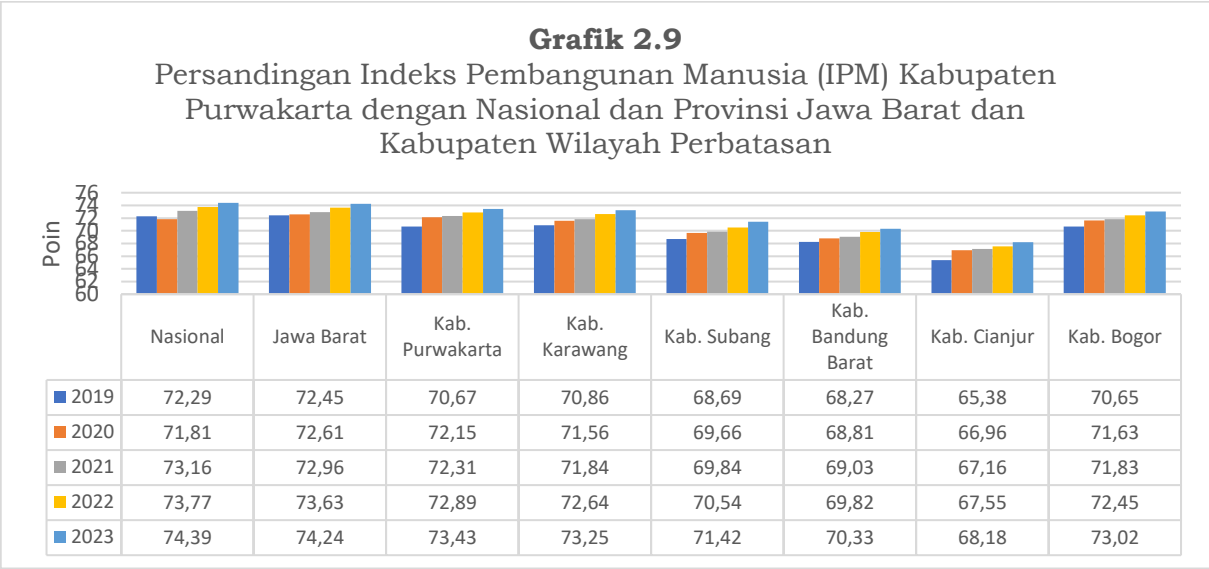
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.34

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	72,29	71,81	73,16	73,77	74,39
2	Jawa Barat	72,45	72,61	72,96	73,63	74,24
3	Kab. Purwakarta	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
4	Kab. Karawang	70,86	71,56	71,84	72,64	73,25
5	Kab. Subang	68,69	69,66	69,84	70,54	71,42
6	Kab. Bandung Barat	68,27	68,81	69,03	69,82	70,33
7	Kab. Cianjur	65,38	66,96	67,16	67,55	68,18
8	Kab. Bogor	70,65	71,63	71,83	72,45	73,02

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

IPM di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 (70,67) ke tahun 2023 (73,43). Peningkatan IPM ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan angka partisipasi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta.



f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91. Namun demikian sampai dengan tahun 2023, perkembangan angka TPT dan TPAK secara berangsur menunjukkan perkembangan yang positif, dimana pada tahun 2023 TPT Kabupaten Purwakarta berada pada angka 7,72 persen dan TPAK pada angka 66,37 persen.



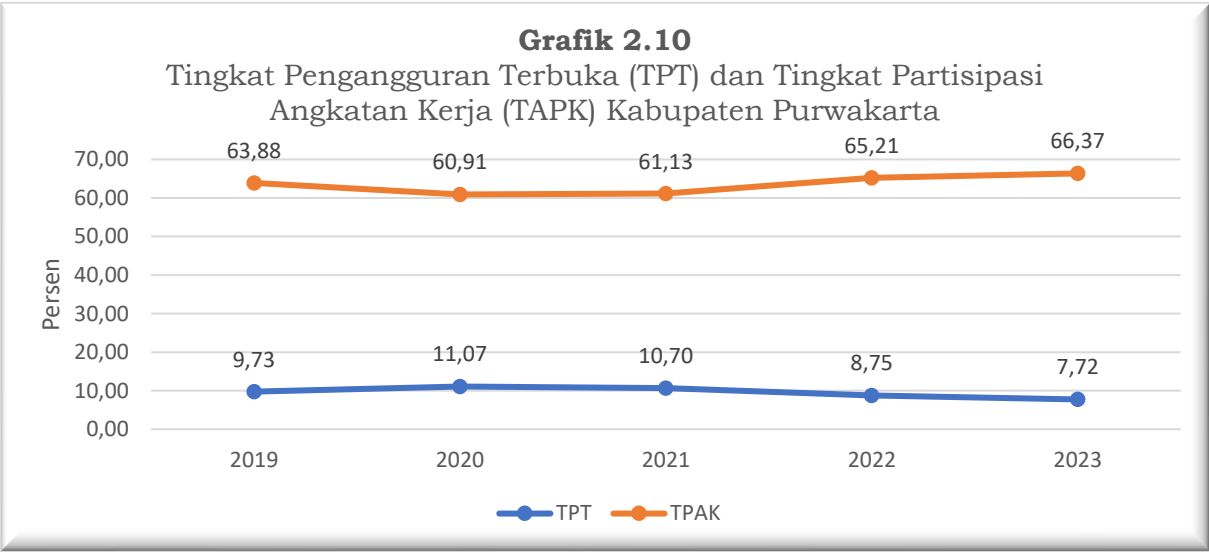
Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 2.35

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,7	8,75	7,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.36

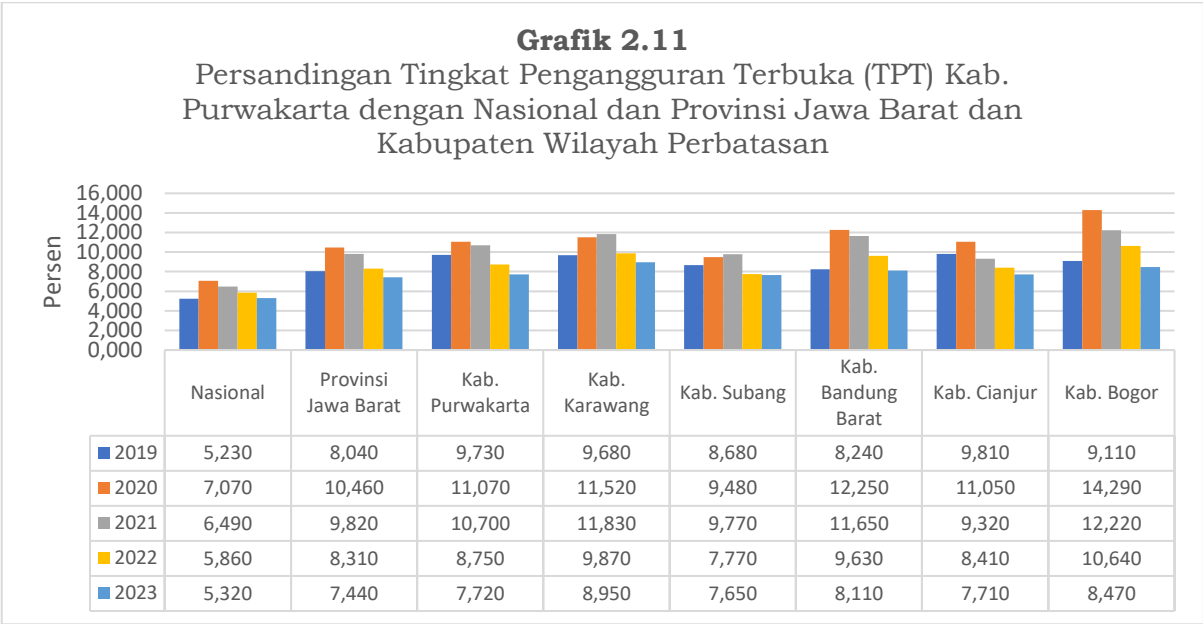
Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Provinsi Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
Kab. Purwakarta	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72
Kab. Karawang	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95
Kab. Subang	8,68	9,48	9,77	7,77	7,65

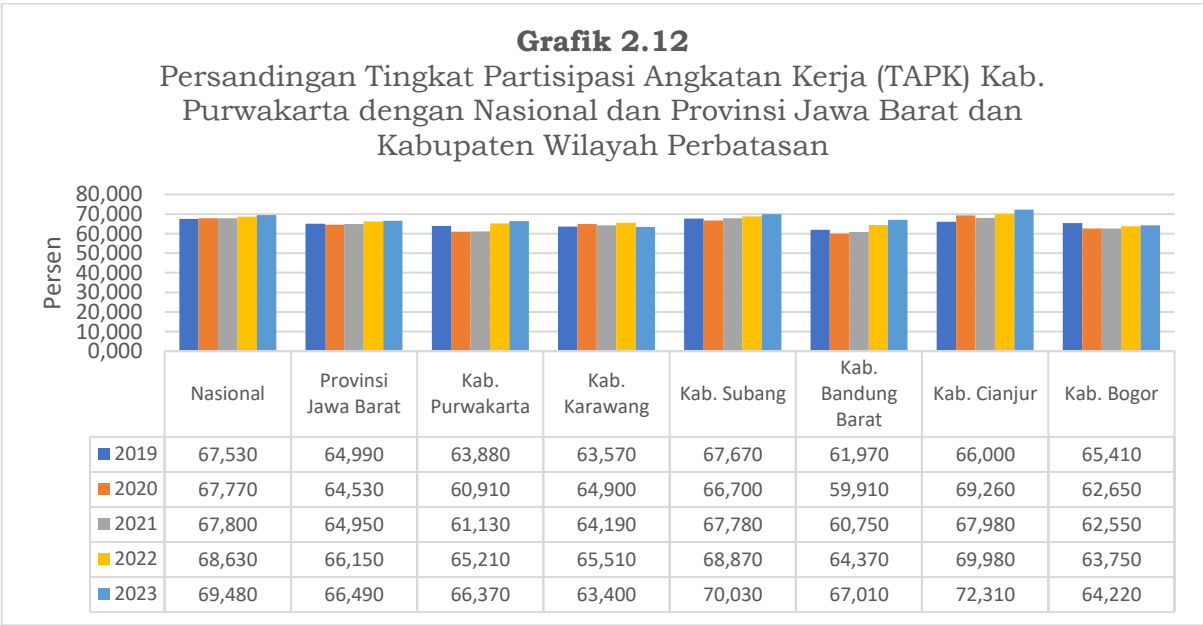


Kab. Bandung Barat	8,24	12,25	11,65	9,63	8,11
Kab. Cianjur	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71
Kab. Bogor	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	67,53	67,77	67,80	68,63	69,48
Provinsi Jawa Barat	64,99	64,53	64,95	66,15	66,49
Kab. Purwakarta	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37
Kab. Karawang	63,57	64,90	64,19	65,51	63,40
Kab. Subang	67,67	66,70	67,78	68,87	70,03
Kab. Bandung Barat	61,97	59,91	60,75	64,37	67,01
Kab. Cianjur	66,00	69,26	67,98	69,98	72,31
Kab. Bogor	65,41	62,65	62,55	63,75	64,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

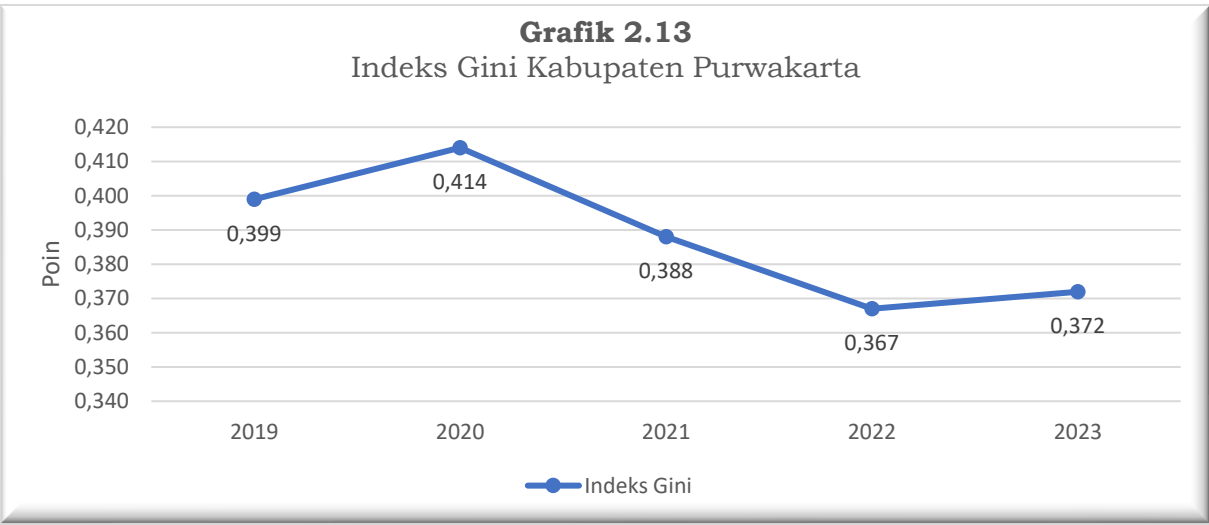
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.37

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Gini / Gini Rasio	Poin	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

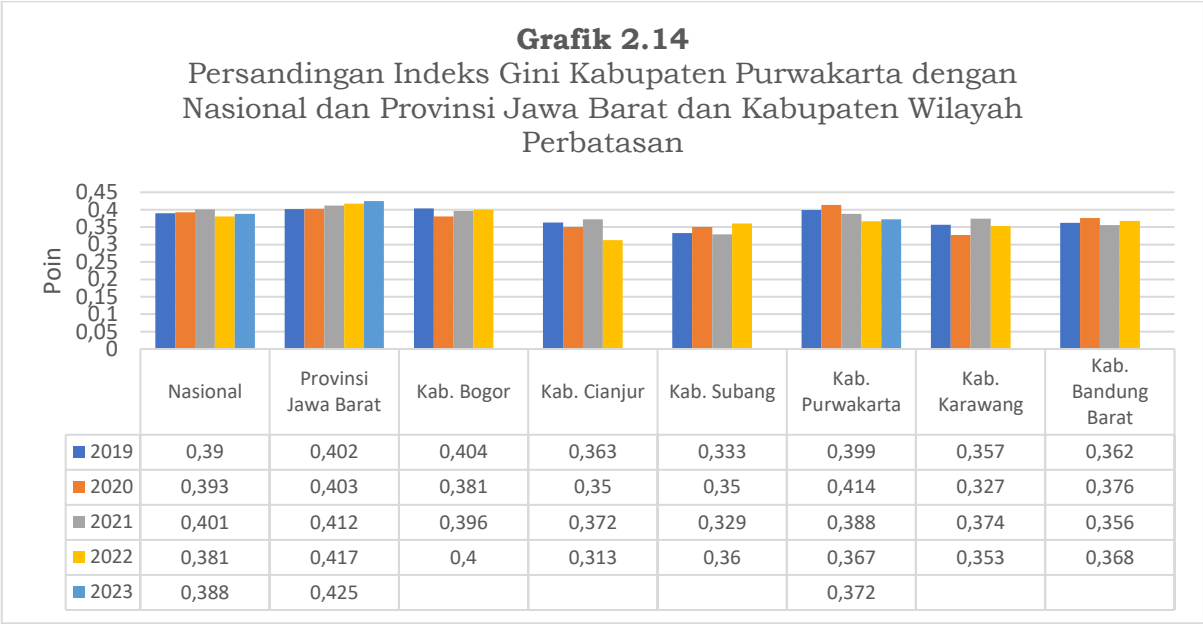


Tabel 2.38

Persandingan Indeks Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	0,390	0,393	0,401	0,381	0,388
2	Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
3	Kab. Bogor	0,404	0,381	0,396	0,400	n/a
4	Kab. Cianjur	0,363	0,350	0,372	0,313	n/a
5	Kab. Subang	0,333	0,350	0,329	0,360	n/a
6	Kab. Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372
7	Kab. Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353	n/a
8	Kab. Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368	n/a

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada tahun 2019, Indeks Gini atau Gini Rasio berada pada nilai 0,399, yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan menjadi 0,414, menandakan adanya peningkatan ketimpangan yang lebih tinggi dalam distribusi pendapatan atau kekayaan.

Tren kemudian berubah pada tahun 2021, di mana nilai Indeks Gini turun menjadi 0,388, menunjukkan adanya penurunan sedikit dalam ketimpangan ekonomi. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan, dengan Indeks Gini turun menjadi 0,367. Hal ini



menandakan upaya atau perubahan kebijakan yang mungkin telah diimplementasikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, angka tersebut sedikit meningkat kembali pada tahun 2023, dengan Indeks Gini mencapai 0,372. Meskipun masih di bawah angka tahun 2020, peningkatan ini mungkin menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan yang berdampak pada ketimpangan ekonomi yang lebih besar.

h. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 walaupun masih dibawah capaian tahun 2019, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.

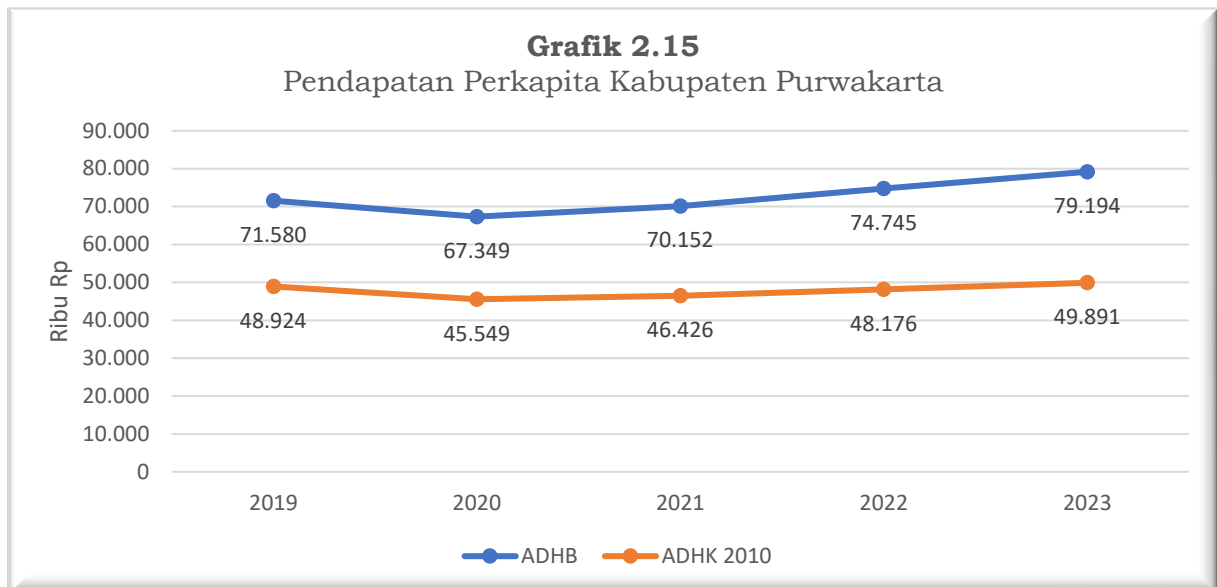
Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.39

Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB	Ribu Rp.	71.580	67.349	70.152	74.745	79.194
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010	Ribu Rp.	48.924	45.549	46.426	48.176	49.891

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pendapatan per kapita dari PDRB-ADHB pada tahun 2019 adalah sebesar 71.580 ribu rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 67.349 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 70.152 ribu rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 74.745 ribu rupiah dan 79.194 ribu rupiah berturut-turut.

Sementara itu, pendapatan per kapita dari PDRB-ADHK 2010 juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 48.924 ribu rupiah, turun menjadi 45.549 ribu rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 46.426 ribu rupiah pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 48.176 ribu rupiah dan 49.891 ribu rupiah berturut-turut.

Meskipun kedua indikator menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan dalam skala nilai antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010, dengan PDRB ADHB memiliki nilai yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan PDRB ADHK 2010. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam metodologi perhitungan antara kedua pendekatan tersebut.



2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang penciptaan kondisi yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mencapai potensi mereka secara penuh, dengan memperhatikan berbagai dimensi kehidupan manusia.

Pembangunan kesejahteraan sosial melibatkan upaya untuk memastikan akses yang adil dan setara terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang memadai serta kebijakan yang mendukung agar setiap orang dapat mengakses layanan tersebut tanpa diskriminasi.

Kemudian pembangunan kesejahteraan sosial mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui program-program redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, dan pendekatan yang inklusif dalam kebijakan publik.

Pembangunan kesejahteraan sosial juga menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan individu. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya serta identitas.

Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial melibatkan upaya untuk mempromosikan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, edukasi tentang gaya hidup sehat, serta dukungan bagi mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan mental.

Disamping itu, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan proses yang berkelanjutan. Tantangan baru akan terus muncul, dan oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, dan individu-individu untuk terus bekerja sama mencapai kesejahteraan yang lebih besar bagi semua. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial menjadi landasan untuk



menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang.

Kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan melalui program pembangunan oleh perangkat daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Capaian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,35	1,54	1,82	1,69	1,41
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,1	8,11	8,13
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,11	12,12	12,13	12,18
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	73,92	74,11	74,40	74,67
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,19	86,56	86,70	86,94	87,08
6	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	74,39	73,94	76,88	76,80	77,15

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan penurunan dari 1,35% pada tahun 2019 menjadi 1,41% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam dinamika pertumbuhan populasi dari tahun ke tahun.

Kemudian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Rata-rata lama sekolah naik dari 7,92 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,13 tahun pada tahun 2023, sementara harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 12,1 tahun menjadi 12,18 tahun dalam periode yang sama. Ini mencerminkan upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dalam masyarakat.



Sedangkan Angka harapan hidup menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2023, melonjak dari 70,80 tahun menjadi 74,67 tahun, hal ini berdasarkan pada metode baru perhitungan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 oleh BPS.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya, dan olahraga adalah aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang beragam, berdaya saing, dan berbudaya. Ini bukan hanya tentang menciptakan infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk ekspresi kreatif, identitas budaya, dan kesejahteraan fisik dan mental.

Pembangunan seni melibatkan dukungan terhadap seniman dan praktisi seni dalam menciptakan, memelihara, dan memperluas warisan budaya dan seni dapat menjadi sumber inspirasi, refleksi, dan penghubung antara berbagai komunitas.

Selanjutnya, pembangunan budaya mencakup pelestarian dan promosi keberagaman budaya serta identitas lokal. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan museum, pusat seni, festival budaya, dan program pendidikan budaya di sekolah. Penting untuk menghormati dan memperkuat warisan budaya tradisional sambil memperkenalkan inovasi baru yang memperkaya kehidupan budaya masyarakat.

Pembangunan olahraga berfokus pada pengembangan keolahragaan yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah terhadap pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan seni, budaya, dan olahraga haruslah berkelanjutan dan inklusif. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang rentan. Dengan demikian, pembangunan ini dapat menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi, pemersatu budaya, dan pembentuk karakter yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan dan memelihara nilai seni budaya daerah dan meningkatkan prestasi olahraga daerah dilaksanakan melalui program pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mengembangkan seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.41
Capaian Seni Budaya dan Olahraga di Kab. Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan	Persen	80	85	90	90	90
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	68,5	70,52	72,71	74,45	76,02
3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	25	25	35	35	14,98

Sumber : BPS Kab. Purwakarta; Laporan monev triwulan 4, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase seni dan budaya yang dibina dan dilestarikan mengalami peningkatan yang signifikan dari 80% pada tahun 2019 menjadi stabil pada 90% dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya yang terus meningkat dalam memelihara dan mempromosikan warisan budaya dan seni dalam masyarakat.

Kemudian indeks kerukunan umat beragama mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2022, naik dari 68,5 poin menjadi 74,45 poin. Kemudian di tahun 2023 kembali naik menjadi 76,02 poin, peningkatan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan antaragama dan mempromosikan toleransi dalam masyarakat.

Sedangkan persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2021, meningkat dari 25% menjadi 35%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 14,98%. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam pencapaian pemuda dalam bidang prestasi tingkat provinsi dan nasional, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, aksesibilitas, atau dukungan terhadap pemuda.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan umum mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi, perumahan, kebersihan, dan banyak lagi.

Salah satu aspek penting dari pelayanan umum adalah aksesibilitas. Layanan harus tersedia secara merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Hal ini memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kualitas layanan juga merupakan aspek kunci dari pelayanan umum. Layanan yang berkualitas tinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman yang positif dan memuaskan bagi penggunaannya. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kecepatan, efisiensi, kehandalan, serta kemampuan untuk merespons dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah dari masyarakat.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya juga mempengaruhi aspek pelayanan umum. Lembaga pelayanan harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas, serta infrastruktur dan peralatan yang memadai untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan lembaga pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting dari pelayanan umum. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi layanan, sehingga layanan yang disediakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyediaan layanan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.



Secara keseluruhan, aspek-aspek pelayanan umum saling terkait dan saling mempengaruhi, dan semuanya penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dan melakukan investasi yang tepat, pemerintah dan lembaga publik dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan umum, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan pelayanan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42

Capaian Pelayanan Umum di Kab. Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	45,00	60,06	60,06	64,41	74,10
2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	B	B	B	B	B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predikat	B	B	B	B	A
4	Nilai SPBE	Poin	n/a	n/a	2,78	2,28	2,99
5	Indeks Profesionalitas ASN	Sebutan/ Poin	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (53,43)	Sangat Rendah (54,22)	Sangat Rendah (55,68)	Tinggi (87,77)
6.	Indeks Inovasi Daerah	Skor	n/a	n/a	50,38	50,54	43,21
7.	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	n/a	n/a	B	B	B

Sumber : Laporan movev triwuan 4, 2023

Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang signifikan dari 45,00 poin pada tahun 2019 menjadi 74,10 poin pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Kemudian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta mempertahankan predikat "B" sepanjang periode tersebut, menunjukkan konsistensi dalam kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi standar akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga mempertahankan predikat "B" sepanjang periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam reformasi



birokrasi, masih ada ruang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Kemudian nilai Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami fluktuasi, mencapai 2,78 poin pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 2,28 poin pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 2,99 poin pada tahun 2023.

Sedangkan indeks profesionalitas ASN mengalami peningkatan signifikan dari tingkat sangat rendah pada tahun 2019 hingga 2022, sebelum mencapai tingkat tinggi pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan standar dan profesionalisme ASN, yang dapat berdampak positif pada kualitas layanan publik.

Kemudian indeks inovasi daerah mengalami kenaikan di tahun 2022 dibanding tahun 2021 namun turun pada tahun 2023, hal ini mencerminkan bahwa inovasi daerah Kabupaten Purwakarta harus mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum yang lebih baik dan inovatif.

Selanjutnya penilaian indeks pelayanan publik Kabupaten purwakarta sepanjang tahun 2021-2023 mendapatkan predikat “B” menunjukkan konsistensi dalam kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik yang prima.



2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	68,00	72,83	61,81	Dinas Pendidikan
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,57	99,58	99,58	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	99,54	99,53	99,96	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	99,73	99,73	99,80	Dinas Pendidikan
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan
7	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
9	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
10	Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	86,23	86,23	49,20	Dinas Pendidikan
11	Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	88,64	88,64	77,10	Dinas Pendidikan
12	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	57,57	43,65	62,03	Dinas Pendidikan
13	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	92,62	95,32	94,83	Dinas Pendidikan
14	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	93,41	97,22	94,25	Dinas Pendidikan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
15	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Dinas Pendidikan
16	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Dinas Pendidikan
17	Dokumen Hasil Pengawasan	Dokumen	0,00	1,00	1,00	Dinas Pendidikan
18	Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah	Persen	95,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, 2024

Dinas Pendidikan telah menunjukkan berbagai kinerja dalam beberapa indikator utama selama periode 2021 hingga 2023. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami fluktuasi, meningkat dari 68,00% pada tahun 2021 menjadi 72,83% di tahun 2022, namun turun menjadi 61,81% pada tahun 2023. Tingkat melek huruf penduduk berusia di atas 15 tahun stabil, sedikit meningkat dari 99,57% di tahun 2021 menjadi 99,58% pada tahun 2022 dan 2023. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI menunjukkan konsistensi tinggi, mencapai 99,96% pada tahun 2023 dari 99,54% di tahun 2021. APM jenjang SMP/MTs juga stabil, dari 99,73% pada tahun 2021 dan 2022, sedikit meningkat menjadi 99,80% pada tahun 2023. Tidak ada siswa yang putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs selama tiga tahun berturut-turut, dengan Angka Putus Sekolah (APS) tetap 0,00%. Tingkat kelulusan di jenjang SD/MI dan SMP/MTs mencapai angka sempurna 100% setiap tahunnya. Semua siswa melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dengan angka melanjutkan tetap 100% selama periode tersebut.

Namun, persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik mengalami penurunan signifikan dari 86,23% pada 2021 dan 2022 menjadi 49,20% pada 2023, sementara untuk SMP, kondisi ruang kelas yang baik turun dari 88,64% pada 2021 dan 2022 menjadi 77,10% pada 2023. Persentase pendidik PAUD dengan ijazah D-IV atau S1 serta sertifikat profesi meningkat dari 57,57% pada 2021 menjadi 62,03% pada 2023, meski sempat menurun ke 43,65% di tahun 2022. Pada jenjang SD, persentase pendidik dengan ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik naik dari 92,62% pada 2021 ke 95,32% pada 2022, sedikit turun ke 94,83% pada



2023. Untuk jenjang SMP, angka ini meningkat dari 93,41% pada 2021 menjadi 97,22% pada 2022, kemudian turun ke 94,25% pada 2023. Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal konsisten dengan 1 dokumen per tahun. Dokumen hasil pengawasan mulai tersedia dari tahun 2022 dengan 1 dokumen per tahun hingga 2023. Keikutsertaan sekolah dalam kegiatan bahasa dan sastra daerah mencapai 95% pada tahun 2021, namun tidak ada keikutsertaan yang tercatat pada tahun 2022 dan 2023.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan telah mempertahankan beberapa indikator kinerja yang tinggi meskipun terdapat beberapa penurunan dalam aspek tertentu seperti kondisi ruang kelas SD dan SMP serta partisipasi dalam kegiatan bahasa dan sastra daerah.

2. Kesehatan

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	75,00	75,00	85,00	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	91,74	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	50,00	98,41	90,00	Dinas Kesehatan
4	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	99,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	68,00	68,09	72,10	Dinas Kesehatan
6	Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis	Persen	75,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
7	Tingkat Mutu Keperawatan	Persen	75,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
8	Cakupan Pelyanan Penunjang	Persen	75,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
9	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga	Persen	85,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	dan sarana prasarana Rumah Sakit					
10	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	80,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
11	Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan	Persen	75,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
12	Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	75,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih
13	Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	Persen	78,00	75,00	85,00	RSUD Bayu Asih

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, 2024

Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih telah menunjukkan berbagai kinerja penting selama periode 2021 hingga 2023. Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan meningkat dari 75% pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 85% pada tahun 2023. Cakupan ketersediaan obat dan vaksin esensial mencapai 91,74% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 100% pada tahun 2022 dan 2023. Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan signifikan dari 50% pada tahun 2021 menjadi 98,41% pada tahun 2022, namun sedikit menurun ke 90% pada tahun 2023. Cakupan sarana farmasi yang dibina mencapai 99% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dan 2023.

Cakupan strata Posyandu Purnama dan Mandiri meningkat dari 68% pada tahun 2021 menjadi 72,10% pada tahun 2023. Di RSUD Bayu Asih, persentase pencapaian target SPM pelayanan medis, tingkat mutu keperawatan, dan cakupan pelayanan penunjang masing-masing meningkat dari 75% pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 85% pada tahun 2023. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana rumah sakit mencapai 85% pada tahun 2021 dan 2023, meski sempat menurun menjadi 75% pada tahun 2022. Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 80% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2023, setelah sempat menurun ke 75% pada tahun 2022. Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja serta keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan,



ketersediaan data kinerja OPD, dan pemenuhan kebutuhan operasional masing-masing meningkat dari 75% pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 85% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam beberapa indikator utama, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tengah periode tersebut.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi	Persen	-	5,95	6,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi	Persen	-	35,75	40,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	Persen	-	19,04	20,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	Persen	-	2,95	3,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	Persen	-	23,80	25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi	Persen	-	24,12	25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	Persen	-	24,12	25,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
8	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Unit	-	1.905,80	2.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun	Unit	-	14,42	14,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Panjang Ruas Jalan Baru	Km	-	1,14	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Jumlah Jembatan Baru	Titik	-	0,88	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	Persen	-	13,47	14,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Persentase Jalan yang ditingkatkan	Persen	-	7,73	7,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Persentase Jembatan yang ditingkatkan	Persen	-	1,26	1,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	Persen	-	75,32	86,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	Persen	-	16,03	18,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persen	-	83,67	95,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persen	-	22,02	24,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi	Persen	-	5,00	5,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	Km	-	1,14	0,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	Unit	-	0,88	0,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
22	Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Persen	-	20,00	19,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	-	33,08	38,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	Persen	-	25,00	24,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	Persentase Peserta Pembinaan	%	-	64,32	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	-	10,45	7,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	-	4,00	1.471,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	-	2,00	2,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	-	1,00	15,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	-	2,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	-	2,00	1.451,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	-	150,00	600,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun	Unit	-	15,00	190,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, 2024



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjukkan berbagai kinerja signifikan selama periode 2021 hingga 2023 dalam bidang infrastruktur dan pengelolaan sumber daya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencatat kemajuan dalam berbagai indikator. Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi meningkat dari 5,95% pada tahun 2022 menjadi 6,25% pada tahun 2023. Kinerja jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya yang berfungsi partisipatif juga menunjukkan peningkatan, dari 35,75% pada tahun 2022 menjadi 40,06% pada tahun 2023. Penelitian dan perancangan pengembangan jaringan irigasi yang dimanfaatkan meningkat dari 19,04% pada tahun 2022 menjadi 20,00% pada tahun 2023. Sementara itu, persentase jaringan irigasi yang dibangun bertambah sedikit dari 2,95% pada tahun 2022 menjadi 3,10% pada tahun 2023. Sistem informasi/data base irigasi yang dikembangkan juga meningkat dari 23,80% pada tahun 2022 menjadi 25,00% pada tahun 2023.

Dalam hal infrastruktur drainase, persentase saluran drainase/gorong-gorong yang berfungsi dan pemeliharannya naik dari 24,12% pada tahun 2022 menjadi 25,00% pada tahun 2023. Jumlah bangunan ber-IMB meningkat dari 1.905,80 unit pada tahun 2022 menjadi 2.000 unit pada tahun 2023. Namun, jumlah ruang publik yang direvitalisasi sedikit menurun dari 14,42 unit pada tahun 2022 menjadi 14,35 unit pada tahun 2023. Panjang ruas jalan baru sedikit menurun dari 1,14 km pada tahun 2022 menjadi 1,00 km pada tahun 2023, sementara jumlah jembatan baru meningkat dari 0,88 titik pada tahun 2022 menjadi 1,00 titik pada tahun 2023.

Peningkatan juga terlihat dalam persentase jalan dan jembatan yang dibangun, dari 13,47% pada tahun 2022 menjadi 14,75% pada tahun 2023. Namun, persentase jalan yang ditingkatkan sedikit menurun dari 7,73% pada tahun 2022 menjadi 7,25% pada tahun 2023, dan persentase jembatan yang ditingkatkan juga mengalami penurunan dari 1,26% pada tahun 2022 menjadi 1,25% pada tahun 2023. Persentase jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan signifikan dari 75,32% pada tahun 2022 menjadi 86,50% pada tahun 2023.

Tingkat pemenuhan inspeksi kondisi jalan dan jembatan meningkat dari 16,03% pada tahun 2022 menjadi 18,00% pada tahun 2023. Penanggulangan tanggap darurat jalan dan jembatan juga meningkat dari 83,67% pada tahun 2022 menjadi 95,00% pada tahun 2023. Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan naik dari 22,02% pada tahun 2022 menjadi 24,25% pada tahun 2023. Sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi meningkat sedikit dari 5,00% pada tahun 2022 menjadi 5,05% pada tahun 2023.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Jumlah sarana prasarana air bersih komunal yang dibangun meningkat drastis dari 4 unit pada tahun 2022 menjadi 1.471 unit pada tahun 2023. Panjang saluran air bersih perpipaan yang dibangun tetap konsisten di angka 2,00 km pada tahun 2022 dan 2023. Unit pengolah air baku yang terbangun meningkat dari 1 unit pada tahun 2022 menjadi 15 unit pada tahun 2023. Namun, cakupan sarana pengolahan sampah yang memadai mengalami penurunan dari 2,00% pada tahun 2022 menjadi 0,00% pada tahun 2023.

Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun atau diperbaiki meningkat tajam dari 2 unit pada tahun 2022 menjadi 1.451 unit pada tahun 2023. Panjang saluran drainase/gorong-gorong lingkungan yang dibangun atau diperbaiki juga meningkat signifikan dari 150 meter pada tahun 2022 menjadi 600 meter pada tahun 2023. Jumlah sarana dan prasarana permukiman yang dibangun meningkat dari 15 unit pada tahun 2022 menjadi 190 unit pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, kedua dinas menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik, meskipun ada beberapa indikator yang mengalami penurunan atau stagnasi. Kinerja yang signifikan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang lebih baik dan pelayanan yang lebih optimal.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	-	710,00	10,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	-	2,00	4,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	-	2,00	4,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	Unit	-	14,00	5,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, 2024

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan berbagai program peningkatan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman selama periode 2021 hingga 2023 dengan hasil yang beragam.

Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki mengalami penurunan signifikan dari 710 unit pada tahun 2022 menjadi hanya 10 unit pada tahun 2023. Di sisi lain, luas kawasan kumuh yang ditangani sesuai dengan surat keputusan meningkat dua kali lipat dari 2 hektar pada tahun 2022 menjadi 4 hektar pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan upaya dalam penanganan kawasan kumuh.

Jumlah pembangunan prasarana sarana utilitas penunjang perumahan menurun dari 14 unit pada tahun 2022 menjadi 5 unit pada tahun 2023. Sementara itu, tidak ada penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang dilakukan selama dua tahun berturut-turut pada 2022 dan 2023.

Secara keseluruhan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek penting seperti



penanganan kawasan kumuh, meskipun terdapat penurunan dalam jumlah rumah yang diperbaiki dan pembangunan prasarana sarana utilitas penunjang perumahan. Ke depan, fokus yang lebih seimbang antara peningkatan jumlah perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan sarana penunjang perumahan akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	%	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani	%	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	Kegiatan	34,00	40,00	40,00	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	Kegiatan	8,00	8,00	8,00	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	%	60,00	60,00	72,00	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Jumlah	98,00	98,00	98,00	Satuan Polisi Pamong Praja



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
7	Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	%	60,00	80,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	Kali	48,00	48,00	48,00	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	%	20,00	20,00	20,00	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	-	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	-	95,53	77,61	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber : Laporan Monev 2023 Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam berbagai indikator.

Satuan Polisi Pamong Praja berhasil mempertahankan frekuensi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum sebesar 100% dari tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani juga mencapai 100% setiap tahunnya. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas meningkat dari 34 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 40 kegiatan pada tahun 2022 dan tetap stabil pada tahun 2023.

Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan, dan penertiban terhadap aset daerah tetap konsisten di angka 8 kegiatan setiap



tahunnya. Jumlah warga negara, badan hukum, dan aparaturnya yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada meningkat dari 60% pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 72% pada tahun 2023. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklat/bimtek tetap stabil di angka 98 setiap tahunnya. Persentase anggota Satpol PP yang dibina karena pelanggaran disiplin (PNS/Non PNS) meningkat dari 60% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022 dan mencapai 100% pada tahun 2023. Frekuensi pengawasan yang dilakukan terhadap anggota Satpol PP (PNS/Non PNS) tetap konsisten di angka 48 kali setiap tahunnya. Persentase anggota Satlinmas yang dibina tetap stabil di angka 20% setiap tahunnya, dan jumlah pembinaan potensi masyarakat juga tetap konsisten dengan 10 kegiatan setiap tahunnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan persentase pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menunjukkan hasil yang signifikan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meskipun terdapat penurunan dari 95,53% pada tahun 2022 menjadi 77,61% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, kinerja yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencerminkan upaya yang konsisten dan komitmen yang kuat dalam menjaga ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran, meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam pencapaian indikator tertentu.

6. Sosial

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.48

Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	26,00	29,00	40,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Jumlah migran yang terfasilitasi	persen	0,00	10,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	94,23	99,87	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Persen	206,00	25,06	44,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	Persen	87,00	90,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Desa/Kel	99,77	90,00	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen	88,00	85,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjukkan berbagai capaian dalam bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina meningkat secara signifikan dari 26 lembaga pada tahun 2021 menjadi 29 lembaga pada tahun 2022 dan mencapai 40 lembaga pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan komitmen dinas dalam memperluas jangkauan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial.

Jumlah migran yang terfasilitasi mengalami fluktuasi, dengan pencapaian sebesar 10% pada tahun 2022, namun kembali turun menjadi 0% pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan fasilitasi migran.



Persentase capaian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial mengalami peningkatan dari 94,23% pada tahun 2021 menjadi 99,87% pada tahun 2022, dan mencapai 100% pada tahun 2023, menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi yang lebih luas dan efektif.

Jumlah anak terlantar yang dibina mengalami penurunan dari 206 anak pada tahun 2021 menjadi 25,06 anak pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 44 anak pada tahun 2023. Persentase fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberdayakan juga meningkat dari 87% pada tahun 2021 menjadi 90% pada tahun 2022 dan mencapai 100% pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan efektivitas program pemberdayaan.

Dukungan terhadap penanganan bencana tetap stabil dengan persentase 99,77% pada tahun 2021 dan 90% pada tahun 2022 dan 2023. Dukungan terhadap layanan makam pahlawan mengalami sedikit penurunan dari 88% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2022, namun meningkat menjadi 100% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai indikator kesejahteraan sosial, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam fasilitasi migran dan penanganan anak terlantar. Upaya yang konsisten dalam pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap layanan makam pahlawan, mencerminkan dedikasi dinas dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.49

Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	Orang	70,16	95,00	95,36	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	Orang	0,00	54,87	95,36	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	100,00	14,06	81,02	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4	Persentase Pelatihan Kewirausahaan	Persen	0,00	14,06	81,02	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00	55,45	61,52	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah menunjukkan peningkatan dalam berbagai indikator kinerja terkait pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jumlah peserta pelatihan kerja bagi pencari kerja meningkat secara signifikan dari 70,16 orang pada tahun 2021 menjadi 95,00 orang pada tahun 2022 dan mencapai 95,36 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen dinas dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja.

Jumlah tenaga kerja produktif pada industri kecil juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari tidak ada pada tahun 2021 menjadi 54,87 orang pada tahun 2022 dan mencapai 95,36 orang pada tahun 2023. Ini mencerminkan upaya dinas dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan industri kecil.



Persentase calon tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan mengalami fluktuasi, dengan pencapaian 100% pada tahun 2021, turun drastis menjadi 14,06% pada tahun 2022, namun kembali meningkat signifikan menjadi 81,02% pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penempatan tenaga kerja.

Persentase pelatihan kewirausahaan juga mengalami peningkatan, dari tidak ada pada tahun 2021 menjadi 14,06% pada tahun 2022 dan mencapai 81,02% pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan upaya dinas dalam mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat.

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2021 menjadi 55,45% pada tahun 2022, namun sedikit meningkat menjadi 61,52% pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, namun dengan adanya peningkatan pada tahun 2023, terlihat adanya upaya perbaikan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator utama, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya yang konsisten dalam pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan kewirausahaan mencerminkan dedikasi dinas dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.50

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan	Persen	74,67	85,00	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	80,84	90,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	80,00	90,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Tersedianya Data Gender Anak	Persen	0,00	75,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	90,00	60,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen	11,74	60,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat berbagai kemajuan dalam beberapa indikator utama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Persentase peranserta gender dalam pembangunan mengalami peningkatan yang signifikan dari 74,67% pada tahun 2021 menjadi 85,00% pada tahun 2022 dan mencapai 90,00% pada tahun 2023. Ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Tingkat penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 80,84% pada tahun 2021 menjadi 90,00% pada tahun 2022 dan mencapai 100,00% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak semakin kuat dan berfungsi secara optimal.

Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan meningkat dari 80,00% pada tahun 2021 menjadi 90,00% pada



tahun 2022 dan mencapai 100,00% pada tahun 2023. Ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan.

Indikator tersedianya data gender anak menunjukkan variasi yang signifikan, dengan pencapaian 0,00% pada tahun 2021, peningkatan menjadi 75,00% pada tahun 2022, dan kembali ke 0,00% pada tahun 2023. Ini menandakan adanya tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang konsisten terkait gender anak.

Persentase pemenuhan hak anak mengalami fluktuasi, dari 90,00% pada tahun 2021 menjadi 60,00% pada tahun 2022, namun kembali meningkat signifikan menjadi 100,00% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi hak-hak anak telah mencapai hasil yang optimal di tahun 2023.

Persentase pemenuhan perlindungan khusus hak anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 11,74% pada tahun 2021 menjadi 60,00% pada tahun 2022 dan mencapai 100,00% pada tahun 2023. Ini mencerminkan peningkatan yang luar biasa dalam upaya melindungi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Secara keseluruhan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, khususnya dalam penyediaan data gender anak yang konsisten. Upaya yang konsisten dalam meningkatkan partisipasi gender, memperkuat kelembagaan, serta memenuhi hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak menunjukkan dedikasi dinas dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9. Pangan

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah	Persen	167,92	163,66	30,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Ketersediaan Bahan Makanan	Persen	181,69	170,38	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	0,00	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama tiga tahun terakhir, Dinas Pangan dan Pertanian mengalami variasi yang signifikan dalam kinerja mereka, terutama terkait ketersediaan bahan makanan di daerah dan penanganan kerawanan pangan. Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah menunjukkan penurunan yang drastis dari 167,92% pada tahun 2021 menjadi hanya 30,00% pada tahun 2023, mencerminkan tantangan serius dalam menjaga ketersediaan beras yang memadai. Namun, dalam hal ketersediaan bahan makanan secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, dinas berhasil mempertahankan tingkat yang relatif tinggi, dengan pencapaian 100,00% pada tahun 2023. Yang lebih menggembirakan lagi, dalam penanganan kerawanan pangan, dinas berhasil mencapai 100,00% pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menangani masalah kritis ini. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya Dinas Pangan dan Pertanian dalam memastikan ketersediaan bahan makanan dan mengurangi kerawanan pangan telah menunjukkan hasil positif yang layak diapresiasi.

10. Pertanian

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.52

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan	Dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi	Persen	-	77,80	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi)	Lokasi	-	16,68	2,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun	Lokasi	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Jumlah Penetapan Tanah Ulayat	Lokasi	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah	Lokasi	-	0,00	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan	Persen	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi	Persen	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencatat beberapa indikator kinerja terkait izin lokasi, konflik pertanahan, dan pengelolaan lahan. Tidak ada rekomendasi izin lokasi yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kemungkinan penundaan atau kendala dalam proses perizinan. Namun, ada peningkatan signifikan dalam persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi, mencapai 100,00% pada tahun 2023 dari 77,80% pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, jumlah lahan untuk pembangunan fasilitas publik mengalami penurunan drastis dari 16,68 lokasi pada tahun 2021 menjadi hanya 2,87 lokasi pada tahun 2023. Tidak ada penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam satu tahun yang terjadi selama periode tersebut. Selain itu, tidak ada penetapan tanah ulayat yang dilakukan selama



periode yang sama. Namun, terdapat satu lokasi tanah kosong yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023.

Persentase izin lokasi membuka tanah yang direkomendasikan dan persentase konflik perpenatagunaan yang terfasilitasi menunjukkan angka nol, menunjukkan kemungkinan kurangnya aktivitas dalam hal tersebut selama periode tersebut. Dengan demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam hal perizinan lokasi, manajemen lahan, dan penyelesaian konflik pertanahan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan ruang dan tata guna lahan di masa mendatang.

11. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.53

Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%	99,55	72,10	35,51	Dinas Lingkungan Hidup
2	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	%	22,07	66,05	93,60	Dinas Lingkungan Hidup
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase Target Pembinaan	%	63,04	70,00	89,74	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta	Lokasi	6,00	6,00	5,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani	%	30,29	56,07	81,50	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan	%	0,00	100,00	84,46	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase pengaduan yang ditangani	%	0,00	100,00	88,64	Dinas Lingkungan Hidup



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
9	Persentase Layanan Persampahan	%	89,17	100,00	93,08	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode tiga tahun terakhir, Dinas Lingkungan Hidup mengalami variasi yang signifikan dalam kinerja mereka, yang tercermin dalam berbagai indikator kunci. Persentase perencanaan lingkungan hidup mengalami penurunan yang drastis dari 99,55% pada tahun 2021 menjadi hanya 35,51% pada tahun 2023, menunjukkan potensi tantangan dalam perencanaan jangka panjang terkait lingkungan hidup. Namun, tingkat adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari 22,07% pada tahun 2021 menjadi 93,60% pada tahun 2023, mencerminkan kesadaran dan upaya yang lebih besar dalam menangani dampak perubahan iklim. Meskipun demikian, tidak ada dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun selama periode tersebut, menyoroti potensi kebutuhan untuk fokus lebih besar pada perlindungan biodiversitas.

Selanjutnya, persentase target pembinaan dan persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen terhadap upaya pembinaan dan penyuluhan. Kegiatan PROPERDA juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 84,46% pada tahun 2023 dari 0,00% pada tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan kesadaran dan penegakan hukum lingkungan. Demikian pula, persentase pengaduan yang ditangani dan persentase layanan persampahan juga menunjukkan peningkatan yang positif, menunjukkan kemajuan dalam respons terhadap masalah lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, hasil ini mencerminkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Purwakarta.



12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54

Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	%	90,00	100,05	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	%	90,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Kepemilikan KIA	%	90,00	46,98	52,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Tingkat Kesadaran Masyarakat	%	90,00	95,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	%	90,00	100,00	100,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	%	90,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	%	90,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	%	90,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	90,00	95,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	%	90,00	100,00	94,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	90,00	90,00	91,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	%	90,00	100,00	82,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	%	90,00	90,00	80,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	%	90,00	80,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mencapai berbagai indikator kinerja dengan hasil



yang mengesankan. Tingkat kepemilikan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, stabil di sekitar 100%. Namun, terdapat penurunan pada tingkat kepemilikan KIA pada tahun 2022, meskipun berhasil meningkat pada tahun 2023. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan juga mencapai target sempurna pada tahun 2023 setelah mencapai 95% pada tahun sebelumnya. Meskipun begitu, akurasi data kependudukan, persentase pengelolaan informasi kependudukan, dan persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan tren yang stabil atau meningkat sepanjang periode tersebut. Namun, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan adminduk yang diselenggarakan serta pemanfaatan data oleh instansi/lembaga pengguna menunjukkan variasi yang lebih besar dalam kinerja, dengan beberapa penurunan pada tahun 2023. Meskipun demikian, persentase inovasi pelayanan adminduk kembali mencapai target pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan data kependudukan.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa	Persen	87,18	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi	Persen	0,00	100,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
3	Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk	Persen	61,89	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persen	64,54	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	Persen	80,76	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	72,16	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa	Persen	0,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil mencapai berbagai indikator kinerja dengan hasil yang signifikan. Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan, dan sarana prasarana desa telah mencapai target maksimal sepanjang periode tersebut, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan tata ruang di tingkat desa. Selain itu, persentase kerjasama desa yang terealisasi menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021 yang mencapai nol persen, mencapai 90% pada tahun 2023, menandakan efektivitas program-program kolaboratif antara pemerintah desa dan stakeholders terkait.

Pembangunan kawasan pedesaan yang dibentuk juga mencapai target maksimal, menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan wilayah pedesaan. Demikian juga dengan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa, yang mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kualitas pelayanan administrasi yang tinggi.

Selain itu, persentase pemberdayaan atau pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan pengembangan teknologi dan inovasi produk unggulan desa juga mencapai target penuh pada tahun 2022 dan 2023, menandakan komitmen dalam mengembangkan potensi lokal dan memperkuat struktur sosial di tingkat desa.



Secara keseluruhan, pencapaian yang konsisten dan signifikan dalam berbagai aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	persen	86,90	100,00	70,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	persen	86,90	100,00	75,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	persen	82,66	100,00	98,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	persen	97,10	100,00	98,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil mencapai sejumlah indikator kinerja yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pertama, cakupan kerjasama penyelenggaraan pendidikan



formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 70%, meskipun mencapai target penuh pada tahun 2022. Demikian juga dengan persentase stakeholder/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkat wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE, meskipun mengalami penurunan, masih mencapai 75% pada tahun 2023.

Namun, terdapat pencapaian yang positif pada indikator lainnya. Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif meningkat secara signifikan dari 82,66% pada tahun 2021 menjadi 98% pada tahun 2023. Begitu pula dengan persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, yang mencapai 98% pada tahun 2023 setelah stabil di 100% sejak tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memberikan layanan dan advokasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan pendidikan kependudukan, penggunaan alat kontrasepsi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Meskipun terdapat tantangan pada beberapa indikator, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola aspek kependudukan dan keluarga.

15. Perhubungan

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.57

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Presentase Prasarana Perlengkapan lalu lintas dan Angkutan jalan	Persen	95,32	87,79	92,55	Dinas Perhubungan
2	Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Persen	79,89	84,57	50,07	Dinas Perhubungan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, 2024



Dalam periode 2021 hingga 2023, Dinas Perhubungan berhasil mencatat beberapa indikator kinerja yang menonjol. Pertama, presentase prasarana perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan menunjukkan tren yang cukup stabil, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 95,32% dan sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 87,79%, namun berhasil pulih kembali pada tahun 2023 mencapai 92,55%.

Sementara itu, indikator kedua, yaitu prosentase konektivitas dan perlengkapan angkutan sungai dan penyeberangan, menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2021, pencapaian mencapai 79,89%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 84,57%, namun kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 menjadi hanya 50,07%. Meskipun demikian, kedua indikator ini memberikan gambaran tentang upaya Dinas Perhubungan dalam memantau dan meningkatkan infrastruktur serta konektivitas transportasi di wilayah tersebut selama periode yang diamati.

16. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	88,30	99,72	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	Persen	99,00	97,81	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	Persen	92,40	98,80	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	Persen	98,90	82,30	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan	Persen	98,40	98,50	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Informasi dan Komunikasi Publik					
6	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika	Persen	98,30	97,58	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	Persen	94,90	95,50	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	Persen	91,00	95,60	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	Persen	97,60	98,40	84,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	Persen	0,00	98,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	Persen	0,00	99,70	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	Persen	85,50	35,36	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama rentang waktu dari tahun 2021 hingga 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat sejumlah pencapaian yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja mereka. Pertama, persentase media informasi yang dimanfaatkan menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023 mencapai 100%, menunjukkan efektivitas strategi mereka dalam memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi. Selanjutnya, persentase publikasi program pembangunan daerah juga menunjukkan kinerja yang baik, mencapai 100% pada tahun 2023, menandakan transparansi dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan kepada masyarakat.

Kemudian, persentase kegiatan pemerintahan daerah yang didokumentasikan juga mencapai 100% pada tahun 2023, mencerminkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengarsipkan kegiatan pemerintahan secara sistematis. Meskipun demikian, terdapat beberapa fluktuasi dalam indikator lainnya, seperti persentase layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani, yang mengalami



penurunan pada tahun 2022 tetapi berhasil pulih pada tahun 2023 mencapai 100%.

Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi dan komunikasi publik menunjukkan stabilitas yang baik, tetap tinggi dan mencapai 100% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan mereka telah berhasil.

Selanjutnya, aspek infrastruktur informatika juga mendapat perhatian yang cukup besar, seperti tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur informatika yang mencapai 100% pada tahun 2023, serta tingkat standarisasi infrastruktur informatika di instansi pemerintah dan ruang publik yang juga mencapai 100% pada tahun yang sama.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti tingkat keamanan jaringan teknologi informasi yang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Selain itu, persentase aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dimanfaatkan masyarakat umum menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2022, tetapi berhasil pulih pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses informasi dan pelayanan publik, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu perhatian lebih lanjut untuk ditingkatkan.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.59

Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Unit	0,00	150,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	Unit	80,00	150,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Unit	150,00	150,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya	Unit	0,00	0,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
5	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	UMKM	60,00	60,00	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	UMKM	30,00	40,00	50,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
7	Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	UMKM	100,00	150,00	150,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
8	Persentase UMKM Yang Terbina	UMKM	60,00	60,00	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9	Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	UMKM	30,00	40,00	50,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
10	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	UMKM	30,00	50,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
11	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	UMKM	25,00	10,00	10,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
12	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	UMKM	20,00	20,00	20,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
13	Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM	UMKM	2,00	0,00	2,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
14	Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	UMKM	0,00	15,00	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
15	Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	UMKM	30,00	20,00	20,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
16	Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	UMKM	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian berhasil melaksanakan sejumlah program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah koperasi yang diawasi, dinilai kesehatannya, dan yang mengikuti pelatihan perkoperasian, yang semuanya mencapai target maksimal pada tahun 2022 dan 2023.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketidakmampuan koperasi untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya, yang tetap pada angka nol sepanjang periode yang diamati. Demikian pula, terdapat kecenderungan stagnasi dalam persentase UMKM yang termonitor dan terevaluasi, serta dalam tingkat keterbinan pelaku UMKM menjadi wiraswasta yang profesional.

Dalam hal fasilitas yang diberikan kepada UMKM, terjadi fluktuasi yang signifikan. Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah wirausaha baru yang dibentuk dan terfasilitasinya UMKM dalam mengakses kredit perbankan dan non-perbankan pada tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis. Hal serupa terjadi pada tingkat terfasilitasinya UMKM untuk bermitra dengan usaha besar, BUMN/BUMD, dan berbagai lembaga lainnya.



Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan stabilitas, seperti jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan, yang tetap konsisten pada 100% sepanjang periode yang diamati. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan minat yang tetap tinggi dari UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa pencapaian yang signifikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan fasilitas dan dukungan yang lebih efektif bagi UMKM agar dapat bersaing secara sehat dalam pasar yang semakin kompetitif.

18. Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.60

Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Minat Penanaman Modal	Investor	305,00	176,00	421,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Event	5,00	7,00	8,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	95,00	98,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,78	92,38	91,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	%	89,00	100,00	81,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	%	99,00	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil mencatat sejumlah pencapaian yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi peningkatan yang mencolok dalam jumlah minat penanaman modal dari investor, yang meningkat secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah 421 minat penanaman modal.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berhasil meningkatkan jumlah promosi penanaman modal yang diselenggarakan, menunjukkan upaya aktif dalam memperkenalkan potensi investasi di wilayah tersebut kepada calon investor. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah event promosi dari tahun ke tahun, mencapai 8 event pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan kecil dalam persentase jumlah perizinan dan non-perizinan yang dapat diselesaikan, tetapi tetap berada pada level yang baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 98% pada tahun 2023.

Selanjutnya, terjadi peningkatan yang stabil dalam nilai pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat.

Dalam hal monitoring terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, namun pada tahun 2022, tercapai tingkat monitoring secara berkala sebesar 100%, menunjukkan upaya dalam memantau perkembangan investasi secara intensif.

Terakhir, terdapat peningkatan yang konsisten dalam persentase data dan informasi yang dimutakhirkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023, menandakan komitmen dalam menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada para pemangku kepentingan.



Secara keseluruhan, pencapaian tersebut mencerminkan komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif serta meningkatkan pelayanan kepada para investor dan masyarakat umum.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.61

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	39,00	84,86	53,05	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	19,50	19,97	17,68	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Cakupan Wirausaha Muda	Persen	48,75	59,90	61,89	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Cakupan Pembinaan Olahraga;	Persen	19,46	22,26	20,27	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	Persen	10,92	12,30	12,92	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	63,82	60,83	61,54	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan	Persen	0,00	6,83	18,87	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, 2024



Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan berhasil mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pembinaan pemuda, olahraga, dan kegiatan kepramukaan di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase organisasi pemuda yang aktif, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan persentase 84,86%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 53,05%.

Selanjutnya, meskipun terdapat fluktuasi, cakupan pembinaan kepemudaan, wirausaha muda, pembinaan olahraga, dan pembinaan atlet muda menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam memberdayakan pemuda dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang.

Dalam hal pembangunan dan/atau peningkatan sarana prasarana olahraga, terjadi peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan. Hal ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan infrastruktur yang mendukung aktivitas olahraga di wilayah tersebut.

Selain itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam cakupan pembangunan dan/atau peningkatan sarana prasarana kepramukaan, yang awalnya pada tahun 2021 masih mencapai angka nol, namun meningkat secara dramatis menjadi 18,87% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap pembinaan kegiatan kepramukaan di wilayah tersebut.

Meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam pencapaian, secara keseluruhan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan berhasil mencatat sejumlah pencapaian yang positif dalam mendukung pemuda, olahraga, dan kegiatan kepramukaan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan potensi generasi muda serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan kebudayaan dan olahraga.



20. Statistik

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Statistik, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Urusan Bidang Statistik Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persen	96,80	99,56	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	Persen	75,00	82,50	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat pencapaian yang signifikan dalam ketersediaan dan pengelolaan data serta informasi statistik sektoral di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi peningkatan yang konsisten dalam persentase ketersediaan data/informasi statistik sektoral daerah, yang mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan akses yang luas terhadap data dan informasi statistik bagi pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral dan spasial yang dihasilkan. Dari 75% pada tahun 2021, meningkat menjadi 100% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam proses pengolahan dan analisis data statistik, serta kemampuan dalam menyajikan informasi yang relevan dan berkualitas bagi pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pencapaian tersebut menunjukkan keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola data dan informasi statistik sektoral secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya



meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

21. Persandian

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Persandian, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.63

Capaian Kinerja Urusan Bidang Persandian Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	Persen	96,70	99,70	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	Persen	0,00	99,70	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	Persen	96,70	99,80	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mencatat pencapaian yang sangat baik dalam kesiapan dan pengelolaan risiko keamanan informasi di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi, yang mencapai 100% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola risiko keamanan informasi dengan efektif, serta kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman yang mungkin timbul.

Selanjutnya, terdapat peningkatan yang mencolok dalam tingkat kesiapan penerapan standar prosentase keamanan informasi, dari 0% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa



Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil menerapkan standar keamanan informasi yang tinggi, sehingga melindungi data dan informasi yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi, yang mencapai 100% pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah siap untuk menangani dan memulihkan diri dari insiden keamanan informasi dengan cepat dan efisien, sehingga dapat meminimalkan dampak negatifnya.

Secara keseluruhan, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil memperkuat infrastruktur keamanan informasi di wilayah tersebut, sehingga mampu melindungi data dan informasi yang sensitif serta memberikan perlindungan yang baik terhadap sistem informasi yang mereka kelola.

22. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Kebudayaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.64

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	Persen	49,76	54,58	43,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	49,76	49,62	39,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Persen	35,83	35,73	28,68	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina	kelompok	3,00	2,94	2,99	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	persen	33,21	49,92	49,72	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
6	Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	99,60	99,86	98,83	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Persen	49,80	59,93	59,30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
8	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	Persen	19,85	19,87	19,96	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama periode 2021 hingga 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pengembangan seni budaya lokal dan pelestarian warisan budaya di wilayah tersebut.

Pertama, terjadi fluktuasi dalam presentase kelompok seni budaya lokal yang dibina, dimana terjadi penurunan dari 54,58% pada tahun 2022 menjadi 43,82% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perubahan dinamis dalam partisipasi dan dukungan terhadap kelompok seni budaya lokal di komunitas.

Selanjutnya, terdapat penurunan dalam presentase event pagelaran seni budaya yang diikuti dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mungkin menandakan tantangan dalam mengorganisir dan mempromosikan acara seni budaya, serta mungkin juga karena faktor-faktor eksternal seperti pandemi atau perubahan tren minat masyarakat.

Selain itu, terjadi penurunan dalam presentase festival seni dan budaya yang diselenggarakan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan dan menemukan strategi yang lebih efektif dalam mempromosikan dan mengadakan festival seni dan budaya.

Meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa indikator, terdapat peningkatan yang konsisten dalam persentase peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah yang disediakan, serta dalam cakupan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini menunjukkan upaya yang terus-menerus dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya di wilayah tersebut.



Meskipun begitu, cakupan pembangunan dan/atau peningkatan sarana prasarana kebudayaan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan potensi untuk peningkatan lebih lanjut dalam investasi infrastruktur kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan seni dan budaya lokal di wilayah tersebut.

23. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Perpustakaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.65

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	7,90	14,13	5,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	Persen	-	29,30	46,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,00	4,78	26,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	Persen	0,15	0,00	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Laju Pengunjung Perpustakaan	Persen	8,80	12,00	7,20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	33,25	8,73	8,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	Persen	7,90	5,00	4,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	3,98	3,20	3,70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	12,40	40,00	94,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	49,80	0,10	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	Persen	10,14	17,68	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Persen	5,00	5,00	5,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam	Persen	100,00	99,90	0,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Mengenai Kabupaten Purwakarta					

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama tiga tahun terakhir, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalami berbagai dinamika dalam upaya meningkatkan layanan dan fasilitas perpustakaan di wilayahnya.

Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase pembinaan terhadap perpustakaan umum dan sekolah dari tahun 2021 hingga 2023. Ini menunjukkan komitmen Dinas untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan di komunitas, meskipun masih ada tantangan dalam ketersediaan koleksi buku dan ruang baca.

Namun, terdapat penurunan yang mencolok dalam ketersediaan koleksi buku perpustakaan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yang menurun menjadi 5% dari sebelumnya 14,13%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengelola dan memperbarui koleksi buku perpustakaan.

Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam persentase ketersediaan ruang baca di ruang publik, mencapai 26,80% pada tahun 2023. Hal ini menandakan upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat baca yang nyaman dan terjangkau.

Meskipun demikian, terdapat penurunan dalam tingkat pemeliharaan bahan perpustakaan, laju pengunjung perpustakaan, dan laju anggota perpustakaan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam menjaga minat masyarakat terhadap perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan hiburan.

Dalam hal inovasi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam persentase titik layanan perpustakaan keliling, mencapai 94% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya Dinas untuk mencapai lebih banyak masyarakat, terutama yang sulit dijangkau oleh perpustakaan konvensional.



Namun, terdapat tantangan dalam pengembangan koleksi buku perpustakaan digital, dengan penurunan drastis dari tahun 2021 hingga 2023. Ini menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dalam memperluas koleksi buku digital dan meningkatkan aksesibilitasnya.

Secara keseluruhan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu terus berupaya meningkatkan ketersediaan koleksi buku, fasilitas, dan layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.

24. Kearsipan

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Kearsipan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.66

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	50,00	100,00	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	33,04	100,00	99,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	1,75	1,55	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	2,67	9,35	2,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	28,57	39,10	43,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00	27,00	85,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	- Persentase Arsip Aktif	Persen	20,00	20,00	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	- Persentase Arsip Inaktif	Persen	5,28	20,00	53,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	- Persentase Arsip Vital	Persen	20,00	7,23	20,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	9,50	20,00	37,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11	Indek Kepuasan Masyarakat (IkM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	73,00	75,00	80,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
12	Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	19,99	19,99	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama tiga tahun terakhir, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengalami sejumlah perkembangan dalam upaya pembinaan, pelestarian, dan penyediaan layanan kearsipan di wilayahnya.

Pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam persentase pembinaan kearsipan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai 100%. Ini menunjukkan komitmen Dinas dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas OPD dalam pengelolaan arsip.

Selanjutnya, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat penyelamatan arsip statis dari tahun 2021 ke 2022, mencapai 100%, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Demikian juga dengan tingkat pelestarian arsip statis, yang meskipun relatif stabil, menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam mempertahankan integritas arsip.

Meskipun demikian, terdapat fluktuasi dalam laju pengunjung diorama/museum kearsipan, serta dalam persentase OPD yang mengelola arsip secara tertib. Hal ini menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap sejarah dan warisan lokal.

Di sisi lain, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemutakhiran sistem informasi kearsipan, mencapai 85% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan arsip menggunakan teknologi informasi.

Meskipun begitu, masih terdapat tantangan dalam persentase arsip inaktif dan penyusutan arsip, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip dari kerusakan dan kehilangan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam pencapaian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menunjukkan



komitmen yang kuat dalam pembinaan, pelestarian, dan penyediaan layanan kearsipan yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi kearsipan dari tahun ke tahun.



2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

25. Pariwisata

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pariwisata, yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	13,24	15,49	16,71	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	4,41	4,42	6,27	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ Tersertifikasi	Persen	4,41	4,42	6,27	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan	Persen	39,52	39,53	48,49	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persen	39,74	39,83	43,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	39,42	39,69	39,39	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, 2024

Selama tiga tahun terakhir, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan telah mengalami beberapa perkembangan dalam upaya pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan sektor pariwisata di wilayahnya.

Pertama, terjadi peningkatan bertahap dalam persentase destinasi wisata yang menarik dan diminati yang berhasil dikembangkan, dari 13,24% pada tahun 2021 menjadi 16,71% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi destinasi wisata yang tersedia bagi pengunjung.

Selanjutnya, terdapat peningkatan dalam persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik atau tersertifikasi, serta lembaga dan SDM



pariwisata yang meningkat atau tersertifikasi. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan pariwisata di wilayah tersebut.

Demikian pula, terjadi peningkatan dalam persentase event promosi yang diikuti atau diselenggarakan, menunjukkan aktifitas yang lebih besar dalam mempromosikan destinasi wisata dan menarik minat pengunjung potensial.

Meskipun demikian, cakupan pembangunan dan/atau peningkatan sarana prasarana pariwisata mengalami peningkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur pariwisata untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, presentasi komunitas ekonomi kreatif yang dibina menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendukung dan mempromosikan komunitas ekonomi kreatif sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan sektor pariwisata telah menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

26. Pertanian

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pertanian, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.68

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Produksi Hasil Ternak	Persen	0,50	1,60	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Akseptor IB	Ekor	2.867,00	2.733,00	1.788,00	Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
3	Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	Ekor	1.569,00	1.941,00	1.299,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	Lokasi	15,00	4,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Budidaya Ternak Unggas Unggul	Lokasi	14,00	2,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Lokasi	1,00	2,00	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	Orang	30,00	30,00	30,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina:	Produsen	1,00	2,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Unit	1,00	1,00	1,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,25	71,20	72,40	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	0,00	0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Kecamatan	17,00	17,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	10.030,00	102.068,00	91.780,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
14	Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Kecamatan	17,00	17,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Daging	Ton	2,00	2,50	2,50	Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
16	Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Telur	Ton	13,00	5,75	5,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : Susu	Liter	22,62	0,00	1.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	Kelompok	101,00	123,00	100,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
19	Jumlah Peternak Yang Terlatih	Orang	100,00	65,00	25,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
20	Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	Penghargaan	0,00	0,00	2,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persen	25,00	25,00	25,00	Dinas Pangan dan Pertanian
22	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	75,00	95,00	95,00	Dinas Pangan dan Pertanian
23	Produksi Padi	Ton	270.538,00	260.425,00	253.649,00	Dinas Pangan dan Pertanian
24	Produksi Jagung	Ton	3.017,00	1.238,00	1.108,00	Dinas Pangan dan Pertanian
25	Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	Hektar	50,00	50,00	50,00	Dinas Pangan dan Pertanian
26	Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	kegiatan	0,00	2,00	2,00	Dinas Pangan dan Pertanian
27	Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Hektar	1.018,00	315,00	297,00	Dinas Pangan dan Pertanian
28	Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	19,00	24,00	10,00	Dinas Pangan dan Pertanian
29	Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	Hektar	10,00	15,00	5,00	Dinas Pangan dan Pertanian
30	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	Peserta	15,00	30,00	30,00	Dinas Pangan dan Pertanian



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
31	Peningkatan Luas Tanaman Durian	Hektar	20,00	9,00	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
32	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Hektar	10,00	5,00	4,00	Dinas Pangan dan Pertanian
33	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	80,00	75,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
34	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
35	Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	3,00	3,00	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
36	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	3,00	3,00	3,00	Dinas Pangan dan Pertanian
37	Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Persen	0,11	0,23	0,24	Dinas Pangan dan Pertanian
38	Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
39	Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih	Persen	100,00	100,00	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencatat sejumlah pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek produksi ternak dan pengembangan sektor peternakan di wilayahnya.

Pertama, terjadi peningkatan yang cukup substansial dalam produksi hasil ternak, dari 0,50% pada tahun 2021 menjadi 2,00% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya Dinas dalam meningkatkan produktivitas peternakan di daerah tersebut.

Kedua, terdapat peningkatan dalam jumlah akseptor IB (Inseminasi Buatan) yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peternak akan pentingnya teknologi reproduksi ternak yang modern.



Selanjutnya, jumlah kelahiran sapi potong hasil IB dan kawin alam juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, menandakan efektivitas dari program IB yang diterapkan.

Dalam hal pemasaran, jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak atau lalu lintas ternak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang berkembang di sektor ini.

Selain itu, peningkatan jumlah kelompok usaha peternakan dan jumlah peternak yang terlatih juga mencerminkan adanya upaya Dinas dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan para pelaku usaha peternakan.

Di sisi lain, Dinas Pangan dan Pertanian juga mencatat beberapa pencapaian penting dalam sektor pertanian. Produksi padi dan jagung menunjukkan tren yang relatif stabil, sementara peningkatan luas tanam komoditas perkebunan seperti manggis dan durian menandakan diversifikasi dalam sektor ini.

Peningkatan produksi dan kualitas benih padi bersertifikat serta peningkatan luas tanaman aneka kacang dan umbi mencerminkan fokus Dinas dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian.

Secara keseluruhan, pencapaian yang dicatat oleh Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Pangan dan Pertanian menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan sektor peternakan dan pertanian di wilayahnya.

27. Perdagangan

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.69

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dokumen	20,00	700,00	300,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	Unit	0,00	3,00	3,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	Pelaku Usaha	50,00	150,00	50,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
4	Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta	Pelaku Usaha	0,00	80,00	80,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
5	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	Pelaku Usaha	80,00	80,00	80,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Even	0,00	0,00	2,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah mencatat serangkaian pencapaian yang mengesankan dalam memfasilitasi dan mengembangkan sektor usaha dan perdagangan di wilayah tersebut. Pertama, terjadi peningkatan yang signifikan dalam proses perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan jumlah rekomendasi perizinan dan pendaftaran yang dikeluarkan meningkat drastis dari 20 pada tahun 2021 menjadi 300 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pelayanan administratif.

Selanjutnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian telah berhasil menyediakan dan memelihara tiga unit sarana dan prasarana distribusi perdagangan, yang mencerminkan dukungan infrastruktur yang kuat bagi kegiatan distribusi perdagangan di wilayah tersebut. Meskipun mengalami fluktuasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian berhasil menjaga kendali terhadap harga kebutuhan pokok dan barang penting di berbagai tingkatan pasar, menunjukkan upaya dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan masyarakat.



Selain itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai ekspor dari pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta, mencerminkan potensi dan daya saing produk lokal di pasar global. Dengan menjaga standar produk, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian juga telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lokal. Melalui even dan kegiatan promosi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian berhasil memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Purwakarta, meningkatkan citra dan daya tarik produk lokal di pasaran.

Keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian dalam mengembangkan sektor koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan, dan perindustrian di Kabupaten Purwakarta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

28. Perindustrian

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perindustrian, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70

Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	Orang	240,00	100,00	60,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Desiminsasi	Orang	0,00	160,00	74,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	Buah	9,00	25,00	25,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
4	Jumlah Perda	Buah	0,00	0,00	1,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
5	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	Unit Usaha	20,00	30,00	10,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6	Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Unit Usaha	60,00	80,00	30,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
7	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	Buah	4,00	7,00	5,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan potensi serta daya saing sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah tersebut. Salah satu pencapaian yang mencolok adalah penurunan jumlah pelatihan potensi unggulan dari 240 orang pada tahun 2021 menjadi 60 orang pada tahun 2023. Meskipun demikian, Dinas telah meningkatkan jumlah desiminsasi dari 0 orang pada tahun 2021 menjadi 74 orang pada tahun 2023, menunjukkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam sektor UKM.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian juga berhasil melaksanakan pelatihan pengembangan desain kemasan untuk buah sebanyak 25 kali setiap tahunnya mulai dari tahun 2022, yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Tahun 2023 juga menjadi tahun di mana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan satu peraturan daerah (Perda) yang relevan untuk mendukung perkembangan UKM. Fasilitasi penerbitan IUI Kecil dan Menengah juga menjadi fokus, dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian berhasil memfasilitasi penerbitan 10 unit usaha pada tahun 2023. Pemantauan dan pengawasan terhadap unit usaha UKM juga ditingkatkan, dengan jumlah unit usaha yang dipantau dan diawasi meningkat dari 60 pada tahun 2021 menjadi 80 pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan menjadi 30 pada tahun 2023.



Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk UKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian juga berhasil mengembangkan 5 produk UKM yang telah diverifikasi. Dengan demikian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UKM di wilayah tersebut.

29. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Transmigrasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	0,00	100,00	89,13	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	0,00	100,00	90,79	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase transmigran yang dibina	Persen	0,00	100,00	66,69	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan berbagai program untuk mengelola dan memfasilitasi transmigrasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, persentase kawasan transmigrasi yang ditetapkan masih berada pada 0%, namun pada tahun 2022 berhasil mencapai 100%, menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan dan menetapkan kawasan khusus untuk program transmigrasi. Selanjutnya, pada tahun 2023, persentase ini turun sedikit menjadi 89,13%, namun masih menunjukkan keterlibatan yang signifikan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pengelolaan program transmigrasi.



Sementara itu, persentase transmigran yang diberangkatkan juga menunjukkan tren yang positif, dari 0% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022, dan mencapai 90,79% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kesuksesan dalam melaksanakan program pemerintah untuk mengirimkan penduduk ke kawasan transmigrasi. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga berhasil membina sebagian besar transmigran yang telah diberangkatkan, dengan persentase transmigran yang dibina mencapai 100% pada tahun 2022 dan menurun sedikit menjadi 66,69% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pencapaian ini masih menunjukkan komitmen Dinas dalam memberikan dukungan dan pembinaan kepada transmigran yang telah menempuh perpindahan ke kawasan baru. Dengan demikian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terus berperan aktif dalam mendukung program transmigrasi dan memastikan kesejahteraan para transmigran di Kabupaten Purwakarta.

30. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Produksi Ikan Hasil Tangkapan	Ton	336,80	1.470,00	1.473,70	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	Ekor	954.700,00	100.000,00	650.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	Kelompok	13,00	50,00	50,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	78.590,58	108.715,52	28.055,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	554.013.000,00	1.111.677.788,00	1.117.911.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	6.630.833,00	7.056.667,00	7.300.000,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
7	Produksi Ikan Hias	Ekor	239.090,00	520.100,00	523.700,00	Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
8	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Kelompok	30,00	190,00	132,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
9	Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya	Kecamatan	5,00	17,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	35,81	36,20	28,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
11	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	250,00	320,00	300,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
12	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	11,00	14,00	17,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
13	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	111,00	131,00	120,00	Dinas Perikanan dan Peternakan

Sumber : Laporan Monev 2023 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah mencatat pencapaian yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja sektor perikanan. Produksi ikan hasil tangkapan dari perairan Purwakarta meningkat secara substansial dari 336,80 ton pada tahun 2021 menjadi 1.473,70 ton pada tahun 2023. Selain itu, jumlah ikan yang ditebarkan (restocking) juga meningkat dari 954.700 ekor pada tahun 2021 menjadi 650.000 ekor pada tahun 2023, menunjukkan upaya dalam menjaga keberlanjutan populasi ikan di perairan tersebut.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan sektor perikanan, Dinas berhasil membina sejumlah kelompok perikanan tangkap dan pembudidaya ikan. Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibina meningkat dari 13 kelompok pada tahun 2021 menjadi 50 kelompok pada tahun 2023, sementara jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina mencapai 190 kelompok pada tahun 2022 sebelum kemudian menurun menjadi 132 kelompok pada tahun 2023.

Peningkatan produksi benih ikan, baik jenis UPR maupun BBI, juga menjadi pencapaian penting. Produksi benih ikan UPR meningkat secara dramatis dari 554.013.000 ekor pada tahun 2021 menjadi 1.117.911.000 ekor pada tahun 2023. Begitu juga dengan produksi benih ikan BBI yang



meningkat dari 6.630.833 ekor pada tahun 2021 menjadi 7.300.000 ekor pada tahun 2023.

Selain itu, tercatat peningkatan produksi ikan hias dari 239.090 ekor pada tahun 2021 menjadi 523.700 ekor pada tahun 2023. Produksi olahan produk perikanan juga meningkat dari 250 ton pada tahun 2021 menjadi 300 ton pada tahun 2023, menunjukkan upaya dalam memperluas nilai tambah dan pemasaran produk perikanan.

Dalam mengawasi usaha perikanan, Dinas berhasil meningkatkan wilayah pengawasan dari 5 kecamatan pada tahun 2021 menjadi 17 kecamatan pada tahun 2023. Ini menandakan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan perikanan tangkap dan budidaya di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor perikanan di daerah tersebut.



2.1.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung

31. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan urusan fungsi pendukung pada Sekretariat Daerah, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.73

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,30	3,50	3,50	Sekretariat Daerah
2	Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
3	Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
4	Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
5	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: - Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
6	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: - Perbup	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
7	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: - Kepbup	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
8	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
9	Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	100,00	0,00	Sekretariat Daerah
10	Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	55,00	62,00	62,42	Sekretariat Daerah
11	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	100,00	91,00	Sekretariat Daerah
12	Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
13	Persentase Ketersediaan Dokumen	Persen	50,00	100,00	0,00	Sekretariat Daerah



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Pengembangan Teknologi Informasi					
14	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	94,70	Sekretariat Daerah
15	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
16	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

Sumber : Laporan Monev 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta mencatat serangkaian pencapaian yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja selama beberapa tahun terakhir. Capaian nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) meningkat dari 3,30 poin pada tahun 2021 menjadi 3,50 poin pada tahun 2022 dan 2023, mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kerjasama antardaerah yang sesuai dengan kebutuhan juga mencapai 100% pada setiap tahunnya, menunjukkan komitmen dalam membangun kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitasi naskah kerjasama daerah, kegiatan kemasyarakatan, dan keagamaan, serta bantuan hukum, semuanya mencapai 100%, menandakan upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah dalam memfasilitasi berbagai kegiatan dan layanan publik.

Dalam hal penetapan produk hukum daerah, termasuk Perda, Perbup, dan Kepbup, pencapaian mencapai 100% setiap tahunnya. Namun, terdapat penurunan dalam persentase sosialisasi produk hukum pada tahun 2023, yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk peningkatan efektivitasnya.

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yang signifikan dari 55,00 poin pada tahun 2021 menjadi 62,42 poin pada tahun 2023, mencerminkan upaya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan birokrasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pembangunan



perekonomian daerah menunjukkan penurunan ke 91% pada tahun 2023, yang menjadi fokus perhatian untuk ditingkatkan.

Selain itu, ketersediaan dokumen petunjuk teknis, pengembangan teknologi informasi, dan sertifikasi pegawai dalam pengadaan barang/jasa mencapai 100% pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dalam ketersediaan dokumen pengembangan teknologi informasi dan persentase pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Meskipun begitu, persentase paket pengadaan barang/jasa yang selesai ditenderkan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik tetap mencapai 100% pada semua tahunnya, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

32. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan urusan fungsi pendukung pada Sekretariat DPRD, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.74

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	75,00	100,00	85,02	Sekretariat DPRD
2	Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	75,00	100,00	85,02	Sekretariat DPRD
3	Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	75,00	100,00	85,02	Sekretariat DPRD

Sumber : Laporan Monev 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, 2024

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta mencatat serangkaian pencapaian yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja selama tiga tahun terakhir. Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan meningkat dari 75,00% pada tahun 2021 menjadi 100,00% pada tahun 2022, dan kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 85,02% pada tahun 2023. Hal ini



menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD dalam memastikan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, fasilitasi kegiatan rapat DPRD juga mencapai 100,00% pada tahun 2022, menunjukkan efisiensi dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang diperlukan untuk proses legislasi dan pengambilan keputusan. Persentase penyusunan risalah rapat juga mencapai 100,00% pada tahun yang sama, menunjukkan konsistensi dalam dokumentasi hasil rapat untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023, pencapaian yang tinggi pada dua indikator kunci tersebut menandakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam mendukung proses legislasi dan penyelenggaraan rapat yang efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Upaya untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang tetap menjadi fokus untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.



2.1.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

33. Perencanaan

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Perencanaan, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	%	90,85	95,60	91,38	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	77,24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90,75	89,42	95,11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	85,79	84,47	95,68	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87,47	87,80	83,34	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta mencatat pencapaian yang konsisten dalam beberapa indikator kinerja kunci selama periode tiga tahun terakhir.



Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan tetap optimal, mencapai 100,00% dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan komitmen badan tersebut dalam memastikan kelancaran penyusunan dokumen perencanaan yang memenuhi persyaratan waktu dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat capaian program kinerja daerah juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 90,85% pada tahun 2021 menjadi 95,60% pada tahun 2022, meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 91,38% pada tahun 2023. Meski demikian, pencapaian ini masih menunjukkan komitmen badan dalam mewujudkan program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa penurunan dalam tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah, yang mencapai 77,24% pada tahun 2023, menurun dari 100,00% pada tahun 2021 dan 2022. Begitu pula dengan tingkat kesesuaian capaian program dan kegiatan pembangunan dengan RPJMD dan Renstra OPD dalam berbagai lingkup bidang, seperti bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

Meskipun demikian, upaya untuk terus meningkatkan tingkat ketersediaan data dan informasi serta meningkatkan kesesuaian capaian program dan kegiatan dengan arahan perencanaan strategis daerah tetap menjadi fokus untuk tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tetap berupaya untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendukung pembangunan Kabupaten Purwakarta secara berkelanjutan.

34. Keuangan

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Keuangan, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	90,36	86,67	86,30	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);	%	63,40	48,08	73,67	Badan Pendapatan Daerah
9	Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	5,02	2,05	4,00	Badan Pendapatan Daerah

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta mencatat pencapaian yang sangat baik dalam beberapa indikator kinerja kunci selama tiga tahun terakhir. Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu, persentase ketepatan waktu penyusunan APBD, dan persentase ketepatan waktu penetapan APBD semuanya mencapai 100,00% dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan komitmen badan tersebut dalam memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan serta proses administrasi keuangan daerah.



Meskipun demikian, terdapat sedikit penurunan dalam persentase penyerapan anggaran, yang turun dari 90,36% pada tahun 2021 menjadi 86,30% pada tahun 2023. Namun, penurunan ini masih dalam rentang yang dapat diterima dan mungkin dapat diperbaiki dengan strategi yang tepat.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah juga mencatat pencapaian yang baik dalam beberapa indikator kinerja kunci. Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang signifikan dari 63,40% pada tahun 2021 menjadi 73,67% pada tahun 2023. Meskipun demikian, persentase retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan dari 5,02% pada tahun 2021 menjadi 4,00% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan efisiensi, ketepatan waktu, dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam beberapa indikator, pencapaian secara keseluruhan tetap mengesankan dan menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat.

35. Kepegawaian

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Kepegawaian, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.77

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai	Persen	0,43	5,88	4,46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	Persen	0,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
4	Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	Persen	1,50	4,85	2,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	6,01	4,65	4,62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	5,58	0,27	0,34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	Persen	95,96	97,07	99,63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	72,00	91,33	99,75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	Persen	82,73	84,54	97,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Persentase Data ASN Yang Mutakhir	Persen	92,97	98,48	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	0,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mencatat sejumlah pencapaian dalam beberapa indikator kinerja kunci selama tiga tahun terakhir. Persentase penurunan indisipliner pegawai mengalami peningkatan dari 0,43% pada tahun 2021 menjadi 4,46% pada tahun 2023, menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengurangi tingkat indisipliner di lingkungan kerja.

Selain itu, badan tersebut berhasil mensosialisasikan 100,00% peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menandakan komitmen mereka dalam memastikan pemahaman yang baik tentang regulasi kepegawaian di antara para pegawai.



Persentase ASN yang berprestasi, berinovasi, teladan, dan berdedikasi yang mendapat penghargaan juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun dengan sedikit fluktuasi. Begitu juga dengan persentase pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu, yang meningkat dari 82,73% pada tahun 2021 menjadi 97,69% pada tahun 2023.

Pencapaian lainnya mencakup persentase pengisian pemangku jabatan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang mencapai 99,63% pada tahun 2023, serta persentase penataan ASN sesuai dengan kompetensi yang meningkat pesat dari 72,00% pada tahun 2021 menjadi 99,75% pada tahun 2023.

Selain itu, persentase data ASN yang mutakhir mencapai 100,00% pada tahun 2023, menandakan keberhasilan dalam menjaga keakuratan informasi terkait pegawai. Selanjutnya, integrasi aplikasi kepegawaian mencapai 100,00% pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan teknologi informasi di bidang kepegawaian.

Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pegawai dan efisiensi administrasi kepegawaian untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

36. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Pendidikan dan Pelatihan, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.78

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00	97,46	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
2	Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	0,20	0,99	1,49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	4,98	12,15	11,15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah mencatat pencapaian yang signifikan dalam beberapa indikator kinerja kunci selama tiga tahun terakhir. Persentase calon ASN yang telah mengikuti pelatihan dasar mencapai 100,00% pada tahun 2021 dan 2023, menunjukkan komitmen untuk mempersiapkan calon pegawai dengan baik sebelum mereka memasuki dinas.

Selain itu, persentase ASN yang mengikuti berbagai jenis pelatihan fungsional, teknis, seminar, lokakarya, dan tugas belajar juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, naik dari 0,20% menjadi 1,49%. Hal ini menunjukkan upaya badan tersebut dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai dalam berbagai bidang.

Peningkatan yang sama juga terlihat dalam persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, yang naik dari 4,98% pada tahun 2021 menjadi 11,15% pada tahun 2023. Hal ini menandakan fokus badan tersebut dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial di kalangan ASN.

Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta terus meningkatkan investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dan tugas yang kompleks dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien.



37. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Penelitian dan Pengembangan, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	%	90,68	74,00	90,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	%	84,25	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta mencatat pencapaian yang konsisten dalam beberapa indikator kinerja kunci selama periode tiga tahun terakhir. Persentase penelitian pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan menunjukkan tren positif, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023. Pada tahun 2021, mencapai 90,68%, turun menjadi 74,00% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseriusan badan tersebut dalam menyesuaikan penelitian dengan kebutuhan aktual pembangunan daerah, meskipun menghadapi tantangan pada tahun 2022.

Selain itu, pemanfaatan inovasi berbasis IPTEK dalam pembangunan daerah juga menunjukkan kinerja yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023, tetap berada di sekitar angka 80,00%. Hal ini mencerminkan komitmen badan tersebut dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pembangunan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pembangunan.



Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta terus bekerja secara konsisten untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan bahwa inovasi berbasis IPTEK diterapkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

38. Pengelolaan Perbatasan

Pelaksanaan urusan fungsi penunjang pada Pengelolaan Perbatasan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.80

Capaian Kinerja Urusan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

Sumber : Laporan Monev 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta berhasil mencapai target identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan serta rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan dengan sangat baik selama periode tiga tahun terakhir. Dalam indikator kinerja tersebut, persentase pencapaian stabil pada level 100,00% dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mencerminkan komitmen dan efisiensi dalam pengelolaan data dan dokumentasi terkait dengan wilayah perbatasan serta rupa bumi buatan dan alam di Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah berhasil mengimplementasikan strategi identifikasi dan inventarisasi yang efektif, memastikan bahwa semua wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam di wilayah tersebut terdokumentasikan secara komprehensif. Dengan demikian, upaya ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, serta pemantauan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.



2.1.3.6 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan

39. Pengawasan

Pelaksanaan urusan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan	OPD	47,00	47,00	47,00	Inspektorat
2	Opini Penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	Persen	79,00	50,07	92,00	Inspektorat
4	Capaian SAKIP Kabupaten	Opini	B	BB	B	Inspektorat
5	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level	2,00	2,00	3,00	Inspektorat
6	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	1,00	0,00	0,00	Inspektorat
7	Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen	37,50	100,00	100,00	Inspektorat

Sumber : Laporan Monev 2023 Inspektorat Kabupaten Purwakarta, 2024

Inspektorat Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi serta peningkatan kapabilitas organisasi. Pada tahun 2021 hingga 2023, Inspektorat mencatat sejumlah prestasi yang signifikan.

Pertama, Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan konsistensi, dimana jumlahnya tetap 47 OPD setiap tahunnya, menunjukkan keterlibatan yang menyeluruh dalam pengawasan internal.



Kedua, opini penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purwakarta selalu memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian, Inspektorat berhasil meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, mencapai 92% pada tahun 2023, menunjukkan responsibilitas yang kuat terhadap masalah yang diidentifikasi.

Selanjutnya, dalam hal Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat mencatat peningkatan dari predikat "B" pada tahun 2021 menjadi "BB" pada tahun 2022, menunjukkan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Selain itu, terdapat peningkatan pada level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari level 2 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi level 3 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan dalam kemampuan dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan.

Meskipun demikian, terdapat predikat "Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" yang tidak tercapai pada tahun 2021, 2022, dan 2023, serta persentase SKPD yang mendapatkan nilai di atas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengalami penurunan pada tahun 2022, namun berhasil mencapai 100% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat organisasional.



2.1.3.7 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

40. Kewilayahan

Pelaksanaan urusan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan oleh 47 Kecamatan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Kecamatan Jatiluhur
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100,00	80,00	80,00	Kecamatan Jatiluhur
3	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	41,81	0,00	80,00	Kecamatan Jatiluhur
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	80,00	80,00	Kecamatan Jatiluhur
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	30,05	51,00	51,00	Kecamatan Jatiluhur
6	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Sukasari
7	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	10,00	100,00	0,00	Kecamatan Sukasari
8	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	80,00	100,00	Kecamatan Sukasari
9	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	80,00	75,00	Kecamatan Sukasari
10	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	97,59	80,00	100,00	Kecamatan Sukasari
11	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Kecamatan Maniis
12	Persentase Pemberdayaan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Maniis



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Masyarakat yang Dilaksanakan					
13	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Maniis
14	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	33,33	100,00	100,00	Kecamatan Maniis
15	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	39,74	100,00	0,00	Kecamatan Maniis
16	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Kecamatan Tegalwaru
17	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
18	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
19	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	35,00	75,00	100,00	Kecamatan Tegalwaru
20	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	75,00	Kecamatan Tegalwaru
21	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	0,00	Baik	Baik	Kecamatan Plered
22	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	76,00	94,58	Kecamatan Plered
23	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	86,00	100,00	Kecamatan Plered
24	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	80,00	Kecamatan Plered
25	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	63,59	Kecamatan Plered
26	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Sukatani



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
27	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	60,00	Kecamatan Sukatani
28	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	60,00	Kecamatan Sukatani
29	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	14,30	80,00	80,00	Kecamatan Sukatani
30	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	24,00	51,00	51,00	Kecamatan Sukatani
31	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Kecamatan Darangdan
32	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Darangdan
33	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Darangdan
34	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	90,32	100,00	100,00	Kecamatan Darangdan
35	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	95,72	100,00	100,00	Kecamatan Darangdan
36	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Bojong
37	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	50,00	100,00	Kecamatan Bojong
38	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	50,00	25,00	Kecamatan Bojong
39	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	72,71	0,00	100,00	Kecamatan Bojong
40	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Bojong



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
41	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Wanayasa
42	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	80,00	80,00	81,03	Kecamatan Wanayasa
43	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wanayasa
44	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	80,00	80,00	100,00	Kecamatan Wanayasa
45	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	56,96	61,00	36,12	Kecamatan Wanayasa
46	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	0,00	Baik	Baik	Kecamatan Kiarapedes
47	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	96,55	Kecamatan Kiarapedes
48	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	50,00	Kecamatan Kiarapedes
49	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	97,35	97,00	50,00	Kecamatan Kiarapedes
50	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	92,31	74,00	50,00	Kecamatan Kiarapedes
51	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	0,00	Baik	Baik	Kecamatan Pasawahan
52	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Pasawahan
53	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Pasawahan
54	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Pasawahan
55	Persentase Pembinaan dan	%	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Pasawahan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Pengawasan yang Dilaksanakan					
56	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Pondoksalam
57	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	50,00	Kecamatan Pondoksalam
58	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	95,81	0,00	90,00	Kecamatan Pondoksalam
59	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	81,38	98,71	90,17	Kecamatan Pondoksalam
60	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	93,40	99,01	90,00	Kecamatan Pondoksalam
61	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Sangat baik	Kecamatan Purwakarta
62	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	83,09	57,68	85,01	Kecamatan Purwakarta
63	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	50,06	35,80	1,12	Kecamatan Purwakarta
64	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	36,15	51,80	80,53	Kecamatan Purwakarta
65	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	84,64	0,00	51,00	Kecamatan Purwakarta
66	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Babakan Cikao
67	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	57,58	100,00	75,54	Kecamatan Babakan Cikao
68	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Babakan Cikao
69	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	100,00	87,63	Kecamatan Babakan Cikao



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
70	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	14,76	0,00	99,73	Kecamatan Babakan Cikao
71	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Campaka
72	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	80,00	80,00	Kecamatan Campaka
73	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	80,00	80,00	80,00	Kecamatan Campaka
74	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	80,00	80,00	78,00	Kecamatan Campaka
75	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	51,00	51,00	50,00	Kecamatan Campaka
76	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Cibatuh
77	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	75,00	50,00	Kecamatan Cibatuh
78	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	75,00	50,00	Kecamatan Cibatuh
79	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	50,00	Kecamatan Cibatuh
80	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	50,00	Kecamatan Cibatuh
81	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	Kecamatan Bungursari
82	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	0,00	0,00	100,00	Kecamatan Bungursari
83	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100,00	90,00	50,00	Kecamatan Bungursari
84	Persentase Penyelenggaraan	%	96,00	100,00	100,00	Kecamatan Bungursari



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
	Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan					
85	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	68,00	100,00	100,00	Kecamatan Bungursari

Sumber : Laporan Monev 2023 Kecamatan Kabupaten Purwakarta, 2024

Pada periode 2021 hingga 2023, Kecamatan Jatiluhur mengalami peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat meningkat dari kategori "Baik" pada 2021 dan 2022 menjadi "Sangat Baik" pada 2023. Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan tetap stabil di angka 80% pada 2022 dan 2023 setelah mencapai 100% pada 2021. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum menunjukkan perbaikan signifikan dari 41,81% pada 2021 dan 0% pada 2022 menjadi 80% pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan juga menunjukkan tren positif.

Kecamatan Sukasari menunjukkan variabilitas dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap konsisten pada kategori "Baik" dari 2021 hingga 2023. Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan ke 100% pada 2022, tetapi menurun drastis ke 0% pada 2023. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum juga menunjukkan perbaikan, sementara Pembinaan dan Pengawasan meningkat ke 100% pada 2023.

Kecamatan Maniis mengalami peningkatan dalam Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, mencapai kategori "Sangat Baik" pada 2023. Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan meningkat signifikan ke 100% pada 2023 setelah nol persen pada dua tahun sebelumnya. Namun, penanganan ketertiban umum masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, tetap di 0% selama tiga tahun. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan peningkatan ke 100% pada 2022 dan 2023, tetapi Pembinaan dan Pengawasan menurun tajam pada 2023.

Kecamatan Tegalwaru menunjukkan tren positif dalam Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang mencapai kategori "Sangat Baik"



pada 2023. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan perbaikan signifikan dengan pencapaian 100% pada 2022 dan 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum juga meningkat ke 100% pada 2023, namun Pembinaan dan Pengawasan menurun sedikit dari 100% pada 2022 ke 75% pada 2023.

Kecamatan Plered menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat meningkat dari nol persen pada 2021 menjadi kategori "Baik" pada 2022 dan 2023. Pemberdayaan Masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari 76% pada 2022 ke 94,58% pada 2023. Penanganan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan, sementara Pembinaan dan Pengawasan sedikit menurun pada 2023.

Kecamatan Sukatani menunjukkan tren stabil dalam Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Namun, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum meningkat signifikan pada 2023 setelah nol persen pada dua tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan stabilitas, tetapi Pembinaan dan Pengawasan tetap konstan di 51% pada 2022 dan 2023.

Kecamatan Darangdan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat mencapai kategori "Sangat Baik" pada 2023. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan juga menunjukkan peningkatan ke 100% pada 2022 dan 2023.

Kecamatan Bojong menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023. Namun, Penanganan Ketertiban Umum mengalami penurunan pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023, sementara Pembinaan dan Pengawasan tetap stabil di 100% selama dua tahun terakhir.



Kecamatan Wanayasa menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan stabil. Namun, Penanganan Ketertiban Umum masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan peningkatan ke 100% pada 2023, tetapi Pembinaan dan Pengawasan menurun pada 2023.

Kecamatan Kiarapedes menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat meningkat dari nol persen pada 2021 menjadi kategori "Baik" pada 2022 dan 2023. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan signifikan pada 2023. Namun, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan menunjukkan penurunan pada 2023.

Kecamatan Pasawahan menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat meningkat dari nol persen pada 2021 menjadi kategori "Baik" pada 2022 dan 2023. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan juga menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023.

Kecamatan Pondoksalam menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan ke 50% pada 2023. Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 90% pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan menunjukkan stabilitas di angka yang tinggi pada 2022 dan 2023.

Kecamatan Purwakarta menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat mencapai kategori "Sangat Baik" pada 2023. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang stabil dari 57,68% pada 2022 ke 85,01% pada 2023. Penanganan Ketertiban Umum mengalami penurunan tajam pada 2023, namun Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan



peningkatan signifikan. Pembinaan dan Pengawasan mengalami peningkatan pada 2023 setelah nol persen pada 2022.

Kecamatan Babakan Cikao menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan ke 75,54% pada 2023. Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan peningkatan signifikan ke 87,63% pada 2023, sementara Pembinaan dan Pengawasan juga menunjukkan peningkatan signifikan ke 99,73% pada 2023.

Kecamatan Campaka menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan stabilitas di angka 80% pada 2022 dan 2023. Penanganan Ketertiban Umum juga menunjukkan stabilitas di angka 80% selama tiga tahun. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan sedikit penurunan pada 2023, sementara Pembinaan dan Pengawasan tetap stabil di angka 50% pada 2023.

Kecamatan Cibatu menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan peningkatan pada 2022, namun menurun pada 2023. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan serta Pengawasan menunjukkan peningkatan pada 2023 setelah nol persen pada dua tahun sebelumnya.

Kecamatan Bungursari menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator kinerja. Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tetap dalam kategori "Baik" selama tiga tahun. Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan ke 100% pada 2023. Penanganan Ketertiban Umum menunjukkan penurunan pada 2023, namun Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjukkan stabilitas di angka 100% selama dua tahun terakhir. Pembinaan dan Pengawasan tetap stabil di angka 100% selama tiga tahun.



2.1.3.8 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Umum

41. Pemerintahan Umum

Pelaksanaan urusan fungsi pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat capaian kinerjanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.83

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	
1	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar;	Persen	91,66	68,93	83,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik	Persen	84,98	97,39	96,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes	Persen	74,80	97,39	87,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;	Persen	100,00	92,71	95,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	Persen	100,00	92,71	95,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Persen	90,91	64,45	91,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	90,91	64,45	75,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta	Persen	41,99	86,13	89,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Laporan Monev 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Purwakarta telah mengelola dan mencatat indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek kebangsaan, politik, dan harmoni sosial selama tiga tahun



terakhir. Persentase pembinaan wawasan kebangsaan bagi LSM, guru, dan pelajar mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 91,66% pada tahun 2021 menjadi 68,93% pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 83,48% pada tahun 2023. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik menunjukkan tren yang hampir konsisten dengan peningkatan dari 84,98% pada tahun 2021 menjadi 97,39% pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 96,75% pada tahun 2023. Partisipasi aktif dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkadaes juga mengalami peningkatan signifikan dari 74,80% pada tahun 2021 menjadi 97,39% pada tahun 2022, meskipun turun menjadi 87,00% pada tahun 2023.

Forum masyarakat untuk ketertiban dan keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) yang dibina menunjukkan kinerja stabil dengan sedikit penurunan dari 100% pada tahun 2021 menjadi 92,71% pada tahun 2022, dan kemudian naik kembali menjadi 95% pada tahun 2023. Pembinaan forum penanganan keamanan daerah juga menunjukkan pola serupa. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat mengalami penurunan dari 90,91% pada tahun 2021 menjadi 64,45% pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 91% pada tahun 2023. Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama juga menurun dari 90,91% pada tahun 2021 menjadi 64,45% pada tahun 2022, sebelum meningkat menjadi 75% pada tahun 2023. Yang paling signifikan adalah penurunan konflik sosial di Purwakarta, yang meningkat dari 41,99% pada tahun 2021 menjadi 86,13% pada tahun 2022, dan kemudian naik lagi menjadi 89,81% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya kuat dan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kesadaran kebangsaan, partisipasi politik, harmoni antarumat beragama, dan mengurangi konflik sosial di Purwakarta selama tiga tahun terakhir.



2.1.3.9 Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jenis Pelayanan Dasar SPM terdiri dari Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib Pemerintahan antara lain Urusan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pelayanan Dasar SPM untuk memberikan jaminan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar, dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, dan kualitas pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar kualitas mutu yang telah ditetapkan dan berkelanjutan.

Penerapan SPM di Kabupaten Purwakarta tahun 2023 sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat beberapa indikator capaian SPM yang harus di dorong dan didukung baik dari aspek anggaran maupun SDM pelaksananya. Adapun Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 2.84

Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN	CAPAIAN SPM (%)
1	PENDIDIKAN	89,47
2	KESEHATAN	94,55
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100
5	TRANTIBUMLINMAS	99,77
6	SOSIAL	100
	KABUPATEN PURWAKARTA	97,3

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>



Kabupaten Purwakarta menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengesankan dalam berbagai bidang urusan. Bidang Pendidikan mencapai 89,47%, sementara bidang Kesehatan mencatat capaian sebesar 94,55%. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman keduanya berhasil mencapai 100%. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) mencatat capaian sebesar 99,77%, dan bidang Sosial juga mencapai 100%.

Secara keseluruhan, capaian SPM Kabupaten Purwakarta mencapai rata-rata 97,3%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memenuhi standar pelayanan minimal di berbagai sektor penting.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal baik level internasional, nasional maupun regional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Posisi daya saing global Indonesia yang terus menurun menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang untuk bangkit dan mampu berperan strategis dipercaturan ekonomi internasional. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi dan globalisasi saat ini.



Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, propinsi, nasional atau internasional. Kondisi daya saing yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang menarik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai pembangkit listrik besar pemasok Jawa Bali.
- b) Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional – internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta.
- c) Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.
- d) Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat di tanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.
- e) Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung

peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

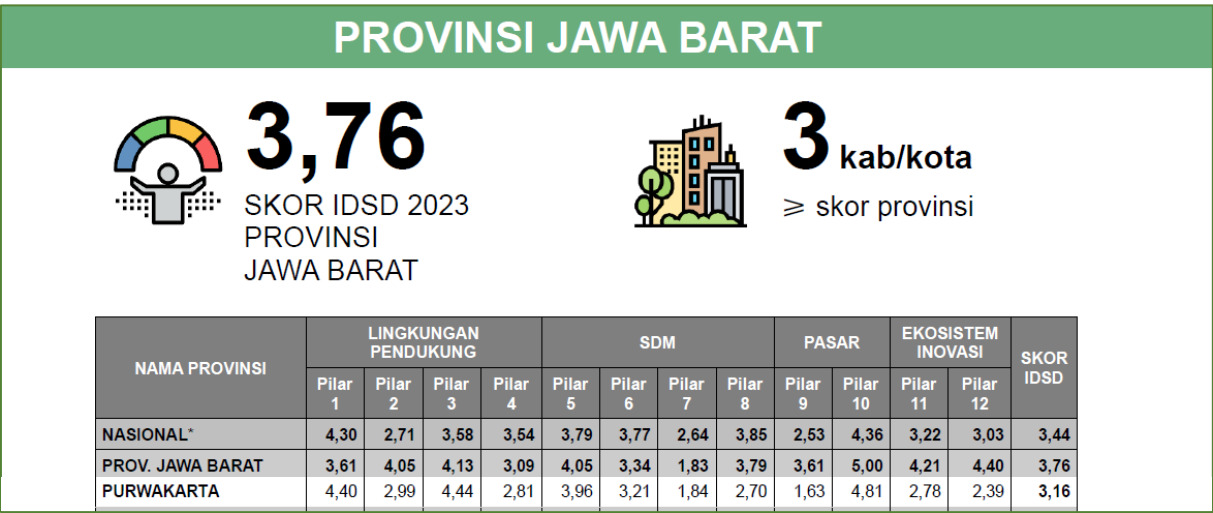
- f) Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi dengan sektor pembangunan daerah lainnya.

Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 4 komponen yakni Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar dan Ekosistem Inovasi.

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, Informasi Indeks Data Saing Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 memperoleh Score/Nilai Indeks sebesar **3,16** poin sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.5

Skor Indeks Daya Saing Daerah 2023



Sumber : Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), 2023



2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing kemampuan ekonomi daerah merupakan kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk bersaing secara efektif dalam pasar global atau regional. Ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kebijakan pemerintah yang kondusif mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kebijakan yang mendukung investasi, mendorong inovasi, mempromosikan kewirausahaan, serta memperbaiki iklim bisnis akan menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk beroperasi dan berinvestasi.

Selain itu, daya saing ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan dan integrasi daerah tersebut dalam pasar global. Daerah yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global, memanfaatkan peluang perdagangan internasional, dan mengintegrasikan diri dalam rantai pasok global, akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekspor.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85

Capaian Kinerja terkait Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
2	Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB	Ribu Rp.	71.580	67.349	70.152	74.745	79.194
3	Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010	Ribu Rp.	48.924	45.549	46.426	48.176	49.891
4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rp	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619
5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	12,00	11,68	11,37	11,10	10,94
6	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	69,76	74,49	80,24	91,83

Sumber : BPS Kab. Purwakarta; Laporan monev triwulan 4, 2023



Laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur dalam persentase, mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Setelah mencapai 4,37% pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 (-2,13%) yang kemudian pulih pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada 5,24% pada tahun 2022 sebelum sedikit melandai menjadi 4,97% pada tahun 2023. Ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19, diikuti oleh pemulihan dan pertumbuhan yang kembali di tahun-tahun berikutnya.

Kemudian Pendapatan per kapita, baik dalam PDRB ADHB maupun PDRB ADHK 2010 (dalam ribu Rupiah), menunjukkan tren yang berbeda. Pendapatan per kapita PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, sementara pendapatan per kapita PDRB ADHK 2010 mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Selanjutnya pengeluaran per kapita disesuaikan juga mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan konsumsi yang lebih tinggi oleh penduduk.

Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang konsisten selama periode tersebut, mencerminkan pergeseran dalam struktur ekonomi atau performa relatif sektor perdagangan dalam ekonomi di Kab. Purwakarta. Namun demikian, nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan kepercayaan investor dalam pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi di Kab. Purwakarta.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing fasilitas infrastruktur wilayah adalah ukuran kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, produktivitas, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakatnya. Fasilitas infrastruktur mencakup berbagai aspek seperti transportasi, energi, komunikasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya yang membentuk kerangka dasar untuk aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Salah satu faktor kunci dalam daya saing fasilitas infrastruktur wilayah adalah aksesibilitas. Infrastruktur yang mudah diakses dan efisien membantu masyarakat dan bisnis untuk bergerak dengan lancar dari satu tempat ke tempat lain, menghubungkan pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jaringan transportasi yang baik menjadi tulang punggung mobilitas yang lancar dan efektif.

Selain itu, kualitas infrastruktur juga memainkan peran penting dalam daya saing wilayah. Infrastruktur yang berkualitas, terawat dengan baik, dan ramah lingkungan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, serta menarik investasi dan bisnis baru ke wilayah tersebut. Infrastruktur yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tahan bencana membantu melindungi lingkungan alam, memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekarang dan di masa depan.

Selanjutnya, kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing infrastruktur wilayah. Kolaborasi yang kuat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur akan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan baik, sambil memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya infrastruktur.

Secara keseluruhan, infrastruktur yang kuat dan berkualitas merupakan fondasi yang penting dalam memperkuat daya saing suatu wilayah. Dengan investasi yang tepat dan pendekatan yang holistik, sebuah wilayah dapat membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung



pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, produktivitas yang tinggi, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fasilitas infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.86

Capaian Kinerja terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Persen	85,63	87,88	83,25	84,93	81,49
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71	64,41	61,07	64,28	58,41
3	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	85,4	34,82	35,06	85,21	78,54
4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	16	16	80,00	32	42,10
5	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	34	34	77,00	70,3	75,73
6	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan	Persen	18,52	18,52	18,52	10,45	13,33

Sumber : Laporan movev triwuan 4, 2023

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut, dengan peningkatan dari 85,63% pada tahun 2019 menjadi 87,88% pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun mengalami fluktuasi, tingkat tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten berada dalam kondisi yang baik.

Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2022 dan 2023 ada penurunan capaian dari 64,28 poin menjadi 58,41 poin, penurunan ini dikarenakan dalam perhitungannya menggunakan metode baru sehingga mempengaruhi pada capaian tahun sebelumnya. Selanjutnya persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut, dengan penurunan drastis dari 85,4% pada tahun 2019 menjadi 34,82% pada tahun 2020, kemudian meningkat



sedikit pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi yang perlu diatasi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing iklim berinvestasi merujuk pada kondisi ekonomi dan regulasi yang memengaruhi ketertarikan dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara atau wilayah. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor kunci dalam daya saing iklim berinvestasi adalah stabilitas politik dan keamanan hukum. Negara atau wilayah yang memiliki pemerintahan yang stabil, sistem hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan hukum yang kuat untuk hak milik dan kontrak investasi, cenderung lebih menarik bagi investor. Keamanan politik dan kepastian hukum menciptakan kepercayaan dan stabilitas yang diperlukan bagi investor untuk membuat keputusan investasi jangka panjang.

Kebijakan ekonomi yang terbuka dan ramah investor juga penting dalam meningkatkan daya saing iklim berinvestasi. Kebijakan yang mendukung liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan pengurangan birokrasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersaing, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien, serta memperluas akses pasar bagi produk dan jasa mereka. Selain itu, kebijakan insentif fiskal dan investasi, seperti pemotongan pajak dan insentif investasi, juga dapat membantu menarik investasi baru dan meningkatkan daya saing iklim berinvestasi.

Kemudian, infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing iklim berinvestasi. Infrastruktur yang baik, termasuk transportasi, energi, komunikasi, dan fasilitas publik lainnya, tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya produksi bagi perusahaan. Investasi dalam infrastruktur yang modern dan inovatif dapat meningkatkan daya tarik suatu wilayah bagi investor.

Akses terhadap pasar yang luas dan diversifikasi ekonomi juga memengaruhi daya saing iklim berinvestasi. Negara atau wilayah yang memiliki akses terhadap pasar regional atau global, serta sektor ekonomi yang beragam dan berkembang, cenderung lebih menarik bagi investor



karena menawarkan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang.

Faktor sosial dan lingkungan juga dapat memengaruhi daya saing iklim berinvestasi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi bisnis. Selain itu, kesadaran lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga dapat meningkatkan daya tarik suatu wilayah bagi investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan.

Secara keseluruhan, daya saing iklim berinvestasi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menerapkan kebijakan yang tepat, sebuah negara atau wilayah dapat meningkatkan daya tariknya bagi investor, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan iklim investasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.87

Capaian Kinerja terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	62,7	69,76	74,49	80,24	91,83
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	68,5	70,52	72,71	74,45	76,02
3	Status Indeks Desa Membangun	Status	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju

Sumber : Laporan movev triwuan 4, 2023

Nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nilai investasi meningkat dari 62,7 triliun pada tahun 2019 menjadi 91,83 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap potensi ekonomi di Kab. Purwakarta.



Kemudian indeks kerukunan umat beragama mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2022, naik dari 68,5 poin menjadi 74,45 poin. Kemudian di tahun 2023 kembali naik menjadi 76,02 poin, peningkatan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat hubungan antaragama dan mempromosikan toleransi dalam masyarakat.

Selanjutnya status indeks desa membangun menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Desa-desa dalam wilayah tersebut berkembang dari status "berkembang" pada tahun 2019 dan 2020 menjadi "maju" pada tahun 2021 hingga 2023. Ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merujuk pada kemampuan individu, kelompok, atau populasi suatu negara atau wilayah dalam bersaing dan beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berkembang. Ini mencakup berbagai aspek keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas yang memengaruhi kemampuan tenaga kerja untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Pendidikan yang berkualitas merupakan landasan utama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Sistem pendidikan yang efektif harus mampu menyediakan akses yang luas terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

Selain pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan keterampilan juga penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Ini meliputi pelatihan teknis dan vokasional untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pelatihan soft skills seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim.

Kesehatan dan kesejahteraan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Tenaga kerja yang sehat cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam sistem kesehatan yang berkualitas dan akses yang luas terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selanjutnya, faktor-faktor seperti mobilitas tenaga kerja, fleksibilitas pasar kerja, dan kebijakan imigrasi juga memengaruhi daya saing sumber daya manusia. Sistem yang mendukung mobilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong keragaman dalam keahlian dan pengalaman dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif bagi tenaga kerja.

Selain itu, inovasi dan teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Mendorong inovasi dalam



pendidikan dan pelatihan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan, dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi yang cepat.

Secara keseluruhan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya yang holistik dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, sebuah negara atau wilayah dapat memperkuat posisinya dalam pasar kerja global dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.88

Capaian Kinerja terkait Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,11	12,12	12,13	12,18
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	73,92	74,11	74,40	74,67
5	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rp	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,7	8,75	7,72
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	45	60,06	60,06	64,41	74,10
9	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta	Predikat	B	B	B	B	B
10	Nilai SPBE	Poin	n/a	n/a	2,78	2,28	2,99
11	Indeks Profesionalitas ASN	Sebutan/ Poin	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (53,43)	Sangat Rendah (54,22)	Sangat Rendah (55,68)	Tinggi (87,77)

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023, Bappelitbangda 2023



Indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023, naik dari 70,67 poin menjadi 73,43 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan yang terbatas dari tahun ke tahun, menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Angka harapan hidup juga mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan peningkatan yang bertahap dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, menandakan perbaikan dalam lapangan kerja dan ekonomi wilayah tersebut. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di Kab. Purwakarta terus berkembang.

Kemudian indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Purwakarta mempertahankan predikat "B" sepanjang periode tersebut, menunjukkan konsistensi dalam kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi standar akuntabilitas kinerja. Sedangkan nilai SPBE (Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik) menunjukkan peningkatan yang bertahap dari tahun 2021 hingga 2023, mencerminkan kemajuan dalam implementasi dan pemantauan penerapan SPBE. Kemudian indeks profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan signifikan dari tingkat sangat rendah pada tahun 2019 hingga mencapai tingkat tinggi pada tahun 2023, menandakan peningkatan standar dan profesionalisme ASN.



2.1.5 Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purwakarta tahun 2018-2023

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Visi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” yang dilaksanakan dengan 5 misi, 7 tujuan, 18 sasaran dan 49 indikator. Capaian kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut telah menunjukkan hasil yang positif walau masih ada beberapa indikator kinerja yang masih belum optimal dalam pencapaiannya dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020-2021, namun demikian Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya agar kinerja pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian realisasi kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.89

Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Tujuan		Sasaran		Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10			
VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA														
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial														
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya				Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43	103,42	MELAMPAUI		
				1.1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13	100,57	MELAMPAUI
						2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,13	12,18	97,23	SANGAT TINGGI
						3	Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan (%)	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	96,67	SANGAT TINGGI
						4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	68,50	70,52	72,71	74,45	76,02	98,96	SANGAT TINGGI
		5	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,35	1,54	1,82	1,69	1,41	172,03	MELAMPAUI				
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	25,00	25,00	35,00	35,00	44,00	88,65	TINGGI		
	1.1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,80	73,92	74,11	74,40	74,67	104,14	MELAMPAUI			
1.2	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				1	Angka Kemiskinan (%)	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46	94,61	SANGAT TINGGI	
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72	103,61	MELAMPAUI		
		1.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan (%)	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46	94,61	SANGAT TINGGI		
		1.2.2		Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37	134,12	MELAMPAUI	
					2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72	103,61	MELAMPAUI	



Tujuan		Sasaran		Indikator		2019	2020	2021	2022	2023	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
		1.2.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	87,19	86,56	86,70	86,94	87,08	97,36	SANGAT TINGGI
				2	Indeks Perberdayaan Gender (IDG) (poin)	74,39	73,94	76,88	76,80	77,15	100,47	MELAMPAUI
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional												
2.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif				Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	45,00	60,06	60,06	64,41	74,1	114,58	MELAMPAUI
		2.1.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	45,00	60,06	60,06	64,41	74,1	114,58	MELAMPAUI
				2	Nilai SAKIP Kab. Purwakarta (predikat)	B	B	B	B	B	77,78	TINGGI
				3	Nilai LPPD Kab. Purwakarta (poin)	35,00	35,00	35,00	2,48	3,09	98,72	SANGAT TINGGI
		2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat)	B	B	B	B	A	100,00	SANGAT TINGGI
				2	Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%)	100,00	99,70	98,00	70,00	100	93,54	SANGAT TINGGI
2.2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas			1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	37,50	SANGAT RENDAH
		2.2.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	37,50	SANGAT RENDAH
		2.2.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	Sangat Rendah (50)	Sangat Rendah (53,43)	Sangat Rendah (54,22)	Sangat Rendah (55,68)	Tinggi (87,77)	125,39	MELAMPAUI



Tujuan		Sasaran		Indikator		2019	2020	2021	2022	2023	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan												
3.1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup			1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	85,63	87,88	83,25	84,93	81,49	96,58	SANGAT TINGGI
				2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	71,00	64,41	61,07	64,28	58,41	88,89	TINGGI
		3.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	85,63	87,88	83,25	84,93	81,49	96,58	SANGAT TINGGI
				2	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	85,40	34,82	35,06	85,21	78,54	74,47	SEDANG
				3	Cakupan Layanan Persampahan (%)	52,00	52,00	52,00	52,00	52	89,66	TINGGI
				4	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%)	16,00	16,00	80,00	32,00	42,1	139,92	MELAMPAUI
				5	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	34,00	34,00	77,00	70,3	75,73	104,84	MELAMPAUI
		3.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	71,00	64,41	61,07	64,28	58,41	88,89	TINGGI
				2	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%)	18,52	18,52	18,52	10,45	13,33	107,10	MELAMPAUI
3.2	Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan			1	Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%)	3,50	7,71	6,36	6,36	5,61	131,27	MELAMPAUI
		3.2.1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.942.213,00	97.421,00	783.171,00	783.171,00	2.389.250	52,16	RENDAH
Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa												
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97	84,64	TINGGI
				2	Indeks Gini (Poin)	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372	101,330	MELAMPAUI
				3	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	11.819.000,00	11.614.000,00	11.669.000,00	12.193.000,00	12.619.000	96,29	SANGAT TINGGI
				4	Inflasi (%)	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22	112,64	MELAMPAUI

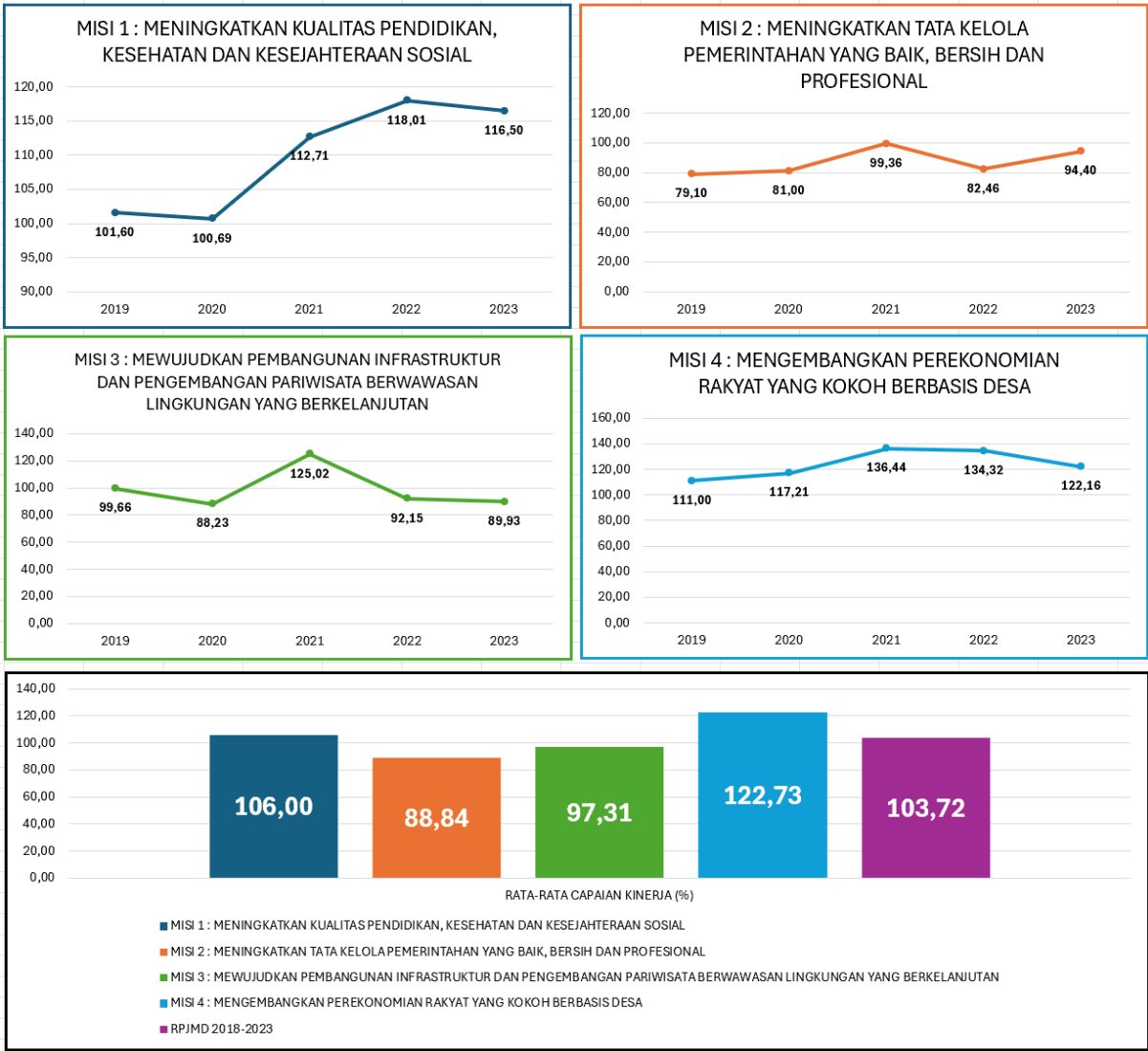


Tujuan		Sasaran		Indikator		2019	2020	2021	2022	2023	Tingkat Capaian	Predikat Kinerja
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10
		4.1.1	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	1	Laju UMKM Yang Dibina (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	SANGAT TINGGI
				2	Laju Koperasi Aktif (%)	80,00	80,00	90,00	90,00	100	97,78	SANGAT TINGGI
		4.1.2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	1	Laju Pertumbuhan IKM (%)	55,00	70,00	75,00	75,00	75	107,69	MELAMPAUI
				2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	12,00	11,68	11,37	11,10	10,94	236,10	MELAMPAUI
		4.1.3	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	62,70	69,76	74,49	82,83	97,72	112,32	MELAMPAUI
		4.1.4	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1	Skor Pola pangan Harapan (poin)	88,55	85,10	78,30	89,20	89,5	94,80	SANGAT TINGGI
				2	Laju Produksi Pertanian (%)	1,22	2,97	4,9	4,90	4,55	317,47	MELAMPAUI
				3	Laju Produksi Peternakan (%)	3,00	0,24	3,13	3,13	2,65	110,45	MELAMPAUI
				4	Laju Produksi Perikanan (%)	14,00	16,48	2,27	2,27	-13	31,46	SANGAT RENDAH
		4.1.5	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Status Indeks Desa Membangun (status)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Maju	115,28	MELAMPAUI
		TINGKAT RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										

Sumber : data diolah Bappelitbangda, 2024



Gambar 2.6
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023



Sumber : data diolah Bappelitbangda, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tercapai 103,72% atau dengan predikat “Melampaui”. Capaian Visi RPJMD “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” ini diperoleh dari keberhasilan pencapaian realisasi kinerja pada pelaksanaan semua Misi. Adapun capaian Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, tercapai 106,00%, kemudian Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional, tercapai 88,84%, selanjutnya Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan, tercapai 97,31%, dan Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa, tercapai 122,73%.



Pencapaian kinerja pembangunan ini merupakan hasil nyata dari komitmen dan kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta. Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta telah menghasilkan transformasi signifikan dalam berbagai bidang. Keberhasilan ini tentunya menjadi landasan kuat untuk terus merumuskan rencana pembangunan daerah yang lebih baik dan berdampak luas serta dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan semangat kebersamaan untuk membangun Purwakarta, kiranya kita harus terus bergerak maju, berinovasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Purwakarta yang lebih baik, sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD/RPD

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan I, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sudah menunjukkan progres pencapaian target tahunan yang telah direncanakan, namun demikian masih ada beberapa kegiatan, subkegiatan yang belum dilaksanakan, karena masih dalam proses persiapan bahan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2.90
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Purwakarta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH								7.587.169.601.302		2.489.589.282.385		2.709.858.394.270		293.030.861.155	28,99	10,81		293.030.861.155	27,91	3,86	Kabupaten Purwakarta	SANGAT RENDAH	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.320.769.162.811		1.417.701.946.305		1.489.293.410.418		193.142.698.081	52,12	12,97		193.142.698.081	49,96	48,89				
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						786.770.791.794		258.262.780.723		284.919.347.645		38.732.529.842	19,11	13,59		38.732.529.842	19,39	22,82				
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						81.201.486.570		26.612.259.969		30.541.475.063		3.152.937.074	29,44	10,32		3.152.937.074	24,53	8,30				
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						469.911.949.198		154.252.453.363		165.619.559.078		7.850.670.905	30,74	4,74		7.850.670.905	30,74	3,36				
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.564.966.937.861		513.455.392.170		570.561.543.411		32.746.823.443	35,25	5,74		32.746.823.443	33,77	21,23				
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						91.804.752.174		30.124.030.316		31.335.945.006		316.266.000	25,09	1,01		316.266.000	25,09	1,04				
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						239.754.559.428		78.671.021.316		86.008.136.215		16.131.308.783	24,91	18,76		16.131.308.783	24,54	67,70				
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						31.989.961.466		10.509.398.223		51.578.977.434		957.627.027	15,23	1,86		957.627.027	15,23	1,42				
1.01.0.00.0.00.01.00.00	DINAS PENDIDIKAN						2.069.779.867.233		679.159.956.234		714.756.181.859		92.936.066.996	86,73	3,28		92.936.066.996	83,30	1,10	Dinas Pendidikan	TINGGI		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.069.779.867.233		679.159.956.234		714.756.181.859		92.936.066.996	86,73	3,28		92.936.066.996	83,30	1,10	Dinas Pendidikan			
1.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.451.273.384.163		478.193.521.597		482.984.573.659		91.071.896.996		18,86		91.071.896.996		6,28	Dinas Pendidikan			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
1.01.02	Program : Pengelolaan Pendidikan						615.476.183.170		199.986.134.737		230.819.038.200		1.864.170.000		0,81		1.864.170.000		0,30	Dinas Pendidikan			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			Persen	77,20		74,29		74,29		60,42		81,33		60,42		78,26		Dinas Pendidikan	TINGGI	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			Persen	99,90		99,50		99,50		99,61		100,11		99,61		99,71		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			Persen	94,73		94,33		94,33		84,27		89,34		84,27		88,96		Dinas Pendidikan	TINGGI	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			Persen	0,56		0,54		0,54		12,02		4,49		12,02		4,66		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
			Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			Persen	100,00		100,00		100,00		99,37		99,37		99,37		99,37		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
			Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			Persen	0,48		0,50		0,50		12,02		4,16		12,02		3,99		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			Persen	1,82		1,75		1,75		2,25		128,57		2,25		123,63		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100,00		100,00		100,00		60,42		60,42		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDAH	
					Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100,00		100,00		100,00		60,42		60,42		60,42		60,42		Dinas Pendidikan	RENDAH	
					Angka partisipasi kasar	Persen	25,30		24,30		24,30		60,42		248,64		60,42		238,81		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka Partisipasi Murni	Persen	23,70		22,80		22,80		60,42		265,00		60,42		254,94		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,63		99,61		99,61		99,61		100,00		99,61		99,98		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	84,20		84,00		84,00		84,27		100,32		84,27		100,08		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,70		99,50		99,50		99,61		100,11		99,61		99,91		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,50		94,30		94,30		84,27		89,36		84,27		89,17		Dinas Pendidikan	TINGGI	
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,30		0,50		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,50		5,70		5,70		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH	
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	25,15		24,19		24,19		24,19		100,00		24,19		96,18		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	50,38		44,88		44,88		44,88		100,00		44,88		89,08		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,57		41,55		41,55		41,55		100,00		41,55		99,95		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00		100,00		100,00		98,13		98,13		98,13		98,13		Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI	
					Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,24		59,10		59,10		60,42		102,24		60,42		102,00		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,10		98,86		98,86		99,61		100,76		99,61		100,51		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	8,48		7,93		7,93		12,02		151,58		12,02		141,75		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,26		52,54		52,54		79,15		150,65		79,15		148,62		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	41,51		40,77		40,77		73,34		179,87		73,34		176,67		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	
					Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	61,19		60,83		60,83		70,98		116,70		70,98		116,00		Dinas Pendidikan	MELAMPAUI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Erata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,41	53,33	53,33	67,78	127,09	67,78	126,90	Dinas Pendidikan	MELAMPAUI									
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	43,87	43,50	43,50	40,67	93,49	40,67	92,72	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI									
				Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	33,05	21,63	21,63	67,10	310,25	67,10	203,01	Dinas Pendidikan	MELAMPAUI									
				Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	82,95	81,68	81,68	78,59	96,22	78,59	94,75	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI									
				Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	82,56	79,27	79,27	74,57	94,07	74,57	90,32	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI									
				Indeks Inklusivitas SD	nilai	76,59	75,66	75,66	59,99	79,29	59,99	78,33	Dinas Pendidikan	TINGGI									
				Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	78,59	78,41	78,41	71,76	91,52	71,76	91,31	Dinas Pendidikan	SANGAT TINGGI									
				Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	71,46	69,95	69,95	73,15	104,57	73,15	102,36	Dinas Pendidikan	MELAMPAUI									
				Indeks Inklusivitas SMP	nilai	71,31	70,31	70,31	57,43	81,69	57,43	80,54	Dinas Pendidikan	TINGGI									
1.01.03	Program : Pengembangan Kurikulum						1.180.300.000	380.300.000	346.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan								
				Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
				Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
1.01.04	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						600.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan									
				Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	38,97	38,77	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	42,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,18	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
1.01.05	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan						599.999.900	199.999.900	99.320.000	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan									
				Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
				Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
1.01.06	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra						650.000.000	200.000.000	307.250.000	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan									
				Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	SANGAT RENDAH									
1.02.0.00.0.00.01.00.00	DINAS KESEHATAN						631.252.510.827	207.133.828.294	237.686.073.189	20.506.580.983	42,70	8,12	20.506.580.983	36,72	2,70	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH						
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						631.252.510.827	207.133.828.294	237.686.073.189	20.506.580.983	42,70	8,12	20.506.580.983	36,72	2,70	Dinas Kesehatan							
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						325.328.371.353	106.523.567.079	109.544.610.449	17.191.919.829	15,69	17.191.919.829	5,28	Dinas Kesehatan									
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH									
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						262.216.111.994	86.109.252.055	114.025.181.740	70.327.655	0,06	70.327.655	0,03	Dinas Kesehatan									



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	65,00		50,00		50,00		100,00		200,00		100,00		153,85		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00		100,00		100,00		14,85		14,85		14,85		14,85		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00		100,00		100,00		13,98		13,98		13,98		13,98		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00		100,00		100,00		14,92		14,92		14,92		14,92		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		12,75		12,75		12,75		12,75		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		60,89		60,89		60,89		60,89		Dinas Kesehatan	RENDAH		
				Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		16,13		16,13		16,13		16,13		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		13,00		13,00		13,00		13,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		80,00		80,00		14,34		17,93		14,34		14,34		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		12,03		12,03		12,03		12,03		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		41,31		41,31		41,31		41,31		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00		95,00		95,00		17,46		18,38		17,46		17,46		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00		80,00		80,00		16,00		20,00		16,00		16,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		14,85		14,85		14,85		14,85		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		13,98		13,98		13,98		13,98		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		14,92		14,92		14,92		14,92		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		12,75		12,75		12,75		12,75		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		60,89		60,89		60,89		60,89		Dinas Kesehatan	RENDAH		
				Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		16,13		16,13		16,13		16,13		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		13,00		13,00		13,00		13,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		14,34		14,34		14,34		14,34		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		12,03		12,03		12,03		12,03		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		
				Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00		100,00		100,00		41,31		41,31		41,31		41,31		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persen	100,00		95,00		95,00		17,45		18,37		17,45		17,45		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persen	100,00		80,00		80,00		4,00		5,00		4,00		4,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Rasio posyandu per satuan balita		Poin	17,86		17,34		17,34		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		Persen	100,00		100,00		100,00		15,31		15,31		15,31		15,31		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		Persen	100,00		100,00		100,00		14,25		14,25		14,25		14,25		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		Persen	100,00		100,00		100,00		15,20		15,20		15,20		15,20		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		Persen	100,00		100,00		100,00		15,60		15,60		15,60		15,60		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani		Persen	90,00		70,00		70,00		13,72		19,60		13,72		15,24		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		Persen	100,00		90,00		90,00		53,96		59,96		53,96		53,96		Dinas Kesehatan	RENDAH	
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Poin	171,39		245,65		245,65		104,00		42,34		104,00		60,68		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		Poin	1,94		2,58		2,58		2,00		129,00		2,00		97,00		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		Persen	100,00		90,00		90,00		17,46		19,40		17,46		17,46		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		Persen	95,00		90,00		90,00		7,83		8,70		7,83		8,24		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		Persen	100,00		100,00		100,00		95,86		95,86		95,86		95,86		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
				Penderita diare yang ditangani		Persen	100,00		85,00		85,00		17,47		20,55		17,47		17,47		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		Rasio	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		Persen	100,00		80,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan kunjungan bayi		Persen	100,00		100,00		100,00		16,29		16,29		16,29		16,29		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan puskesmas		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan pelayanan nifas		Persen	100,00		100,00		100,00		14,10		14,10		14,10		14,10		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		Persen	100,00		100,00		100,00		11,09		11,09		11,09		11,09		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100,00		100,00		100,00		11,82		11,82		11,82		11,82		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							39.603.027.480		13.201.009.160		13.064.577.000		3.244.333.499		24,83		3.244.333.499		8,19	Dinas Kesehatan		
					Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	40,00		30,00		30,00		75,00		250,00		75,00		187,50		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
					Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	40,00		30,00		30,00		61,90		206,33		61,90		154,75		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
					Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	40,00		30,00		30,00		27,95		93,17		27,95		69,88		Dinas Kesehatan	SANGAT TINGGI	
					Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	40,00		30,00		30,00		73,16		243,87		73,16		182,90		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
					Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		45,00		150,00		45,00		112,50		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	40,00		30,00		30,00		34,90		116,33		34,90		87,25		Dinas Kesehatan	MELAMPAUI	
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman							2.045.000.000		620.000.000		590.444.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kesehatan		
					Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,15		25,15		25,15		25,15		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
					Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	85,00		80,00		80,00		25,15		31,44		25,15		29,59		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							2.060.000.000		680.000.000		461.260.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kesehatan		
					Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	10,00		6,00		6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
					Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	100,00		89,00		89,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kesehatan	SANGAT RENDAH	
1.02.0.00.0.00.02.00.00	RSUD BAYU ASIH							638.080.963.468		209.374.458.648		204.061.620.297		58.723.569.491	73,60	7,41		58.723.569.491	70,20	2,48	RSUD Bayu Asih	SEDANG	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							638.080.963.468		209.374.458.648		204.061.620.297		58.723.569.491	73,60	7,41		58.723.569.491	70,20	2,48	RSUD Bayu Asih		
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							592.030.963.468		194.749.458.648		198.223.608.453		58.723.569.491		29,62		58.723.569.491		9,92	RSUD Bayu Asih		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH	
					Rasio Keuangan BLUD	Skor	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		100,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
					Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD	Persen	100,00		100,00		100,00		27,55		27,55		27,55		27,55		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH	
					Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	80,00		80,00		80,00		100,00		125,00		100,00		125,00		RSUD Bayu Asih	MELAMPAUI	
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							42.400.000.000		13.500.000.000		5.838.011.844		0		0,00		0		0,00	RSUD Bayu Asih		
					Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
					Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
					Capaian Indikator Medik	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
				Pengendalian Mutu	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
				Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
				Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
				Temuan Yang di Tindaklanjuti	Persen	85,00		80,00		80,00		100,00		125,00		100,00		117,65		RSUD Bayu Asih	MELAMPAUI	
				Tingkat Keandalan Sumber Daya	Persen	85,00		80,00		80,00		80,00		100,00		80,00		94,12		RSUD Bayu Asih	SANGAT TINGGI	
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						2.150.000.000		625.000.000		0		0		0,00		0		0,00	RSUD Bayu Asih		
				Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	80,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH	
				Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	80,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH	
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						1.500.000.000		500.000.000		0		0		0,00		0		0,00	RSUD Bayu Asih		
				Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	75,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		RSUD Bayu Asih	SANGAT RENDAH	
1.03.2.10.00.02.00.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						600.145.115.461		196.926.512.236		175.965.176.236		3.284.700.537	72,81	1,28		3.284.700.537	72,90	0,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SEDANG	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						581.245.115.461		190.626.512.236		175.965.176.236		3.284.700.537	72,81	1,28		3.284.700.537	72,90	0,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
1.03.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						127.513.091.003		42.437.697.001		32.177.069.737		3.284.700.537		10,21		3.284.700.537		2,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						59.400.000.000		19.730.000.000		24.747.103.300		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,60		37,60		37,60		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	84,71		84,71		84,71		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						16.710.000.000		5.570.000.000		2.657.896.700		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25,00		25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.08	Program : Penataan Bangunan Gedung						94.920.000.000		30.100.000.000		23.003.149.302		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
					Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
					Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	90,00		90,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.09	Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya							810.000.000		270.000.000		1.141.630.400		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
					Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.10	Program : Penyelenggaraan Jalan							269.540.000.000		88.490.000.000		86.997.106.499		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
					Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00		84,00		84,00		81,49		97,01		81,49		95,87		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT TINGGI	
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,00		68,00		68,00		59,00		86,76		59,00		86,76		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TINGGI	
					Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	70,00		72,00		72,00		71,70		99,58		71,70		102,43		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT TINGGI	
					Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	7,00		7,00		7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
					Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	5,00		5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	
1.03.11	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi							2.250.000.000		750.000.000		790.121.298		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25,00		25,00		25,00		25,00		100,00		25,00		100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT TINGGI	
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,10		0,10		0,10		0,90		900,00		0,90		900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	MELAMPAUI	
					Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	50,00		50,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT TINGGI	
1.03.12	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang							10.102.024.458		3.278.815.235		4.451.099.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
					Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		Persen	55,00		55,00		55,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH		
				Ketaatan terhadap RTRW		Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								18.900.000.000		6.300.000.000		0		0	0,00	0,00		0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
2.10.04	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan								1.200.000.000		400.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi		Persen	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH		
2.10.05	Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan								15.150.000.000		5.050.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH		
2.10.08	Program : Pengelolaan Tanah Kosong								2.550.000.000		850.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
				Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan		Persen	25,00		25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SANGAT RENDAH		
1.04.1.03.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								244.306.861.160		80.164.774.892		99.532.728.892		8.238.881.938	100,96	14,96		8.238.881.938	91,40	18,58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	MELAMPAU I	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								171.283.100.395		56.203.379.310		36.375.849.657		1.571.671.977	41,25	6,26		1.571.671.977	37,95	5,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.03.03	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								40.569.264.210		13.312.053.199		20.789.935.039		994.245.745		4,78		994.245.745		2,45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Persen	63,00		61,00		61,00		30,00		49,18		30,00		47,62		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH		
				Persentase penduduk berakses air minum		Persen	97,00		95,00		95,00		25,00		26,32		25,00		25,77		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH		
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		Persen	82,00		80,00		80,00		32,00		40,00		32,00		39,02		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH		
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari		Persen	1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT TINGGI		
				Tingkat jaringan SPAM yang dibangun		Persen	99,00		97,00		97,00		35,00		36,08		35,00		35,35		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.03.05	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						48.715.761.312		15.985.175.450		12.735.569.071		0		0,00		0		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	71,00		69,00		69,00		25,00		36,23		25,00		35,21		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	84,00		82,00		82,00		25,00		30,49		25,00		29,76		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
				Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	83,00		81,00		81,00		25,00		30,86		25,00		30,12		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						3.003.317.457		985.483.039		2.850.345.547		577.426.232		20,26		577.426.232		19,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
1.03.07	Program : Pengembangan Permukiman						78.994.757.416		25.920.667.622		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Persentase areal kawasan kumuh	Persen	8,00		8,00		8,00		5,00		62,50		5,00		62,50		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH	
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	50,00		30,00		30,00		25,00		83,33		25,00		50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						73.023.760.765		23.961.395.582		63.156.879.235		6.667.209.961	59,71	8,70		6.667.209.961	53,45	13,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						60.503.831.582		19.853.212.538		17.315.370.175		3.927.662.152		22,68		3.927.662.152		6,49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
1.04.02	Program : Pengembangan Perumahan						942.140.686		309.146.029		392.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	40,00		38,00		38,00		28,00		73,68		28,00		70,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	11,00		9,00		9,00		10,00		111,11		10,00		90,91		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	MELAMPAUI	
				Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	50,00		48,00		48,00		25,00		52,08		25,00		50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.04.03	Program : Kawasan Permukiman						6.021.651.201		1.975.893.394		37.941.594.060		2.282.132.809		6,01		2.282.132.809		37,90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Rasio rumah layak huni	Persen	8,00		8,00		8,00		5,00		62,50		5,00		62,50		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENDAH	
				Rasio permukiman layak huni	Persen	50,00		30,00		30,00		25,00		83,33		25,00		50,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI	
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	98,00		96,00		96,00		28,00		29,17		28,00		28,57		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	94,00		92,00		92,00		26,00		28,26		26,00		27,66		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SANGAT RENDAH	
				Persentase pemukiman yang tertata	Persen	20,00		18,00		18,00		15,00		83,33		15,00		75,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	TINGGI	
1.04.05	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)						5.556.137.296		1.823.143.621		7.507.415.000		457.415.000		6,09		457.415.000		8,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00		3,00		3,00		2,00		66,67		2,00		66,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG	
				Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00		3,00		3,00		2,00		66,67		2,00		66,67		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SEDANG	
1.05.0.00.0.00.02.00.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						61.456.073.769		20.165.673.187		22.946.468.066		5.318.827.965	28,29	22,09		5.318.827.965	28,29	14,47	Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						61.456.073.769		20.165.673.187		22.946.468.066		5.318.827.965	28,29	22,09		5.318.827.965	28,29	14,47	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						58.563.804.208		19.233.250.000		20.017.633.066		4.714.843.965		23,55		4.714.843.965		8,05	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT TINGGI	
1.05.02	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						2.892.269.561		932.423.187		2.928.835.000		603.984.000		20,62		603.984.000		20,88	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00		100,00		100,00		53,00		53,00		53,00		53,00		Satuan Polisi Pamong Praja	RENDAH	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	
				Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	
				Persentase Penegakan PERDA	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Satuan Polisi Pamong Praja	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.05.0.00.0.00.03.00.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							18.967.924.003		6.223.973.206		6.640.356.796		997.573.741	29,81	12,63		997.573.741	29,81	4,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.967.924.003		6.223.973.206		6.640.356.796		997.573.741	29,81	12,63		997.573.741	29,81	4,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							15.684.924.003		5.147.973.206		5.126.283.980		872.983.741		17,03		872.983.741		5,57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH	
1.05.03	Program : Penanggulangan Bencana							3.283.000.000		1.076.000.000		1.514.072.816		124.590.000		8,23		124.590.000		3,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00		100,00		100,00		8,59		8,59		8,59		8,59		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH	
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00		100,00		100,00		14,64		14,64		14,64		14,64		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT RENDAH	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00		100,00		100,00		96,00		96,00		96,00		96,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SANGAT TINGGI	
1.05.0.00.0.00.04.00.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							46.281.734.566		15.186.494.622		16.890.749.232		3.136.496.430	77,67	12,21		3.136.496.430	78,28	4,57	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							46.281.734.566		15.186.494.622		16.890.749.232		3.136.496.430	77,67	12,21		3.136.496.430	78,28	4,57	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1.05.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							42.066.734.566		13.831.494.622		14.309.270.452		3.057.738.430		21,37		3.057.738.430		7,27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		B		100,00		B		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI	
1.05.04	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran							4.215.000.000		1.355.000.000		2.581.478.780		78.758.000		3,05		78.758.000		1,87	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI	
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14		18,14		18,14		5,5		30,32		5,5		30,32		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT RENDAH	
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100,00		100,00		100,00		88,46		88,46		88,46		88,46		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	100,00		100,00		100,00		88,46		88,46		88,46		88,46		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	TINGGI		
				Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT TINGGI		
				Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Layanan	700,00		800,00		800,00		273,00		34,13		273,00		39,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SANGAT RENDAH		
1.06.2.08.0.00.01.00.00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							31.866.112.324		10.456.274.986		11.631.774.351		0	12,69	0,00		0	12,69	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							29.398.112.324		9.666.274.986		10.814.055.851		0	8,69	0,00		0	8,69	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							22.906.837.338		7.599.000.000		8.016.379.432		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
1.06.02	Program : Pemberdayaan Sosial							801.000.000		255.000.000		245.880.800		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
				Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
1.06.03	Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							100.000.000		30.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
1.06.04	Program : Rehabilitasi Sosial							2.471.300.000		778.300.000		615.283.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan	SANGAT RENDAH		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)																Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		100,00		100,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
1.06.05	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial						1.870.000.000		600.000.000		1.539.304.500	0	0,00		0		0,00		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		7,00		7,00		7,00		7,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
1.06.06	Program : Penanganan Bencana						673.974.986		213.974.986		203.981.500	0	0,00		0		0,00		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00		100,00		100,00		30,00		30,00		30,00		30,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
1.06.07	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						575.000.000		190.000.000		193.226.619		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.468.000.000		790.000.000		817.718.500		0	4,00	0,00		0	4,00	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.02	Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						821.000.000		260.000.000		260.000.500		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
2.08.03	Program : Perlindungan Perempuan						652.000.000		205.000.000		276.968.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	30,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH	
2.08.04	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga							370.000.000		120.000.000		120.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
2.08.05	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak							125.000.000		40.000.000		40.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Data Gender Anak	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
2.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)							425.000.000		140.000.000		120.750.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
2.08.07	Program : Perlindungan Khusus Anak							75.000.000		25.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00		100,00		100,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SANGAT RENDAH		
2.07.3.32.0.00.01.00.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI							38.694.564.965		12.696.905.340		13.694.756.576		1.718.192.308	30,88	3,98		1.718.192.308	30,88	1,38	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							37.369.564.965		12.271.905.340		13.269.756.576		1.718.192.308	10,88	3,98		1.718.192.308	10,88	1,38	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
2.07.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							31.024.564.965		10.156.905.340		10.798.506.576		1.718.192.308		15,91		1.718.192.308		5,54	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.07.03	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						3.210.000.000		1.070.000.000		1.645.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	69,06		69,06		69,06		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,40		0,40		0,40		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	3,40		3,40		3,40		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,57		0,57		0,57		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,11		0,11		0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,07		0,07		0,07		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
2.07.04	Program : Penempatan Tenaga Kerja						2.235.000.000		745.000.000		456.250.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	5,81		5,81		5,81		0,55		9,47		0,55		9,47		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
2.07.05	Program : Hubungan Industrial						900.000.000		300.000.000		370.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	50,00		50,00		50,00		66,00		132,00		66,00		132,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	MELAMPAUI	
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,64		0,64		0,64		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	38,88		38,88		38,88		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Keselamatan dan perlindungan	Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						1.325.000.000		425.000.000		425.000.000		0	20,00	0,00		0	20,00	0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
3.32.02	Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi						225.000.000		75.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
3.32.03	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi						725.000.000		225.000.000		418.880.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Persentase transmigran swakarsa	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
				Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT RENDAH	
3.32.04	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi						375.000.000		125.000.000		6.120.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
				Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	SANGAT TINGGI	
2.09.3.27.0.00.01.00.00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						65.249.658.569		21.410.467.828		29.012.193.717		3.966.165.755	59,64	6,59		3.966.165.755	33,83	3,68	Dinas Pangan dan Pertanian	RENDAH	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						54.198.491.366		17.729.497.122		19.672.193.717		3.667.498.255	4,00	4,02		3.667.498.255	4,00	1,49	Dinas Pangan dan Pertanian		
2.09.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						49.123.491.366		16.074.497.122		18.249.693.717		3.667.498.255		20,10		3.667.498.255		7,47	Dinas Pangan dan Pertanian		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
2.09.02	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						990.000.000		330.000.000		130.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
				Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
2.09.03	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						3.255.000.000		1.065.000.000		1.057.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
2.09.04	Program : Penanganan Kerawanan Pangan						190.000.000		60.000.000		60.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
2.09.05	Program : Pengawasan Keamanan Pangan						640.000.000		200.000.000		175.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.051.167.203		3.680.970.706		9.340.000.000		298.667.500	55,64	2,57		298.667.500	29,83	2,19	Dinas Pangan dan Pertanian		
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						2.730.000.000		910.000.000		2.325.000.000		298.667.500		12,85		298.667.500		10,94	Dinas Pangan dan Pertanian		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,26		6,25		6,25		5,42		86,72		5,42		86,58		Dinas Pangan dan Pertanian	TINGGI	
					Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	73,00		73,00		73,00		15,00		20,55		15,00		20,55		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Produksi Padi	Ton	271.350,00		270.808,00		270.808,00		6.799,00		2,51		6.799,00		2,51		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	3,00		3,00		3,00		0,50		16,67		0,50		16,67		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	77,00		77,00		77,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	20,00		5,00		5,00		20,00		400,00		20,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	MELAMPAUI	
3.27.03					Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			5.551.167.203		1.880.970.706		6.160.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	48,00		48,00		48,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
3.27.05					Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian			750.000.000		250.000.000		250.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	50,00		50,00		50,00		15,8		31,60		15,8		31,60		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
					Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
3.27.06					Program : Perizinan Usaha Pertanian			120.000.000		40.000.000		40.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	75,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pangan dan Pertanian	SANGAT RENDAH	
3.27.07					Program : Penyuluhan Pertanian			1.900.000.000		600.000.000		565.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pangan dan Pertanian		
					Cakupan bina kelompok petani	Persen	80,00		73,00		73,00		80,00		109,59		80,00		100,00		Dinas Pangan dan Pertanian	MELAMPAUI	
2.11.0.00.0.00.01.00.00					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			123.670.864.499		40.580.305.302		44.771.469.821		7.795.430.743	18,86	3,81		7.795.430.743	17,68	1,33	Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			123.670.864.499		40.580.305.302		44.771.469.821		7.795.430.743	18,86	3,81		7.795.430.743	17,68	1,33	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			110.519.864.499		37.125.305.302		38.012.283.527		7.667.681.243		20,17		7.667.681.243		6,94	Dinas Lingkungan Hidup		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.02					Program : Perencanaan Lingkungan Hidup			600.000.000		200.000.000		425.000.000		1.464.000		0,34		1.464.000		0,24	Dinas Lingkungan Hidup		
					Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.11.03	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						4.141.000.000		1.275.000.000		2.495.000.000		106.285.500		4,26		106.285.500		2,57	Dinas Lingkungan Hidup		
				Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	90,00		70,00		70,00		45,00		64,29		45,00		50,00		Dinas Lingkungan Hidup	RENDAH	
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/Kategori	70,00		60,00		60,00		45,00		75,00		45,00		64,29		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG	
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/Kategori	80,00		70,00		70,00		50,00		71,43		50,00		62,50		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG	
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/Kategori	37,93		37,18		37,18		25,00		67,24		25,00		65,91		Dinas Lingkungan Hidup	SEDANG	
2.11.04	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)						300.000.000		100.000.000		42.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)						150.000.000		50.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	#####		#####		#####		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						950.000.000		250.000.000		242.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		100,00		100,00		35,00		35,00		35,00		35,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00		25,00		25,00		25,00		100,00		25,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT TINGGI	
				Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.07	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH						350.000.000		100.000.000		87.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Penetapan hak MHA	MHA	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
				Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.11.08	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							950.000.000		300.000.000		275.000.000		4.430.000		1,61		4.430.000		0,47	Dinas Lingkungan Hidup		
					Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00		100,00		100,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.09	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							425.000.000		125.000.000		62.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
					Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.10	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup							350.000.000		100.000.000		100.000.000		15.570.000		15,57		15.570.000		4,45	Dinas Lingkungan Hidup		
					Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00		100,00		100,00		22,00		22,00		22,00		22,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.11.11	Program : Pengelolaan Persampahan							4.935.000.000		955.000.000		3.029.186.294		0		0,00		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup		
					Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75,00		75,00		75,00		12,70		16,93		12,70		16,93		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	32,00		31,00		31,00		0,06		0,19		0,06		0,19		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Persentase cakupan area pelayanan	Persen	75,00		75,00		75,00		48,00		64,00		48,00		64,00		Dinas Lingkungan Hidup	RENDAH	
					Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	72,00		72,00		72,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
					Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00		75,00		75,00		35,00		46,67		35,00		46,67		Dinas Lingkungan Hidup	SANGAT RENDAH	
2.12.0.00.0.00.01.00.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							56.145.055.047		18.422.960.689		19.247.960.689		2.927.421.705	59,88	3,27		2.927.421.705	58,38	1,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENDAH	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							56.145.055.047		18.422.960.689		19.247.960.689		2.927.421.705	59,88	3,27		2.927.421.705	58,38	1,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							52.085.055.047		17.242.960.689		17.928.299.689		2.927.421.705		16,33		2.927.421.705		5,62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT RENDAH	
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk							635.000.000		210.000.000		209.501.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Perekaman KTP elektronik	Persen	100,00		100,00		100,00		100,29		100,29		100,29		100,29		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAMPAUI	
					Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT RENDAH	
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah		Sudah		Sudah		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,20		100,20		100,20		100,20		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MELAMPAUI	
					Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60,00		50,00		50,00		49,21		98,42		49,21		82,02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil							285.000.000		160.000.000		50.160.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00		100,00		100,00		87,11		87,11		87,11		87,11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI	
					Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT RENDAH	
					Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
					Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100,00		100,00		100,00		87,11		87,11		87,11		87,11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TINGGI	
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							3.045.000.000		785.000.000		1.035.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	57,00		55,00		55,00		25,00		45,45		25,00		43,86		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT RENDAH	
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan							95.000.000		25.000.000		25.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
					Profil data kependudukan	Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SANGAT TINGGI	
2.13.0.00.0.00.01.00.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							66.008.375.530		21.659.426.756		22.283.734.005		1.347.592.418	52,69	2,51		1.347.592.418	65,63	0,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							66.008.375.530		21.659.426.756		22.283.734.005		1.347.592.418	52,69	2,51		1.347.592.418	65,63	0,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.13.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							38.908.375.530		12.459.426.756		11.353.189.271		1.331.592.418		11,73		1.331.592.418		3,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
2.13.02	Program : Penataan Desa							2.700.000.000		1.100.000.000		125.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
					Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	20,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa							5.150.000.000		1.550.000.000		4.341.453.315		0		0,00		0		0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
					Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	11,48		5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
					Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa						12.650.000.000		4.350.000.000		1.965.520.600		16.000.000		0,81		16.000.000		0,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5,00		5,00		5,00		25,00		500,00		25,00		500,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
				Persentase desa tertib administrasi	Persen	30,00		40,00		40,00		25,00		62,50		25,00		83,33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH	
				Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	20,00		40,00		40,00		25,00		62,50		25,00		125,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH	
				Persentase penertiban aset desa	Persen	20,00		50,00		50,00		25,00		50,00		25,00		125,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Persentase kepala desa yang dibina	Persen	30,00		40,00		40,00		25,00		62,50		25,00		83,33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH	
				Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	30,00		45,00		45,00		25,00		55,56		25,00		83,33		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RENDAH	
2.13.05	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						6.600.000.000		2.200.000.000		4.498.570.819		0		0,00		0		0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Persentase LSM aktif	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Persentase PKK aktif	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Persentase Posyandu aktif	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
				Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	5,00		5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT RENDAH	
2.14.0.00.0.00.01.00.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						69.043.243.370		22.655.262.469		23.266.501.469		1.026.676.348	35,27	3,22		1.026.676.348	35,11	1,16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						69.043.243.370		22.655.262.469		23.266.501.469		1.026.676.348	35,27	3,22		1.026.676.348	35,11	1,16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						20.605.819.815		6.862.690.484		8.303.441.469		592.524.348		7,14		592.524.348		2,88	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI	
2.14.02	Program : Pengendalian Penduduk						1.254.324.950		349.385.450		356.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,50		2,50		2,50		2,33		93,20		2,33		93,20		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	36,00		36,00		36,00		2,33		6,47		2,33		6,47		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	31,11		30,00		30,00		25,00		83,33		25,00		80,36		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TINGGI	
2.14.03	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						27.905.383.950		9.017.281.650		8.843.660.000		296.726.000		3,36		296.726.000		1,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	99,00		99,00		99,00		17,50		17,68		17,50		17,68		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	38,40		35,22		35,22		8,00		22,71		8,00		20,83		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00		94,00		94,00		25,00		26,60		25,00		26,60		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Ratio Akseptor KB	Persen	25.521,00		25.521,00		25.521,00		18,87		0,07		18,87		0,07		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	83,28		83,28		83,28		17,50		21,01		17,50		21,01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71		25,71		25,71		6,01		23,38		6,01		23,38		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	534,83		534,83		534,83		8,01		1,50		8,01		1,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	46,24		46,24		46,24		6,27		13,56		6,27		13,56		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,78		17,78		17,78		2,60		14,62		2,60		14,62		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	691.167,00		691.167,00		691.167,00		23,75		0,00		23,75		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	161.153,00		161.153,00		161.153,00		16,25		0,01		16,25		0,01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	624.471,00		624.471,00		624.471,00		2,82		0,00		2,82		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	100,00		100,00		100,00		7,50		7,50		7,50		7,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	100,00		100,00		100,00		133,83		133,83		133,83		133,83		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	MELAMPAUI	
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	126,00		126,00		126,00		25,00		19,84		25,00		19,84		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	23,90		23,90		23,90		12,05		50,42		12,05		50,42		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RENDAH	
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00		100,00		100,00		1:1,6		0,00		1:1,6		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	391.178,00		272.476,00		272.476,00		25,00		0,01		25,00		0,01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	135,00		135,00		135,00		43,25		32,03		43,25		32,03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
2.14.04	Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						19.277.714.655		6.425.904.885		5.763.400.000		137.426.000		2,38		137.426.000		0,71	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65		15,65		15,65		12,05		77,00		12,05		77,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TINGGI	
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00		3.314,00		3.314,00		25,00		0,75		25,00		0,75		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00		674,00		674,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65		15,65		15,65		25,00		159,74		25,00		159,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	MELAMPAUI	
				Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71		53,71		53,71		15,00		27,93		15,00		27,93		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT RENDAH	
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00		19,00		19,00		19,00		100,00		19,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SANGAT TINGGI	
2.15.0.00.0.00.01.00.00	DINAS PERHUBUNGAN						66.767.092.489		21.908.385.684		43.862.873.684		8.356.649.369	57,72	8,73		8.356.649.369	57,31	5,73	Dinas Perhubungan	RENDAH	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						66.767.092.489		21.908.385.684		43.862.873.684		8.356.649.369	57,72	8,73		8.356.649.369	57,31	5,73	Dinas Perhubungan		
2.15.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						55.623.732.784		18.333.385.684		35.371.564.844		8.081.649.369		22,85		8.081.649.369		14,53	Dinas Perhubungan		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI	
2.15.02	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)						10.393.359.705		3.325.000.000		8.223.563.840		275.000.000		3,34		275.000.000		2,65	Dinas Perhubungan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	100,00		98,00		98,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	85,00		80,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00		311.378,00		311.378,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Rasio ijin trayek	Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	310,00		307,00		307,00		1.828,00		595,44		1.828,00		589,68		Dinas Perhubungan	MELAMPAUI	
					Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Perhubungan	SANGAT TINGGI	
					Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00		1.397,00		1.397,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	881,00		881,00		881,00		89,46		10,15		89,46		10,15		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Pemasangan Rambu-rambu	Persen	75,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002		0,002		0,002		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00		576.262,00		576.262,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
					Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	539.548,00		539.548,00		539.548,00		13.778,00		2,55		13.778,00		2,55		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
2.15.03	Program : Pengelolaan Pelayaran							750.000.000		250.000.000		267.745.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Perhubungan		
					Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen	70,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perhubungan	SANGAT RENDAH	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							83.458.865.613		27.385.482.106		26.849.232.106		2.811.223.786	14,31	9,55		2.811.223.786	14,00	3,94	Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							77.973.865.613		25.670.482.106		24.733.120.106		2.792.355.786	4,59	7,86		2.792.355.786	4,27	3,29	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							28.198.865.613		9.330.482.106		13.042.665.506		2.504.058.234		19,20		2.504.058.234		8,88	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.16.02	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik							18.265.000.000		5.970.000.000		4.653.233.500		38.919.800		0,84		38.919.800		0,21	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	99,00		95,00		95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
					Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	99,00		95,00		95,00		16,40		17,26		16,40		16,57		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
					Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	99,00		95,00		95,00		3,16		3,33		3,16		3,19		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
					Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	99,00		95,00		95,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.16.03	Program : Aplikasi Informatika						31.510.000.000		10.370.000.000		7.037.221.100		249.377.752		3,54		249.377.752		0,79	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00		100,00		100,00		0,39		0,39		0,39		0,39		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	100,00		90,00		90,00		18,31		20,34		18,31		18,31		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						2.210.000.000		675.000.000		912.250.000		4.508.000	0,00	0,49		4.508.000	0,00	0,20	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.20.02	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral						2.210.000.000		675.000.000		912.250.000		4.508.000		0,49		4.508.000		0,20	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	95,00		85,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	95,00		85,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		0,00		Tidak Ada		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Buku kabupaten dalam angka (ada/ tidak ada)	Buku	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		0,00		Tidak Ada		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	95,00		85,00		85,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						3.275.000.000		1.040.000.000		1.203.862.000		14.360.000	9,72	1,19		14.360.000	9,72	0,44	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						3.275.000.000		1.040.000.000		1.203.862.000		14.360.000		1,19		14.360.000		0,44	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	30,00		30,00		30,00		8,75		29,17		8,75		29,17		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
				Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	50,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	SANGAT RENDAH	
2.17.3.30.3.31.01.00.00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						51.592.753.288		16.929.207.120		19.126.886.478		4.222.903.945	57,13	8,33		4.222.903.945	53,82	3,51	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	RENDAH	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						46.192.753.288		15.304.207.120		17.124.200.678		4.121.023.945	3,72	3,92		4.121.023.945	3,69	1,39	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
2.17.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						42.462.753.288		14.154.207.120		15.010.452.572		4.121.023.945		27,45		4.121.023.945		9,71	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				Perdagangan dan Perindustrian		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.02				Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			162.500.000		50.000.000		50.000.000			0	0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	91,67		87,50		87,50		2,86		3,27		2,86		3,12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.03				Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			602.500.000		185.000.000		125.000.000			0	0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	90,05		89,70		89,70		24,95		27,81		24,95		27,71		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.04				Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			942.500.000		290.000.000		200.000.000			0	0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	90,25		89,70		89,70		15,45		17,22		15,45		17,12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	18,00		12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.05				Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			307.500.000		100.000.000		189.707.600			0	0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	74,60		72,82		72,82		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.07				Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			1.190.000.000		375.000.000		1.060.882.816			0	0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100,00		85,23		85,23		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	57,39		56,46		56,46		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
					Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	100,00		75,23		75,23		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
					Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	3,85		2,53		2,53		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
					Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	63,22		57,90		57,90		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.17.08	Program : Pengembangan UMKM							525.000.000		150.000.000		488.157.690		0	0,00		0		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	28,04		20,56		20,56		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
					Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	11,50		9,63		9,63		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3.275.000.000		975.000.000		952.772.800		19.480.000	19,21	1,18		19.480.000	18,48	0,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
3.30.02	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							350.000.000		110.000.000		129.437.400		0	0,00		0		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	97,86		95,32		95,32		20,52		21,53		20,52		20,97		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
					Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00		100,00		100,00		23,33		23,33		23,33		23,33		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.30.03	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							70.000.000		20.000.000		20.000.000		0	0,00		0		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.30.04	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						970.000.000		295.000.000		259.545.400		0		0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00		100,00		100,00		78,57		78,57		78,57		78,57		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	TINGGI	
				Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	39,00		37,00		37,00		21,50		58,11		21,50		55,13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	RENDAH	
3.30.05	Program : Pengembangan Ekspor						600.000.000		200.000.000		178.790.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Tingkat Nilai Export bersih	Persen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	3,22		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.30.06	Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen						1.000.000.000		275.000.000		275.000.000		19.480.000		7,08		19.480.000		1,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100,00		64,62		64,62		6,85		10,60		6,85		6,85		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.30.07	Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						285.000.000		75.000.000		90.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	70,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	70,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.125.000.000		650.000.000		1.049.913.000		82.400.000	34,20	3,23		82.400.000	31,65	1,80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
3.31.02	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri						1.525.000.000		450.000.000		849.953.000		82.400.000		9,69		82.400.000		5,40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	100,00		60,00		60,00		20,00		33,33		20,00		20,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	100,00		83,33		83,33		34,29		41,15		34,29		34,29		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.31.03	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota						225.000.000		50.000.000		49.974.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	21,45		20,71		20,71		1,55		7,48		1,55		7,23		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00		100,00		100,00		66,67		66,67		66,67		66,67		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SEDANG	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
3.31.04	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						375.000.000		150.000.000		149.986.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian		
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT TINGGI	
				Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	SANGAT RENDAH	
2.18.0.00.0.00.01.00.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						40.211.998.886		13.194.823.196		14.699.308.112		2.676.076.374	55,12	3,32		2.676.076.374	50,94	1,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							40.211.998.886		13.194.823.196		14.699.308.112		2.676.076.374	55,12	3,32		2.676.076.374	50,94	1,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							35.980.296.178		11.801.503.096		13.422.110.853		2.676.076.374		19,94		2.676.076.374		7,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT TINGGI	
2.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal							299.969.400		99.989.800		209.933.259		0		0,00		0		0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
					Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	6,00		5,60		5,60		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	7,70		6,73		6,73		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
					Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	884,00		730,00		730,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
					Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	29,50		28,50		28,50		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
2.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal							599.850.000		199.950.000		177.500.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
					Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
					Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	8,40		7,40		7,40		6,30		85,14		6,30		75,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TINGGI	
2.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal							899.959.500		299.986.500		135.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
					Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	19,50		18,50		18,50		9,00		48,65		9,00		46,15		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
					Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	96,58		94,58		94,58		100,00		105,73		100,00		103,54		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	93,50		92,50		92,50		97,96		105,90		97,96		104,77		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI	
2.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							1.180.182.000		393.394.000		585.147.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Penanaman Modal dan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	8,70		7,14		7,14		13,64		191,04		13,64		156,78		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MELAMPAUI	
2.18.06				Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			1.251.741.808		399.999.800		169.617.000		0	0,00		0		0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SANGAT RENDAH	
2.19.2.22.3.26.01.00.00				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			100.026.789.616		32.809.455.312		28.630.705.312		205.900.000	11,11	10,20		205.900.000	9,76	1,75	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			73.551.789.616		23.984.455.312		25.076.955.312		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan		
2.19.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			58.823.596.509		18.565.000.000		16.946.955.312		0	0,00	0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.19.02				Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			2.325.000.000		775.000.000		1.112.500.000		0	0,00	0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,00		0,0001		0,0001		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,01		0,01		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,41		0,41		0,41		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,84		0,74		0,74		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,41		0,41		0,41		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.19.03				Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			10.123.910.624		4.024.455.312		6.692.500.000		0	0,00	0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Tingkat prestasi olahraga	Persen	85,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	75,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	65,00		40,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	60,00		40,00		40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Tingkat atlet berprestasi	Persen	55,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	20,00		16,00		16,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.19.04	Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan							2.279.282.483		620.000.000		325.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
					Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							13.125.000.000		4.375.000.000		1.551.250.000		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
2.22.02	Program : Pengembangan Kebudayaan							7.500.000.000		2.500.000.000		1.226.250.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
					Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	90,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen	55,00		55,00		55,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	30,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.22.03	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional							825.000.000		275.000.000		50.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
					Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	12,00		12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00		3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00		30,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.22.04	Program : Pembinaan Sejarah							1.350.000.000		450.000.000		50.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.22.05	Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						1.800.000.000		600.000.000		100.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	60,00		60,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	20,00		12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.22.06	Program : Pengelolaan Permuseuman						1.650.000.000		550.000.000		125.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						13.350.000.000		4.450.000.000		2.002.500.000		205.900.000	11,11	10,20		205.900.000	9,76	1,75	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
3.26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						9.450.000.000		3.150.000.000		908.250.000		120.000.000		13,21		120.000.000		1,27	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	4,84		6,53		6,53		0,86		13,21		0,86		17,83		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	2,78		0,42		0,42		0,06		13,21		0,06		2,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat hunian akomodasi	Persen	31,05		19,87		19,87		2,63		13,21		2,63		8,45		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Kunjungan wisata	Persen	90,00		80,00		80,00		10,57		13,21		10,57		11,74		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Lama kunjungan Wisata	Hari	2,00		1,50		1,50		0,20		13,21		0,20		9,91		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	0,31		0,31		0,31		0,04		13,21		0,04		13,21		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	0,43		0,43		0,43		0,06		13,21		0,06		13,21		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	0,31		0,31		0,31		0,04		13,21		0,04		13,21		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
3.26.03	Program : Pemasaran Pariwisata						1.200.000.000		400.000.000		453.750.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,32		0,32		0,32		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
3.26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						1.500.000.000		500.000.000		311.250.000		85.900.000		27,60		85.900.000		5,73	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen	1,00		1,00		1,00		0,28		27,60		0,28		27,60		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
3.26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						1.200.000.000		400.000.000		329.250.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan		
				Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	SANGAT RENDAH	
2.23.2.24.0.00.01.00.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						35.659.697.125		11.701.069.627		12.426.192.976		2.284.744.591	27,49	9,55		2.284.744.591	27,49	3,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						32.534.697.125		10.676.069.627		11.964.565.976		2.272.868.091	27,49	8,26		2.272.868.091	27,49	3,10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2.23.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						31.037.485.779		10.218.858.281		11.385.239.976		2.245.004.741		19,72		2.245.004.741		7,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
2.23.02	Program : Pembinaan Perpustakaan						1.347.211.346		407.211.346		549.326.000		27.863.350		5,07		27.863.350		2,07	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	85,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	70,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	10,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07		1,07		1,07		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Laju pengunjung perpustakaan	Persen	50,00		50,00		50,00		29,20		58,40		29,20		58,40		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH	
				Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	75.000,00		75.000,00		75.000,00		9.782,00		13,04		9.782,00		13,04		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,80		0,80		0,80		1,60		200,00		1,60		200,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	MELAMPAUI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik		Persen	0,16		0,16		0,16		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Laju Anggota Perpustakaan		Persen	51,52		51,52		51,52		30,10		58,42		30,10		58,42		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RENDAH	
				Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling		Persen	0,08		0,09		0,09		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
2.23.03	Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							150.000.000		50.000.000		30.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Persentase naskah kuno yang dilestarikan		Persen	61,00		50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							3.125.000.000		1.025.000.000		461.627.000		11.876.500	0,00	1,29		11.876.500	0,00	0,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2.24.02	Program : Pengelolaan Arsip							2.600.000.000		850.000.000		461.627.000		11.876.500		2,57		11.876.500		0,46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Persentase Pembinaan Kearsipan OPD		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib		Persen	39,10		39,10		39,10		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan		Persen	27,00		27,00		27,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Penyusutan Arsip		Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Arsip Aktif		Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Arsip Inaktif		Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Arsip Vital		Persen	20,00		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan		Persen	75,00		75,00		75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan		Persen	4,70		4,70		4,70		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
2.24.03	Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							525.000.000		175.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Tingkat Penyelamatan Arsip Statis		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis		Persen	19,99		19,99		19,99		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
				Tingkat Pelestarian Arsip Statis		Persen	1,75		1,75		1,75		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SANGAT RENDAH	
3.25.3.27.00.00.01.00.00	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN							50.075.319.367		16.431.289.263		16.771.289.263		2.546.489.574	65,90	6,04		2.546.489.574	62,01	2,24	Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							46.167.019.367		15.159.550.263		14.482.869.614		2.516.422.374	41,62	4,37		2.516.422.374	38,53	1,53	Dinas Perikanan dan Peternakan		
3.25.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							34.261.512.367		11.195.629.263		13.136.252.914		2.502.332.374		19,05		2.502.332.374		7,30	Dinas Perikanan dan Peternakan		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.25.03	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap						1.819.350.000		596.986.000		297.145.500		4.644.000		1,56		4.644.000		0,26	Dinas Perikanan dan Peternakan		
				Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.751,77		1.635,30		1.635,30		401,75		24,57		401,75		22,93		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Produksi perikanan	Persen	5,25		5,25		5,25		5,25		100,00		5,25		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI	
				Konsumsi ikan	Persen	35,00		30,00		30,00		20,00		66,67		20,00		57,14		Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG	
				Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	20,31		18,97		18,97		10,00		52,71		10,00		49,24		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH	
				Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	3,48		3,32		3,32		3,20		96,39		3,20		91,95		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI	
				Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	82,33		76,85		76,85		50,00		65,06		50,00		60,73		Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG	
				Produksi Perikanan Tangkap	Persen	3,50		3,50		3,50		2,45		70,00		2,45		70,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG	
3.25.04	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya						8.740.712.000		2.925.452.000		777.196.000		9.446.000		1,22		9.446.000		0,11	Dinas Perikanan dan Peternakan		
				Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.721,11		16.351,74		16.351,74		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	20.473,00		17.987,00		17.987,00		25.420,00		141,32		25.420,00		124,16		Dinas Perikanan dan Peternakan	MELAMPAUI	
				Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	#####		#####		#####		285.000,00		0,03		285.000,00		0,03		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	#####		#####		#####		#####		23,33		#####		18,53		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Produksi Ikan Hias	Ton	646.076,00		608.990,00		608.990,00		165.500,00		27,18		165.500,00		25,62		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Produksi Perikanan budidaya	Ton	38,00		36,00		36,00		25,42		70,61		25,42		66,89		Dinas Perikanan dan Peternakan	SEDANG	
				Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00		100,00		100,00		30,00		30,00		30,00		30,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.25.05	Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						126.878.000		41.632.000		26.652.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan		
				Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00		1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.25.06	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						1.218.567.000		399.851.000		245.623.200		0		0,00		0		0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan		
				Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	550,00		400,00		400,00		80,00		20,00		80,00		14,55		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	16,00		14,00		14,00		3,00		21,43		3,00		18,75		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
				Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	150,00		130,00		130,00		30,00		23,08		30,00		20,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.908.300.000		1.271.739.000		2.288.419.649		30.067.200	24,28	1,67		30.067.200	23,48	0,71	Dinas Perikanan dan Peternakan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.27.02	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							1.583.816.000		519.701.000		1.113.688.149		6.418.000		0,58		6.418.000		0,41	Dinas Perikanan dan Peternakan		
					Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50		1,50		1,50		0,25		16,67		0,25		16,67		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Cakupan Akseptor IB	Persen	85,00		75,00		75,00		19,30		25,73		19,30		22,71		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	15,00		10,00		10,00		2,50		25,00		2,50		16,67		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	3,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.27.03	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							190.313.000		62.448.000		165.000.000		0		0,00		0		0,00	Dinas Perikanan dan Peternakan		
					Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.27.04	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							1.693.173.000		552.488.000		859.731.500		17.549.200		2,04		17.549.200		1,04	Dinas Perikanan dan Peternakan		
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00		0,00		0,00		5,00		-25,00		5,00		-25,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00		70,00		70,00		30,00		42,86		30,00		42,86		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00		100,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT TINGGI	
					Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00		17,00		17,00		11,00		64,71		11,00		64,71		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH	
					Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	20.000,00		20.000,00		20.000,00		6.914,00		34,57		6.914,00		34,57		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	87,50		79,00		79,00		39,70		50,25		39,70		45,37		Dinas Perikanan dan Peternakan	RENDAH	
					Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	992,00		828,00		828,00		1,00		0,12		1,00		0,10		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	19,80		16,20		16,20		1,70		10,49		1,70		8,59		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
					Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	42,70		38,80		38,80		0,00		0,00		0,00		0,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
3.27.07	Program : Penyuluhan Pertanian							440.998.000		137.102.000		150.000.000		6.100.000		4,07		6.100.000		1,38	Dinas Perikanan dan Peternakan		
					Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	12,00		16,00		16,00		3,00		18,75		3,00		25,00		Dinas Perikanan dan Peternakan	SANGAT RENDAH	
4.01.5.06.00.01.00.00	SEKRETARIAT DAERAH							253.411.464.682		83.152.282.031		81.509.043.594		2.539.699.091	12,59	3,65		2.539.699.091	12,59	1,04	Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							251.401.464.682		82.552.282.031		81.416.093.594		2.539.699.091	12,59	3,65		2.539.699.091	12,59	1,04	Sekretariat Daerah		
4.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum							190.060.209.300		63.243.130.002		59.474.453.375		2.168.955.328		3,65		2.168.955.328		1,14	Sekretariat Daerah		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		3,64		3,64		3,64		3,64		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00		100,00		100,00		2,44		2,44		2,44		2,44		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
4.01.02	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						42.720.000.000		13.870.000.000		16.954.410.174		8.220.000		0,05		8.220.000		0,02	Sekretariat Daerah		
				Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	100,00		100,00		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	100,00		100,00		100,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00		15,00		15,00		10,00		66,67		10,00		66,67		Sekretariat Daerah	SEDANG	
4.01.03	Program : Perekonomian Dan Pembangunan						18.621.255.382		5.439.152.029		4.987.230.045		362.523.763		7,27		362.523.763		1,95	Sekretariat Daerah		
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00		8,00		8,00		3,00		37,50		3,00		37,50		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100,00		100,00		100,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00		100,00		100,00		23,00		23,00		23,00		23,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55,00		55,00		55,00		3,00		5,45		3,00		5,45		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN						2.010.000.000		600.000.000		92.950.000		0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	Sekretariat Daerah		
5.06.02	Program : Pengelolaan Perbatasan						2.010.000.000		600.000.000		92.950.000		0		0,00		0		0,00	Sekretariat Daerah		
				Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Sekretariat Daerah	SANGAT RENDAH	
4.02.0.00.0.00.01.00.00	SEKRETARIAT DPRD						218.510.484.516		71.700.171.332		84.203.465.484		5.310.971.814	48,88	6,03		5.310.971.814	48,88	2,33	Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH	
4.02	SEKRETARIAT DPRD						218.510.484.516		71.700.171.332		84.203.465.484		5.310.971.814	48,88	6,03		5.310.971.814	48,88	2,33	Sekretariat DPRD		
4.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota						141.981.900.006		46.876.175.032		48.758.540.268		3.800.028.588		7,79		3.800.028.588		2,68	Sekretariat DPRD		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		0,00		0,00		0,00		0,00		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH	
				Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00		100,00		100,00		14,05		14,05		14,05		14,05		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH	
4.02.02	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD						76.528.584.510		24.823.996.300		35.444.925.216		1.510.943.226		4,26		1.510.943.226		1,97	Sekretariat DPRD		
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI	
				Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)																		
				Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Sekretariat DPRD	SANGAT TINGGI	
				Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00		100,00		100,00		14,05		14,05		14,05		14,05		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		14,05		14,05		14,05		14,05		Sekretariat DPRD	SANGAT RENDAH	
5.01.5.05.00.01.00.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						41.729.432.806		13.692.741.053		15.893.593.427		2.472.636.586	30,00	14,36		2.472.636.586	30,00	5,43	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.01	PERENCANAAN						38.154.432.806		12.542.741.053		15.044.843.427		2.455.984.526	30,00	12,40		2.455.984.526	30,00	4,96	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						32.029.432.806		10.617.741.053		12.023.737.786		2.170.937.526		18,06		2.170.937.526		6,78	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA		AA		AA		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.01.02	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah						3.675.000.000		1.175.000.000		1.483.605.641		259.499.000		17,49		259.499.000		7,06	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Tidak Ada		0,00		Tidak Ada		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
				Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Pengembangan Daerah		
					Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT TINGGI	
					Capaian Kinerja RKPD	Persen	89,50		89,00		89,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.01.03	Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							2.450.000.000		750.000.000		1.537.500.000		25.548.000		1,66		25.548.000		1,04	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.575.000.000		1.150.000.000		848.750.000		16.652.060	0,00	1,96		16.652.060	0,00	0,47	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.05.02	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah							3.575.000.000		1.150.000.000		848.750.000		16.652.060		1,96		16.652.060		0,47	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
					Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	15,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	53,19		42,55		42,55		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	SANGAT RENDAH	



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																					Pengembangan Daerah		
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.02.0.00.0.00.01.00.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							1.299.682.152.701		426.466.644.072		481.132.722.341		18.631.814.302	79,44	4,89		18.631.814.302	77,82	2,35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
5.02	KEUANGAN							1.299.682.152.701		426.466.644.072		481.132.722.341		18.631.814.302	79,44	4,89		18.631.814.302	77,82	2,35	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							169.552.644.072		58.106.644.072		94.236.919.785		9.291.732.351		9,86		9.291.732.351		5,48	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI	
5.02.02	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah							1.123.679.508.629		366.210.000.000		384.869.795.556		9.291.732.351		2,41		9.291.732.351		0,83	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
					Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,00		15,00		15,00		18,71		124,73		18,71		124,73		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI	
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89,00		85,00		85,00		72,00		84,71		72,00		80,90		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP		WTP		WTP		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	76,14		75,54		75,54		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
					Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,03		2,13		2,13		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,58		1,74		1,74		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
					Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35,00		32,00		32,00		26,38		82,44		26,38		75,37		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	25,00		21,00		21,00		16,30		77,62		16,30		65,20		Badan Keuangan dan Aset Daerah	TINGGI	
					Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,74		1,80		1,80		1,66		92,22		1,66		95,40		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI	
					Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		100,00		100,00		Tepat Waktu		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI	
					Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6		6,00		6,00		39,10		651,67		39,10		651,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI	
					Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20		20,00		20,00		20,00		100,00		20,00		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI	
					Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8		8,00		8,00		7,49		93,63		7,49		93,63		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI	
					Penyerapan Anggaran	Skor	20		20,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
					Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4		4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH	
5.02.03	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah							6.450.000.000		2.150.000.000		2.026.007.000		48.349.600		2,39		48.349.600		0,75	Badan Keuangan dan Aset Daerah		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)		Dokumen	Ya		Ya		Ya		Ya		100,00		Ya		100,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT TINGGI		
				Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal		Persen	100,00		100,00		100,00		59,00		59,00		59,00		59,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	RENDAH		
				Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat		Persen	30,00		25,00		25,00		33,20		132,80		33,20		110,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	MELAMPAUI		
				Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Persen	100,00		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH		
				Persentase pengolahan BMD yang dibina		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH		
				Persentase penyusutan/ penghapusan BMD		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SANGAT RENDAH		
				Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif		Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
				Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan		Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
				Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif		Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
				Administrasi BMD yang Andal		Indeks	Baik		Baik		Baik		Cukup		66,67		Cukup		66,67		Badan Keuangan dan Aset Daerah	SEDANG		
5.02.0.00.0.00.02.00.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH								100.150.638.735		32.862.578.527		34.824.748.125		8.377.335.172	40,14	16,97		8.377.335.172	38,00	6,01	Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH	
5.02	KEUANGAN								100.150.638.735		32.862.578.527		34.824.748.125		8.377.335.172	40,14	16,97		8.377.335.172	38,00	6,01	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								87.650.638.735		28.912.578.527		29.591.005.025		8.018.793.328		27,10		8.018.793.328		9,15	Badan Pendapatan Daerah		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT TINGGI		
5.02.04	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah								12.500.000.000		3.950.000.000		5.233.743.100		358.541.844		6,85		358.541.844		2,87	Badan Pendapatan Daerah		
				Rasio PAD		Persen	0,93		0,83		0,83		0,13		15,66		0,13		13,98		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH		
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		Persen	13,35		12,65		12,65		86,30		14,66		86,30		15,47		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH		
				Rasio Pajak daerah		Persen	50,84		49,84		49,84		8,94		17,94		8,94		17,58		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH		
				Rasio retribusi daerah		Persen	5,14		4,53		4,53		4,68		103,31		4,68		91,05		Badan Pendapatan Daerah	MELAMPAUI		
				Persentase capaian PAD		Persen	89,85		88,95		88,95		13,70		15,40		13,70		15,25		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH		
				Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah		Persen	10,50		9,50		9,50		1,33		14,00		1,33		12,67		Badan Pendapatan Daerah	SANGAT RENDAH		
5.03.5.04.0.00.01.00.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								121.394.713.619		39.833.428.518		38.617.529.518		3.265.037.383	97,15	12,35		3.265.037.383	90,59	7,44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.03		KEPEGAWAIAN						116.774.713.619		38.408.428.518		34.514.841.218		3.002.537.383	64,65	5,95		3.002.537.383	62,33	1,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5.03.01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						98.574.713.619		32.358.428.518		29.128.325.618		2.897.105.254		9,95		2.897.105.254		2,94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI	
5.03.02		Program : Kepegawaian Daerah						18.200.000.000		6.050.000.000		5.386.515.600		105.432.129		1,96		105.432.129		0,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persen	82,67		80,88		80,88		82,00		101,38		82,00		99,19		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI	
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persen	17,67		16,99		16,99		20,34		119,72		20,34		115,11		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI	
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Persen	59,92		49,80		49,80		40,53		81,39		40,53		67,64		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINGGI	
				Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		Orang	34,00		34,00		34,00		32,00		94,12		32,00		94,12		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI	
				Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		Orang	172,00		172,00		172,00		169,00		98,26		169,00		98,26		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI	
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		Orang	524,00		504,00		504,00		498,00		98,81		498,00		95,04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT TINGGI	
				Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		Persen	0,21		0,29		0,29		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pemberhentian ASN		Persen	6,16		5,73		5,73		1,00		17,45		1,00		16,23		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
				Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa		Persen	1,93		2,15		2,15		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
				Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai		Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																				Sumber Daya Manusia		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4.620.000.000		1.425.000.000		4.102.688.300		262.500.000	32,50	6,40		262.500.000	28,26	5,68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5.04.02	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia						4.620.000.000		1.425.000.000		4.102.688.300		262.500.000		6,40		262.500.000		5,68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	30,00		25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	1,15		1,00		1,00		1,30		130,00		1,30		113,04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MELAMPAUI	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	63,85		51,01		51,01		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
				Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,86		2,86		2,86		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SANGAT RENDAH	
6.01.0.00.0.00.01.00.00	INSPEKTORAT						91.804.752.174		30.124.030.316		31.335.945.006		316.266.000	25,09	3,46		316.266.000	25,09	1,04	Inspektorat	SANGAT RENDAH	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						91.804.752.174		30.124.030.316		31.335.945.006		316.266.000	25,09	3,46		316.266.000	25,09	1,04	Inspektorat		
6.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						78.264.752.174		25.699.030.316		26.861.965.006		0		0,00		0		0,00	Inspektorat		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH	
6.01.02	Program : Penyelenggaraan Pengawasan						10.135.000.000		3.280.000.000		3.047.950.000		316.266.000		10,38		316.266.000		3,12	Inspektorat		
				Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00		3,00		3,00		3,00		100,00		3,00		100,00		Inspektorat	SANGAT TINGGI	
				Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80,00		80,00		80,00		11,36		14,20		11,36		14,20		Inspektorat	SANGAT RENDAH	
				Jumlah temuan BPK	Laporan	8,00		10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH	
				Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		61,43		61,43		61,43		61,43		Inspektorat	RENDAH	
6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						3.405.000.000		1.145.000.000		1.426.030.000		0		0,00		0		0,00	Inspektorat		
				Capaian MCP KPK	Persen	83,00		81,00		81,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH	
				Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	2,00		2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Inspektorat	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.0.00.0.00.01.00.00	KECAMATAN JATILUHUR							10.622.037.440		3.485.424.995		3.577.340.893		795.403.822	0,00	15,82		795.403.822	0,00	5,16	Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN							10.622.037.440		3.485.424.995		3.577.340.893		795.403.822	0,00	15,82		795.403.822	0,00	5,16	Kecamatan Jatiluhur		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10.301.437.440		3.386.324.995		3.366.107.293		773.314.222		22,97		773.314.222		7,51	Kecamatan Jatiluhur		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							27.000.000		7.000.000		111.771.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							94.100.000		29.600.000		30.704.600		22.089.600		71,94		22.089.600		23,47	Kecamatan Jatiluhur		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							26.500.000		7.500.000		5.213.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur		
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							78.000.000		25.000.000		50.300.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							95.000.000		30.000.000		13.245.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Jatiluhur		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Jatiluhur	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.02.00.00	KECAMATAN SUKASARI							9.863.320.481		3.236.466.067		3.441.332.071		676.119.234	35,42	8,51		676.119.234	35,42	2,68	Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN							9.863.320.481		3.236.466.067		3.441.332.071		676.119.234	35,42	8,51		676.119.234	35,42	2,68	Kecamatan Sukasari		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.476.816.065		3.130.982.955		3.229.146.471		662.647.634		20,52		662.647.634		6,99	Kecamatan Sukasari		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		B		100,00		B		100,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT TINGGI	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							43.784.450		12.784.450		100.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukasari		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT TINGGI	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							71.604.750		21.704.750		5.851.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukasari		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							10.500.000		3.000.000		3.721.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukasari		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH	
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			112.426.066		26.914.762		58.480.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukasari		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH	
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			148.189.150		41.079.150		44.133.600		13.471.600		30,52		13.471.600		9,09	Kecamatan Sukasari		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		12,50		12,50		12,50		12,50		Kecamatan Sukasari	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.03.00.00					KECAMATAN MANIIS			9.104.603.519		2.987.507.138		3.218.289.234		587.296.278	55,12	16,78		587.296.278	55,12	8,08	Kecamatan Maniis	RENDAH	
7.01					KECAMATAN			9.104.603.519		2.987.507.138		3.218.289.234		587.296.278	55,12	16,78		587.296.278	55,12	8,08	Kecamatan Maniis		
7.01.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.680.317.494		2.861.568.444		2.969.189.734		551.824.678		18,59		551.824.678		6,36	Kecamatan Maniis		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		BB		114,29		BB		114,29		Kecamatan Maniis	MELAMPAUI	
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			127.500.000		40.500.000		123.655.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Maniis		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Maniis	SANGAT TINGGI	
7.01.03					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			108.286.025		29.438.694		31.030.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Maniis		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Maniis	SANGAT RENDAH	
7.01.04					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			17.500.000		5.000.000		6.820.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Maniis		
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Maniis	SANGAT RENDAH	
7.01.05					Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			81.000.000		26.000.000		56.247.000		22.000.000		39,11		22.000.000		27,16	Kecamatan Maniis		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		16,41		16,41		16,41		16,41		Kecamatan Maniis	SANGAT RENDAH	
7.01.06					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			90.000.000		25.000.000		31.347.500		13.471.600		42,98		13.471.600		14,97	Kecamatan Maniis		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Maniis	SANGAT TINGGI	
7.01.0.00.0.00.04.00.00					KECAMATAN TEGALWARU			10.622.037.440		3.485.424.995		3.565.987.728		682.815.027	24,17	15,78		682.815.027	24,17	5,80	Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01					KECAMATAN			10.622.037.440		3.485.424.995		3.565.987.728		682.815.027	24,17	15,78		682.815.027	24,17	5,80	Kecamatan Tegalwaru		
7.01.01					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.977.503.739		3.283.584.092		3.258.001.828		644.071.127		19,77		644.071.127		6,46	Kecamatan Tegalwaru		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT TINGGI	
7.01.02					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			108.000.000		35.500.000		135.128.000		2.580.000		1,91		2.580.000		2,39	Kecamatan Tegalwaru		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			117.580.903		37.970.903		43.313.900		23.767.900		54,87		23.767.900		20,21	Kecamatan Tegalwaru		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			42.150.000		13.450.000		12.161.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Tegalwaru		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			216.882.798		64.050.000		68.459.000		12.396.000		18,11		12.396.000		5,72	Kecamatan Tegalwaru		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			159.920.000		50.870.000		48.924.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Tegalwaru		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Tegalwaru	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.05.00.00	KECAMATAN PLERED						10.622.037.440		3.485.424.995		3.755.398.442		948.829.593	40,48	15,64		948.829.593	40,48	6,96	Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.755.398.442		948.829.593	40,48	15,64		948.829.593	40,48	6,96	Kecamatan Plered		
7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.324.395.422		3.391.924.995		3.567.095.586		926.201.693		25,97		926.201.693		8,97	Kecamatan Plered		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		CC		75,00		CC		75,00		Kecamatan Plered	SEDANG	
7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			21.800.000		7.500.000		107.274.956		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Plered		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Plered	SANGAT TINGGI	
7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			69.000.000		23.000.000		33.327.900		22.627.900		67,89		22.627.900		32,79	Kecamatan Plered		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		67,89		67,89		67,89		67,89		Kecamatan Plered	SEDANG	
7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			5.000.000		2.000.000		2.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Plered		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH	
7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			133.500.000		35.500.000		35.700.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Plered		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			68.342.018		25.500.000		10.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Plered		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Plered	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.0.00.0.00.06.00.00	KECAMATAN SUKATANI							12.139.471.361		3.983.342.851		4.128.546.775		775.665.208	13,33	3,30		775.665.208	13,33	1,09	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN							12.139.471.361		3.983.342.851		4.128.546.775		775.665.208	13,33	3,30		775.665.208	13,33	1,09	Kecamatan Sukatani		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							11.826.263.602		3.881.427.939		3.918.982.151		775.665.208		19,79		775.665.208		6,56	Kecamatan Sukatani		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							23.600.000		7.000.000		116.410.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukatani		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							32.500.000		10.500.000		13.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukatani		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							26.500.000		8.500.000		5.500.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukatani		
					Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							165.160.000		54.600.000		54.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukatani		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							65.447.759		21.314.912		20.654.624		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Sukatani		
					Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Kecamatan Sukatani	TINGGI	
7.01.0.00.0.00.07.00.00	KECAMATAN DARANGDAN							11.380.754.400		3.734.383.923		4.354.038.999		830.013.330	16,67	14,95		830.013.330	16,67	5,72	Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN							11.380.754.400		3.734.383.923		4.354.038.999		830.013.330	16,67	14,95		830.013.330	16,67	5,72	Kecamatan Darangdan		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10.734.754.400		3.523.383.923		3.621.703.099		807.182.430		22,29		807.182.430		7,52	Kecamatan Darangdan		
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							69.000.000		20.000.000		513.398.000		2.436.000		0,47		2.436.000		3,53	Kecamatan Darangdan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							64.000.000		20.000.000		25.826.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Darangdan		
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							25.000.000		10.000.000		19.843.000		2.140.000		10,78		2.140.000		8,56	Kecamatan Darangdan		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			364.000.000		120.000.000		140.758.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Darangdan		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			124.000.000		41.000.000		32.510.900		18.254.900		56,15		18.254.900		14,72	Kecamatan Darangdan		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Darangdan	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.08.00.00	KECAMATAN BOJONG						11.380.754.400		3.734.383.923		4.260.383.744		703.565.590	8,33	16,75		703.565.590	8,33	5,33	Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.260.383.744		703.565.590	8,33	16,75		703.565.590	8,33	5,33	Kecamatan Bojong		
7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.851.754.400		3.562.383.923		3.603.706.744		673.677.590		18,69		673.677.590		6,21	Kecamatan Bojong		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			73.000.000		23.000.000		509.313.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bojong		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			30.000.000		10.000.000		8.020.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bojong		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			24.000.000		8.000.000		9.450.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bojong		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			300.000.000		100.000.000		97.860.000		5.460.000		5,58		5.460.000		1,82	Kecamatan Bojong		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			102.000.000		31.000.000		32.034.000		24.428.000		76,26		24.428.000		23,95	Kecamatan Bojong		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Kecamatan Bojong	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.09.00.00	KECAMATAN WANAYASA						11.380.754.400		3.734.383.923		4.090.618.856		1.124.547.110	5,21	10,28		1.124.547.110	5,21	4,40	Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						11.380.754.400		3.734.383.923		4.090.618.856		1.124.547.110	5,21	10,28		1.124.547.110	5,21	4,40	Kecamatan Wanayasa		
7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.973.754.400		3.617.383.923		3.880.023.856		1.107.458.110		28,54		1.107.458.110		10,09	Kecamatan Wanayasa		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						26.000.000		7.000.000		112.600.000		2.100.000		1,87		2.100.000		8,08	Kecamatan Wanayasa		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						54.000.000		18.000.000		4.905.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Wanayasa		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						18.000.000		6.000.000		3.360.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Wanayasa		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						127.500.000		35.000.000		41.777.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Wanayasa		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						181.500.000		51.000.000		47.953.000		14.989.000		31,26		14.989.000		8,26	Kecamatan Wanayasa		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		31,25		31,25		31,25		31,25		Kecamatan Wanayasa	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.10.00.00	KECAMATAN KIARAPEDES						10.622.037.440		3.485.424.995		3.682.603.115		0	16,67	0,00		0	16,67	0,00	Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.682.603.115		0	16,67	0,00		0	16,67	0,00	Kecamatan Kiarapedes		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.496.037.440		3.445.424.995		3.523.251.115		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						17.000.000		5.000.000		105.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						15.000.000		5.000.000		4.750.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT TINGGI	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						15.000.000		5.000.000		5.054.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						34.000.000		10.000.000		35.033.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						45.000.000		15.000.000		9.515.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Kiarapedes		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Kiarapedes	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.11.00.00	KECAMATAN PASAWAHAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.356.929.910		624.581.089	32,35	6,36		624.581.089	32,35	5,96	Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.356.929.910		624.581.089	32,35	6,36		624.581.089	32,35	5,96	Kecamatan Pasawahan		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						9.615.369.589		3.182.916.067		3.129.704.910		595.881.089		19,04		595.881.089		6,20	Kecamatan Pasawahan		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						16.000.000		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pasawahan		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						97.000.000		30.000.000		150.173.000		28.700.000		19,11		28.700.000		29,59	Kecamatan Pasawahan		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		19,11		19,11		19,11		19,11		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						0		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pasawahan		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						51.000.000		0		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pasawahan		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						83.950.892		23.550.000		77.052.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pasawahan		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.12.00.00	KECAMATAN PONDOKSALAM						10.622.037.440		3.485.424.995		3.633.417.407		723.153.424	45,52	15,61		723.153.424	41,81	4,82	Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						10.622.037.440		3.485.424.995		3.633.417.407		723.153.424	45,52	15,61		723.153.424	41,81	4,82	Kecamatan Pondoksalam		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.131.123.626		3.327.552.609		3.343.715.807		687.681.824		20,57		687.681.824		6,79	Kecamatan Pondoksalam		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		B		B		B		100,00		B		77,78		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						130.800.000		42.500.000		100.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pondoksalam		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT TINGGI	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						16.500.000		5.000.000		21.300.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pondoksalam		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						27.600.000		8.000.000		10.650.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Pondoksalam		
	Tingkat penyelesaian konflik sosial			Persen	100,00			100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						176.537.814		57.372.386		133.990.000		22.000.000		16,42		22.000.000		12,46	Kecamatan Pondoksalam		
	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan			Persen	100,00			100,00		100,00		16,41		16,41		16,41		16,41		Kecamatan Pondoksalam	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						139.476.000		45.000.000		23.761.600		13.471.600		56,69		13.471.600		9,66	Kecamatan Pondoksalam		
	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan			Persen	100,00			100,00		100,00		56,69		56,69		56,69		56,69		Kecamatan Pondoksalam	RENDAH	
7.01.0.00.0.00.13.00.00	KECAMATAN PURWAKARTA						69.043.243.370		22.655.262.469		26.365.021.962		4.816.402.443	50,82	6,15		4.816.402.443	50,82	2,31	Kecamatan Purwakarta	RENDAH	
7.01	KECAMATAN						69.043.243.370		22.655.262.469		26.365.021.962		4.816.402.443	50,82	6,15		4.816.402.443	50,82	2,31	Kecamatan Purwakarta		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						44.822.799.780		14.829.743.173		16.917.700.944		3.318.352.443		19,61		3.318.352.443		7,40	Kecamatan Purwakarta		
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Predikat	BB			BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						330.000.000		110.000.000		610.712.018		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Purwakarta		
	Indeks Kepuasan Masyarakat			Predikat	Baik			Baik		Baik		Sangat Baik		113,25		Sangat Baik		113,25		Kecamatan Purwakarta	MELAMPAUI	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						23.155.180.150		7.499.760.050		8.663.849.000		1.498.050.000		17,29		1.498.050.000		6,47	Kecamatan Purwakarta		
	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan			Persen	100,00			100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						471.186.146		151.884.246		87.500.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Purwakarta		
	Tingkat penyelesaian konflik sosial			Persen	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Purwakarta	SANGAT TINGGI	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						224.077.294		53.875.000		60.260.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Purwakarta		
	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan			Persen	100,00			100,00		100,00		33,33		33,33		33,33		33,33		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						40.000.000		10.000.000		25.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Purwakarta		
	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan			Persen	100,00			100,00		100,00		33,33		33,33		33,33		33,33		Kecamatan Purwakarta	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.14.00.00	KECAMATAN BABAKAN CIKAO						9.863.320.481		3.236.466.067		3.460.825.015		759.139.664	13,33	3,94		759.139.664	13,33	1,32	Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.460.825.015		759.139.664	13,33	3,94		759.139.664	13,33	1,32	Kecamatan Babakan Cikao		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						9.571.374.517		3.151.551.305		3.211.825.015		759.139.664		23,64		759.139.664		7,93	Kecamatan Babakan Cikao		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						30.000.000		10.000.000		125.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						66.000.000		22.000.000		30.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Kecamatan Babakan Cikao	TINGGI	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						30.000.000		10.000.000		10.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						137.945.964		34.914.762		80.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						28.000.000		8.000.000		4.000.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Babakan Cikao		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Babakan Cikao	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.15.00.00	KECAMATAN CAMPAKA						10.622.037.465		3.485.424.995		3.573.750.107		715.260.304	4,17	13,21		715.260.304	4,17	5,88	Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						10.622.037.465		3.485.424.995		3.573.750.107		715.260.304	4,17	13,21		715.260.304	4,17	5,88	Kecamatan Campaka		
7.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.226.112.465		3.358.024.995		3.307.839.207		695.602.404		21,03		695.602.404		6,80	Kecamatan Campaka		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		B		B		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.02	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						18.915.000		6.000.000		118.960.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Campaka		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						46.341.750		14.700.000		21.529.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Campaka		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						43.200.000		14.400.000		14.260.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Campaka		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						218.468.250		69.300.000		77.394.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Campaka		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			69.000.000		23.000.000		33.767.900		19.657.900		58,21		19.657.900		28,49	Kecamatan Campaka		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Kecamatan Campaka	SANGAT RENDAH	
7.01.0.00.0.00.16.00.00	KECAMATAN CIBATU						12.139.471.389		3.983.342.851		4.124.682.803		706.776.274	28,57	3,10		706.776.274	25,93	1,02	Kecamatan Cibat	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						12.139.471.389		3.983.342.851		4.124.682.803		706.776.274	28,57	3,10		706.776.274	25,93	1,02	Kecamatan Cibat		
7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			11.599.471.389		3.783.342.851		3.805.153.507		706.776.274		18,57		706.776.274		6,09	Kecamatan Cibat		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		B		B		C		71,43		C		55,56		Kecamatan Cibat	SEDANG	
7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			120.000.000		45.000.000		182.478.500		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Cibat		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibat	SANGAT RENDAH	
7.01.03				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			75.000.000		30.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Cibat		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibat	SANGAT RENDAH	
7.01.04				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			75.000.000		30.000.000		0		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Cibat		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibat	SANGAT RENDAH	
7.01.05				Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			145.000.000		50.000.000		117.040.796		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Cibat		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Cibat	SANGAT RENDAH	
7.01.06				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			125.000.000		45.000.000		20.010.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Cibat		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan Cibat	SANGAT TINGGI	
7.01.0.00.0.00.17.00.00	KECAMATAN BUNGURSARI						9.863.320.481		3.236.466.067		3.418.969.154		661.740.393	33,33	3,42		661.740.393	33,33	1,15	Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH	
7.01	KECAMATAN						9.863.320.481		3.236.466.067		3.418.969.154		661.740.393	33,33	3,42		661.740.393	33,33	1,15	Kecamatan Bungursari		
7.01.01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.575.070.481		3.143.466.067		3.220.260.154		661.740.393		20,55		661.740.393		6,91	Kecamatan Bungursari		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB		BB		BB		100,00		BB		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT TINGGI	
7.01.02				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			62.250.000		20.000.000		16.012.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bungursari		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT TINGGI	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.03	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						54.800.000		17.000.000		112.849.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bungursari		
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH	
7.01.04	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						31.400.000		10.000.000		10.650.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bungursari		
				Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						121.000.000		40.000.000		52.040.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bungursari		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH	
7.01.06	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18.800.000		6.000.000		7.158.000		0		0,00		0		0,00	Kecamatan Bungursari		
				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Kecamatan Bungursari	SANGAT RENDAH	
8.01.0.00.0.00.02.00.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.989.961.466		10.509.398.223		51.578.977.434		957.627.027	15,23	5,04		957.627.027	15,23	1,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.989.961.466		10.509.398.223		51.578.977.434		957.627.027	15,23	5,04		957.627.027	15,23	1,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						12.598.644.384		4.088.634.734		3.915.105.934		924.367.027		23,61		924.367.027		7,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A		A		A		A		100,00		A		100,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT TINGGI	
8.01.02	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						3.455.000.000		1.150.000.000		928.764.900		14.305.000		1,54		14.305.000		0,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00		100,00		100,00		1,54		1,54		1,54		1,54		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	
8.01.03	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						9.595.817.082		3.170.763.489		44.960.114.200		0		0,00		0		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	
				Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	
8.01.04	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						756.000.000		250.000.000		224.920.000		0		0,00		0		0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	
8.01.05	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						1.515.500.000		500.000.000		180.965.900		7.765.000		4,29		7.765.000		0,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00		100,00		100,00		4,29		4,29		4,29		4,29		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024	Ket.
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8.01.06	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						4.069.000.000		1.350.000.000		1.369.106.500		11.190.000		0,82		11.190.000		0,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Tingkat penyelesaian konflik sosial				Persen	100,00		100,00		100,00		0,81		0,81		0,81		0,81		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SANGAT RENDAH	

Sumber : Laporan Dal-Ev RKPD Tahun 2024

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan daerah yang secara umum berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, terutama pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah;

Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan merupakan hambatan yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan daerah. Pada aspek sumber daya manusia, meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup, peningkatan ini masih belum memadai dan terdapat kesenjangan yang signifikan di antara masyarakat. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya pelatihan kerja yang relevan, serta ketidakmerataan distribusi layanan kesehatan menjadi beberapa tantangan utama.

Di sisi pemajuan kebudayaan, meskipun kebudayaan memegang peran penting dalam identitas dan pembangunan lokal, belum adanya dukungan yang memadai dari pemerintah daerah seringkali menjadi penghambat. Kurangnya investasi dalam pelestarian budaya lokal, kurangnya akses terhadap fasilitas budaya, serta minimnya promosi dan pengembangan industri kreatif lokal menjadi beberapa isu yang perlu ditangani.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan yang merata. Selain itu, pemajuan kebudayaan juga perlu mendapat perhatian serius melalui investasi dalam pelestarian dan promosi budaya lokal, pengembangan industri kreatif, serta peningkatan akses terhadap fasilitas budaya bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan, memperkuat identitas lokal sambil meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB masih perlu ditingkatkan secara optimal

Sejak pandemi Covid-19 melanda di berbagai daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, telah menguji kesiapan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan di daerah, akses pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang belum optimal dan memadai telah menjadi kendala yang harus diatasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan SDM tenaga kesehatan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai termasuk ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan, penyuluhan kesehatan reproduksi, pelayanan KB serta pemberdayaan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat harus terus ditingkatkan secara optimal.

Kualitas mutu pelayanan merupakan aspek krusial dalam memberikan perawatan kesehatan yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, akses pelayanan masih menjadi masalah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang sering kali sulit dijangkau oleh layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan dan KB yang optimal yang meliputi fasilitas rumah sakit, puskesmas, dan posyandu yang dilengkapi dengan peralatan medis dan tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu pelayanan yang berkualitas.

3. Masih rendahnya pelaksanaan reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup menjadi kenyataan pahit yang sering melanda Indonesia, membawa dampak destruktif bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi. Fenomena ini menandakan urgensi reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kelemahan sistem saat ini, seperti sistem peringatan dini yang tidak efisien, kurangnya edukasi dan kesiapan masyarakat, serta terbatasnya kapasitas tanggap darurat, memperparah dampak bencana. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, seperti lemahnya



penegakan hukum dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam, mempercepat kerusakan lingkungan.

Reformasi sistem menjadi sebuah keharusan. Memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan edukasi dan kesiapan masyarakat, dan memperkuat kapasitas tanggap darurat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan bencana. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menegakkan hukum, mendorong energi terbarukan, dan mengembangkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, menjadi solusi untuk melestarikan alam.

Manfaat reformasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan bencana dan meminimalisir dampaknya, tetapi juga melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya kolektif dan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

4. Kurangnya terobosan inovasi dalam upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat;

Penguatan sosial ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovasi yang dapat memberikan dorongan baru dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut bisa berupa program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuka akses pasar dan memperluas jangkauan ekonomi masyarakat. Dengan adanya terobosan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan penguatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang



berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang.

Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih harus terus digalakkan, disisi lain program pemulihan ekonomi sangat perlu untuk terus diprioritaskan guna menurunkan tingkat kemiskinan pada level terendah atau kemiskinan ekstrem.

Kebijakan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Belum optimalnya pelaksanaan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

Efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan baik dan efisien. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, masih diperlukan optimalisasi dan pengembangan yang lebih maju dan modern. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai inovasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi publik. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi birokrasi yang mendalam, termasuk peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan proses administrasi, dan pemberian insentif bagi pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas dari pemerintah.

Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara

efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

Efektifitas tata kelola pemerintahan juga perlu dilakukan pada level pemerintahan desa, dengan terus meningkatkan pembinaan baik secara administrasi, maupun kelembagaannya, termasuk peningkatan SDM aparatur desa. Selain itu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu digalakan guna mendukung dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan daerah.

Disamping itu aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat juga harus terus ditingkatkan guna menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi di tahun 2024 nanti akan diselenggarakannya Pilkada Serentak, yang tentunya aspek ketentraman dan ketertiban harus ditingkatkan, sehingga target pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, terutama pada aspek pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan pelayanannya agar lebih efektif, mudah, maju dan modern.

6. Belum meratanya penyediaan sarana infrastruktur dan konektivitas wilayah;

Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata merupakan aspek penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi infrastruktur di berbagai wilayah. Beberapa wilayah masih menghadapi tantangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi akses masyarakat terhadap layanan penting, serta meningkatkan ketidaksetaraan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur di wilayah yang terpinggirkan,



termasuk alokasi anggaran yang lebih besar, perencanaan yang lebih baik, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur juga dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di berbagai wilayah, sehingga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai sarana konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) sudah sepatutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Kendati demikian pada aspek penyediaan infrastruktur lainnya seperti penyediaan infrastruktur terkait sanitasi, pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana pemerintahan, perekonomian, perumahan dan permukiman, konektivitas wilayah, dan fasilitas umum lainnya masih perlu ditingkatkan, dan masih belum merata di setiap wilayah.



2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1.01 Bidang Pendidikan

1. Masih kurang meratanya pelayanan pendidikan;
2. Sarana dan Prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas;
3. Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan;
4. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap;
5. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan terutama Dunia Usaha dan Dunia Industri

2.3.2.1.02 Bidang Kesehatan

1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi lansia dan penyandang cacat;
2. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir;
3. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus *stunting*;
4. Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, ISPA, diare, dan sebagainya);
5. Penyakit degeneratif, penyakit tidak menular pada usia diatas 15 tahun masih belum optimal penanganannya;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
7. Fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal mutu pelayanannya;
8. Jumlah peserta penjaminan kesehatan menurun;
9. Masih kurangnya tenaga medis kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensi serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai kebutuhan, serta kualitas sehingga pelayanan kesehatan belum optimal;
10. Masih adanya penduduk miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

2.3.2.1.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
3. Cakupan air bersih/air minum masih ada yang belum memenuhi SPM;
4. Belum optimalnya pengelolaan drainase pada beberapa titik kawasan permukiman maupun jalan, sehingga menyebabkan potensi genangan air yang cukup tinggi;
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional, dimana prasarana TPA/TPS masih kurang sehingga daya tampung sampah belum optimal;
6. Masih banyak kerusakan jalan dan jembatan yang kondisinya kurang baik akibat beban yang melebihi tonase, kontur tanah yang labil, maupun akibat bencana alam;
7. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal.

2.3.2.1.04 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum adanya peraturan pengelolaan PSU di lingkungan permukiman;
2. Terbatasnya penyediaan lahan dan pemenuhan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
3. Masih terdapat kawasan yang perlu penanganan lebih lanjut untuk mencegah menjadi kawasan kumuh;
4. Belum optimalnya proses peningkatan serah terima PSU;
5. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di kawasan kumuh dan non kumuh;
6. Belum optimalnya penanganan Rutilahu bencana di kawasan rawan bencana;
7. Perlu diadakan review baseline kekumuhan untuk luasan kumuh terbaru;

2.3.2.1.05 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan risiko bencana, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;



2. Masih kurangnya rasio aparaturnya pemadam kebakaran per 1:5.000 penduduk;
3. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, terutama Perda terkait Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.3.2.1.06 Bidang Sosial

1. Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar;
2. Ketersediaan data PPKS daerah belum terpadu dan terintegrasi dengan data pusat;
3. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap permasalahan sosial (kondisi anak terlantar, penyandang disabilitas);
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti kewenangan Kabupaten/Kota;
5. Belum terbentuknya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten serta Puskesmas di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Purwakarta;
6. Belum optimalnya integrasi data kemiskinan;
7. Belum adanya Kampung Siaga Bencana pada program perlindungan korban sosial bagi korban bencana alam/sosial;
8. Belum optimalnya SDM, alokasi anggaran, dan sarana prasarana yang mendukung program perlindungan jaminan sosial;
9. Belum tersedianya Rumah Singgah yang optimal untuk penampungan sementara PPKS yang belum diketahui identitas/keluarganya (Terlantar);
10. Belum adanya Panti Rehabilitasi Sosial untuk PPKS milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.3.2.2.07 Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan;
2. Pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan kerja karena keterbatasan sarana prasarana dan instruktur, serta kurikulum yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
4. Belum tersedianya data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja, Persentase tenaga kerja yang siap kerja, AKAD (antar kerja antar daerah) yang dikarenakan tidak adanya penganggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Belum sepenuhnya semua pekerja memahami hukum ketenagakerjaan;
6. Relatif masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja, terlebih dengan akan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) beserta konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pekerja dan calon;
7. Isu terkait pasar kerja didorong menjadi inklusi, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan;
8. Pengusulan kenaikan UMP/UMK selalu terjadi setiap tahun.

2.3.2.2.08 Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG dikarenakan kurangnya komitmen masing-masing perangkat daerah;
2. Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia;
3. Masih banyak ditemukan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak;
4. Masih kurangnya sharing dana desa untuk keberlanjutan P2WKSS;
5. Belum optimalnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Kesenjangan gender dalam pembangunan masih tinggi.



2.3.2.2.09 Bidang Pangan

1. Serangan OPT yang masih tinggi;
2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi;
3. Pengawasan ketersediaan dan harga pangan belum optimal;
4. Pengadaan beras dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum optimal.

2.3.2.2.10 Bidang Pertanahan

1. Lambatnya proses administrasi pertanahan;
2. Kurangnya kesadaran hukum terkait pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat, sehingga banyak menimbulkan konflik;
3. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa;
4. Minimnya bukti otentik tentang kepemilikan maupun tukar menukar tanah.

2.3.2.2.11 Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3;
2. Masih belum optimalnya penanganan sampah yang terstruktur dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan sarana prasarana TPS/TPST/TPS3R, pengolahan, distribusi dan kelembagaan/komunitas pengelola sampah;
3. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL;
4. Kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya masih sangat kurang
5. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

2.3.2.2.12 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



2. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan/memperbarui data kependudukan.

2.3.2.2.13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai katalis perekonomian desa;
3. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
5. Hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi;
6. Salah satu indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu aspek ekologi di beberapa desa belum terpenuhi;
7. Belum adanya dukungan terhadap program Rumah Desa Sehat (RDS) yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dan PDT di tingkat Kabupaten.

2.3.2.2.14 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam ber KB;
2. Masih Rendahnya Pelayanan PIK KRR terhadap Remaja;
3. Rendahnya Rasio Petugas Lapangan KB dibanding dengan jumlah Wilayah Pemerintahan (Desa/Kelurahan);
4. Pertumbuhan penduduk yang cepat akibat banyaknya migrasi penduduk dan tingginya angka kelahiran;
5. Masih banyaknya usia kawin pertama di usia dini;

6. Kurang optimalnya pelibatan Poktan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dalam mendorong kepesertaan KB;

2.3.2.2.15 Bidang Perhubungan

1. Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat;
2. Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan);
3. Minat Masyarakat terhadap angkutan umum menurun, karena maraknya angkutan yang sifatnya online;
4. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai;
5. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar;
6. Penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan, sehingga kerap terjadi kemacetan lalu lintas;
7. Belum adanya Terminal Angkutan Penumpang;
8. Kurangnya tertib hukum pengendara kendaraan;
9. Kurangnya sarana dan prasaran yang dimiliki;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian khusus di bidang Perhubungan.

2.3.2.2.16 Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum terintegrasinya rencana induk (Peta Rencana dan Arsitektur SPBE) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Nasional;
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi, terutama di daerah yang terpencil;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi.



2.3.2.2.17 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, sehingga masih banyak koperasi yang tidak aktif;
2. Rendahnya daya saing UKM;
3. Masih rendahnya persentase UMKM mandiri;
4. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang;
5. Terbatasnya kompetensi SDM koperasi dan UMKM, sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar;
6. Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas

2.3.2.2.18 Bidang Penanaman Modal

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Masih terdapat tumpang-tindihnya Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan sehingga mempengaruhi iklim investasi, implementasi regulasi di daerah serta adanya NSPK dari kementerian teknis terkait;
3. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Purwakarta yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Purwakarta;
4. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan kepada investor;
5. Adanya ijin-ijin tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait, sehingga memperlambat proses perijinan;
6. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha;
7. Upah Minimum Kabupaten yang dinilai terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lain;
8. Belum tersedianya peta peluang investasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan kepada investor dalam keputusan investasinya;
9. Keterbatasan kemampuan pelaku UMK untuk bersaing di tingkat sektoral, regional dan global;

10. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan rencana investasi dari para investor;
11. Implementasi regulasi yang belum optimal baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta adanya Peraturan perundangan yang berubah-ubah dengan adanya NSPK dari Peraturan Kementerian terkait.

2.3.2.2.19 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Purwakarta, hal ini terlihat dari rendahnya cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi serta pencegahan perilaku negatif;
2. Masih rendahnya partisipasi/kesadaran masyarakat dalam berolahraga;
3. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan;
4. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
5. Kurangnya penataan sistem festival dan kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan di daerah;
6. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Purwakarta;
7. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan;
8. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional;
9. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Purwakarta;
10. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional.

2.3.2.2.20 Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus terkait dengan statistika, planologi, informatika, geodesi dan survei pemetaan informasi geografi untuk melaksanakan tanggungjawab pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara akurat dan real time;

2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi Pembangunan;
5. Belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi satu sama lain.

2.3.2.2.21 Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian dan cyber security;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;
5. Implementasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam kedinasan belum menyeluruh;
6. Masih rendahnya kepedulian dan komitmen stakeholder terhadap keamanan informasi;
7. Belum maksimalnya penggunaan secure email sanapati;

2.3.2.2.22 Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain);
2. Terbatasnya kesediaan tenaga ahli cagar budaya dan SDM yang relevan dengan keilmuan yang menyangkut kecabarbudayaan;
3. Belum optimalnya produk hukum yang memayungi cagar budaya di Kabupaten Purwakarta, serta belum tersedianya museum konvensional;
4. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya;
5. Belum tersedia gedung kesenian daerah;

6. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan;
7. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah. Perkembangan pariwisata tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sarana rekreasi, pengembangan kebudayaan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Belum optimalnya pembinaan terhadap para seniman serta kurangnya pengadaan pelatihan manajemen sanggar, berkembangnya sanggar seni baik seni musik maupun seni tari di Kabupaten Purwakarta sudah baik namun belum diimbangi dengan tenaga ahli yang relevan dan belum optimalnya pengetahuan manajemen sanggar pada setiap sanggar seni;
9. Kurangnya produktivitas sanggar seni karena terkendala sarana, alat pendukung, dan alat kesenian; belum optimalnya bantuan sarana prasarana penunjang dan alat kesenian yang merata di tiap sanggar;
10. Belum Optimalnya Pendataan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan ciri peninggalan sejarah di daerah tersebut. Sekaligus menjadi daya tarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlihat dari banyaknya peninggalan suatu daerah yang belum diteliti;
11. Perkembangan kesenian yang signifikan menyebabkan banyak berdirinya sanggar-sanggar seni baru yang belum terdata dan kurangnya pemahaman masyarakat/seniman untuk mendaftarkan sanggarnya sehingga menyebabkan pendataan sanggar belum maksimal;

2.3.2.2.23 Bidang Perpustakaan

1. Masih kurangnya pustakawan yang terampil dan bersertifikasi;
2. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan;
4. Terbatasnya koleksi perpustakaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan *e-book* sebagai media literasi digital;
6. Belum optimalnya dukungan dari para stakeholder terhadap perkembangan perpustakaan.

2.3.2.2.24 Bidang Kearsipan

1. Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan;
2. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (*e-arsip*);
3. Masih minimnya sarana dan prasarana kearsipan;
4. Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan serta pelayanan kearsipan;
5. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.

2.3.2.3.25 Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya kesadaran pembudidaya ikan untuk melaksanakan usaha bersama dalam bentuk korporasi;
2. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi;
3. Sumber daya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang teknis perikanan masih relatif terbatas;
4. pertumbuhan produksi perikanan relatif lambat, sehingga penyediaan ikan masih terbatas;
5. Potensi sumber daya perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi perikanan dalam upaya penyediaan pangan hewani;
6. Kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah, relatif masih terbatas;
7. Masih terbatasnya penyediaan produksi daging, telur, dan susu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini penyediaan sapi potong dan ayam buras Kabupaten Purwakarta sebagian besar masih bergantung kepada pasokan dari luar Kabupaten;
8. Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang berkembangnya sentra-sentra bibit/benih komoditas unggulan peternakan dan perikanan.

2.3.2.3.26 Bidang Pariwisata

1. Rata-rata lama kunjungan wisatawan masih belum optimal, sebagian besar masih 1 hari (one day trip) dan hanya sebagian kecil antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan kapasitas destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Purwakarta;
2. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang, dan mitigasi bencana;
3. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
4. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan tersertifikasi baik untuk para stakeholder pariwisata maupun para pelaku usaha pariwisata serta komunitas mitra Pariwisata;
5. Masih rendahnya “sadar wisata” masyarakat, terutama bagi masyarakat sekitar destinasi wisata;
6. Belum Optimalnya Daya Saing Destinasi Pariwisata, dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur;
7. Masih Kurangnya Penataan dan Pengamanan Objek Wisata. Kondisi potensi objek pariwisata Purwakarta umumnya belum siap jual, namun seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata maka perlu penataan yang lebih baik;
8. Penambahan destinasi wisata belum diimbangi dengan infrastruktur dan pengelolaan yang baik.

2.3.2.3.27 Bidang Pertanian

1. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas;
2. Terbatasnya lahan pertanian dan belum maksimalnya pemanfaatan lahan;
3. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berstatus PNS yang terus berkurang karena mencapai Batas Usia Pensiun;
4. Terbatasnya permodalan dan masih rendahnya regenerasi petani;
5. Meningkatnya resiko kerugian usaha tani akibat dampak perubahan iklim;
6. Pemasaran hasil pertanian belum maksimal;



7. Perubahan iklim global dan meningkatnya populasi organisme tanaman yang dapat mempengaruhi produksi pertanian;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai di Rumah Potong Hewan (RPH);
9. Perlunya meningkatkan kinerja petugas paramedis veteriner dan inseminator serta pengawasan mutu pakan, melalui bimtek dan sertifikasi medik dan paramedik;
10. Meningkatnya resiko kerugian usaha peternakan akibat dampak penyakit menular zoonosis;

2.3.2.3.30 Bidang Perdagangan

1. Masih rendahnya serapan resi Gudang;
2. Masih rendahnya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat;
3. Masih ditemukannya kasus peredaran barang rusak/kadarluarsa dan produk makanan dengan bahan berbahaya.
4. Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan peredaran barang tiruan serta barang ilegal di Kabupaten Purwakarta masih perlu ditingkatkan;

2.3.2.3.31 Bidang Perindustrian

1. Industri kecil belum optimal dalam memanfaatkan *e-commerce*;
2. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
3. Masih rendahnya pelaksanaan pembinaan terhadap sentra industri;
4. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing dibandingkan produk serupa dari daerah lain;
5. Dalam penerbitan perijinan usaha industri belum bersinergi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten.

2.3.2.3.32 Bidang Transmigrasi

1. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigran yang disediakan oleh pemerintah provinsi maupun pusat yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya;



2. Dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terkadang terlambat ditanda tangani oleh kepala daerah kabupaten penerima;
3. Kementerian PDT belum menyiapkan lahan dan pemukiman pada lokasi penerima.

2.3.2.4.01 Unsur Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
2. Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis *reinventing government*;
3. Masih belum optimalnya kebutuhan organisasi yang sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Masih belum optimalnya penilaian penyelenggaraan LPPD dan RB Kabupaten;

2.3.2.4.02 Unsur Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya pemahaman ketugasan dari anggota dewan;
2. Belum optimalnya pemenuhan ketepatan jadwal pembahasan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

2.3.2.5.01 Unsur Perencanaan

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan *output*, *outcome* yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
2. Belum optimalnya pelibatan stakeholder non pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
4. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;



5. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
7. Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah.

2.3.2.5.02 Unsur Keuangan

1. Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
2. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;

2.3.2.5.03 Unsur Kepegawaian

1. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

2.3.2.5.04 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Purwakarta.

2.3.2.5.05 Unsur Penelitian dan Pengembangan

1. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Purwakarta.

2.3.2.5.06. Unsur Pengelolaan Perbatasan

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan di Kabupaten Purwakarta;



2.3.2.6.01 Unsur Pengawasan (Inspektorat)

1. Masih sedikit unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kab. Purwakarta;
2. Masih belum optimalnya hasil tindaklanjut temuan BPK RI yang telah ditindaklanjuti;
3. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan pengawasan/pembinaan belum optimal;

2.3.2.7.01 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/kelurahan;
2. Terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sesuai pada perencanaan yang telah dibuat bersama.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan dari segi Kuantitas dan Kualitas dalam mendukung tugas-tugas organisasi;
5. Belum optimalnya peran serta dan swadaya Masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan, peran serta dan swadaya Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

2.3.2.8.01 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pendidikan politik, serta pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang masih perlu di tingkatkan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rumusan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan ekonomi di wilayahnya. Tujuan utama dari arah kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.

Prinsip-prinsip dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah, antara lain : 1). Berbasis Potensi Daerah, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi pariwisata. 2). Berkelanjutan, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. 3). Inklusif, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh semua pihak. dan 4). Terintegrasi, yaitu bahwa kebijakan ekonomi daerah harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan sektoral lainnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2025 mempertimbangkan hasil capaian realisasi indikator makro pembangunan tahun 2023 serta proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025. Adapun capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan



ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut merangkak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen. Namun di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke angka 4,97 persen.

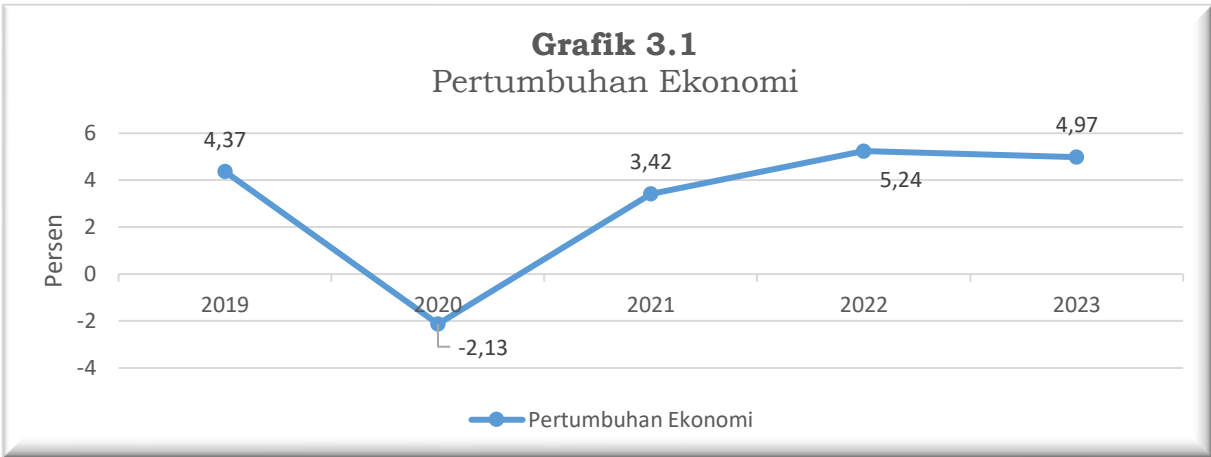
Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

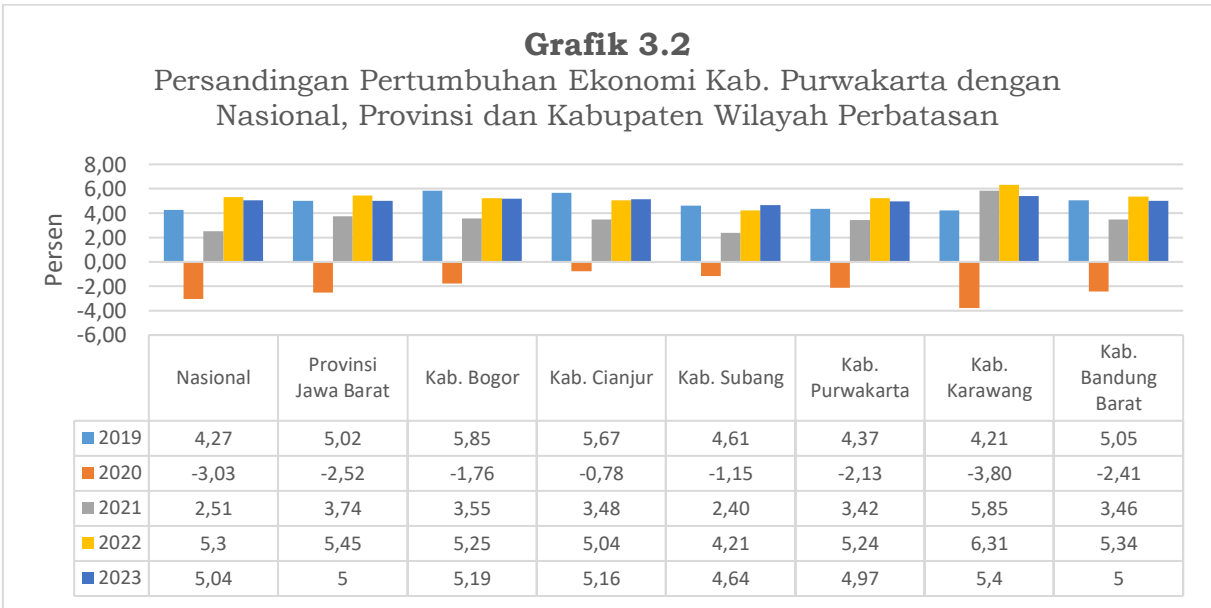
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	4,27	-3,03	2,51	5,30	5,04
2	Provinsi Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00
3	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
4	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
5	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,40	4,21	4,64
6	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
7	Kab. Karawang	4,21	-3,80	5,85	6,31	5,40
8	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kab. Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta sangat fluktuatif, dengan pertumbuhan positif di 2019, 2021, 2022, dan 2023, dan pertumbuhan negatif di 2020. Pertumbuhan di 2023 (4,97%) lebih rendah dibandingkan 2022 (5,24%). Penurunan terdalam terjadi di 2020 (-2,13%) akibat pandemi Covid-19. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi Covid-19 di 2020.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purwakarta, sektor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan



penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.720,79	2.726,05	2.770,71	2.870,50	2.901,24
B	Pertambangan dan Penggalian	31,59	30,91	33,49	33,2	33,46
C	Industri Pengolahan	26.974,84	26.205,23	27.126,57	28.876,61	30.483,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	279,6	274,22	306,12	314,04	323,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,15	14,84	16,27	16,64	16,98
F	Konstruksi	3.247,02	3.081,79	3.243,27	3.293,70	3.411,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.665,63	5.393,40	5.506,10	5.717,88	5.914,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1.060,28	1.029,85	1.037,98	1.091,34	1.199,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	574,21	556,41	561,28	595,94	636,99
J	Informasi dan Komunikasi	988,61	1.265,58	1.345,83	1.406,78	1.508,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046,73	1.053,51	1.125,29	1.124,97	1.155,96
L	Real Estat	636,8	638,17	698,51	736,1	778,06
M, N	Jasa Perusahaan	214,89	202,6	219,43	240,03	255,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522,5	499,32	488,12	480,35	487,99
P	Jasa Pendidikan	1.005,91	1.065,31	1.080,25	1.103,42	1.148,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,64	225,61	240,38	251,87	265,39
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.068,02	1.030,44	1.040,55	1.139,61	1.219,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.582,19	4.650,21	4.650,04	5.026,60	5.332,31
B	Pertambangan dan Penggalian	43,44	43,07	47,94	49,2	50,85
C	Industri Pengolahan	38.714,75	38.224,62	40.769,59	44.549,33	47.918,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	450,52	441,74	502,83	520,9	540,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,73	24,63	27,16	28,08	28,89
F	Konstruksi	5.166,05	4.926,75	5.342,72	5.640,50	6.044,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.122,54	7.828,29	8.048,88	8.492,28	8.985,27
H	Transportasi dan Pergudangan	1.687,67	1.669,51	1.720,99	1.892,07	2.217,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	762,19	745,1	778,21	855,08	947,81
J	Informasi dan Komunikasi	968,79	1.241,29	1.293,62	1.314,43	1.409,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.675,07	1.680,88	1.824,62	1.982,94	2.080,86
L	Real Estat	867,31	875,85	961,5	1.024,64	1.091,60
M, N	Jasa Perusahaan	327,99	316,27	343,89	380,77	420,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903,63	868,07	856,85	841,98	864,88
P	Jasa Pendidikan	1.521,95	1.651,87	1.715,10	1.782,21	1.891,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,17	337,35	363,37	386,03	418,48
R, S, T, U	Jasa lainnya	1.560,51	1.526,09	1.530,92	1.710,50	1.886,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Tabel 3.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,15	0,19	1,64	3,6	1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,08	-2,13	8,32	-0,85	0,77
C	Industri Pengolahan	3,09	-2,85	3,52	6,45	5,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,28	-1,92	11,63	2,58	2,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	12,8	9,63	2,31	2,04
F	Konstruksi	5,88	-5,09	5,24	1,55	3,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	-4,8	2,09	3,85	3,44
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	-2,87	0,79	5,14	9,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,65	-3,1	0,88	6,17	6,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,67	28,02	6,34	4,53	7,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	0,65	6,81	-0,03	2,76
L	Real Estat	9,3	0,22	9,46	5,38	5,7
M, N	Jasa Perusahaan	9,23	-5,72	8,31	9,39	6,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	-4,44	-2,24	-1,59	1,59
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,9	1,4	2,14	4,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	-0,89	6,54	4,78	5,37
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,09	-3,52	0,98	9,52	6,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	6,94	6,57	6,57	6,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
C	Industri Pengolahan	57,18	57,01	57,6	58,25	58,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,66	0,71	0,68	0,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	7,63	7,35	7,55	7,38	7,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12	11,68	11,37	11,1	10,94
H	Transportasi dan Pergudangan	2,49	2,49	2,43	2,47	2,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,11	1,1	1,12	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,43	1,85	1,83	1,72	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	2,51	2,58	2,59	2,53
L	Real Estat	1,28	1,31	1,36	1,34	1,33
M, N	Jasa Perusahaan	0,48	0,47	0,49	0,5	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	1,29	1,21	1,1	1,05
P	Jasa Pendidikan	2,25	2,46	2,42	2,33	2,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,5	0,51	0,5	0,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,3	2,28	2,16	2,24	2,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 3.7

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar -2,13% akibat pandemi COVID-19. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,42%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 5,24% dan 4,97%.

PDRB atas dasar harga berlaku mengalami Tren serupa dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB sebesar 1,91%. PDRB mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,22%. Pertumbuhan PDRB terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 8,13% dan 7,54%.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2023. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2022 (5,24%), dan Laju pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2020 (-2,13%).

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta adalah Industri Pengolahan (26,33% pada tahun 2023). Sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (18,83%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,27%). Dengan demikian, Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Pertanian,



Kehutanan, dan Perikanan adalah sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	Kab. Purwakarta	46.278,21	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50
	Kab. Karawang	163.732,48	157.849,53	166.941,49	177.470,89	187.051,65
	Kab. Subang	28.672,90	28.344,32	28.960,89	30.202,58	31.604,98
	Kab. Bandung Barat	31.398,35	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19
	Kab. Cianjur	32.039,32	31.790,76	32.897,52	34.556,40	36.339,55
	Kab. Bogor	156.876,01	154.113,60	159.589,55	167.966,18	176.683,58
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	Kab. Purwakarta	67.709,51	67.051,58	70.778,25	76.477,55	82.129,26
	Kab. Karawang	230.021,38	225.063,63	243.713,20	268.228,79	290.916,32
	Kab. Subang	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.160,40	49.692,22
	Kab. Bandung Barat	47.180,08	46.478,90	48.764,31	52.921,29	56.945,18
	Kab. Cianjur	46.957,85	47.528,97	50.137,65	53.988,97	58.391,22
	Kab. Bogor	237.227,08	235.887,26	248.892,48	267.743,69	289.106,15
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	4,37	-2,13	3,42	5,24	4,97
	Kab. Karawang	4,21	-3,8	5,85	6,31	5,4
	Kab. Subang	4,61	-1,15	2,4	4,21	4,64
	Kab. Bandung Barat	5,05	-2,41	3,46	5,34	5
	Kab. Cianjur	5,67	-0,78	3,48	5,04	5,16
	Kab. Bogor	5,85	-1,76	3,55	5,25	5,19
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	Kab. Purwakarta	3,16	3,16	3,15	3,13	3,11
	Kab. Karawang	10,73	10,54	10,86	10,96	11
	Kab. Subang	1,9	1,89	1,88	1,89	1,88
	Kab. Bandung Barat	2,2	2,19	2,17	2,16	2,15
	Kab. Cianjur	2,19	2,24	2,23	2,21	2,21
	Kab. Bogor	11,06	11,12	11,09	10,94	10,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



c. Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

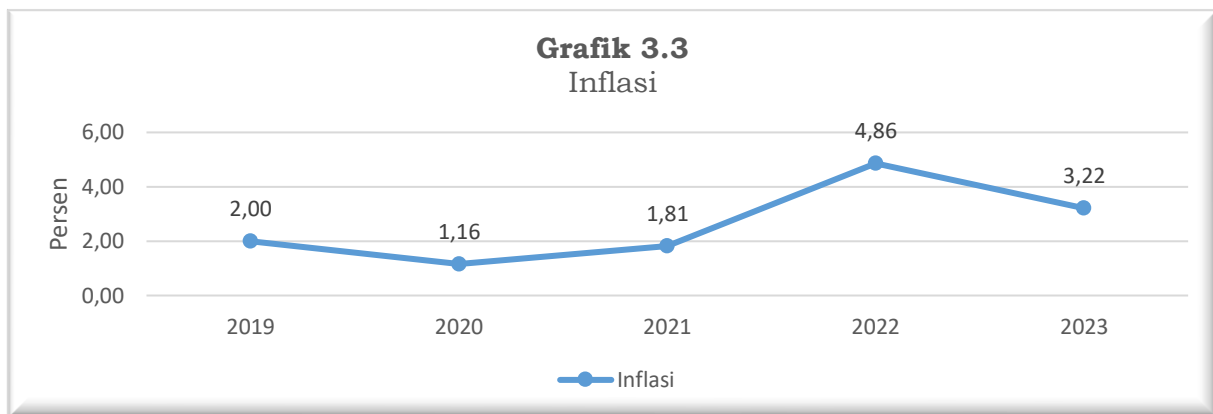
Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon sebagai *sister city* yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran inflasi Kabupaten Purwakarta, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.9

Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi	Persen	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Inflasi di Kabupaten Purwakarta menunjukkan data fluktuasi selama periode 2019-2023. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 (1,16%) dan Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (4,86%). Inflasi pada tahun 2023 (3,22%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerahnya.

Faktor-faktor yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta antara lain; Harga bahan makanan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di Kabupaten Purwakarta. Fluktuasi harga bahan makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca, musim, dan pasokan. Kemudian harga barang dan jasa lainnya, seperti transportasi, perumahan, dan pendidikan juga dapat mendorong inflasi. Selain itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), juga dapat mendorong inflasi.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, antara lain; dengan mengadakan operasi pasar secara rutin untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin mengadakan rapat untuk membahas perkembangan inflasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Kerjasama dengan distributor untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan makanan. kemudian Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga mengembangkan program



ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan makanan.

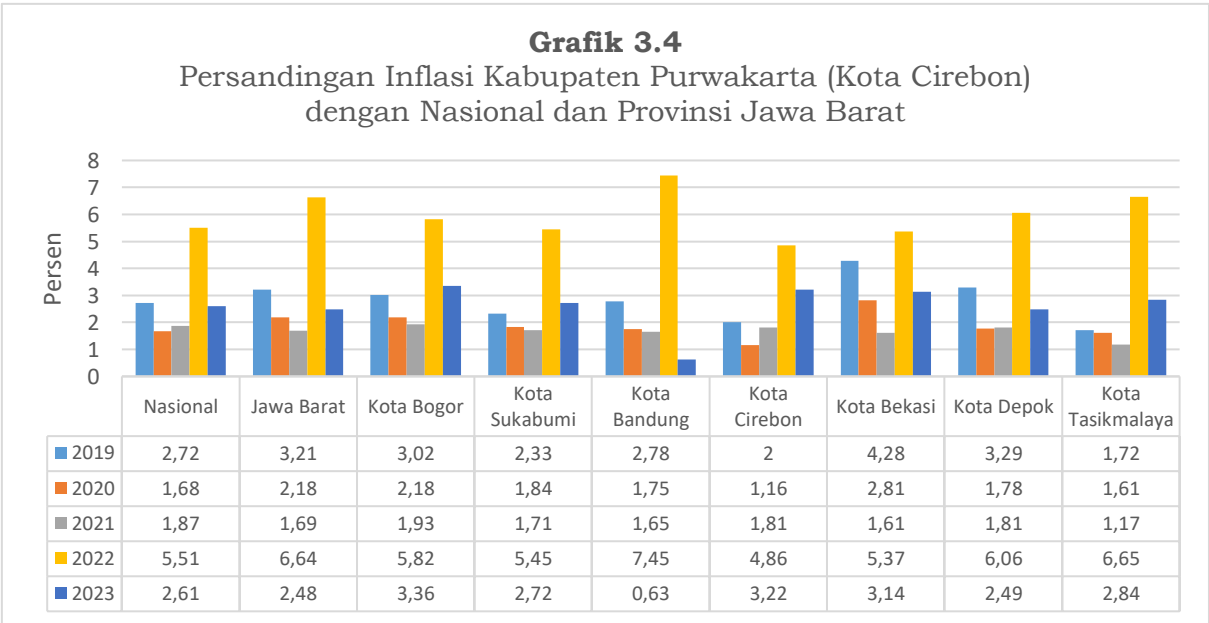
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

No.	Inflasi (persen)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,64	2,48
3	Kota Bogor	3,02	2,18	1,93	5,82	3,36
4	Kota Sukabumi	2,33	1,84	1,71	5,45	2,72
5	Kota Bandung	2,78	1,75	1,65	7,45	0,63
6	Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22
7	Kota Bekasi	4,28	2,81	1,61	5,37	3,14
8	Kota Depok	3,29	1,78	1,81	6,06	2,49
9	Kota Tasikmalaya	1,72	1,61	1,17	6,65	2,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

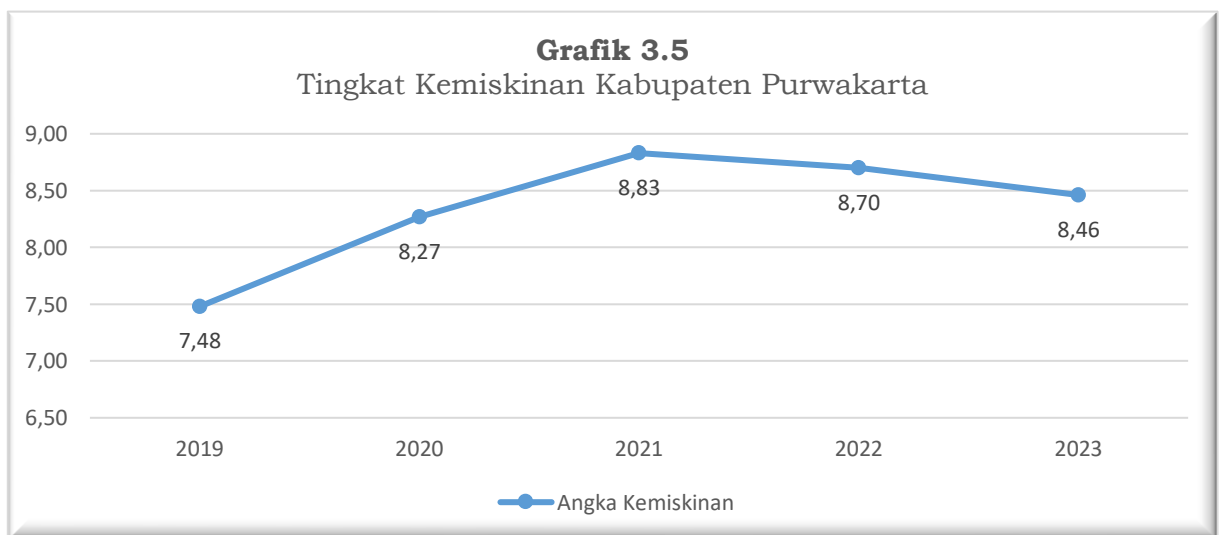
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.11

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,48	8,27	8,83	8,7	8,46
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

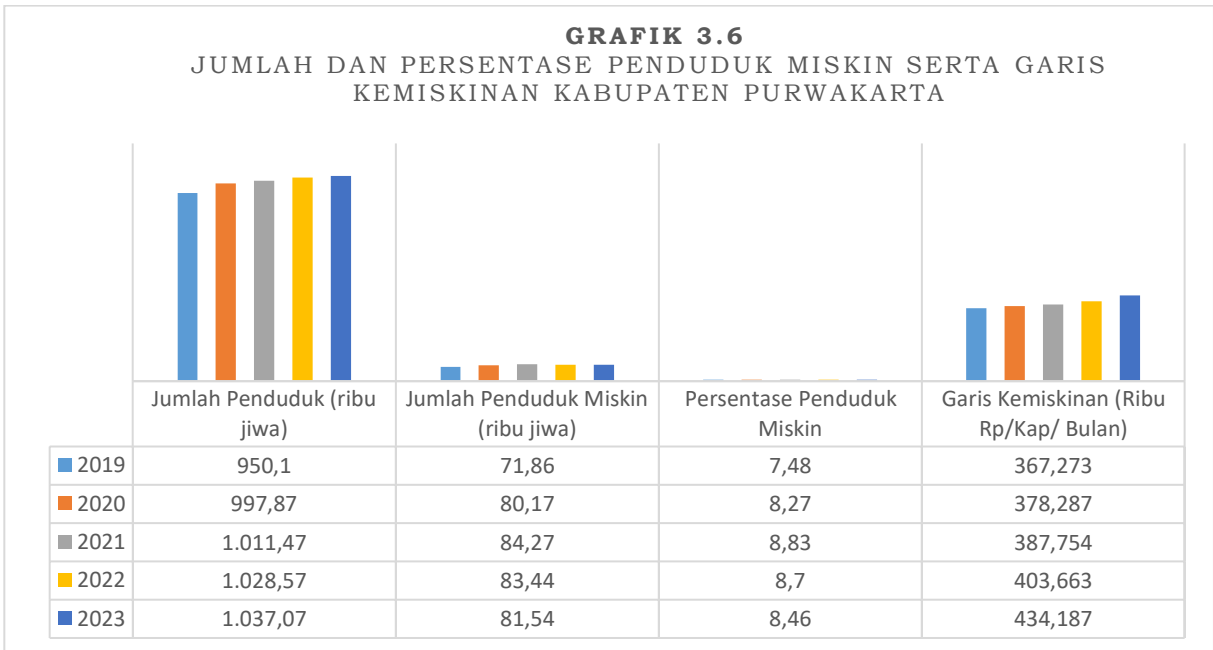


Tabel 3.12

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54
3.	Persentase Penduduk Miskin	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
4.	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.13

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2023

Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kab. Purwakarta	950,10	997,87	1.011,47	1.028,57	1.037,07
	Kab. Karawang	2.353,92	2.439,09	2.468.58	2.505,25	2.526,00
	Kab. Subang	1.595,83	1.595,32	1.608.59	1.624,39	1.649,82
	Kab. Bandung Barat	1.699,90	1.788,34	1.814.23	1.846,97	1.859,64
	Kab. Cianjur	2.263,07	2.477,56	2.506.68	2.542,79	2.558,14
	Kab. Bogor	5.965,41	5.427,07	5.489.54	5.566,84	5.627,02
	Prov. Jawa Barat	49.316,7	48.274,2	48.782,4	49.405,81	49.860,33
	Nasional	268.074,6	270.203,9	272.682,5	275.773,8	278.696,2
	Kab. Purwakarta	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54



Uraian	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Kab. Karawang	171,721	195,410	210,780	199,910	187,23
	Kab. Subang	127,460	149,810	158,970	155,340	152,33
	Kab. Bandung Barat	163,437	179,460	190,770	183,670	179,43
	Kab. Cianjur	209,751	234,470	260,020	246,810	240,06
	Kab. Bogor	395,000	465,670	491,240	474,740	453,76
	Prov. Jawa Barat	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98	3.888,60
	Nasional	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55
Persentase Penduduk Miskin (persen)	Kab. Purwakarta	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
	Kab. Karawang	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87
	Kab. Subang	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52
	Kab. Bandung Barat	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52
	Kab. Cianjur	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
	Kab. Bogor	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
	Prov. Jawa Barat	6,91	7,88	8,40	8,06	7,62
	Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)	Kab. Purwakarta	367.273	378.287	387.754	403.663	434.187
	Kab. Karawang	440.347	466.152	496.201	521.158	555.889
	Kab. Subang	339.607	351.885	360.691	372.308	404.320
	Kab. Bandung Barat	341.307	362.212	374.470	393.956	426.355
	Kab. Cianjur	350.760	371.699	387.631	406.829	437.327
	Kab. Bogor	373.799	402.877	418.483	443.787	482.174
	Prov. Jawa Barat	391.009	411.342	433.041	477.969	495.229
	Nasional	418.515	437.902	464.474	513.170	547.175

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat kemiskinan, yang diukur dalam persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kenaikan dari 7,48% pada tahun 2019 menjadi 8,46% pada tahun 2023. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut, terlihat bahwa tingkat kemiskinan cenderung menurun setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021.

Secara paralel, jumlah penduduk miskin, yang diukur dalam ribu jiwa, menunjukkan peningkatan dari 71,86 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 81,54 ribu jiwa pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan absolut dalam jumlah ini, perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk

mengurangi dampak kemiskinan meskipun tingkat kemiskinan secara umum masih stabil atau mengalami peningkatan yang kecil.

Dinamika ini mencerminkan tantangan dalam upaya mengurangi kemiskinan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan sosial dan ekonomi domestik, serta respon terhadap perubahan sosial dan demografis di dalam negeri. Upaya lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang tepat terus diimplementasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kemudian terkait Kemiskinan Ekstrem yang ada di Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem terdiri dari, jumlah keluarga ekstrem sebanyak 5.668 keluarga dan individu sebanyak 30.397 jiwa.

Gambar 3.1

Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Purwakarta

NO	KECAMATAN	DATA KELUARGA		DATA INDIVIDU	
		DESIL 1	DESIL 2 - 4	DESIL 1	DESIL 2 - 4
1	BABAKANCIKAO	571	3.632	2.760	13.616
2	BOJONG	3.137	6.761	14.213	22.801
3	BUNGURSARI	577	3.240	2.623	11.609
4	CAMPAKA	663	3.702	3.136	12.970
5	CIBATU	284	2.137	1.321	7.244
6	DARANGDAN	2.803	8.869	12.696	29.844
7	JATILUHUR	909	3.767	4.709	14.176
8	KIARAPEDES	944	3.541	4.037	11.566
9	MANIIS	2.268	3.946	9.891	12.443
10	PASAWAHAN	799	4.128	3.640	14.083
11	PLERED	3.360	9.140	16.062	31.859
12	PONDOKSALAM	474	2.849	2.143	10.174
13	PURWAKARTA	2.020	8.952	10.289	33.257
14	SUKASARI	821	2.378	3.683	7.754
15	SUKATANI	2.416	7.566	11.341	26.862
16	TEGALWARU	2.477	6.926	10.750	22.650
17	WANAYASA	1.717	4.726	7.639	16.221
TOTAL		26.240	86.260	120.933	299.129

NO	KECAMATAN	PERSENTIL 1-2 DARI DESIL 1 (MISKIN EKSTREM)	
		DATA KELUARGA	DATA INDIVIDU
1	BABAKANCIKAO	80	458
2	BOJONG	838	4.406
3	BUNGURSARI	92	485
4	CAMPAKA	100	559
5	CIBATU	21	111
6	DARANGDAN	555	2.910
7	JATILUHUR	164	1.034
8	KIARAPEDES	181	912
9	MANIIS	725	3.730
10	PASAWAHAN	126	669
11	PLERED	726	4.070
12	PONDOKSALAM	66	334
13	PURWAKARTA	287	1.687
14	SUKASARI	208	1.092
15	SUKATANI	560	3.042
16	TEGALWARU	525	2.739
17	WANAYASA	414	2.159
TOTAL		5.668	30.397

Sumber : Kemenko PMK, 2024

Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem :
Keluarga : 5.668 dan Individu : 30.397

Perkembangan jumlah penduduk miskin ekstrem, selain dipengaruhi oleh tingkat garis kemiskinan dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, karena akan mempengaruhi perhitungan jumlah persentil 1 dan 2 pada Desil 1.



e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diukur berdasarkan tiga dimensi: Umur panjang dan sehat (diukur dengan UHH); Pengetahuan (diukur dengan APK-SD dan APS); Kehidupan yang layak (diukur dengan pengeluaran per kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin. Kemudian pada tahun 2023 ada peningkatan kembali menjadi 73,43 poin.

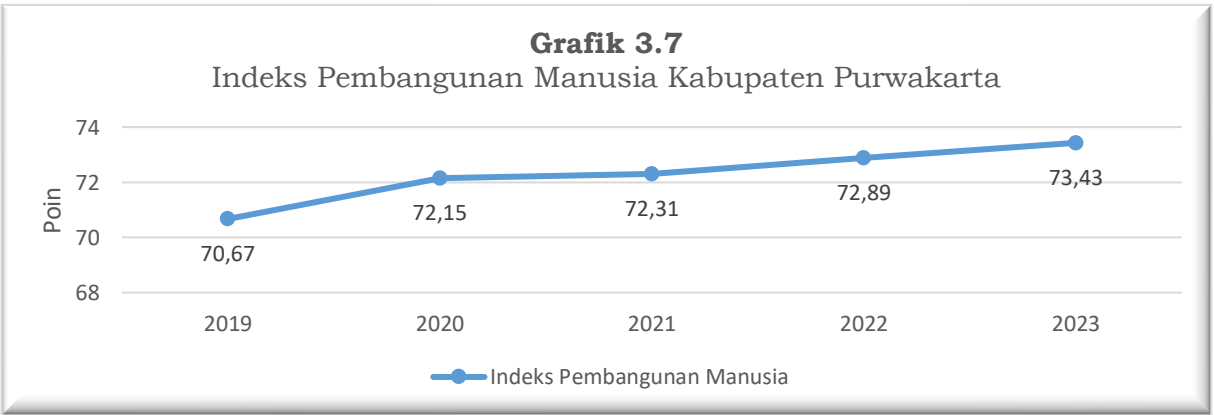
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.14

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,11	12,12	12,13	12,18
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,8	73,92	74,11	74,40	74,67
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rp	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



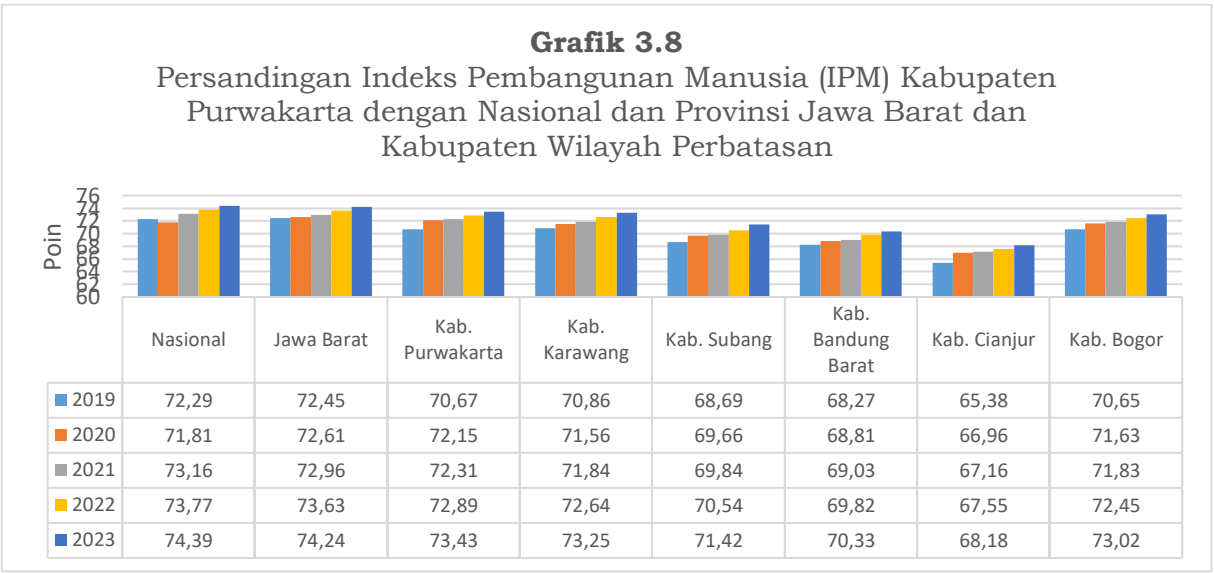
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indeks Pembagunan Manusia (IPM) (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	72,29	71,81	73,16	73,77	74,39
2	Jawa Barat	72,45	72,61	72,96	73,63	74,24
3	Kab. Purwakarta	70,67	72,15	72,31	72,89	73,43
4	Kab. Karawang	70,86	71,56	71,84	72,64	73,25
5	Kab. Subang	68,69	69,66	69,84	70,54	71,42
6	Kab. Bandung Barat	68,27	68,81	69,03	69,82	70,33
7	Kab. Cianjur	65,38	66,96	67,16	67,55	68,18
8	Kab. Bogor	70,65	71,63	71,83	72,45	73,02

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

IPM di Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 (70,67) ke tahun 2023 (73,43). Peningkatan IPM ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, peningkatan angka partisipasi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purwakarta.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91. Namun demikian sampai dengan tahun 2023, perkembangan angka TPT dan TPAK secara berangsur menunjukan perkembangan yang positif, dimana pada tahun 2023 TPT Kabupaten Purwakarta berada pada angka 7,72 persen dan TPAK pada angka 66,37 persen.



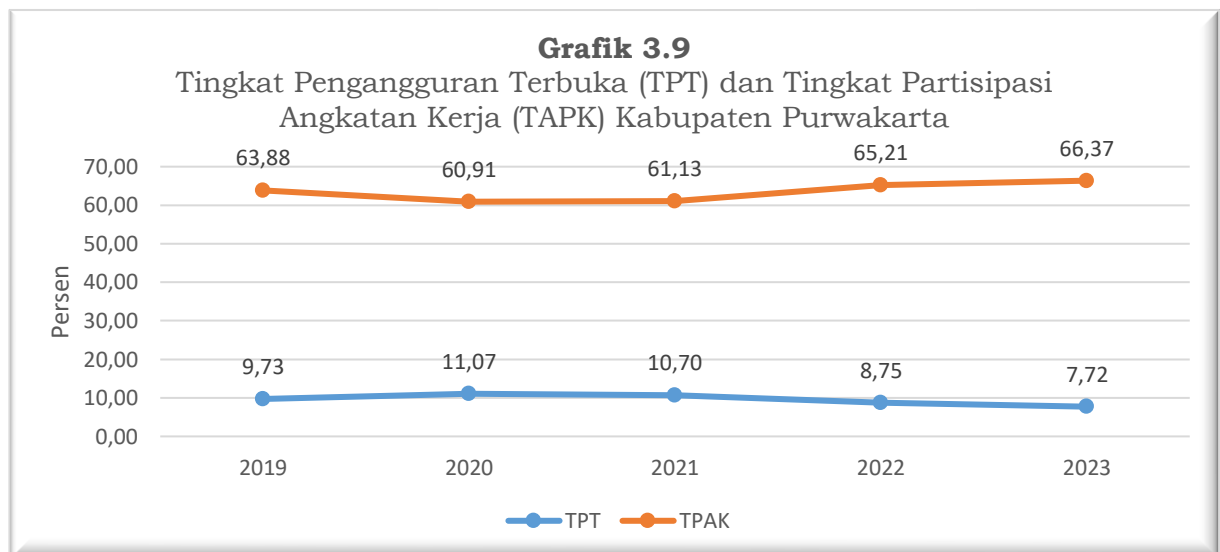
Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 3.16

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,73	11,07	10,7	8,75	7,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

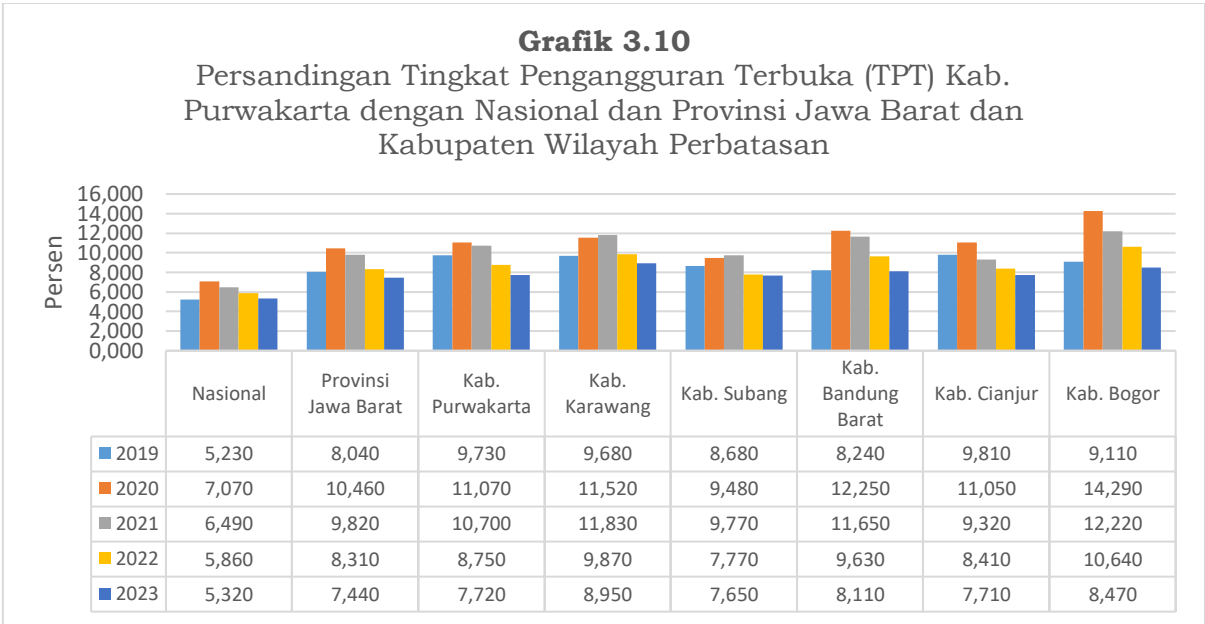
Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Provinsi Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
Kab. Purwakarta	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72
Kab. Karawang	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95
Kab. Subang	8,68	9,48	9,77	7,77	7,65
Kab. Bandung Barat	8,24	12,25	11,65	9,63	8,11

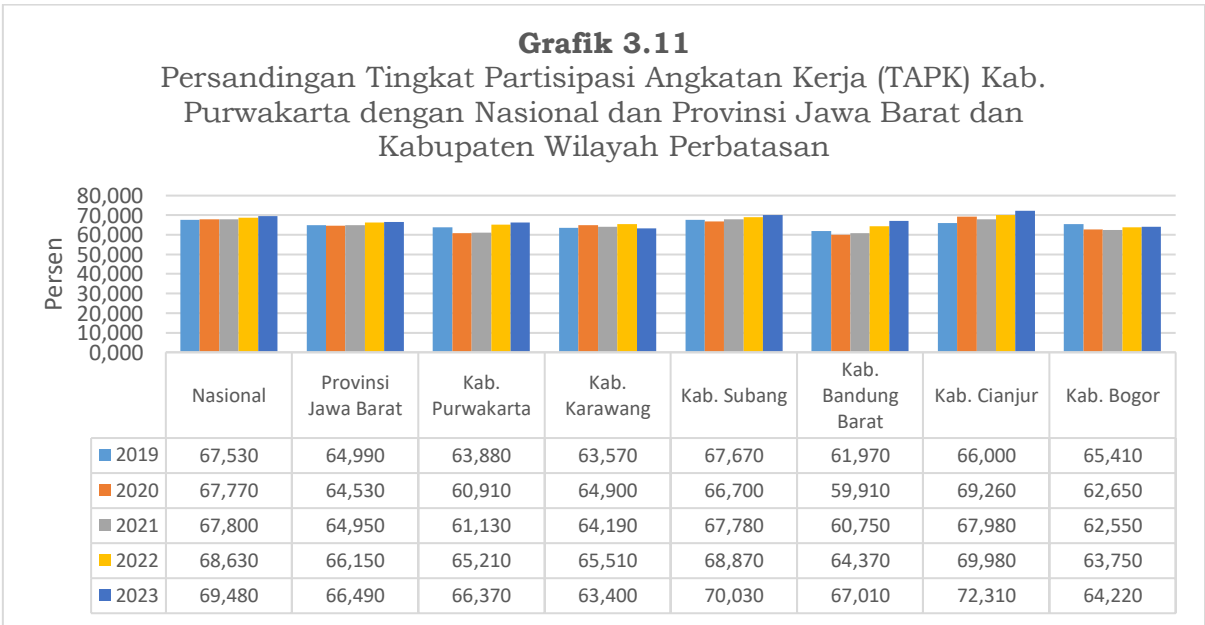


Kab. Cianjur	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71
Kab. Bogor	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	67,53	67,77	67,80	68,63	69,48
Provinsi Jawa Barat	64,99	64,53	64,95	66,15	66,49
Kab. Purwakarta	63,88	60,91	61,13	65,21	66,37
Kab. Karawang	63,57	64,90	64,19	65,51	63,40
Kab. Subang	67,67	66,70	67,78	68,87	70,03
Kab. Bandung Barat	61,97	59,91	60,75	64,37	67,01
Kab. Cianjur	66,00	69,26	67,98	69,98	72,31
Kab. Bogor	65,41	62,65	62,55	63,75	64,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

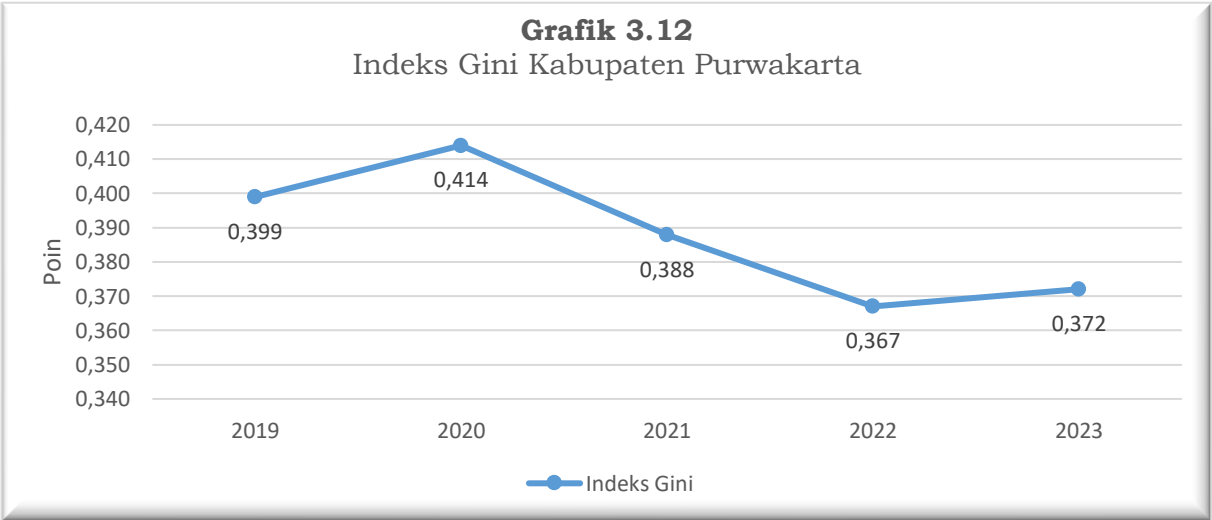
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.18

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kab. Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Gini / Gini Rasio	Poin	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Tabel 3.19

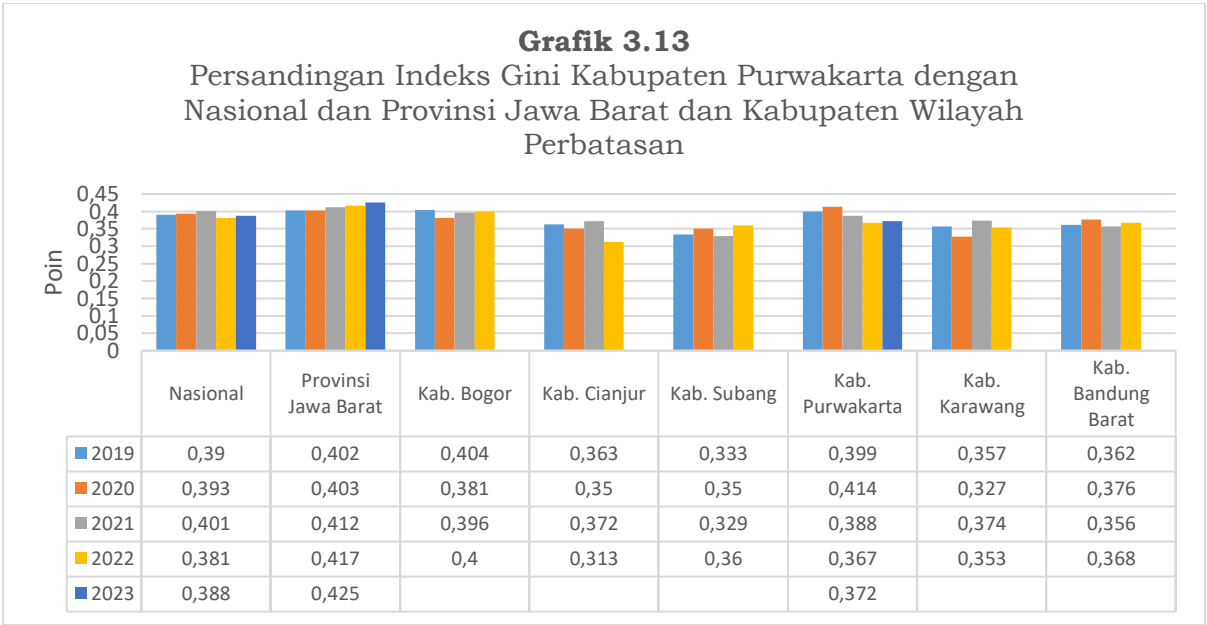
Persandingan Indek Gini/Gini Rasio Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab. di wilayah perbatasan Tahun 2019-2023

No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	0,390	0,393	0,401	0,381	0,388
2	Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
3	Kab. Bogor	0,404	0,381	0,396	0,400	n/a



No.	Indek Gini / Gini Rasio (poin)	2019	2020	2021	2022	2023
4	Kab. Cianjur	0,363	0,350	0,372	0,313	n/a
5	Kab. Subang	0,333	0,350	0,329	0,360	n/a
6	Kab. Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372
7	Kab. Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353	n/a
8	Kab. Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368	n/a

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada tahun 2019, Indeks Gini atau Gini Rasio berada pada nilai 0,399, yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan menjadi 0,414, menandakan adanya peningkatan ketimpangan yang lebih tinggi dalam distribusi pendapatan atau kekayaan.

Tren kemudian berubah pada tahun 2021, di mana nilai Indeks Gini turun menjadi 0,388, menunjukkan adanya penurunan sedikit dalam ketimpangan ekonomi. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan, dengan Indeks Gini turun menjadi 0,367. Hal ini menandakan upaya atau perubahan kebijakan yang mungkin telah diimplementasikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, angka tersebut sedikit meningkat kembali pada tahun 2023, dengan Indeks Gini mencapai 0,372. Meskipun masih di bawah angka tahun 2020, peningkatan ini mungkin



menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau perubahan kebijakan yang berdampak pada ketimpangan ekonomi yang lebih besar.

h. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 walaupun masih dibawah capaian tahun 2019, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid-19.

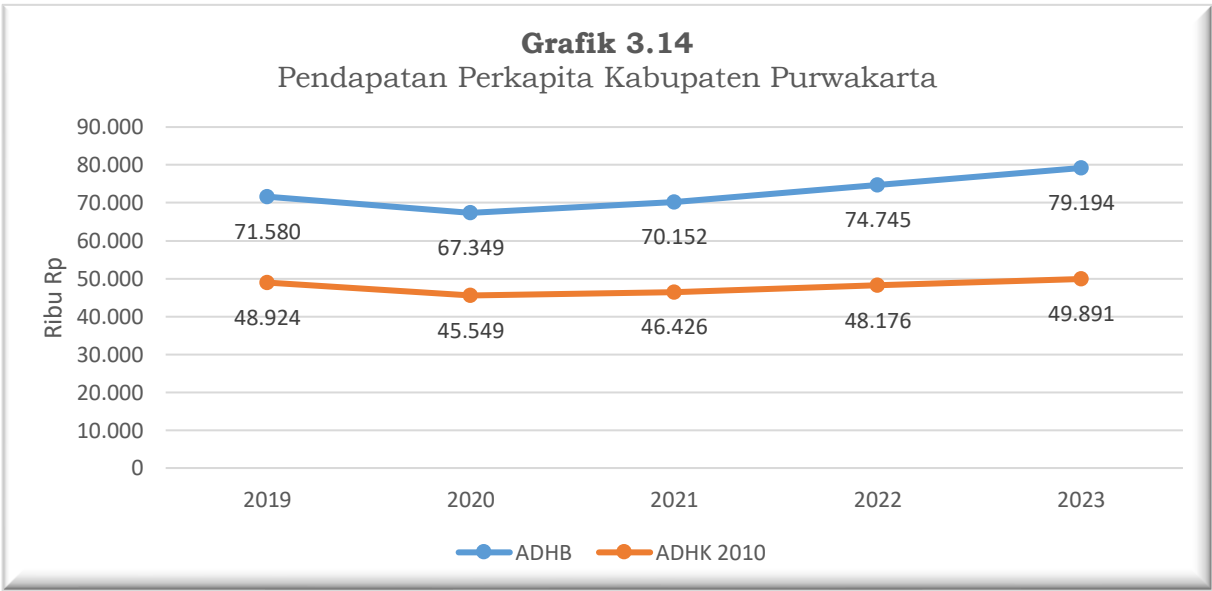
Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.20

Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHB	Ribu Rp.	71.580	67.349	70.152	74.745	79.194
Pendapatan Per Kapita - PDRB ADHK 2010	Ribu Rp.	48.924	45.549	46.426	48.176	49.891

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta, 2024

Pendapatan per kapita dari PDRB-ADHB pada tahun 2019 adalah sebesar 71.580 ribu rupiah. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 67.349 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 70.152 ribu rupiah. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 74.745 ribu rupiah dan 79.194 ribu rupiah berturut-turut.

Sementara itu, pendapatan per kapita dari PDRB-ADHK 2010 juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita sebesar 48.924 ribu rupiah, turun menjadi 45.549 ribu rupiah pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 46.426 ribu rupiah pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan pendapatan per kapita mencapai 48.176 ribu rupiah dan 49.891 ribu rupiah berturut-turut.

Meskipun kedua indikator menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, terdapat perbedaan dalam skala nilai antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010, dengan PDRB ADHB memiliki nilai yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan PDRB ADHK 2010. Hal ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam metodologi perhitungan antara kedua pendekatan tersebut.

Dengan memperhatikan capaian realisasi indikator makro pembangunan pada tahun sebelumnya, maka di tahun 2025 arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri pengolahan, yang dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Purwakarta, akan mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan akan diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong inovasi dalam proses produksi, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Investasi dalam infrastruktur juga akan ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas terhadap pasar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik. Kemudian kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan non-



pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan terus meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mendukung transformasi ekonomi ke arah sektor-sektor berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi, yang dapat menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan juga difokuskan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta penguatan jaringan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk percepatan pelaksanaan strategi penanganan kemiskinan ekstrem.

Kemudian pada aspek penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal dan inovasi teknologi. Sektor pertanian akan didorong menuju pertanian modern dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan produk olahan bernilai tambah, dan perluasan akses pasar digital. Sektor pariwisata akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata unggulan tematik yang mengedepankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Sektor industri kreatif akan diperkuat melalui inkubasi bisnis, pelatihan keterampilan digital, dan fasilitasi akses permodalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi akan terus ditingkatkan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah secara makro dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2025.

Proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.21

Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kab. Purwakarta, Tahun 2025

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target 2025
1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15 – 6,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Poin	0,330 – 0,343
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	279.711,36

Sumber : Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat digunakan analisis keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana penyusunannya diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang akhirnya bermuara pada penyusunan Rancangan dan Penetapan APBD.

Dalam penerapan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta secara umum tercermin atas tiga aspek, yaitu:

- A. Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- B. Aspek Pengelolaan Belanja Daerah; dan
- C. Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- e. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- g. Meningkatkan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;



- h. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
- j. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
- k. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan;
- l. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
- m. Mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
- 2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
- 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
- 4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai,



yaitu menjamin dijalankannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : pro poor, pro job dan pro growth.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Pemenuhan anggaran untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
4. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
6. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
7. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;



8. Pemenuhan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
9. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahap dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
10. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
11. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
12. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;
13. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah;
14. Dukungan terhadap penyelenggaraan trantibumlinmas dan penanggulangan kebencanaan, dan lain-lain;

3.2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja keuangan masa lalu pada pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2023, khususnya pada pengelolaan Pembiayaan Daerah memperlihatkan trend dimana terdapat kenaikan pembiayaan dengan rata-rata sebesar 5,54%. Dari sektor Penerimaan Pembiayaan terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 9,31%. Sedangkan dari sektor Pengeluaran Pembiayaan terlihat ada penurunan dengan rata-rata penurunannya sebesar -25,00%.

Kemudian bila dilihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari kurun waktu tahun 2021-2023 terdapat penurunan perhitungan SILPA dengan rata-rata sebesar -12,71%. Dimana SILPA tahun 2023 sebesar 1,53% dari capaian realisasi APBD 2023. Penurunan SILPA di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh upaya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sehingga penyerapan anggaran dan pengurangan silpa di tahun sebelumnya dapat dilakukan secara optimal.

Perkembangan Realisasi dan Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu 5 tahun, yaitu Tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel 3.22

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.402.816.479.087	2.256.119.657.743	2.371.774.256.872	2.615.297.224.652	2.363.431.731.835
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.746.568.984	561.927.757.652	554.854.784.899	761.958.601.536	707.154.689.352
4.1.01	Pajak Daerah	286.064.771.702	333.962.582.037	338.160.104.269	504.885.237.213	479.153.704.992
4.1.02	Retribusi Daerah	22.984.397.619	14.419.443.019	20.397.567.606	227.926.390.425	215.227.891.644
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.964.612.631	6.959.205.038	7.427.509.729	7.635.881.071	7.635.881.071
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.732.787.032	206.586.527.558	188.869.603.295	21.511.092.827	5.137.211.645
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.763.835.158.455	1.694.191.900.091	1.816.919.471.973	1.851.934.623.116	1.656.277.042.483
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.471.176.858.725	1.467.882.592.377	1.534.341.225.263	1.629.018.099.000	1.507.206.320.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	292.658.299.730	226.309.307.714	282.578.246.710	222.916.524.116	149.070.722.483
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.234.751.648	0	0	1.404.000.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	123.234.751.648	0	0	1.404.000.000	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0

Sumber : LRA Tahun 2021-2023 (audited), APBD 2024 dan TAPD, 2024



Tabel 3.23

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	2.397.792.974.124	2.242.044.866.124	2.385.366.153.224	2.653.589.477.779	2.397.133.685.323
5.1	BELANJA OPERASI	1.741.345.029.012	1.723.718.913.864	1.817.915.407.513	2.035.558.242.704	1.860.762.204.545
5.1.01	Belanja Pegawai	918.150.922.272	877.588.545.991	884.567.140.660	1.029.883.293.341	1.052.280.695.189
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.409.752.174	798.636.928.666	856.592.355.153	885.505.935.365	755.150.273.228
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	74.666.814.566	43.548.139.207	74.293.778.700	117.859.013.998	51.296.236.128
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.117.540.000	3.945.300.000	2.462.133.000	2.310.000.000	2.035.000.000
5.2	BELANJA MODAL	305.961.356.301	211.006.361.159	221.687.313.491	229.293.941.356	161.435.643.204
5.2.01	Belanja Modal Tanah	229.500.000	4.137.824.210	987.440.000	1.896.200.000	1.016.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.933.700.271	59.869.624.977	95.977.193.325	79.130.065.230	51.560.110.985
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.517.889.109	62.803.892.607	62.085.346.580	60.948.438.384	47.018.946.132
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.157.250.021	77.502.411.526	51.045.921.061	77.548.749.204	55.684.691.221
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.123.016.900	6.692.607.839	11.591.412.525	9.770.488.538	6.155.694.866
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.115.437.618	267.948.493	9.290.031.314	40.067.981.161	26.156.756.557
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.115.437.618	267.948.493	9.290.031.314	40.067.981.161	26.156.756.557



KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	329.371.151.193	307.051.642.608	336.473.400.906	348.669.312.558	348.779.081.017
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.860.059.993	35.969.243.808	43.864.193.106	44.927.822.558	44.962.193.106
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	301.511.091.200	271.082.398.800	292.609.207.800	303.741.490.000	303.816.887.911
Total Surplus/(Defisit)		5.023.504.963	4.074.791.674	-18.591.896.352	-43.292.253.127	-41.201.953.488
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.397.792.974.124	2.242.044.866.124	2.385.366.153.224	2.653.589.477.779	2.397.133.685.323

Sumber : LRA Tahun 2021-2023 (audited), APBD 2024 dan TAPD, 2024



Tabel 3.24

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 – 2025

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	46.745.537.376	41.769.042.394	50.843.834.013	38.292.253.127	33.701.953.488
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.745.537.376	51.769.042.339	55.843.834.013	43.292.253.127	41.201.953.488
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.745.537.376	51.769.042.339	55.843.834.013	43.292.253.127	41.201.953.488
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	9.999.999.945	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	9.999.999.945	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0



KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)		51.769.042.339	55.843.834.013	37.251.937.661	0	0
TOTAL APBD		2.449.562.016.463	2.307.888.700.082	2.427.618.090.885	2.658.589.477.779	2.404.633.685.323

Sumber : LRA Tahun 2021-2023 (audited), APBD 2024 dan TAPD, 2024



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dimana penekanan pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi.

Tujuan pembangunan jangka menengah nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional yaitu dituangkan dalam upaya pencapaian Visi dan 8 Misi (agenda) jangka panjang pembangunan 2045, yakni :

Visi Indonesia Emas 2045

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

8 Misi (Agenda) Pembangunan 2025 – 2045 yaitu :

Transformasi Indonesia

Misi (Agenda) 1 : Transformasi Sosial;

untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.

Misi (Agenda) 2 : Transformasi Ekonomi;

untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.



Misi (Agenda) 3 : **Transformasi Tata Kelola;**

untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat.

Landasan Transformasi

Misi (Agenda) 4 : **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;**

dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat global.

Misi (Agenda) 5 : **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;**

dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

Kerangka Implementasi Transformasi

Misi (Agenda) 6 : **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**

diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.



Misi (Agenda) 7 : **Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;**

menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Misi (Agenda) 8 : **Kesinambungan Pembangunan;**

yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

17 Arah (Tujuan) Pembangunan 2025 – 2045 yaitu :

I. Transformasi Sosial;

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif

II. Transformasi Ekonomi;

4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

III. Transformasi Tata Kelola;

9. Iregulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif

IV. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi;

10. Hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi ekonomi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro
12. Ketangguhan diplomasi

V. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air dan menanditian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim



Adapun Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2025-2045 terdiri dari :

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission;

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;



3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan .akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

Tujuan 4

Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.



4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Tujuan dan sasaran pembangunan pada penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, yaitu:

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan daerah disertai dengan target indikator yang akan dicapai pada tahun 2025.

Adapun tujuan dan sasaran yang disertai target indikator pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing				
		Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *
		Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	89,58
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan			
		Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,75
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63
		Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	80,00
	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat			
		Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	89,58
		Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,063
Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
		Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32
	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana			
		Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,49
Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09
		Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	279.711,36 *
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana			
		Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat				
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *
		Inflasi	Persen	1,25
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,725
	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah			
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,80
		Pertumbuhan UMKM	Persen	13,16
	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian			
		Inflasi	Persen	1,25
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,725
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	58,49
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	99,89
	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat			
		Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,82
	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Nilai Tukar Petani	Poin	103,00
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	97,80
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,34
Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				
		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,905
	Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan			
		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,905



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
	Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,60
		Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	80,93
	Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00
	Sasaran 12 : Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00
		Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,00
	Sasaran 13 : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00
		Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,00
		Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60
	Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel			
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,41
		Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,64
		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,68
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
	Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE			
		Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,41
		Indeks SPBE	Poin	2,80
	Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
		Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Tinggi
		Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik
		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
		Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,237
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,09
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,00
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,68
Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Ten tram dan Damai				
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	75,95
		Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju
	Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
		Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju
	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat			
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	75,95
8	17	71	71	71

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026;

*) Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

Kemudian dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.2

Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan		
		Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas	
			Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD
			Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan	
			Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM
			Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
			Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
			Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
		Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat	
			Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
			Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat		
		Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat	
			Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM
			Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja
			Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
			Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
			Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
			Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai, melalui penerapan meritokrasi sistem
Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana		
		Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	
			Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
			Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC
			Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
			Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
			Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
		Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	
			Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
			Menerapkan rencana pengendalian penduduk
			Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
			Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
			Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera
Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			
	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
		Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	
			Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
			Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
			Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
			Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
			Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
		Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan	
			Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
			Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana		
		Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana	
			Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
			Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan
			Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
			Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat			
	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah		
		Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
			Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
		Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
			Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
			Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
			Menyediakan Sistem Data Base UMKM
	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian		
		Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
			Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
		Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis
			Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
			Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
			Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat		
		Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
			Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata
			Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan
		Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
			Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI
	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan		
		Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah
			Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
			Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
			Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
			Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
		Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	
			Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
			Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
			Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas
Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
	Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan		
		Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin	
			Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
			Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
			Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
			Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
			Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
	Sasaran 11 : Meningkatnya Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
			Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak
Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah			
	Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah		
		Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap	
			Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah
			Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
			Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat
		Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata	
			Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah
			Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
		Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal	
			Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah
			Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
			Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman
	Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien		
		Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata	
			Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah
			Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
			Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
			Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
			Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
			Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh
Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel			
	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE		
		Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
			Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
			Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
		Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik	
			Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
			Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
			Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
		Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)	
			Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
			Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri
			Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital
			Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
			Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
			Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
			Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
			Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
			Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
		Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas	
			Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
			Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
			Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas
Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		
		Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa	
			Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
			Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparat pemerintah desa
			Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat		
		Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila
8	17	29	8/100

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026;

Selanjutnya dari 8 arah kebijakan pembangunan tersebut, di dijabarkan kembali menjadi 100 arah kebijakan teknis yang di sebar ke semua Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan pembangunan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.3

Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah

NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
	1. Peningkatan Kualitas SDM	
1	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD	Dinas Pendidikan
2	Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal	Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
4	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
5	Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
6	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
7	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10	Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
12	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
13	Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai, melalui penerapan meritokrasi sistem	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	
1	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih
2	Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC	Dinas Kesehatan
3	Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya	Dinas Kesehatan
4	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih
5	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Menerapkan rencana pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
8	Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	
1	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
3	Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau	Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8	Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9	Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
	4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
1	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
4	Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
5	Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6	Menyediakan Sistem Data Base UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
7	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
9	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
10	Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
11	Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
12	Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
13	Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
14	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
15	Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
16	Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
17	Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
18	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
19	Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
20	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian;
21	Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;
22	Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan;
23	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian;
24	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan;
25	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;
26	Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas	Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
5	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah		
1	Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman	Dinas Perhubungan
6	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Reformasi Birokrasi		
1	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah	Semua Perangkat Daerah;
2	Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi	Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah;
4	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD;
5	Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan;
6	Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel	Dinas Komunikasi dan Informatika;
7	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah;
9	Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat	Sekretariat Daerah;



NO.	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
	dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait	
10	Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri	Sekretariat Daerah;
11	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
13	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14	Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif	Badan Keuangan dan Aset Daerah;
15	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah	Badan Pendapatan Daerah;
16	Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
17	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
18	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kecamatan;
19	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Inspektorat; Kecamatan;
20	Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP	Inspektorat;
21	Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas	Inspektorat; Kecamatan;
	8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
1	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
2	Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
3	Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan;
4	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan ;
5	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan;
6	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
	8 / 100	47

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026;

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah :

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025

“AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 yaitu :

1. SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif)

Transformasi Sosial:

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system;

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;



2. Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas)

Transformasi Ekonomi:

- a. Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- b. Penguatan infrastruktur digital;
- c. Pengembangan infrastruktur transisi energi;
- d. Percepatan infrastruktur IKN;

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

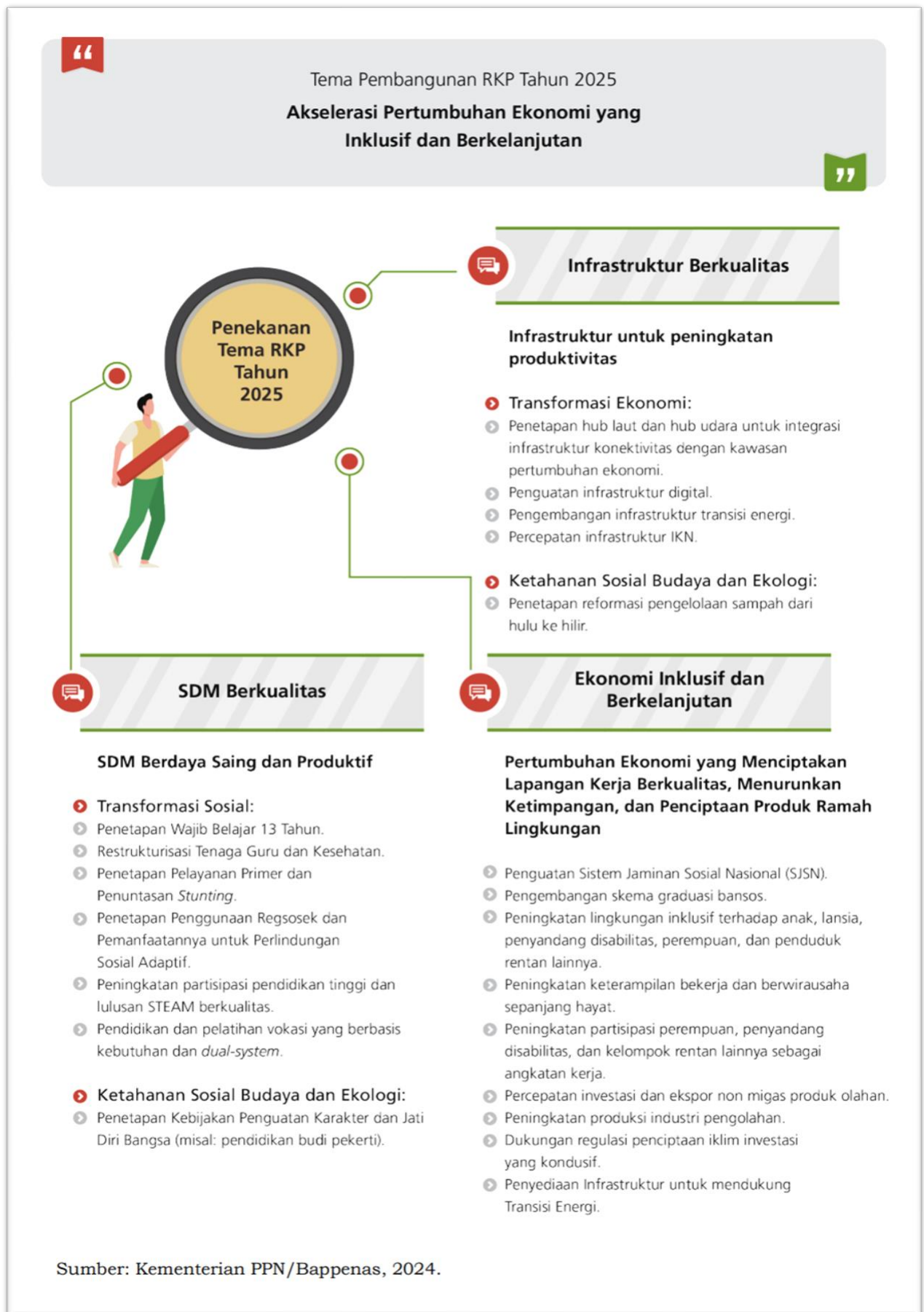
- a. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir;

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan)

- a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- b. Pengembangan skema graduasi bansos;
- c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- g. Peningkatan produksi industri pengolahan;
- h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- i. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi;

Sedangkan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Gambar 4.1
Tema Pembangunan RKP Tahun 2025





Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, dengan Sasaran PN 1 yaitu mendorong Indeks Demokrasi Indonesia.
2. **Prioritas Nasional/PN 2, yaitu, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**, dengan Sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) Asia Power Index (Military Capability); (b) Asia Power Index (Diplomatic Influence); (c) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya; (d) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU); (e) Indeks Ketahanan Energi; (f) Kapasitas tampungan air; (g) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan; (h) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; (i) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global; (j) Indeks Ekonomi Hijau; (k) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer; (l) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; (m) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; (n) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan (o) Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan dan Kumulatif.
3. **Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**, dengan Sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; (b) Rasio Kewirausahaan; (c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB; (d) Rasio PDB Pariwisata; (e) Devisa Pariwisata; (f) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif; (g) Aset Perbankan/PDB; (h) Aset Dana Pensiun/PDB; (i) Aset Asuransi/PDB, (j) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB; (k) Total Kredit/PDB; dan (l) Inklusi Keuangan.

4. **Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**, dengan Sasaran PN 4, yaitu mendorong: (a) Hasil Pembelajaran: Rata-rata nilai PISA (Membaca, Matematika, Sains), Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, Harapan lama sekolah; (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi; (c) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi; (d) Tingkat Penguasaan Iptek: Pengeluaran Iptek dan Inovasi dan Peringkat Indeks Inovasi Global; (e) Tingkat Pengangguran Terbuka; (f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; (g) Usia Harapan Hidup; (h) Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) dan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (i) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); (j) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; (k) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); dan (l) Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
5. **Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Rasio PDB Industri Pengolahan; (b) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (c) Ekspor Barang dan Jasa; dan (d) Biaya Logistik.
6. **Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk; (b) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; (c) Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal; (d) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional; (e) Persentase desa mandiri; dan (f) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



7. **Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Return on Asset (ROA) BUMN; (b) Indeks Integritas Nasional; (c) Indeks Materi Hukum; (d) Indeks Pelayanan Publik; (e) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (f) Indeks Persepsi Korupsi; (g) Indeks Pembangunan Hukum; (h) Rasio Perpajakan terhadap PDB; dan (i) Tingkat Inflasi.
8. **Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); (b) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB); dan (c) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB.

Gambar 4.2

Prioritas Nasional Tahun 2025





4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tema pembangunan, isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025
**“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT”**

Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.



4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2025, tema pembangunan, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
**” PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
MANUSIA YANG PROFESIONAL”**

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah;
2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/prasarana bidang Kesehatan dan KB;
3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi;
5. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata;
6. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern;
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan;
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah;
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;



11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah tersebut disusun dengan menerapkan konsep **THIS**, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Adapun prioritas, sasaran dan target indikator sasaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan			
		Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,75
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63
		Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	80,00
	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat			
		Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	89,58
		Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,063
PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana			
		Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,49
PP 3 : Pengelolaan Lingkungan	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09



PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
Hidup dan Ketahanan Bencana		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	279.711,36 *
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana			
		Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang
PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah			
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,80
		Pertumbuhan UMKM	Persen	13,16
PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian			
		Inflasi	Persen	1,25
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,725
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	58,49
		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	99,89
PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat			
		Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,82
PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Nilai Tukar Petani	Poin	103,00
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	97,80
		Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,34
PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan			
		Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *
		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,905
	Sasaran 11 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,60
		Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	80,93
PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00
		Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,00



PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
	Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00
		Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,00
		Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60
PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE			
		Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,41
		Indeks SPBE	Poin	2,80
	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
		Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Tinggi
		Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik
		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP
		Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,237
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,09
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,00
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,68
PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
		Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju
PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat			
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	75,95
12	17	71	71	71

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026;

*) Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

Kemudian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025. Adapun keterkaitan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan dan isu strategis tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas, Arah Kebijakan dan Isu Strategis RKPD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2025

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3
Isu Strategis 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah	Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM	PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD	
	Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	
	Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional	
	Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya	
	Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	
	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno	
	Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat	
	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja	
	Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan	
	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga	
	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran	
	Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai, melalui penerapan meritokrasi sistem	
Isu Strategis 2 : Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB	Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
	Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	
	Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC	
	Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya	
	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	
	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat	
	Menerapkan rencana pengendalian penduduk	
	Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB	
	Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah	



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3
	Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera	
Isu Strategis 3 : Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup	Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
	Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup	
	Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan	
	Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau	
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3	
	Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan	
	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan	
	Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan	
	Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan	
	Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat)	
Isu Strategis 4 : Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi	Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM
	Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan	
	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian	
	Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional	
	Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha	
	Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM	
	Menyediakan Sistem Data Base UMKM	
	Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses	PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha	
	Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang refresentatif dan strategis	
	Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu	
	Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
	Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya	



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3
	di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah	PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen	
	Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan	
	Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar	
	Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata	
	Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan	
	Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata	
	Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI	
	Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian	
	Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan	
	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian	
	Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak	
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata	
	Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas	
	Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
	Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	
	Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas	
	Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat	
	Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
	Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak	
Isu Strategis 5 : Penyediaan infrastruktur dan	Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah	PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
	Meningkatkan kualitas kemandapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata	



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3
konektivitas wilayah secara merata	Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat	
	Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata	
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan	
	Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman	
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat	
	Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	
	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	
	Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan	
	Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	
Isu Strategis 6 : Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern	Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi	PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah	
	Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi	
	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	
	Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital	
	Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel	
	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan	
	Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait	
	Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri	
	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital	
	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran	
	Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif	



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	2	3
	Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah	
	Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna	
	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional	
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	
	Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP	
	Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas	
	Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa	
	Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	
	Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan	
Isu Strategis 7 : Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat	PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
	Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026;

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara teknis akan dilaksanakan melalui program pembangunan yang ada di semua Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Adapun keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan program pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.6

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Program Pembangunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan		184.136.295.178	
	Program : Pengelolaan Pendidikan	169.692.901.566	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Kurikulum	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra	250.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Kebudayaan	1.350.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Kesenian Tradisional	275.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pembinaan Sejarah	150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengelolaan Permuseuman	200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pembinaan Perpustakaan	460.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.430.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	356.250.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Hubungan Industrial	350.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	775.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.024.455.312	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	620.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.102.688.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB		119.005.056.910	
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69.648.481.736	Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.512.409.687	RSUD Bayu Asih
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.301.009.160	Dinas Kesehatan
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	725.000.000	RSUD Bayu Asih
	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	245.000.000	Dinas Kesehatan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	685.000.000	Dinas Kesehatan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	500.000.000	RSUD Bayu Asih
	Program : Pengendalian Penduduk	290.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.709.695.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.388.461.327	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		17.649.495.406	
	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Persampahan	10.684.495.406	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Penanggulangan Bencana	1.060.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.735.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Program : Penanganan Bencana	220.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM		1.972.617.896	
	Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	471.370.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	614.668.803	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengembangan UMKM	441.579.093	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan		3.068.546.900	
	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	109.999.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program : Promosi Penanaman Modal	152.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program : Pelayanan Penanaman Modal	155.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	585.147.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	125.900.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	290.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengembangan Ekspor	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
			Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri	800.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat		2.450.000.000	
	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.800.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pemasaran Pariwisata	200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	250.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan		6.411.672.294	
	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	180.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	915.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Pengawasan Keamanan Pangan	125.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	215.331.550	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	569.840.472	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	35.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	358.506.693	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	645.876.390	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	240.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Perizinan Usaha Pertanian	40.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyuluhan Pertanian	392.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyuluhan Pertanian	184.700.056	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	850.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	946.186.124	Dinas Pangan dan Pertanian



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	534.160.948	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	119.570.061	Dinas Perikanan dan Peternakan
PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.762.000.000	
	Program : Pemberdayaan Sosial	271.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	35.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Rehabilitasi Sosial	773.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial	860.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	273.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Perlindungan Perempuan	250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga	120.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	40.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)	140.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Perlindungan Khusus Anak	0	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		96.330.000.000	
PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Program : Penyelenggaraan Jalan	35.253.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.502.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.195.000.000	Dinas Perhubungan
	Program : Pengelolaan Pelayaran	200.000.000	Dinas Perhubungan
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Penataan Bangunan Gedung	13.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan Tanah Kosong	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	7.100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	850.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	700.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengembangan Permukiman	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengembangan Perumahan	850.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Kawasan Permukiman	8.740.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.900.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	190.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		455.423.709.328	
PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.710.717.355	Sekretariat DPRD
	Program : Pendaftaran Penduduk	210.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program : Pencatatan Sipil	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	780.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Aplikasi Informatika	4.370.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	550.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	820.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	114.000.000	Kecamatan Jatiluhur
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	103.500.000	Kecamatan Sukasari
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.500.000	Kecamatan Maniis
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	Kecamatan Tegalwaru



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	Kecamatan Plered
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	138.652.176	Kecamatan Sukatani
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.000.000	Kecamatan Darangdan
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	85.000.000	Kecamatan Bojong
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.000.000	Kecamatan Wanayasa
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	Kecamatan Kiarapedes
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.000.000	Kecamatan Pasawahan
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	116.800.000	Kecamatan Pondoksalam
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	Kecamatan Purwakarta
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	110.250.000	Kecamatan Babakan Cikao
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.100.000	Kecamatan Campaka
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.000.000	Kecamatan Cibatu
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	93.369.960	Kecamatan Bungursari
	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.515.951.739	Sekretariat Daerah
	Program : Perekonomian Dan Pembangunan	4.583.706.676	Sekretariat Daerah
	Program : Pengelolaan Arsip	700.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	379.557.439.663	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.150.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.549.974.920	Badan Pendapatan Daerah
	Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah	550.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	Program : Pengelolaan Perbatasan	92.950.000	Sekretariat Daerah
	Program : Kepegawaian Daerah	4.265.509.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.500.000	Kecamatan Jatiluhur
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.177.083	Kecamatan Sukasari
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.988.294	Kecamatan Maniis



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.250.000	Kecamatan Tegalwaru
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.500.000	Kecamatan Plered
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75.000.000	Kecamatan Sukatani
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	112.000.000	Kecamatan Darangdan
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.500.000	Kecamatan Bojong
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	Kecamatan Wanayasa
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	Kecamatan Kiarapedes
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.214.804	Kecamatan Pasawahan
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.200.000	Kecamatan Pondoksalam
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	Kecamatan Purwakarta
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76.000.000	Kecamatan Campaka
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.000.000	Kecamatan Cibatuh
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.400.000	Kecamatan Bungursari
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	3.378.000.000	Inspektorat
	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.135.000.000	Inspektorat
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000	Kecamatan Jatiluhur
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.060.000	Kecamatan Sukasari
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	Kecamatan Maniis
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.220.000	Kecamatan Tegalwaru
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.500.000	Kecamatan Plered
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.030.658	Kecamatan Sukatani
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.000.000	Kecamatan Darangdan
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.000.000	Kecamatan Bojong
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.520.000	Kecamatan Wanayasa
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	Kecamatan Kiarapedes
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.711.000	Kecamatan Pasawahan
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.516.000	Kecamatan Pondoksalam
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	Kecamatan Purwakarta



PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.200.000	Kecamatan Campaka
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	Kecamatan Cibatu
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.800.000	Kecamatan Bungursari
PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12.570.314.617	
	Program : Penataan Desa	125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa	1.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	1.590.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.025.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31.000.000	Kecamatan Jatiluhur
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	23.900.000	Kecamatan Sukasari
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	37.000.000	Kecamatan Maniis
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.020.000	Kecamatan Tegalwaru
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	43.000.000	Kecamatan Plered
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.000.000	Kecamatan Sukatani
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22.000.000	Kecamatan Darangdan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.000.000	Kecamatan Bojong
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.905.000	Kecamatan Wanayasa
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.000.000	Kecamatan Kiarapedes
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.673.000	Kecamatan Pasawahan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.500.000	Kecamatan Pondoksalam
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.000.119.650	Kecamatan Purwakarta
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.761.967	Kecamatan Babakan Cikao
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	40.435.000	Kecamatan Campaka
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	40.000.000	Kecamatan Cibatu
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.000.000	Kecamatan Bungursari
PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		7.878.790.099	
	Program : Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.045.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



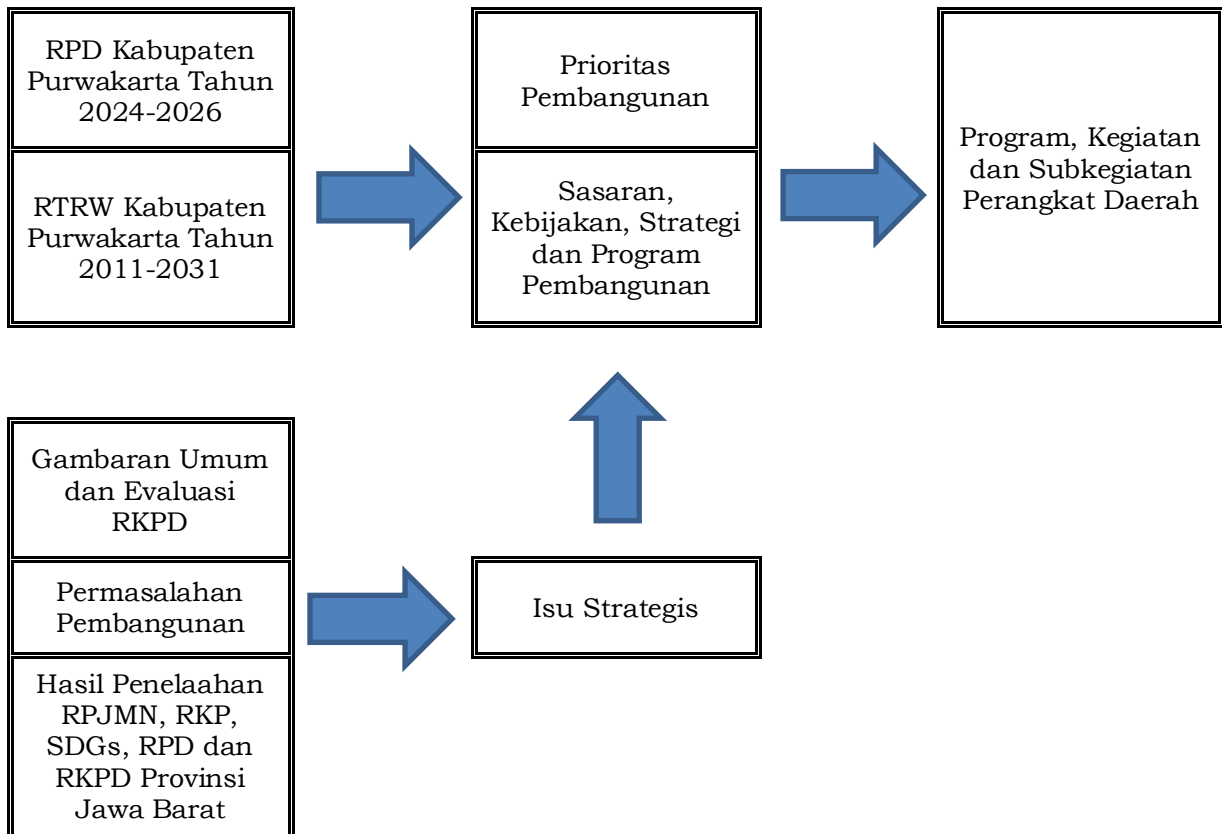
PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.879.930.099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	505.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.255.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.000.000	Kecamatan Jatiluhur
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.500.000	Kecamatan Sukasari
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.000.000	Kecamatan Maniis
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.000.000	Kecamatan Tegalwaru
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000	Kecamatan Plered
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000	Kecamatan Sukatani
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	Kecamatan Darangdan
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.000.000	Kecamatan Bojong
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.360.000	Kecamatan Wanayasa
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000	Kecamatan Pasawahan
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.500.000	Kecamatan Pondoksalam
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	Kecamatan Purwakarta
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15.000.000	Kecamatan Babakan Cikao
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	14.400.000	Kecamatan Campaka
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	Kecamatan Cibatuh
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.600.000	Kecamatan Bungursari
12	283	907.013.696.549	47

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026; SIPD-RI, 2025

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 4.3

Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, Tahun 2024

Dalam penyusunan dokumen RKPD telah memperhatikan poin-poin ringkasan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kab. Purwakarta yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.7

Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025
1	2
a. Pokir : Pembangunan Ruang Kelas Baru	1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
b. Pokir : Perbaikan Jalan Kabupaten c. Pokir : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan/Perkotaan d. Pokir : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni e. Pokir : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Penunjang Hunian (Jalan Lingkungan Perkotaan, Jalan Lingkungan Sekolah, Drainase, TPT, Sanitasi)	9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, Tahun 2024



4.2.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan antar dokumen perencanaan baik pada tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel penyelarasan berikut dibawah ini :

Tabel 4.8

Keselaran Sasaran Pokok RPJPD Kab. Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2025

SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025	SASARAN RKPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025
1	2
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan
	2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana
4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
	8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
5. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan
	11. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah
	13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE
	15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai	16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026



Tabel 4.9

Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;	PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;	PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;	PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;	PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;	PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;	PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Bappelitbangda, 2024



Tabel 4.10

Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA
1	2
P1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM
	PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
	PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
	PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
P2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
	PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
P3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
P4 : Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
	PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
	PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
P6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sumber : Bappelitbangda, 2024



Tabel 4.11

Keselarasan Indikator Sasaran Nasional dengan Indikator Sasaran
Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
S1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.		PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	
		PP 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
S2. Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.	1. Asia Power Index (Military Capability)		
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)		
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	4. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani
	5. Indeks Ketahanan Energi	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan
	6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
	7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Cakupan Layanan Air Bersih
	8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah	Cakupan Layanan Air Bersih
	9. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah
	10. Indeks Ekonomi Hijau	Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
	11. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
	12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
	13. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
	15. Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif



Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		PP 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM	
		PP 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	
		PP 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	
S3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM
	2. Rasio Kewirausahaan (%)	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM
	3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat
	4. Rasio PDB Pariwisata (%)	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	7. Aset Perbankan/PDB (%)		
	8. Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
	9. Aset Asuransi/PDB (%)		
	10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
	11. Total Kredit/PDB (%)		
	12. Inklusi Keuangan (%)		
PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PP 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan	
		PP 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB	
		PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
S4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil Pembelajaran:		
	a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-Rata Lama Sekolah
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-Rata Lama Sekolah
	c. Harapan lama sekolah (tahun)	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Harapan Lama Sekolah
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
	3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
	4. Tingkat Penguasaan Iptek:		
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah



Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah
	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran
	6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)
	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	8. Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Angka Harapan Hidup
	12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PP 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan	
S5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
	2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)
	3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)
	4. Biaya Logistik (% PDB)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)



Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PP 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PP 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
S6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
	2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
	4. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		
	5. Persentase desa mandiri (%)	Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Desa Membangun
	6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PP 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
S7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Indeks Integritas Nasional		
	3. Indeks Materi Hukum	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Indeks Reformasi Birokrasi
	4. Indeks Pelayanan Publik	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Indeks Kepuasan Masyarakat
	5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Indeks SPBE
	6. Indeks Persepsi Korupsi	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	7. Indeks Pembangunan Hukum	Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Indeks Reformasi Birokrasi
	8. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal



Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
	9. Tingkat Inflasi (%)	Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Inflasi
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PP 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	
		PP 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
S8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah

Sumber : Bappelitbangda, 2024

Tabel 4.12

Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.879.930.099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4.679.930.099	
PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	180.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	915.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Pengawasan Keamanan Pangan	125.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	215.331.550	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	569.840.472	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	358.506.693	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	240.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Perizinan Usaha Pertanian	40.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyuluhan Pertanian	392.500.000	Dinas Pangan dan Pertanian



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Penyuluhan Pertanian	184.700.056	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	850.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	946.186.124	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	534.160.948	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	119.570.061	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.045.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		6.775.795.904	
PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.430.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Penempatan Tenaga Kerja	356.250.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Hubungan Industrial	350.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	471.370.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	614.668.803	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengembangan UMKM	441.579.093	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	250.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Penyelenggaraan Jalan	35.253.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.502.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	500.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Penataan Bangunan Gedung	13.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	850.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	700.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Pengembangan Perumahan	850.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Kawasan Permukiman	8.740.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.900.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		81.953.867.896	
PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Program : Pengelolaan Pendidikan	169.692.901.566	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Kurikulum	200.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra	250.000.000	Dinas Pendidikan
	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	775.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.024.455.312	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	620.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69.648.481.736	Dinas Kesehatan
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.512.409.687	RSUD Bayu Asih
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.301.009.160	Dinas Kesehatan
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	725.000.000	RSUD Bayu Asih
	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	245.000.000	Dinas Kesehatan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	685.000.000	Dinas Kesehatan
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	500.000.000	RSUD Bayu Asih
	Program : Pemberdayaan Sosial	271.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Rehabilitasi Sosial	773.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial	860.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	273.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program : Perlindungan Perempuan	250.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		282.806.257.461	



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri	800.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
		1.075.000.000	
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	100.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	290.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Pengembangan Ekspor	200.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	250.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
	Program : Penataan Desa	125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa	1.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	1.590.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.025.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5.005.000.000	
PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.515.951.739	Sekretariat Daerah
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	3.378.000.000	Inspektorat
	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.135.000.000	Inspektorat
		21.028.951.739	
PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN 2025	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pengelolaan Persampahan	10.684.495.406	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	505.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.255.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		16.594.995.406	

Sumber : Bappelitbangda, 2024

4.2.5 Inovasi Daerah

Guna mendukung pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat dan terjangkau, maka diperlukan terobosan atau inovasi daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat dan modern sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah. Adapun terobosan atau inovasi daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13

Rekap Inovasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta

No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
1.	Mitra TB (Tim jejaring layanan Tuberkolosis dengan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta)	Dinas Kesehatan	2021
2.	Mas Bunting (Optimalisasi kelas ibu untuk turunkan stunting)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Purwakarta)	2021
3.	Keju Cedar (Kader Juara, Cerdas,Aktif dan Responsif)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukatani)	2021
4.	Bale Sauyunan (Integrasi berbagai kegiatan dalam satu wadah)	Dinas Kesehatan	2022
5.	Kebon Ambu (Kawasan percontohan pertanian terpadu untuk para penyuluh pertanian dan kelompok petani dengan edukasi dan agrowisata)	Dinas Pangan dan Pertanian	2021
6.	Sadapur (Satu Data Purwakarta)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2021
7.	Mepeling Mepende Ceu Ati (Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	2021
8.	Simdag (Sistem Informasi Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	2022
9.	Edacil (Edukasi Pemadam Cilik)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2021
10.	RedKar (Relawan Pemadam Kebakaran)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2022



No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
11.	Website BPBD Purwakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2022
12.	Cekatan (Cek Kesehatan Ternak dan Hewan)	Dinas Perikanan dan Peternakan	2022
13.	Sikasep (Sistem Informasi Kepemudaan yang Aktual, Sinergis, Edukatif dan Produktif)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
14.	Dimata (Digital Market Purwakarta)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
15.	Digital Signage (Media informasi dan promosi destinasi wisata melalui online)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2021
16.	Idola (Informasi dokumen lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup	2023
17.	Si Saham (Sistem Informasi Suara Hati Masyarakat/e-Pokir)	Sekretariat DPRD	2022
18.	Gerakan Ambu (Gerakan Anak Membaca Buku)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
19.	Galendo (Gerakan Literasi Masyarakat Peduli Naskah Kuno)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
20.	Lipperpul (Lima Program Perpustakaan unggulan)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2021
21.	Siceupol (Sistem Informasi Cek PBB Online)	Badan Pendapatan Daerah	2022
22.	Disepedah (Dashboard Informasi Seputar Pendapatan Daerah)	Badan Pendapatan Daerah	2022
23.	E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)	Badan Pendapatan Daerah	2022
24.	Madukara (Manajemen Pelayanan Terpadu Purwakarta Istimewa)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
25.	Silapak Prestasi (Pelayanan Proaktif Promosi Investasi dan Inovasi Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
26.	Japati Bodas (Jasa antar cepat izin, bebas ongkir dan aman sampai tujuan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
27.	Gerakan "Ulin Ka Mal" (Urus Langsung Izin & Non Izin Ka Mal Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
28.	Gardu Pasti (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
29.	Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2022
30.	Hallo Pehape Online (Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan melalui Pengaduan Online dan Call Center)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2021



No	Nama Inovasi	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab	Tahun Penerapan/Pembaruan
31.	Si Pelaku (Sistem Pelaporan Keuangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022
32.	Siyansos (Sistem Informasi Pelayanan Sosial)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022
33.	Gempungan Ngariung di buruan urang lembur	Sekretaris Daerah	2022
34.	Ambu Keren (Sistem Aplikasi untuk mempermudah pelayanan dan edukasi kepada calon akseptor mengenai informasi keluarga berencana, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2021
35.	Sipila (Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi Layanan Adminduk)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
36.	Silpy (Sistem Informasi Loker)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
37.	Sikepo (Sebarkan Informasi Kependudukan Online)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
38.	DC Prokila (Dashboard Center Progress Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
39.	Ceria (Cetak Rekam KIA di Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2021
40.	Disdukcapil Goes To School (Perekaman KTP El)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
41.	Sijempol (Perekaman KTP el bagi sakit, lansia, ODGJ dan disabilitas)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2021
42.	Lampu Umat (Pelayanan Jemput Bola di Hari Jum'at)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2022
43.	PERKIMSERU (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman dan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2022

Sumber : Keputusan Bupati Purwakarta No. 050/Kep.431-Bappelitbangda/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Penerapan 2021, 2022 dan 2023



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang disajikan dalam Bab V ini hanya memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar; Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 18 (Delapan Belas) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;



17. Perpustakaan;

18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan Perikanan.

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) Unsur yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Unsur yang meliputi :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penelitian dan Pengembangan;
6. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Inspektorat;

Unsur Kewilayahan terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi :

1. Kecamatan;

Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Unsur yang meliputi:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik;



Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta, harus memperhitungkan kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan pada semua Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan bidang urusan pemerintahan yang diampunya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan program-program pembangunan untuk melaksanakan kegiatan dan subkegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Program Pembangunan pada Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 terdiri dari :

A. PROGRAM PADA SEMUA PERANGKAT DAERAH

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



B. PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN

Program Teknis Urusan Pendidikan

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2. DINAS KESEHATAN

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. RSUD BAYU ASIH

Program Teknis Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung
- 4) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 5) Program Penyelenggaraan Jalan
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang



5. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Program Teknis Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 5) Program Pengembangan Permukiman

Program Teknis Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Teknis Urusan Pertanahan

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 3) Program Pengelolaan Tanah Kosong

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Teknis Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penanggulangan Bencana



8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Program Teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

9. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Teknis Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak

10. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Program Teknis Urusan Ketenagakerjaan

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 3) Program Hubungan Industrial

Program Teknis Urusan Transmigrasi

- 1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi



- 2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Program Teknis Urusan Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Teknis Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengelolaan Persampahan

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Teknis Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Teknis Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Program Penataan Desa
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Teknis Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

16. DINAS PERHUBUNGAN

Program Teknis Urusan Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran



17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Teknis Urusan Komunikasi Dan Informatika

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Aplikasi Informatika

Program Teknis Urusan Statistik

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Teknis Urusan Persandian

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

18. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Program Teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6) Program Pengembangan UMKM

Program Teknis Urusan Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Pengembangan Ekspor
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Teknis Urusan Perindustrian



- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program Teknis Urusan Penanaman Modal

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal

20. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Program Teknis Urusan Kepemudaan, dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Teknis Urusan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3) Program Pembinaan Sejarah
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program Teknis Urusan Pariwisata

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) Program Pemasaran Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



21. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Program Teknis Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Teknis Urusan Kearsipan

- 1) Program Pengelolaan Arsip
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

22. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Program Teknis Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Teknis Urusan Pertanian

- 1) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 2) Program Penyuluhan Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

23. SEKRETARIAT DAERAH

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Pengelolaan Perbatasan

- 1) Program Pengelolaan Perbatasan



24. SEKRETARIAT DPRD

Program Teknis Unsur Pendukung Urusan Sekretariat DPRD

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

26. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

27. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program Teknis Unsur Penunjang Urusan Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

28. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program Teknis Urusan Kepegawaian

- 1) Program Kepegawaian Daerah

Program Teknis Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



29. INSPEKTORAT

Program Teknis Unsur Pengawas

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

30. KECAMATAN JATILUHUR

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

31. KECAMATAN SUKASARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

32. KECAMATAN MANIIS

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

33. KECAMATAN TEGALWARU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

34. KECAMATAN PLERED

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

35. KECAMATAN SUKATANI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

36. KECAMATAN DARANGDAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

37. KECAMATAN BOJONG

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

38. KECAMATAN WANAYASA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

39. KECAMATAN KIARAPEDES

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

40. KECAMATAN PASAWAHAN

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

41. KECAMATAN PONDOKSALAM

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

42. KECAMATAN PURWAKARTA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

43. KECAMATAN BABAKANCIKAO

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

44. KECAMATAN CAMPAKA

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

45. KECAMATAN CIBATU

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



46. KECAMATAN BUNGURSARI

Program Teknis Unsur Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

47. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Teknis Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selengkapnya mengenai uraian Kerangka Pendanaan dan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Purwakarta dapat kami uraikan sebagai berikut :



Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025 Kabupaten Purwakarta

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	2.397.792.974.124	2.242.044.866.124	2.385.366.153.224	2.653.589.477.779	2.397.133.685.323
5.1	BELANJA OPERASI	1.741.345.029.012	1.723.718.913.864	1.817.915.407.513	2.035.558.242.704	1.860.762.204.545
5.1.01	Belanja Pegawai	918.150.922.272	877.588.545.991	884.567.140.660	1.029.883.293.341	1.052.280.695.189
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.409.752.174	798.636.928.666	856.592.355.153	885.505.935.365	755.150.273.228
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	74.666.814.566	43.548.139.207	74.293.778.700	117.859.013.998	51.296.236.128
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.117.540.000	3.945.300.000	2.462.133.000	2.310.000.000	2.035.000.000
5.2	BELANJA MODAL	305.961.356.301	211.006.361.159	221.687.313.491	229.293.941.356	161.435.643.204
5.2.01	Belanja Modal Tanah	229.500.000	4.137.824.210	987.440.000	1.896.200.000	1.016.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.933.700.271	59.869.624.977	95.977.193.325	79.130.065.230	51.560.110.985
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.517.889.109	62.803.892.607	62.085.346.580	60.948.438.384	47.018.946.132
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.157.250.021	77.502.411.526	51.045.921.061	77.548.749.204	55.684.691.221
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.123.016.900	6.692.607.839	11.591.412.525	9.770.488.538	6.155.694.866
5.2.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.115.437.618	267.948.493	9.290.031.314	40.067.981.161	26.156.756.557
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.115.437.618	267.948.493	9.290.031.314	40.067.981.161	26.156.756.557



KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	APBD 2024 (MURNI)	PROYEKSI RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	329.371.151.193	307.051.642.608	336.473.400.906	348.669.312.558	348.779.081.017
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.860.059.993	35.969.243.808	43.864.193.106	44.927.822.558	44.962.193.106
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	301.511.091.200	271.082.398.800	292.609.207.800	303.741.490.000	303.816.887.911
Total Surplus/(Defisit)		5.023.504.963	4.074.791.674	-18.591.896.352	-43.292.253.127	-41.201.953.488
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		2.397.792.974.124	2.242.044.866.124	2.385.366.153.224	2.653.589.477.779	2.397.133.685.323

Sumber : LRA Tahun 2021-2023 (audited), APBD 2024 dan TAPD, 2024



Tabel 5.2

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

No.	Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran
1	1.01.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pendidikan	6	18	236	684.531.288.342
2	1.02.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Kesehatan	5	24	122	192.570.654.466
3	1.02.0.00.0.0 0.02.0000	Rumah Sakit Bayu Asih	4	16	57	220.768.347.331
4	1.03.0.00.0.0 0.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	21	107	100.318.695.191
5	1.04.1.03.2.1 0.02.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	24	133	36.967.746.307
6	1.05.0.00.0.0 0.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	46	20.287.129.793
7	1.05.0.00.0.0 0.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	75	6.558.448.683
8	1.05.0.00.0.0 0.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	13	76	16.175.577.205
9	1.06.2.08.0.0 0.01.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	28	86	10.974.781.288
10	2.07.3.32.0.0 0.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6	20	51	12.025.280.721
11	2.09.3.27.0.0 0.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	10	22	96	20.206.701.186
12	2.11.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	10	22	85	40.716.338.660
13	2.12.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	29	18.252.678.225
14	2.13.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	66	14.985.254.376
15	2.14.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	16	52	20.967.061.191
16	2.15.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Perhubungan	3	26	85	42.330.442.796
17	2.16.2.20.2.2 1.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	87	22.592.783.326
18	2.17.3.30.3.3 1.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	16	30	72	17.749.454.970
19	2.18.0.00.0.0 0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	47	13.146.458.566
20	2.19.2.22.3.2 6.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	13	34	134	25.465.502.243
21	2.23.2.24.0.0 0.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	16	43	11.677.577.355
22	3.25.3.27.0.0 0.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	9	29	81	14.968.390.473
23	4.01.5.06.0.0 0.01.0000	Sekretariat Daerah	4	21	91	74.888.340.681
24	4.02.0.00.0.0 0.01.0000	Sekretariat DPRD	2	15	49	75.809.575.874
25	5.01.5.05.0.0 0.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4	18	72	15.351.942.299



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No.	Kode	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran
26	5.02.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	71	484.448.797.272
27	5.02.0.00.0.0 0.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	2	9	56	32.817.569.395
28	5.03.5.04.0.0 0.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	66	27.927.155.130
29	6.01.0.00.0.0 0.01.0000	Inspektorat	3	12	43	31.010.906.489
30	7.01.0.00.0.0 0.01.0000	Kecamatan Jatiluhur	6	17	42	3.257.788.753
31	7.01.0.00.0.0 0.02.0000	Kecamatan Sukasari	6	16	49	3.292.747.789
32	7.01.0.00.0.0 0.03.0000	Kecamatan Maniis	6	16	41	3.342.037.344
33	7.01.0.00.0.0 0.04.0000	Kecamatan Tegalwaru	6	15	41	3.204.329.871
34	7.01.0.00.0.0 0.05.0000	Kecamatan Plered	6	15	39	3.467.901.695
35	7.01.0.00.0.0 0.06.0000	Kecamatan Sukatani	6	16	40	4.020.584.375
36	7.01.0.00.0.0 0.07.0000	Kecamatan Darangdan	6	14	34	3.710.854.617
37	7.01.0.00.0.0 0.08.0000	Kecamatan Bojong	6	14	37	3.614.117.230
38	7.01.0.00.0.0 0.09.0000	Kecamatan Wanayasa	6	13	35	4.126.903.368
39	7.01.0.00.0.0 0.10.0000	Kecamatan Kiarapedes	6	12	24	3.728.725.604
40	7.01.0.00.0.0 0.11.0000	Kecamatan Pasawahan	6	14	36	3.196.574.119
41	7.01.0.00.0.0 0.12.0000	Kecamatan Pondoksalam	6	13	33	3.600.540.295
42	7.01.0.00.0.0 0.13.0000	Kecamatan Purwakarta	6	16	45	22.275.069.713
43	7.01.0.00.0.0 0.14.0000	Kecamatan Babakancikao	6	14	37	3.538.327.534
44	7.01.0.00.0.0 0.15.0000	Kecamatan Campaka	6	16	40	3.525.094.911
45	7.01.0.00.0.0 0.16.0000	Kecamatan Cibatuh	6	14	33	3.971.271.558
46	7.01.0.00.0.0 0.17.0000	Kecamatan Bungursari	6	13	35	3.432.178.273
47	8.01.0.00.0.0 0.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	44	11.337.758.440
		JUMLAH	279	799	2.999	2.397.133.685.323

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id](https://sipd-ri.kemendagri.go.id)

Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat Program Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan “ [https:// tinyurl.com/renja-pd-tahun-2025](https://tinyurl.com/renja-pd-tahun-2025) “



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi



penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau *impact*. Indikator tingkat *impact* ini merupakan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (*outcome*).

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini :



Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHK (Juta)	Rp.	57,08	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,73	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	279.711,36	Tambahan indikator berdasarkan kesepakatan dengan provinsi Jawa Barat
	6	6	6	6

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026,

*) Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

A. IKU PEMKAB PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,75	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	80,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	89,58	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,49	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
15	Pertumbuhan UMKM	Persen	13,16	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Inflasi	Persen	1,25	IKU PEMKAB PURWAKARTA



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
17	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,73	IKU PEMKAB PURWAKARTA
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	58,49	IKU PEMKAB PURWAKARTA
19	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	99,89	IKU PEMKAB PURWAKARTA
20	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03	IKU PEMKAB PURWAKARTA
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,82	IKU PEMKAB PURWAKARTA
22	Nilai Tukar Petani	Poin	103,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
23	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	97,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
24	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,34	IKU PEMKAB PURWAKARTA
25	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
26	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
27	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,91	IKU PEMKAB PURWAKARTA
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
29	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	80,93	IKU PEMKAB PURWAKARTA
30	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
31	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
32	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
33	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
34	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
35	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
36	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
38	Indeks SPBE	Poin	2,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
39	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Tinggi	IKU PEMKAB PURWAKARTA
40	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA
41	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	IKU PEMKAB PURWAKARTA
42	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	IKU PEMKAB PURWAKARTA
43	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,2370	IKU PEMKAB PURWAKARTA
44	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,09	IKU PEMKAB PURWAKARTA
45	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,000	IKU PEMKAB PURWAKARTA
46	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,68	IKU PEMKAB PURWAKARTA
47	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	IKU PEMKAB PURWAKARTA
48	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	75,95	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	48	48	48	48

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026,

*) Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



B. IKU PERANGKAT DAERAH KAB. PURWAKARTA

NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Dinas Pendidikan				
1		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	IKU Dinas Pendidikan
2		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	IKU Dinas Pendidikan
3		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Pendidikan
4		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Pendidikan
	Dinas Kesehatan				
5		Angka Harapan Hidup	Tahun	71,62	IKU Dinas Kesehatan
6		Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan	Persen	0,00	IKU Dinas Kesehatan
7		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Kesehatan
8		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Kesehatan
	Rumah Sakit Bayu Asih				
9		Persentase ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Persen	100,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
10		Pencapaian Standar Akreditasi	Opini	Paripurna	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
11		Presentase pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan	Persen	88,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
12		Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persen	92,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
13		Dokumen Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	10,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
14		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dalam Kondisi Baik	Persen	82,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
15		Persentase Pemenuhan Kebutuhan oprasional Penunjang Pelayanan Kesehatan	Persen	78,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
16		Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persen	87,00	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
17		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
18		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Rumah Sakit Bayu Asih
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang					
19		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	85,00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21		Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
24		Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,00	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25		Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,00	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja					
28		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
29		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
30		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
31		Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
34		Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	100,00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
35		Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100,00	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
36		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
37		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
38		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
39		Tingkat Kemiskinan	Persen	8,08	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40		Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,36	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rp.	12,28	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,60	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	80,93	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				
46		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	69,06	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
47		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	69,06	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
48		Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	100,00	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
49		Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	100,00	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
50		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
51		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Dinas Pangan dan Pertanian				
52		Persentase kecukupan bahan pangan	Persen	100,00	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
53		Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persen	2,00	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
54		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
55		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Pangan dan Pertanian
	Dinas Lingkungan Hidup				
56		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09	IKU Dinas Lingkungan Hidup
57		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	75 %	IKU Dinas Lingkungan Hidup
58		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
59		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Lingkungan Hidup
60		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Lingkungan Hidup



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
61		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
65		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya	Persen	100,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
66		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
67		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
68		Indeks Desa Membangun	Poin/ Status	Maju	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
69		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,37	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
70		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
71		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Dinas Perhubungan				
72		Tersedianya sarana prasarana layanan publik Perhubungan	Persen	85,00	IKU Dinas Perhubungan
73		Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Pon	85,00	IKU Dinas Perhubungan
74		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Perhubungan
75		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Perhubungan



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
76		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
77		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
78		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,80	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
79		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	98,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
80		Cakupan pelayanan data statistik sectoral	Persen	95,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
81		Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan	Persen	100,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian				
82		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,31	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
83		Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,80	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
84		Pertumbuhan UMKM	Persen	13,16	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
85		Inflasi	Persen	1,25	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
86		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp.	47.737.192.933,00	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
87		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
88		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
89		Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Triliun)	7,20	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Sangat Baik	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan				
92		Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	80,00	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
93		Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,063	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
94		Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
95		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,82	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
96		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
97		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
98		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	80,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
99		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	70,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
100		Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	10,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
101		Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
102		Laju pengunjung perpustakaan	Persen	50,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
103		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	75.000,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
104		Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,80	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
105		Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,16	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
106		Laju Anggota Perpustakaan	Persen	51,52	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
107		Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,08	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
108		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
109		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
110		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Poin	100,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
111		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Poin	100,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
112		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	11,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
113		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	11,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
114		Persentase arsip dinamis	Persen	85,20	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
115		Persentase arsip statis	Persen	10,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dinas Perikanan dan Peternakan					
116		Persentase peningkatan usaha perikanan	Persen	5,25	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
117		Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
118		Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
119		Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	kasus	0,00	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
120		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan
121		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Dinas Perikanan dan Peternakan



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Sekretariat Daerah				
122		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Sekretariat Daerah
123		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Sekretariat Daerah
124		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	IKU Sekretariat Daerah
125		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,00	IKU Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD				
126		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Sekretariat DPRD
127		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Sekretariat DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah				
128		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
129		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
130		Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
131		Indeks Inovasi Daerah	Skor/ Kategori	50,68	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
132		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
133		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
134		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
135		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Baik	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Pendapatan Daerah				
136		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Badan Pendapatan Daerah
137		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Badan Pendapatan Daerah



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
138		Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,237	IKU Badan Pendapatan Daerah
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
139		Tingkat Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
140		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
141		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
142		Indeks Sistem Merit Kabupaten	Kategori	Baik	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Inspektorat				
143		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Inspektorat
144		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Inspektorat
145		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat Daerah	2,00	IKU Inspektorat
146		Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3,00	IKU Inspektorat
147		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	IKU Inspektorat
148		Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80,00	IKU Inspektorat
149		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	Persen	87,00	IKU Inspektorat
	Kecamatan Jatiluhur				
150		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Jatiluhur
151		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Jatiluhur
152		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Jatiluhur
	Kecamatan Sukasari				
153		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Kecamatan Sukasari



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
154		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Sukasari
155		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Sukasari
Kecamatan Maniis					
156		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Kecamatan Maniis
157		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Maniis
157		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Maniis
Kecamatan Tegalwaru					
159		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Tegalwaru
160		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Tegalwaru
160		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan Plered					
162		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Kecamatan Plered
163		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Plered
164		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Plered
Kecamatan Sukatani					
165		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Sukatani
166		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Sukatani
167		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Sukatani
Kecamatan Darangdan					
168		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Darangdan
169		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Darangdan
170		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Darangdan



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Kecamatan Bojong				
171		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Bojong
172		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Bojong
173		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Bojong
	Kecamatan Wanayasa				
174		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Wanayasa
175		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Wanayasa
175		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status Mandiri	Maju	IKU Kecamatan Wanayasa
	Kecamatan Kiarapedes				
177		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Kecamatan Kiarapedes
178		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Kiarapedes
179		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Kiarapedes
	Kecamatan Pasawahan				
180		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Pasawahan
181		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Pasawahan
182		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Pasawahan
	Kecamatan Pondoksalam				
183		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Kecamatan Pondoksalam
184		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Pondoksalam
184		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Pondoksalam
	Kecamatan Purwakarta				



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
186		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Purwakarta
187		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Purwakarta
188		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Mandiri	IKU Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Babakan Cikao					
189		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Babakan Cikao
190		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Babakan Cikao
191		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	IKU Kecamatan Babakan Cikao
Kecamatan Campaka					
192		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKU Kecamatan Campaka
193		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Campaka
193		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Predikat	Maju	IKU Kecamatan Campaka
Kecamatan Cibatu					
195		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Kecamatan Cibatu
196		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Cibatu
196		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Berkembang	IKU Kecamatan Cibatu
Kecamatan Bungursari					
198		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKU Kecamatan Bungursari
199		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Kecamatan Bungursari
200		Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Mandiri	IKU Kecamatan Bungursari



NO.	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
				2025	
1	2		3	4	5
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
201		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
202		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
203		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	75,95	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH	47	203	203	203	202
UNIQUE	47	96	21	68	48

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



Tabel 6.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	74,06 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,75	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,63	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran	Persen	6,15 – 6,70 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	89,58	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,49	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,78 – 5,19 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta)	Rp.	86,73	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun)	Rp.	58,49	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun)	Rp.	99,89	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Nilai Tukar Petani	Poin	103,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	97,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,55 – 8,33 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	4	5
15	Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,330 – 0,343 *	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta)	Rp.	12,91	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	16	16	16	16

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



B. ASPEK PELAYANAN UMUM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	75,74	IKK Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,70	IKK Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	94,53	IKK Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,55	IKK Dinas Pendidikan
5	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
6	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	0,49	IKK Dinas Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Persen	1,78	IKK Dinas Pendidikan
8	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
9	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
10	Angka partisipasi kasar	Persen	24,80	IKK Dinas Pendidikan
11	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
12	Angka Partisipasi Murni	Persen	23,20	IKK Dinas Pendidikan
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,62	IKK Dinas Pendidikan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	84,10	IKK Dinas Pendidikan
15	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,60	IKK Dinas Pendidikan
16	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,40	IKK Dinas Pendidikan
17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,40	IKK Dinas Pendidikan
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	5,60	IKK Dinas Pendidikan
19	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	24,67	IKK Dinas Pendidikan
24	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	47,63	IKK Dinas Pendidikan
25	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	41,56	IKK Dinas Pendidikan
26	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
27	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
28	Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
29	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	59,17	IKK Dinas Pendidikan
30	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,98	IKK Dinas Pendidikan
31	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	%	8,21	IKK Dinas Pendidikan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
32	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	52,90	IKK Dinas Pendidikan
33	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	nilai	41,14	IKK Dinas Pendidikan
34	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	61,01	IKK Dinas Pendidikan
35	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,37	IKK Dinas Pendidikan
36	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	43,62	IKK Dinas Pendidikan
37	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	%	25,44	IKK Dinas Pendidikan
38	Indeks Iklim Keamanan SD	nilai	82,31	IKK Dinas Pendidikan
39	Indeks Iklim Kebinekaan SD	nilai	80,92	IKK Dinas Pendidikan
40	Indeks Inklusivitas SD	nilai	76,12	IKK Dinas Pendidikan
41	Indeks Iklim Keamanan SMP	nilai	78,50	IKK Dinas Pendidikan
42	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	nilai	70,71	IKK Dinas Pendidikan
43	Indeks Inklusivitas SMP	nilai	70,81	IKK Dinas Pendidikan
44	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
45	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
46	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	38,87	IKK Dinas Pendidikan
47	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	41,90	IKK Dinas Pendidikan
48	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,12	IKK Dinas Pendidikan
49	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
50	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
51	Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan	Persen	100,00	IKK Dinas Pendidikan
52	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	80,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
53	Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina	Persen	55,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
54	Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
55	Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	Persen	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
56	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	12,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
57	Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina	Persen	3,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
58	Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan	Persen	30,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
59	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan	Persen	50,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
60	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
61	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	60,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
62	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
63	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	16,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
64	Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat	Persen	20,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	80,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	70,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
67	Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah	Persen	10,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
68	Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	Persen	1,07	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
69	Laju pengunjung perpustakaan	Persen	50,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
70	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	75.000,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
71	Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina	Persen	0,80	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
72	Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	Persen	0,16	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
73	Laju Anggota Perpustakaan	Persen	51,52	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
74	Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling	Persen	0,08	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
75	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	53,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
76	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	69,06	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
77	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,40	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
78	Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan	Persen	3,40	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
79	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0,57	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
80	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	0,11	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
81	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,07	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
82	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	5,81	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
83	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	50,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
84	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	0,64	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
85	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	38,88	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
86	Keselamatan dan perlindungan	Persen	50,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
87	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
88	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0001	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
89	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	0,0100	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
90	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	0,41	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
91	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,83	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
92	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,41	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
93	Tingkat prestasi olahraga	Persen	80,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
94	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	60,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
95	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	50,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
96	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	50,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
97	Tingkat atlet berprestasi	Persen	52,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
98	Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	Persen	18,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
99	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
100	Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
101	Persentase transmigran swakarsa	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
102	Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
103	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
104	Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman	Persen	100,00	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
105	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	30,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
106	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	1,07	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
107	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	56,51	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
108	Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2,86	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
109	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	60,00	IKK Dinas Kesehatan
110	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
111	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
112	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
113	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
114	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
115	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
116	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
117	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan
118	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
119	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
120	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	98,00	IKK Dinas Kesehatan
121	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan
122	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
123	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
124	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
125	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
126	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
127	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
128	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
129	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
130	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
131	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
132	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	98,00	IKK Dinas Kesehatan
133	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
134	Rasio posyandu per satuan balita	Poin	17,60	IKK Dinas Kesehatan
135	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
136	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
137	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
138	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
139	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
140	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
141	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	80,00	IKK Dinas Kesehatan
142	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	95,00	IKK Dinas Kesehatan
143	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	208,52	IKK Dinas Kesehatan
144	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	2,26	IKK Dinas Kesehatan
145	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	95,00	IKK Dinas Kesehatan
146	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan
147	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
148	Penderita diare yang ditangani	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan
149	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	100,00	IKK Dinas Kesehatan
150	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	90,00	IKK Dinas Kesehatan
151	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
152	Cakupan puskesmas	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
153	Cakupan pelayanan nifas	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
154	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
155	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
156	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
157	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
158	Tingkat Pengendalian Infeksi di RS	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
159	Capaian Indikator Medik	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
160	Prosedur Penanganan Sampel Uji	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
161	Pengendalian Mutu	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
162	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
163	Ketepatan Waktu Pelayanan	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
164	Temuan Yang di Tindaklanjuti (Temuan ketidaktersediaan Media dan Reagensia dan Temuan Hasil Telusur)	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
165	Tingkat Kehandalan Sumber Daya	Persen	82,00	IKK RSUD Bayu Asih
166	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	30,00	IKK Dinas Kesehatan
167	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	30,00	IKK Dinas Kesehatan
168	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	30,00	IKK Dinas Kesehatan
169	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	30,00	IKK Dinas Kesehatan
170	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30,00	IKK Dinas Kesehatan
171	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30,00	IKK Dinas Kesehatan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
172	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	78,00	IKK RSUD Bayu Asih
173	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	78,00	IKK RSUD Bayu Asih
174	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100,00	IKK Dinas Kesehatan
175	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	82,00	IKK Dinas Kesehatan
176	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	8,00	IKK Dinas Kesehatan
177	Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	96,00	IKK Dinas Kesehatan
178	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	75,00	IKK RSUD Bayu Asih
179	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,50	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
180	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
181	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	36,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
182	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	Persen	30,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
183	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	99,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
184	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	36,30	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
185	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	94,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
186	Ratio Akseptor KB	Persen	25.521,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
187	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	83,28	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
188	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)	Poin	25,71	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
189	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	534,83	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
190	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	46,24	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
191	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	17,78	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
192	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	691.167,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
193	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	161.153,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
194	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	624.471,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
195	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
196	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
197	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	126,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
198	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	23,90	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
199	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
200	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	325.980,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
201	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	135,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
202	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
203	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	3.314,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
204	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	674,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
205	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	15,65	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
206	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
207	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	19,00	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
208	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
209	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
210	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
211	Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim	Persen	80,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
212	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Skor/ Kategori	65 / Sedang	IKK Dinas Lingkungan Hidup
213	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Skor/ Kategori	75 / Baik	IKK Dinas Lingkungan Hidup
214	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor/ Kategori	37,55	IKK Dinas Lingkungan Hidup
215	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun	Dokumen	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
216	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Kg	13.000.000.000,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
217	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
218	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
219	Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	25,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
220	Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Persen	50,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
221	Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan	Persen	10,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
222	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
223	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
224	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	MHA	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
225	Penetapan hak MHA	MHA	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
226	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
227	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
228	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
229	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	32,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
230	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
231	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Skor	72,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
232	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	75,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
233	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
234	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
235	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	1,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
236	Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru	Persen	100,00	IKK Dinas Lingkungan Hidup
237	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
238	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
239	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
240	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
241	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
242	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	18,14	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
243	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
244	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
245	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Persen	100,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
246	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh	Layanan	750,00	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah			
247	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
248	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
249	Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	90,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
250	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89,80	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
251	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,80	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
252	Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	15,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
253	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	73,71	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
254	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	92,24	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
255	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	56,93	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
256	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	86,45	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
257	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	2,78	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
258	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	60,42	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
259	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	24,30	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
260	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	10,56	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
261	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	5,80	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
262	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp.	7,20	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
263	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	803,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
264	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	29,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
265	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kegiatan	2,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
266	Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun)	Rp.	7,90	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
267	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	19,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
268	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	95,58	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
269	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	93,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
270	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	8,70	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
271	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
272	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	96,53	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
273	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
274	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
275	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
276	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	38,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
277	Tingkat Nilai Export bersih	Persen	1,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
278	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	2,94	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
279	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	80,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
280	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	60,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
281	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	60,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
282	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	80,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
283	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	90,48	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
284	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	21,19	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
285	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
286	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
287	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
288	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
289	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	10,00	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
290	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3,33	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
291	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	2,38	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
292	Tingkat hunian akomodasi	Persen	24,84	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
293	Kunjungan wisata	Persen	85,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
294	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
295	Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	Persen	0,31	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
296	Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat	Persen	0,43	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
297	Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	Persen	0,31	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
298	Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan	Event	2,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
299	Persentase destinasi wisata yang diminati	Persen	0,32	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
300	Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan	Persen	1,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
301	Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina	Persen	1,00	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
302	Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan	Persen	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
303	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
304	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Dokumen	1,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
305	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
306	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.692,54	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
307	Produksi perikanan	Persen	5,25	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
308	Konsumsi ikan	Persen	35,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
309	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	19,67	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
310	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	3,40	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
311	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	79,54	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
312	Produksi Perikanan Tangkap	Persen	3,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
313	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.496,36	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
314	Poduksi Ikan Konsumsi	Ton	19.189,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
315	Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	1.088.818.897,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
316	Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	9.150.000,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
317	Produksi Ikan Hias	Ton	627.259,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
318	Produksi Perikanan budidaya	Ton	37,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
319	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
320	Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
321	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
322	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	500,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
323	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	15,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
324	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	140,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
325	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
326	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
327	Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
328	Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
329	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	20.000,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
330	Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	84,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
331	Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	908,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
332	Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	18,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
333	Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	41,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
334	Persentase Pengendalian Serangan OPT	Persen	50,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
335	Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen	50,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
336	Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin	Persen	75,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
337	Cakupan bina kelompok petani	Persen	74,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
338	Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	12,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
339	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,26	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
340	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Persen	2,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
341	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persen	73,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
342	Produksi Padi	Ton	271.079,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
343	Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	Persen	3,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
344	Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	Persen	77,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
345	Pengembangan Tanaman Manggis	Persen	15,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
346	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	48,00	IKK Dinas Pangan dan Pertanian
347	Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
348	Cakupan Akseptor IB	Persen	80,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
349	Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	13,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
350	Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	2,50	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
351	Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
352	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
353	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
354	Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
355	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
356	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
357	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
358	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
359	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
360	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
361	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
362	Persentase anak terlantar yang dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
363	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
364	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
365	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
366	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
367	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
368	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
369	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
370	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
371	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	30,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
372	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
373	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
374	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
375	Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
376	Data Gender Anak	Dokumen	1,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
377	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
378	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
379	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
380	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
381	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	71,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
382	Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	7,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
383	Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi	Persen	5,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
384	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,60	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
385	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	84,71	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
386	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	62,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
387	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	96,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
388	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	81,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
389	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	1,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
390	Tingkat jaringan SPAM yang dibangun	Persen	98,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
391	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	100,00	IKK Dinas Perhubungan
392	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	Poin	85,00	IKK Dinas Perhubungan
393	Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan)	Unit	311.378,00	IKK Dinas Perhubungan
394	Rasio ijin trayek	Persen	50,00	IKK Dinas Perhubungan
395	Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	Unit	310,00	IKK Dinas Perhubungan



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
396	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1,00	IKK Dinas Perhubungan
397	Persentase layanan angkutan darat	Persen	1.397,00	IKK Dinas Perhubungan
398	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	881,00	IKK Dinas Perhubungan
399	Pemasangan Rambu- rambu	Persen	72,00	IKK Dinas Perhubungan
400	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,002	IKK Dinas Perhubungan
401	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	576.262,00	IKK Dinas Perhubungan
402	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	539.548,00	IKK Dinas Perhubungan
403	Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin	Persen	50,00	IKK Dinas Perhubungan
404	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
405	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
406	Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat	Persen	10,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
407	Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	90,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
408	Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen	1,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
409	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
410	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,10	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
411	Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persen	50,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
412	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	20,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
413	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen	55,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
414	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	50,00	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
415	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	10,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
416	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	Persen	100,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
417	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	Persen	25,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
418	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	70,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
419	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	83,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
420	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	1,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
421	Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki	Persen	82,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
422	Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	2,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
423	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	8,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
424	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	40,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
425	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	39,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
426	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	10,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
427	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	49,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
428	Rasio rumah layak huni	Persen	8,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
429	Rasio permukiman layak huni	Persen	40,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
430	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
431	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	93,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
432	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	19,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
433	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	3,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
434	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	3,00	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
435	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	100,00	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
436	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Pendidikan
437	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Kesehatan
438	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK RSUD Bayu Asih
439	Rasio Keuangan BLUD	Skor	85,00	IKK RSUD Bayu Asih
440	Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD	Persen	100,00	IKK RSUD Bayu Asih
441	Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Skor	80,00	IKK RSUD Bayu Asih
442	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
443	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
444	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
445	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah
446	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
447	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
448	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
449	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Pangan dan Pertanian



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
450	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Lingkungan Hidup
451	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
452	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
453	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
454	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Perhubungan
455	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
456	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
457	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
458	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
459	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
460	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Dinas Perikanan dan Peternakan
461	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Sekretariat Daerah
462	Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
463	Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
464	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Sekretariat DPRD
465	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persen	100,00	IKK Sekretariat DPRD
466	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
467	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
468	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Badan Pendapatan Daerah
469	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
470	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Inspektorat



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
471	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Jatiluhur
472	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Kecamatan Sukasari
473	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Kecamatan Maniis
474	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Tegalwaru
475	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Plered
476	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Kecamatan Sukatani
477	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Darangdan
478	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Bojong
479	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Wanayasa
480	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	IKK Kecamatan Kiarapedes
481	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Pasawahan
482	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Kecamatan Pondoksalam
483	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Purwakarta
484	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Babakan Cikao
485	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Campaka
486	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Kecamatan Cibatu
487	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	IKK Kecamatan Bungursari
488	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
489	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Sekretariat DPRD
490	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen	Dokumen	Ada	IKK Sekretariat DPRD



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)			
491	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Sekretariat DPRD
492	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	IKK Sekretariat DPRD
493	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Sekretariat DPRD
494	Perekaman KTP elektronik	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
495	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
496	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Kategori	Sudah	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
497	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
498	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	55,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
499	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
500	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
501	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
502	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
503	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	56,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
504	Profil data kependudukan	Dokumen	1,00	IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
505	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	97,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
506	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	97,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
507	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	97,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
508	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
509	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
510	Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat	Persen	97,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
511	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
512	Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif	Persen	95,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
513	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	90,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
514	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	90,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
515	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
516	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
517	Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan	Persen	90,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
518	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	30,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
519	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
520	Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah	Persen	20,00	IKK Dinas Komunikasi dan Informatika
521	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Jatiluhur



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
522	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Sukasari
523	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Maniis
524	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Tegalwaru
525	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Plered
526	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Sukatani
527	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Darangdan
528	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Bojong
529	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Wanayasa
530	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Kiarapedes
531	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Pasawahan
532	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Pondoksalam
533	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Purwakarta
534	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Babakan Cikao
535	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Campaka
536	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Cibatuh
537	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKK Kecamatan Bungursari
538	Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
539	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
540	Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
541	Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif	Persen	15,00	IKK Sekretariat Daerah
542	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
543	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
544	Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun	Dokumen	8,00	IKK Sekretariat Daerah
545	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
546	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
547	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	55,00	IKK Sekretariat Daerah
548	Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	Persen	100,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
549	Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	39,10	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
550	Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	Persen	27,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
551	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
552	Arsip Aktif	Persen	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
553	Arsip Inaktif	Persen	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
554	Arsip Vital	Persen	20,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
555	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	Persen	75,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
556	Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan	Persen	4,70	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
557	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	100,00	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
558	Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	Persen	19,99	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
559	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	1,75	IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
560	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
561	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
562	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
563	Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
564	Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
565	Capaian Kinerja RKPD	Persen	89,25	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
566	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
567	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
568	Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
569	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
570	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	87,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
571	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
572	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	75,84	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
573	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,08	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
574	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,69	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
575	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	34,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
576	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	23,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
577	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,78	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
578	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
579	Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
580	Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
581	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
582	Penyerapan Anggaran	Skor	20,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
583	Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
584	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Dokumen	Ya	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
585	Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
586	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	27,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
587	Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	85,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
588	Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
589	Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100,00	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
590	Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
591	Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
592	Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
593	Administrasi BMD yang Andal	Indeks	3 (Baik)	IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah
594	Rasio PAD	Persen	0,88	IKK Badan Pendapatan Daerah
595	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	13,00	IKK Badan Pendapatan Daerah
596	Rasio Pajak daerah	Persen	50,34	IKK Badan Pendapatan Daerah
597	Rasio retribusi daerah	Persen	4,84	IKK Badan Pendapatan Daerah



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
598	Persentase capaian PAD	Persen	89,40	IKK Badan Pendapatan Daerah
599	Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah	Persen	10,00	IKK Badan Pendapatan Daerah
600	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	15,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
601	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
602	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	53,19	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
603	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100,00	IKK Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
604	Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara	Persen	100,00	IKK Sekretariat Daerah
605	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	81,74	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
606	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17,33	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
607	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	54,86	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
608	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
609	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
610	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	514,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
611	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0,26	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
612	Persentase Pemberhentian ASN	Persen	5,94	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
613	Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	2,03	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
614	Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	Persen	100,00	IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
615	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
616	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
617	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Maniis
618	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
619	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Plered
620	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
621	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
622	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bojong
623	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
624	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
625	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
626	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
627	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
628	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
629	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Campaka
630	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Cibatuh
631	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
632	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	IKK Inspektorat
633	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80,00	IKK Inspektorat
634	Jumlah temuan BPK	Laporan	9,00	IKK Inspektorat
635	Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Inspektorat
636	Capaian MCP KPK	Persen	82,00	IKK Inspektorat
637	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	Perangkat Daerah	2,00	IKK Inspektorat
638	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
639	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
640	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Maniis
641	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
642	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Plered
643	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukatani



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
644	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
645	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bojong
646	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
647	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
648	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
649	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
650	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
651	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
652	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Campaka
653	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Cibatuh
654	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
655	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	20,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
656	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	8,74	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
657	Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
658	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
659	Persentase desa tertib administrasi	Persen	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
660	Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	40,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
661	Persentase penertiban aset desa	Persen	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
662	Persentase kepala desa yang dibina	Persen	30,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
663	Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	35,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
664	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
665	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
666	Persentase LSM aktif	Persen	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
667	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
668	Persentase Posyandu aktif	Persen	100,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
669	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	5,00	IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
670	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
671	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
672	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Maniis
673	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
674	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Plered
675	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukatani



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
676	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
677	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bojong
678	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
679	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes
680	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
681	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
682	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
683	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
684	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Campaka
685	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Cibatuh
686	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
687	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
688	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
689	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
690	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
691	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
692	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100,00	IKK Satuan Polisi Pamong Praja
693	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
694	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades)	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
695	Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
696	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
697	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
698	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
699	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Jatiluhur
700	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukasari
701	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Maniis
702	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Tegalwaru
703	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Plered
704	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Sukatani
705	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Darangdan
706	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bojong
707	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Wanayasa
708	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
709	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pasawahan
710	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Pondoksalam
711	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Purwakarta
712	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Babakan Cikao
713	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Campaka
714	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Cibatu
715	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	IKK Kecamatan Bungursari
	715	715	715	715

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan	Persen	80,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
2	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,06	IKU PEMKAB PURWAKARTA
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	69,09	IKU PEMKAB PURWAKARTA
4	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,55	IKU PEMKAB PURWAKARTA
5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Predikat	Sedang	IKU PEMKAB PURWAKARTA
6	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	89,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
7	Pertumbuhan UMKM	Persen	13,16	IKU PEMKAB PURWAKARTA
8	Inflasi	Persen	1,25	IKU PEMKAB PURWAKARTA
9	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	0,03	IKU PEMKAB PURWAKARTA
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	9,82	IKU PEMKAB PURWAKARTA
11	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	6,34	IKU PEMKAB PURWAKARTA
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
13	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Poin	80,93	IKU PEMKAB PURWAKARTA
14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
15	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
16	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
17	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	90,00	IKU PEMKAB PURWAKARTA
18	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	37,60	IKU PEMKAB PURWAKARTA
19	Nilai SAKIP Kabupaten	Poin	71,64	IKU PEMKAB PURWAKARTA
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA



NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	KETERANGAN
			2025	
1	2	3	7	10
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,41	IKU PEMKAB PURWAKARTA
22	Indeks SPBE	Poin	2,80	IKU PEMKAB PURWAKARTA
23	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Tinggi	IKU PEMKAB PURWAKARTA
24	Sistem Merit Kabupaten	Predikat	Baik	IKU PEMKAB PURWAKARTA
25	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	3,5	IKU PEMKAB PURWAKARTA
26	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	IKU PEMKAB PURWAKARTA
27	Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,2370	IKU PEMKAB PURWAKARTA
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	84,09	IKU PEMKAB PURWAKARTA
29	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,000	IKU PEMKAB PURWAKARTA
30	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,68	IKU PEMKAB PURWAKARTA
31	Indeks Desa Membangun	Predikat	Maju	IKU PEMKAB PURWAKARTA
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,70	IKU PEMKAB PURWAKARTA
	32	32	32	32

Sumber : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



Tabel 6.4

Penghargaan/ Prestasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Tanggal	Penghargaan	Instansi yang menyerahkan
1	2	3	4
1	14 Februari 2023	Penghargaan Dalam Mendukung Program KB Pria Metode Opratif Pria (MOP)	Gubernur Jawa Barat
2	16 Februari 2023	Bronze Winner	Kemendikbudris tek melalui LLDIKTI Wilayah IV
3	01 Maret 2023	Penggerak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat Provinsi Jawa Barat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
4	11 Maret 2023	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran tahun 2022 kategori Tuntas Paripurna 100%	Gubernur Jawabarat
5	14 Maret 2023	Satpol PP dan Satlimas peduli gempa bumi Cianjur.	Gubernur jawabarat
6	14 Maret 2023	Dukungan dan Kontribusi Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pencapaian Universal Health Coverage	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7	7 Mei 2023	Penghargaan Respons Imunisasi Terbaik dalam pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio Provinsi Jawa Barat	Kementerian Kesehatan RI
8	12 Mei 2023	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke 8 Kali	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
9	14 Juni 2023	Juara 1 Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional KB Pasca Persalinan,Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor	Kepala BKKBN
10	14 Juni 2023	Juara 3 Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target >2000 Akseptor	Kepala BKKBN
11	22 Juli 2023	Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Pratama	Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
12	24 Juli 2023	Wredatama Nugraha Madya Tahun 2023	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)
13	2 September 2023	Digital Literacy of The Year	Gubernur Jawa Barat
14	2 September 2023	Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia



No	Tanggal	Penghargaan	Instansi yang menyerahkan
1	2	3	4
15	10 November 2023	Penghargaan Daerah Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
16	27 November 2023	Predikat Terbaik 2 dalam Pencatatan dan Pelaporan Data Program Bangga Kencana Tahun 2023 Kategori Wilayah Kecil	BKKBN Provinsi Jawa Barat
17	28 November 2023	Penghargaan Swasti Saba Kategori PADAPA	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
18	30 November 2023	Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Dalam E- Monev Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023	Komisi Informasi Jawa Barat
19	4 Desember 2023	Top Digital Implementation 2023 # Star 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2023 (Benni Irwan – Pj. Bupati Purwakarta)	Majalah ItWorks dan Asosiasi IT & TELCO Indonesia
20	7 Desember 2023	Piagam Penghargaan Keikutsertaan dalam Gerakan Menuju Smart City 2023	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Purwakarta Tahun 2024



BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, mengusung Tema Pembangunan yakni *“PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL”*, dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB;
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan;
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan;
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah;
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;



Dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan.

Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKPD dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat, stakeholder termasuk dunia usaha;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah;
5. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten dan LAKIP Perangkat Daerah, dan penyusunan laporan lainnya;

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta sehingga



pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Purwakarta Maju Mandiri dan Berkelanjutan.

Semoga rencana pembangunan daerah ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.


Bj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN